

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Narasi 1

Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 10

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 11

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 22

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya 330

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 1464

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.....1466

Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD.....1469

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD 1475

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 1596

Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.....1609

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah 1611

Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya 1613

Lampiran XIII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah..... 1614

Lampiran XIII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1615

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak *(Multi Years)*..... 1616

Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan 1617

Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah..... 1618

Lampiran XVII : Keputusan Gubernur Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1619



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR…TAHUN …

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah;dan
   c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp 24.156.414.261.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	23.741.914.261.000,00
b. Belanja Daerah	Rp	24.156.414.261.000,00
Defisit	Rp	(414.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp	484.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp	70.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	414.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA):	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp23.741.914.261.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus

empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.318.898.370.000,00 (enam belas triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak;
   b. Retribusi;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.899.838.185.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.405.199.623.000,00 (dua triliun empat ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp701.832.870.000,00 (tujuh ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.027.692.000,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

(2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 *(*dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pendapatan hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp24.156.414.261.000,00 (dua puluh empat triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp15.630.119.890.500,00 (lima belas triliun enam ratus tiga puluh miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.550.817.590.000,00 (tujuh triliun lima ratus lima puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.990.665.305.500,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.280.000,00 (tujuh

miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.070.582.715.000,00 (dua triliun tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.407.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.679.982.022.500,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp861.153.591.500,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp464.553.957.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp239.626.386.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp107.827.988.000,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.465.100.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp6.826.312.348.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.400.368.228.000,00 (empat triliun empat ratus miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.425.944.120.000,00 (dua triliun empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp484.500.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Adalah Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai uraian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan

		Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	berisi ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	berisi rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	berisi rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
e.	Lampiran V	berisi rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	berisi rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	berisi sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
h.	Lampiran VIII	berisi sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	berisi sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	berisi daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	berisi daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	berisi daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII A	berisi daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.	Lampiran XIII B	berisi daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain:
o.	Lampiran XIV	berisi daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
p.	Lampiran XV	berisi daftar Dana Cadangan;
q.	Lampiran XVI	berisi daftar Pinjaman Daerah;dan
r.	Lampiran XVII	berisi Keputusan Gubernur Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan peraturan Gubernur.

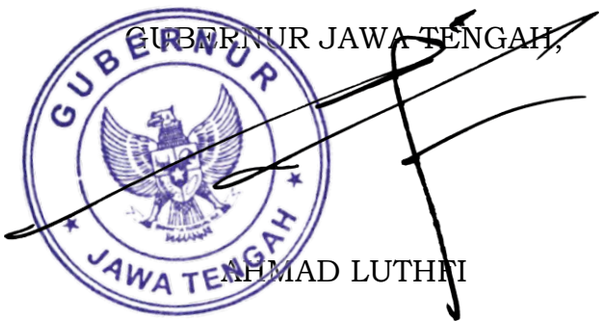
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,



AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (.../2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026 yang selaras dan mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 adalah "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional" bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otoriasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

Dengan APBD Pemerintah Daerah mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi Daerah.Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Daerah. Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL:

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**23.741.914.261.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**16.318.898.370.000**
4.1.1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	701.832.870.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	312.027.692.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**7.397.415.721.000**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**25.600.170.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.600.170.000
	Jumlah Pendapatan	**23.741.914.261.000**
5	**BELANJA DAERAH**	**24.156.414.261.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.630.119.890.500**
5.1.1	Belanja Pegawai	7.550.817.590.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.665.305.500
5.1.4	Belanja Subsidi	7.647.280.000
5.1.5	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.679.982.022.500**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.355.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	861.153.591.500
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	464.553.957.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	239.626.386.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.827.988.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.465.100.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**6.826.312.348.000**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
	Jumlah Belanja	**24.156.414.261.000**
	Surplus/(Defisit)	**(414.500.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**414.500.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**484.500.000.000**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**484.500.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**70.000.000.000**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**70.000.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

PRINTED BY GRMS JATENG

LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.351.252.554.000**	**11.799.723.744.500**	**1.551.196.214.500**	**-**	**-**	**13.350.919.959.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**4.357.050.000**	**7.984.741.844.000**	**440.796.201.000**	**-**	**-**	**8.425.538.045.000**
1.01.0.00.0.00.02	Dinas Pendidikan	4.357.050.000	7.984.741.844.000	440.796.201.000	-	-	8.425.538.045.000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.330.443.996.000**	**2.971.063.969.000**	**898.346.311.000**	**-**	**-**	**3.869.410.280.000**
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	2.330.443.996.000	2.971.063.969.000	898.346.311.000	-	-	3.869.410.280.000
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**15.797.992.000**	**432.708.959.500**	**206.624.937.500**	**-**	**-**	**639.333.897.000**
1.03.0.00.0.00.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.797.992.000	432.708.959.500	206.624.937.500	-	-	639.333.897.000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**39.560.871.000**	**250.000.000**	**-**	**-**	**39.810.871.000**
1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	39.560.871.000	250.000.000	-	-	39.810.871.000

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**420.100.000**	**42.483.545.000**	**448.457.000**	**-**	**-**	**42.932.002.000**
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	420.100.000	22.187.101.000	348.457.000	-	-	22.535.558.000
1.05.0.00.0.00.04	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	20.296.444.000	100.000.000	-	-	20.396.444.000
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**233.416.000**	**329.164.556.000**	**4.730.308.000**	**-**	**-**	**333.894.864.000**
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	233.416.000	329.164.556.000	4.730.308.000	-	-	333.894.864.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**48.661.614.000**	**815.883.908.000**	**51.127.300.000**	**-**	**-**	**867.011.208.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**3.156.454.000**	**89.463.558.000**	**204.378.000**	**-**	**-**	**89.667.936.000**
2.07.3.32.0.00.02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.156.454.000	89.463.558.000	204.378.000	-	-	89.667.936.000
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**-**	**21.461.962.000**	**74.962.000**	**-**	**-**	**21.536.924.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	21.461.962.000	74.962.000	-	-	21.536.924.000
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**63.770.000**	**41.154.706.000**	**4.014.589.000**	**-**	**-**	**45.169.295.000**
2.09.0.00.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan	63.770.000	41.154.706.000	4.014.589.000	-	-	45.169.295.000
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**3.007.000.000**	**140.625.650.000**	**40.500.000**	**-**	**-**	**140.666.150.000**
2.11.3.28.0.00.02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.007.000.000	140.625.650.000	40.500.000	-	-	140.666.150.000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**-**	**23.835.191.000**	**74.250.000**	**-**	**-**	**23.909.441.000**
2.13.2.12.0.00.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	23.835.191.000	74.250.000	-	-	23.909.441.000
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**37.033.315.000**	**192.575.128.000**	**14.973.362.000**	**-**	**-**	**207.548.490.000**
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	37.033.315.000	192.575.128.000	14.973.362.000	-	-	207.548.490.000
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**-**	**67.194.992.000**	**30.178.340.000**	**-**	**-**	**97.373.332.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	-	67.194.992.000	30.178.340.000	-	-	97.373.332.000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**625.000.000**	**33.933.698.000**	**-**	**-**	**-**	**33.933.698.000**
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	625.000.000	33.933.698.000	-	-	-	33.933.698.000
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**60.600.000**	**22.835.331.000**	**218.000.000**	**-**	**-**	**23.053.331.000**
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.600.000	22.835.331.000	218.000.000	-	-	23.053.331.000
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**4.671.337.000**	**151.542.445.000**	**110.000.000**	**-**	**-**	**151.652.445.000**
2.19.0.00.0.00.02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.671.337.000	151.542.445.000	110.000.000	-	-	151.652.445.000
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**44.138.000**	**31.261.247.000**	**1.238.919.000**	**-**	**-**	**32.500.166.000**
2.23.2.24.0.00.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44.138.000	31.261.247.000	1.238.919.000	-	-	32.500.166.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**50.697.492.000**	**878.060.736.000**	**33.037.172.000**	**-**	**-**	**911.097.908.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**17.749.767.000**	**78.492.601.000**	**11.270.997.000**	**-**	**-**	**89.763.598.000**
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.749.767.000	78.492.601.000	11.270.997.000	-	-	89.763.598.000
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**3.316.715.000**	**86.780.737.000**	**1.239.415.000**	**-**	**-**	**88.020.152.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
3.26.2.22.0.00.02	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.316.715.000	86.780.737.000	1.239.415.000	-	-	88.020.152.000
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**22.278.321.000**	**549.916.600.000**	**19.604.340.000**	**-**	**-**	**569.520.940.000**
3.27.0.00.0.00.10	Dinas Pertanian dan Peternakan	22.278.321.000	549.916.600.000	19.604.340.000	-	-	569.520.940.000
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**3.384.441.000**	**54.847.707.000**	**74.420.000**	**-**	**-**	**54.922.127.000**
3.29.0.00.0.00.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.384.441.000	54.847.707.000	74.420.000	-	-	54.922.127.000
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.968.248.000**	**108.023.091.000**	**848.000.000**	**-**	**-**	**108.871.091.000**
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.968.248.000	108.023.091.000	848.000.000	-	-	108.871.091.000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.773.550.000**	**1.237.358.814.000**	**32.940.292.000**	**-**	**-**	**1.270.299.106.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**1.020.490.000**	**674.712.519.000**	**28.004.338.000**	**-**	**-**	**702.716.857.000**
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	1.020.490.000	674.712.519.000	28.004.338.000	-	-	702.716.857.000
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**1.753.060.000**	**562.646.295.000**	**4.935.954.000**	**-**	**-**	**567.582.249.000**
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	1.753.060.000	562.646.295.000	4.935.954.000	-	-	567.582.249.000
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**21.288.529.051.000**	**536.567.511.000**	**11.400.513.000**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**7.394.280.372.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**30.240.000**	**40.342.576.000**	**732.000.000**	**-**	**-**	**41.074.576.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
5.01.0.00.0.00.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.240.000	40.342.576.000	732.000.000	-	-	41.074.576.000
5.02	**KEUANGAN**	**21.264.229.411.000**	**348.281.879.000**	**6.539.793.000**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**7.201.134.020.000**
5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.065.294.070.000	258.464.257.000	3.606.387.000	-	-	262.070.644.000
5.02.0.00.0.00.03	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.198.935.341.000	89.817.622.000	2.933.406.000	20.000.000.000	6.826.312.348.000	6.939.063.376.000
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**724.400.000**	**35.869.682.000**	**375.000.000**	**-**	**-**	**36.244.682.000**
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah	724.400.000	35.869.682.000	375.000.000	-	-	36.244.682.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**22.800.000.000**	**69.987.277.000**	**2.421.500.000**	**-**	**-**	**72.408.777.000**
5.04.0.00.0.00.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.800.000.000	69.987.277.000	2.421.500.000	-	-	72.408.777.000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**-**	**16.968.842.000**	**205.000.000**	**-**	**-**	**17.173.842.000**
5.05.0.00.0.00.01	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	16.968.842.000	205.000.000	-	-	17.173.842.000
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**745.000.000**	**25.117.255.000**	**1.127.220.000**	**-**	**-**	**26.244.475.000**
5.07.0.00.0.00.01	Badan Penghubung	745.000.000	25.117.255.000	1.127.220.000	-	-	26.244.475.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**-**	**36.074.660.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**36.109.160.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**-**	**36.074.660.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**36.109.160.000**
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	-	36.074.660.000	34.500.000	-	-	36.109.160.000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**326.450.517.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**326.696.548.000**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**-**	**326.450.517.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**326.696.548.000**
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	326.450.517.000	246.031.000	-	-	326.696.548.000
Jumlah		**23.741.914.261.000**	**15.630.119.890.500**	**1.679.982.022.500**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**24.156.414.261.000**
Surplus / (Defisit)		**(414.500.000.000)**					

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN III: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL:

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.02 - Dinas Pendidikan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**4.357.050.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.357.050.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	4.357.050.000	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**8.425.538.045.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.396.218.243.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.259.167.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.279.167.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	91.279.167.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.385.092.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	84.894.075.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.155.662.053.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.153.515.173.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.153.515.173.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	5.153.515.173.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.146.880.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.146.880.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.146.880.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**867.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	592.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	592.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	592.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	165.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**537.500.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	275.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.493.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	27.493.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.493.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.007.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.007.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.007.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.272.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	689.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	689.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	689.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	962.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	910.100.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	910.100.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	51.900.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.900.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	634.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	634.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	634.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	599.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	599.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	599.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	228.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	228.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.341.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.341.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.341.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.825.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.825.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	850.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.416.700.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	655.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	625.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	625.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.195.200.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.288.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.288.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.184.912.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.184.912.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	26.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	26.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	26.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.318.733.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.550.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	79.550.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.550.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.690.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.690.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	373.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	373.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.175.683.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	122.175.683.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.175.683.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.885.090.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441.790.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	441.790.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	441.790.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	253.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	253.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	253.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	641.600.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	641.600.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	641.600.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	91.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.102.300.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.102.300.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.102.300.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	820.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.400.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	295.400.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	295.400.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.028.289.802.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**1.082.181.804.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	22.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19.517.962.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	19.517.962.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.517.962.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	220.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0036.5.2	BELANJA MODAL	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0036.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11.200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0038.5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0038.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0041.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0041.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0045.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0045.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0049.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0049.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	276.620.844.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0052.5.1	BELANJA OPERASI	276.620.844.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0052.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.620.844.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	719.471.810.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.1	BELANJA OPERASI	558.487.034.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.652.144.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.1.5	Belanja Hibah	182.834.890.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.2	BELANJA MODAL	160.984.776.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.323.184.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.661.592.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0057.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0057.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0058.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0058.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.735.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0060.5.1	BELANJA OPERASI	8.735.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0060.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0060.5.1.5	Belanja Hibah	8.135.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0065.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0065.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.036.188.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0075.5.1	BELANJA OPERASI	1.036.188.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0075.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.036.188.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.822.807.369.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	13.115.731.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	13.115.731.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.115.731.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0028.5.2	BELANJA MODAL	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0028.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16.797.200.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	16.797.200.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.797.200.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	52.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0033.5.2	BELANJA MODAL	52.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0033.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	66.634.500.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	65.045.734.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.045.734.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037.5.2	BELANJA MODAL	1.588.766.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.438.766.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0041.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	262.332.616.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0045.5.1	BELANJA OPERASI	262.332.616.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0045.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.332.616.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.369.240.710.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	1.219.828.458.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	348.649.588.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.1.5	Belanja Hibah	871.178.870.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.2	BELANJA MODAL	149.412.252.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.608.168.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.804.084.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	550.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0050.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0050.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0051.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0051.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.475.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0053.5.1	BELANJA OPERASI	25.475.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0053.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	625.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0053.5.1.5	Belanja Hibah	24.850.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	2.357.673.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0056.5.1	BELANJA OPERASI	2.357.673.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0056.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.357.673.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0059.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0059.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0060.5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0060.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.225.278.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0069.5.1	BELANJA OPERASI	4.225.278.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0069.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.225.278.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	318.661.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0073.5.1	BELANJA OPERASI	318.661.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0073.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.661.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**123.300.629.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0035.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0035.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.080.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0037.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0037.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	450.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0039.5.2	BELANJA MODAL	450.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0039.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0040.5.2	BELANJA MODAL	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0040.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0044.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0044.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.250.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0048.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0048.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	26.125.133.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0051.5.1	BELANJA OPERASI	26.125.133.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0051.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.125.133.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	82.731.830.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.1	BELANJA OPERASI	71.695.466.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.751.516.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.1.5	Belanja Hibah	45.943.950.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.2	BELANJA MODAL	11.036.364.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.357.576.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.678.788.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0056.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0056.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0057.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0057.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.900.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0059.5.1	BELANJA OPERASI	2.900.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0059.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0059.5.1.5	Belanja Hibah	2.520.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0066.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0066.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	223.666.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0073.5.1	BELANJA OPERASI	223.666.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0073.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.666.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0080.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0080.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**330.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**240.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**90.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**400.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**400.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	400.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**300.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**240.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**60.000.000**	**-**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
	Jumlah Belanja	**8.425.538.045.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(8.421.180.995.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**2.330.443.996.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.330.443.996.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	2.299.568.664.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah atas Pelayanan yang DIselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.875.332.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A

			Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**3.869.410.280.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.318.995.266.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**344.083.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.835.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	218.835.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.835.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.248.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	125.248.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.248.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**600.951.733.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	590.370.913.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	590.370.913.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	590.370.913.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.525.820.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.525.820.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.525.820.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**376.800.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	268.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	268.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	268.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	108.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	108.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.520.430.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.052.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	244.052.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.052.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.519.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	217.519.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.519.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.639.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	173.639.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173.639.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	492.721.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	492.721.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	492.721.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	401.279.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	401.279.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	401.279.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	507.088.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	507.088.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	507.088.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.425.512.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.425.512.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.512.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.620.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	57.620.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.620.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.020.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	320.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.698.901.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.271.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	164.271.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.271.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.514.325.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.514.325.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.514.325.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	141.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.879.105.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.879.105.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.879.105.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.104.323.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.045.825.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.045.825.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.825.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.020.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	753.020.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	753.020.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	334.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	234.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.231.170.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.231.170.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.231.170.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.200.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	568.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	568.200.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.108.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	134.108.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	134.108.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.688.943.996.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.688.943.996.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.885.710.797.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	362.343.510.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.523.367.287.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	803.233.199.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.355.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.687.241.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	357.540.795.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.400.563.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.224.600.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**547.251.577.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**161.359.249.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.027.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.027.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.5	Belanja Hibah	1.960.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	79.315.215.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	7.815.215.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.815.215.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	71.500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.500.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	102.166.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	102.166.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.166.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1.000.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	426.888.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	426.888.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.2	BELANJA MODAL	573.112.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.112.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	907.891.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	907.891.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	907.891.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	270.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	20.900.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026.5.2	BELANJA MODAL	20.900.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.900.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	55.336.477.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	55.336.477.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.336.477.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**380.980.711.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	358.654.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	358.654.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	358.654.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	469.570.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	469.570.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	469.570.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	55.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	32.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	503.086.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	503.086.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	503.086.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	170.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.677.412.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.677.412.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.677.412.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	79.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	79.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	372.662.615.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	372.662.615.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.662.615.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	709.990.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	709.990.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	709.990.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	356.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	356.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	356.800.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.356.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	1.356.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.356.500.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	80.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0026.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0026.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.248.584.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0031.5.1	BELANJA OPERASI	2.248.584.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0031.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.248.584.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**625.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	625.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**4.286.617.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	135.830.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	135.830.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.830.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.150.787.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.150.787.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.787.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.928.215.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**273.215.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	268.025.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	268.025.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	268.025.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.190.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.190.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.655.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	405.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	405.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**75.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**75.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	75.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.160.222.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**824.000.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	824.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	824.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	824.000.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**336.222.000**	**-**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	336.222.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	336.222.000	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.222.000	-
	Jumlah Belanja	**3.869.410.280.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(1.538.966.284.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**15.797.992.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.797.992.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	15.797.992.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**639.333.897.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**186.731.430.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.121.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	571.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	571.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	571.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**137.626.945.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.578.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	134.578.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	134.578.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.435.280.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.435.280.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.280.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	613.172.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	613.172.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	613.172.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.512.440.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.512.440.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.271.324.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.271.324.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	241.116.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	241.116.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**300.169.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.700.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	56.700.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.469.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	243.469.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.469.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.131.514.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	275.899.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	275.899.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.899.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	751.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	751.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	751.493.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	776.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	776.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	776.848.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	484.319.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	484.319.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.319.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	81.520.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	81.520.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.520.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.750.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	32.750.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.941.826.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.941.826.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.941.826.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	357.360.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	357.360.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	357.360.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	429.499.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	429.499.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.499.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.577.473.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.577.473.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.577.473.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.577.473.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.727.881.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.186.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	95.186.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.186.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.110.834.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.110.834.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.110.834.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.521.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	22.521.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.521.861.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.734.008.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.929.180.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.929.180.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.929.180.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.524.570.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.852.550.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.852.550.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	672.020.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	672.020.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.280.258.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.280.258.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.258.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**48.621.302.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**24.405.458.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0075.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0075.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0079.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0079.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0087.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0087.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	300.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0090.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0090.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0104.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0104.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.759.106.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0107.5.1	BELANJA OPERASI	3.759.106.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0107.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.759.106.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0117.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0117.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	487.974.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0122.5.1	BELANJA OPERASI	487.974.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0122.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	487.974.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0125	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0125.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0125.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	10.000.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127.5.1	BELANJA OPERASI	44.492.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.492.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127.5.2	BELANJA MODAL	9.955.508.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.955.508.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0134	Rehabilitasi Embung	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	4.952.312.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136.5.1	BELANJA OPERASI	4.852.312.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.852.312.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	2.606.066.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0137.5.1	BELANJA OPERASI	2.606.066.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0137.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.606.066.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**24.215.844.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	565.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	24.524.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.524.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014.5.2	BELANJA MODAL	540.476.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	540.476.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	23.113.818.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	23.113.818.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.113.818.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	187.026.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	187.026.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0032.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	187.026.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0046.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**23.013.309.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**23.013.309.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	7.808.462.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	7.808.462.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.808.462.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	13.599.672.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	13.599.672.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.599.672.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.355.175.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0025.5.1	BELANJA OPERASI	1.355.175.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.255.175.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0025.5.1.4	Belanja Subsidi	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**11.770.900.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**11.770.900.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.325.900.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	11.325.900.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.325.900.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	445.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	445.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	445.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.793.451.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**2.793.451.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.693.451.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	2.693.451.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.693.451.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**13.470.116.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**13.470.116.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	109.668.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	109.668.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.668.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.360.448.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	1.851.974.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.851.974.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.2	BELANJA MODAL	11.508.474.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.508.474.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**349.789.477.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**349.789.477.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	24.348.160.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.2	BELANJA MODAL	24.337.600.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.337.600.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.380.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.275.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.2	BELANJA MODAL	3.105.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.105.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	380.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	162.336.122.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045.5.1	BELANJA OPERASI	161.619.722.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.619.722.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045.5.2	BELANJA MODAL	716.400.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	716.400.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	104.520.096.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0051.5.2	BELANJA MODAL	104.520.096.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0051.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.520.096.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	3.982.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0052.5.2	BELANJA MODAL	3.982.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0052.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.982.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0053.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0053.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	28.140.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0054.5.2	BELANJA MODAL	28.140.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0054.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.140.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.420.342.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0057.5.1	BELANJA OPERASI	15.420.342.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0057.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.420.342.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	2.782.757.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059.5.1	BELANJA OPERASI	1.159.654.500	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.654.500	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059.5.2	BELANJA MODAL	1.623.102.500	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.623.102.500	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**2.146.224.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**1.397.224.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	115.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	469.537.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	469.537.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	469.537.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	146.224.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	146.224.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.224.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	666.463.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	666.463.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.463.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**597.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	544.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	538.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	538.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	53.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**152.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	124.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	124.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**997.688.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**300.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	170.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	130.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**300.000.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	147.389.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	147.389.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.389.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	152.611.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	152.611.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.611.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**397.688.000**	**-**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	290.545.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	290.545.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	290.545.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	62.789.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	62.789.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.789.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	44.354.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	44.354.000	-
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.354.000	-
	Jumlah Belanja	**639.333.897.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(623.535.905.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**39.810.871.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.466.548.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**839.389.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	497.234.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	497.234.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	497.234.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.155.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	292.155.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.155.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.844.944.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.368.944.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.368.944.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	13.368.944.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	386.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**62.305.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	11.641.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.641.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.664.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.664.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.115.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	630.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.830.515.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.325.515.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.325.515.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**604.395.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	89.395.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.395.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.845.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**170.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**130.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	130.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**10.963.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.635.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.635.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.480.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.008.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.008.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.720.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	5.320.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.320.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0008.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.800.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.582.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1.582.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.492.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.492.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.266.323.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.397.300.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	775.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	705.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	705.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	142.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	142.500.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	479.800.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	479.800.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	479.800.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.869.023.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.520.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.520.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	171.950.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	81.950.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.950.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.2	BELANJA MODAL	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.682.553.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.682.553.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.682.553.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.663.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**2.663.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.638.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.638.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.638.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**370.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	**370.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**270.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**270.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	270.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**500.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	375.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**430.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**430.000.000**	**-**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	365.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	365.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	365.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	65.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
	Jumlah Belanja	**39.810.871.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(39.810.871.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**420.100.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.100.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	420.100.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**22.535.558.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.742.868.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**152.365.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.305.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	103.305.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.305.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.060.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	44.060.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.060.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.148.333.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.333.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.846.333.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	12.846.333.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	282.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**415.835.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.835.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	130.835.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.835.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**655.707.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.155.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	95.155.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.155.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.152.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.152.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.152.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.559.171.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.227.171.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.227.171.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.227.171.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**761.457.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	309.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.457.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	348.457.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.457.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.432.690.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2.182.890.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	231.940.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	231.940.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.940.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.340.750.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	1.340.750.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.340.750.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	260.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	350.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0030.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**2.221.680.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.850.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	70.850.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.850.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.790.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.790.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.790.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.130.040.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.130.040.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.130.040.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**28.120.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	19.920.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.920.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	8.200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**360.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**360.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	160.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
	Jumlah Belanja	**22.535.558.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(22.115.458.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**20.396.444.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.421.444.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**260.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.182.223.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.832.223.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.832.223.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	6.832.223.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**61.500.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	61.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	61.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**537.500.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	130.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	316.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	316.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.528.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	828.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	728.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	728.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.931.721.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	529.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	529.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.401.221.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.401.221.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.401.221.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**905.500.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	685.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	685.500.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.975.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**700.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**2.125.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	400.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	1.250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0026.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0026.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**2.750.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0025.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0026.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0026.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0028.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0028.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0030.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0031.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0031.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**400.000.000**	**-**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	80.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	130.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0013.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0022.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0023.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
	Jumlah Belanja	**20.396.444.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(20.396.444.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**233.416.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	233.416.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	233.416.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**333.894.864.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**134.126.589.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**850.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95.930.738.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.255.738.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	94.255.738.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	94.255.738.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	175.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.601.579.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	297.089.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	297.089.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.089.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.820.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	117.820.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.820.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	262.452.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	262.452.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.452.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	666.854.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	666.854.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.854.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.785.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	185.785.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.785.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	36.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	434.767.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	434.767.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	434.767.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	238.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	238.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	238.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.286.712.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.286.712.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.286.712.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.051.213.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	17.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	734.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	734.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	734.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	443.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	443.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	856.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	848.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.063.583.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	80.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.808.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.808.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.808.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.975.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.975.193.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.254.476.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.676.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	773.676.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	773.676.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	253.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	253.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.687.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	6.687.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.687.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	390.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	390.520.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.286.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**10.086.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	750.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.384.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.384.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.5	Belanja Hibah	2.610.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	4.002.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	4.002.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.002.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	355.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	355.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	355.720.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	44.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	44.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.280.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**74.090.123.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**24.402.971.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.793.060.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.774.010.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.774.010.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	19.050.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.050.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.542.882.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.542.882.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.542.882.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.123.607.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	809.507.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	809.507.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	314.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	501.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	500.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	152.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	152.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.900.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.037.521.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.011.321.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.011.321.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.2	BELANJA MODAL	26.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	91.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	81.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	324.810.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	324.810.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	324.810.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	70.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.830.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	76.909.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	76.909.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.909.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	12.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0019	Pemulasaraan	146.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	146.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	528.192.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	528.192.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.192.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**22.242.229.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Pengasuhan	7.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.753.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.753.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.753.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.102.772.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	562.892.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	562.892.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.2	BELANJA MODAL	1.539.880.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.539.880.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	60.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.450.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	695.756.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	659.256.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	659.256.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.2	BELANJA MODAL	36.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	119.070.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	119.070.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119.070.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.857.939.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.857.939.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.857.939.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	35.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	35.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	89.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	89.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	12.061.913.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	12.025.798.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.025.798.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015.5.2	BELANJA MODAL	36.115.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.115.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	421.606.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	421.606.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.606.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	7.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0022.5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	29.793.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	29.793.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.793.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**20.567.939.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	13.301.815.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.229.965.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.229.965.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	71.850.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.850.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	3.799.320.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.799.320.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.799.320.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.107.019.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	648.619.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	648.619.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.2	BELANJA MODAL	458.400.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.400.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	85.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	59.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.2	BELANJA MODAL	25.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	233.890.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	233.890.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	233.890.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	912.065.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	904.565.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	904.565.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.2	BELANJA MODAL	7.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	96.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007.5.2	BELANJA MODAL	4.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0010.5.1	BELANJA OPERASI	70.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.140.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.090.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	59.090.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.090.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012	Pemulasaraan	421.125.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	421.125.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.125.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	8.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0015.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	259.910.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016.5.1	BELANJA OPERASI	249.910.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.910.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	210.265.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0017.5.1	BELANJA OPERASI	210.265.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.265.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**2.490.140.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	1.763.300.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.753.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.753.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.2	BELANJA MODAL	9.950.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.950.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	202.940.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	202.940.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.940.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	147.650.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	63.650.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.650.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.2	BELANJA MODAL	84.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	30.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	16.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	76.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	76.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.490.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	20.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.660.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	192.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	192.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	1.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**4.386.844.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.101.730.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.091.380.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.091.380.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.2	BELANJA MODAL	10.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.350.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	562.514.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	562.514.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	562.514.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	193.110.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	176.410.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.410.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.2	BELANJA MODAL	16.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	31.270.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.270.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.270.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	23.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	23.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.424.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.424.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.424.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	211.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	211.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	211.700.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.346.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.346.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.346.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	26.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	165.150.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	165.150.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.150.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**110.594.572.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**350.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**110.244.572.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	84.044.572.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	84.044.572.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.044.572.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.700.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**4.397.580.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**4.397.580.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.349.018.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.349.018.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.349.018.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	824.312.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	824.312.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	824.312.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00011	Penyediaan Sandang	247.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00011.5.1	BELANJA OPERASI	247.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.500.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	247.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00013.5.1	BELANJA OPERASI	247.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	364.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00016.5.1	BELANJA OPERASI	364.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	364.750.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	165.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00022.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**200.000.000**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.000.000	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
	Jumlah Belanja	**333.894.864.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(333.661.448.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.156.454.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.156.454.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	3.140.954.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.500.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**89.667.936.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**77.615.772.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**378.365.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.284.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	237.284.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237.284.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.691.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.691.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.691.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	28.290.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.100.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	12.100.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62.986.623.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.251.652.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	62.251.652.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	62.251.652.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.666.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	642.666.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	642.666.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.345.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	91.345.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.345.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	960.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	960.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	960.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**70.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.100.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.900.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.900.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.900.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.876.213.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.622.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	83.622.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.622.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.008.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.008.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.008.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.085.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	110.085.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.085.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.792.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	195.792.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.792.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.206.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.206.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.206.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	93.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.224.122.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.224.122.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.122.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**222.426.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.225.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	26.048.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.048.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	170.177.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.177.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.201.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	26.201.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.201.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.458.953.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.632.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.632.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.632.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.160.358.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.160.358.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.358.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.939.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	145.939.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.939.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.130.024.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.130.024.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.130.024.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.587.092.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.386.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	416.386.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	416.386.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.983.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.983.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.983.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	94.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	94.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564.128.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	564.128.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	564.128.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.010.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	62.010.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.010.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.285.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	214.285.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	214.285.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**121.635.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**121.635.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	51.510.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	51.510.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.510.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	31.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	31.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.605.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	38.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	38.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**7.572.217.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**7.067.256.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.857.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.857.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.857.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	146.647.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	146.647.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.647.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	63.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	8.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**93.677.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	93.677.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	93.677.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.677.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**370.284.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	370.284.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	370.284.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	370.284.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**41.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.510.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**691.279.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	69.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	69.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.870.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	245.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	245.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24.860.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.860.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.860.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	16.360.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	16.360.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	320.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	320.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.609.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.290.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.820.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.820.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.820.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**675.510.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	37.470.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	37.470.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.470.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	638.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	638.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	638.040.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**130.306.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.063.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.063.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.063.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	15.089.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.089.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.089.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	83.634.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	83.634.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.634.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**9.085.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.085.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.085.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.085.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**950.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**141.605.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	53.333.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.333.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.333.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	14.158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.158.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	74.114.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	74.114.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.114.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**511.356.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	169.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	169.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	47.272.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	47.272.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.272.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.316.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.316.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.316.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	195.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	195.220.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.220.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	86.548.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	86.548.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.548.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**297.039.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	245.476.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	245.476.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.476.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	23.197.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	23.197.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.197.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	28.366.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	28.366.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.366.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**1.748.312.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**1.748.312.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	761.720.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	761.720.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	761.720.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	231.305.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	231.305.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.305.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	755.287.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	755.287.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	755.287.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**150.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**150.000.000**	**-**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	90.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	60.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
	Jumlah Belanja	**89.667.936.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(86.511.482.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**21.536.924.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.341.824.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**207.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	62.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.916.389.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.457.489.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	11.457.489.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.200.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	366.200.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	366.200.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.700.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	72.700.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.700.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**46.570.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**628.631.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.462.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	64.462.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.462.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.921.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	116.921.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.921.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.749.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	281.749.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	281.749.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.500.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.836.581.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447.536.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	447.536.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	447.536.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.387.045.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.387.045.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.387.045.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**637.153.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.400.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.128.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	355.128.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	355.128.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.625.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	94.625.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.625.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**2.698.800.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**121.730.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.800.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	40.930.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	40.930.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.930.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**2.577.070.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.439.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.439.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.439.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	705.070.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	705.070.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	705.070.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	432.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	432.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	432.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**770.432.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**115.750.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	14.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**136.040.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**518.642.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	347.642.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	347.642.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.642.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	56.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**328.408.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**312.808.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	312.808.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	312.808.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.808.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**15.600.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**373.720.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**271.100.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	271.100.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	271.100.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	271.100.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**102.620.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	43.840.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	43.840.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.840.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	51.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	51.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**296.720.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**96.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**136.040.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.720.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**64.680.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	34.680.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	34.680.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.680.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**160.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**151.230.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	36.170.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	36.170.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.170.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	22.488.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	22.488.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.488.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	26.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	26.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.780.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	65.792.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	65.792.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0024.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.792.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**8.770.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	8.770.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.770.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**389.667.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**352.667.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	148.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	148.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	35.856.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	35.856.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.856.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	168.811.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	168.811.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.811.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**37.000.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**177.353.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**88.586.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	27.109.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	27.109.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.109.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	25.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	25.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.570.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	35.907.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	35.907.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.907.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**88.767.000**	**-**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	13.210.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	13.210.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	35.928.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.928.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.928.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina	39.629.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

	Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	39.629.000	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.629.000	-
	Jumlah Belanja	**21.536.924.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(21.536.924.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**63.770.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.770.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	48.770.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**45.169.295.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.986.170.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.873.531.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.317.257.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.317.257.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	14.317.257.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.274.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	376.274.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	376.274.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**154.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**763.501.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	156.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	156.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	335.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.301.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	87.301.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.301.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**635.200.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	635.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	635.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	635.200.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.372.660.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	438.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.934.660.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.934.660.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.934.660.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.731.278.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.190.278.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	199.911.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.911.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	2.990.367.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.990.367.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	331.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	331.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**13.614.995.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**8.078.791.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.138.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.138.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.988.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.4	Belanja Subsidi	150.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	346.990.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	346.990.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.990.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.006.835.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.006.835.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.006.835.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	3.138.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.138.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	438.440.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009.5.1.4	Belanja Subsidi	2.700.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	377.226.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	377.226.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	377.226.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	70.860.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	70.860.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.860.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**5.025.529.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.025.529.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.025.529.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.025.529.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**510.675.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.675.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	510.675.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.675.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001.5.1.4	Belanja Subsidi	150.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**4.975.924.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**4.975.924.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	275.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	317.317.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	317.317.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.317.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	2.750.402.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.402.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.402.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004.5.1.4	Belanja Subsidi	2.520.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1.633.205.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.633.205.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.925.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0005.5.1.4	Belanja Subsidi	1.502.280.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**2.592.206.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.592.206.000**	**-**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	220.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	446.378.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	446.378.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	446.378.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	338.743.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	338.743.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137.743.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009.5.1.4	Belanja Subsidi	201.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.437.085.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	412.863.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	412.863.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.024.222.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.024.222.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	150.000.000	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
	Jumlah Belanja	**45.169.295.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(45.105.525.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.3.28.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.007.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.007.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	2.309.673.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.11.2.11.3.28.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	697.327.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**140.666.150.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**135.158.813.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**385.500.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	225.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**120.250.739.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.165.739.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	120.165.739.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	120.165.739.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**313.345.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	313.345.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	313.345.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.345.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**45.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.605.604.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	62.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.229.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.229.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.229.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.777.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	111.777.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.777.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.618.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	131.618.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	131.618.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.035.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	84.035.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.035.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.260.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	227.260.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.260.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.185.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	886.185.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	886.185.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.500.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	34.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	6.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.500.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.752.311.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.807.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.807.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.807.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.988.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.703.988.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.703.988.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.760.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	161.760.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.760.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.862.756.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.862.756.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.862.756.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.765.814.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.315.914.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.315.914.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.315.914.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.300.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	255.300.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	255.300.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**145.772.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.088.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.088.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.088.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	44.684.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	44.684.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.684.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**54.228.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	54.228.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	54.228.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.228.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**965.614.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**965.614.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14.370.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.370.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.370.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	201.244.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	201.244.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.244.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	450.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**158.986.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**158.986.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	94.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	94.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64.386.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	64.386.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.386.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**25.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**400.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**400.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	200.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**200.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	85.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	115.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**30.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**30.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**245.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**245.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	155.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	90.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0014.5.1.5	Belanja Hibah	80.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**2.676.375.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**50.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**20.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.333.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	804.754.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	804.754.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	804.754.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	34.220.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	34.220.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.220.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.434.026.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.434.026.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.434.026.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**105.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	105.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**45.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**50.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**73.375.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	14.490.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.490.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.480.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.480.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	20.150.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	20.150.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	27.425.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	27.425.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.425.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**191.362.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**90.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	55.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**51.362.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	51.362.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	51.362.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.362.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**50.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**300.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**300.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	211.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	211.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	211.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	49.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	-	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**115.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**115.000.000**	**-**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
	Jumlah Belanja	**140.666.150.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(137.659.150.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**23.909.441.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.645.901.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**285.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.069.218.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.712.218.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.712.218.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	13.712.218.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	357.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	357.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**651.683.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	142.683.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	142.683.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	142.683.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	750.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	74.250.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.250.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.945.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	496.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	496.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.424.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.424.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.424.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**520.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**70.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**70.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**60.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**60.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	60.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**75.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**75.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**155.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**155.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	155.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.033.540.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.033.540.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	418.540.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	418.540.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	418.540.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	120.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.870.000.000**	**-**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.870.000.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	165.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	550.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	-
	Jumlah Belanja	**23.909.441.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(23.909.441.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**37.033.315.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.033.315.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	4.535.293.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	32.498.022.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**207.548.490.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.792.811.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**245.683.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.064.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	120.064.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.064.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.619.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	62.619.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.619.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**47.183.594.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.366.833.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.366.833.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	46.366.833.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.200.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	766.200.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	766.200.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.561.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.561.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.561.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**955.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	955.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	955.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	955.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**192.500.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.554.352.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	257.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	257.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	199.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.852.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	812.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	812.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	812.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.885.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.700.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.700.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.692.712.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.589.225.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.093.487.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	13.093.487.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.093.487.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.083.970.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	857.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.070.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	117.070.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.070.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**136.438.696.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**101.800.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	101.800.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.800.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**6.257.194.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.257.194.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	389.096.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	389.096.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	5.868.098.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.393.098.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**5.812.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.2	BELANJA MODAL	155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.107.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	24.992.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.992.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.2	BELANJA MODAL	1.082.008.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.082.008.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4.195.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010.5.2	BELANJA MODAL	4.195.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.195.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	355.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	355.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**3.317.321.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	22.916.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.916.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.916.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	864.240.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	864.240.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	864.240.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	58.624.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	58.624.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.624.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.371.541.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.932.611.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.611.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.2	BELANJA MODAL	438.930.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	438.930.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**37.316.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	37.316.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	37.316.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.316.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**1.358.496.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.078.653.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.078.653.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.653.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	173.460.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004.5.1	BELANJA OPERASI	173.460.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173.460.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	106.383.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	106.383.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.383.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**118.790.622.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	696.815.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	696.815.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	696.815.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.093.807.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	117.615.807.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.615.807.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.2	BELANJA MODAL	478.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**660.173.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	586.551.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	586.551.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	586.551.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	73.622.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	73.622.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.622.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**18.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	18.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**48.400.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	48.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17.374.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.374.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.374.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.374.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**20.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**716.983.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**56.400.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**37.387.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.387.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	37.387.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.387.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**38.536.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	38.536.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.536.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.536.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**584.660.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	77.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	483.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002.5.2	BELANJA MODAL	483.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	483.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.660.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.900.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.2	BELANJA MODAL	19.760.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.760.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.600.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1.600.000.000**	**-**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.600.000.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.308.434.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.308.434.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	291.566.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.716.000	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.850.000	-
	Jumlah Belanja	**207.548.490.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(170.515.175.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.16.2.20.2.21.01 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**97.373.332.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.762.703.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**335.887.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.887.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	135.887.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.887.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.824.042.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.000.242.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.242.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	19.000.242.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	763.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	763.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	763.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**220.678.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.178.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.178.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.178.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**93.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.095.586.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.226.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	34.226.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.226.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.200.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	165.200.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.200.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	54.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	196.580.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	196.580.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.580.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	88.780.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	88.780.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.780.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.200.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.900.210.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.616.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.616.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.616.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.273.594.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.273.594.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.273.594.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.093.300.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	37.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	408.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	408.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	101.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.300.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	46.300.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**15.345.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**15.345.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0014	Relasi Media	2.588.285.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	2.588.285.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.588.285.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	95.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	3.884.375.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	3.884.375.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.884.375.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.700.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	4.720.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	4.712.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	462.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021.5.1.5	Belanja Hibah	4.250.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021.5.2	BELANJA MODAL	7.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	601.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	601.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	601.800.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	614.817.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	614.817.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	614.817.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.140.723.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	1.140.723.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0024.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.723.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**42.741.829.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**42.741.829.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1.181.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	1.181.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.181.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	146.725.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0030.5.1	BELANJA OPERASI	146.725.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0030.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.725.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	450.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0031.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0031.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	1.213.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	1.213.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0032.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.213.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	19.027.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	5.347.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.347.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033.5.2	BELANJA MODAL	13.680.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.680.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	550.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0035.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0035.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	20.173.604.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	3.873.604.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.873.604.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037.5.2	BELANJA MODAL	16.300.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.300.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**740.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**740.000.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	220.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**1.783.800.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.164.140.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	429.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	429.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.500.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	457.600.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	457.600.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	457.600.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	63.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	63.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	213.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	213.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	213.520.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**619.660.000**	**-**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	619.660.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	428.820.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	428.820.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	190.840.000	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.840.000	-
	Jumlah Belanja	**97.373.332.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(97.373.332.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**625.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	625.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	411.215.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	213.785.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**33.933.698.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.089.628.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**120.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.433.081.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.008.081.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.008.081.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	14.008.081.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	410.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**582.975.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.550.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	82.550.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.550.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.925.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.925.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.925.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	325.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.555.222.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.310.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.310.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.087.310.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.443.412.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.443.412.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.443.412.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300.350.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	91.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.350.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	48.350.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**938.680.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**400.000.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**538.680.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	538.680.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	538.680.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	538.680.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**195.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**195.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**577.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**577.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	238.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	238.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	238.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	53.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	53.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	235.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**855.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**855.000.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	178.422.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	178.422.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.422.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	151.578.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	151.578.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.578.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	105.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	52.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	270.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	73.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	73.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**3.278.390.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**3.278.390.000**	**-**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	185.551.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	185.551.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.551.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	20.799.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.799.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.799.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	3.072.040.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.072.040.000	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.072.040.000	-
	Jumlah Belanja	**33.933.698.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(33.308.698.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**60.600.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.600.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	60.600.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**23.053.331.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.521.177.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**266.660.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.660.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	121.660.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.660.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.720.401.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.394.401.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.394.401.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	14.394.401.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	326.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	326.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	326.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**56.500.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**624.110.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.891.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.891.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.891.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	79.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.219.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	244.219.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.219.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**218.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	178.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.049.660.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	534.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	534.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.453.660.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.453.660.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.453.660.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**505.846.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.846.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	305.846.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.846.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**667.200.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**667.200.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	357.200.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	357.200.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	357.200.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	210.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.514.954.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.514.954.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.439.954.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.439.954.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.439.954.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**790.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**310.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	310.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**480.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**350.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**350.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	125.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	225.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**210.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**210.000.000**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	210.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	-
	Jumlah Belanja	**23.053.331.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(22.992.731.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.19.0.00.0.00.02 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**4.671.337.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.671.337.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	4.671.337.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.19.2.19.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**151.652.445.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.242.745.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**850.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.683.731.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.917.871.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.917.871.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	16.917.871.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	765.860.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	765.860.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	765.860.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.350.463.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	43.600.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.463.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.463.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.463.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.400.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	871.400.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.400.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.110.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.183.551.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.562.551.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.562.551.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.562.551.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.560.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	985.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	985.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	985.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.965.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.720.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	720.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	600.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	900.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**8.245.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	7.245.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.245.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.5	Belanja Hibah	7.045.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100.444.700.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**14.064.700.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	10.364.700.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	10.364.700.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.364.700.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**27.100.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	9.500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	14.450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	14.450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**58.780.000.000**	**-**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	58.580.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	58.580.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0003.5.1.5	Belanja Hibah	58.380.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
	Jumlah Belanja	**151.652.445.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(146.981.108.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**44.138.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.138.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	44.138.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**32.500.166.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.309.985.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**178.316.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.396.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	143.396.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.396.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.920.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	24.920.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.920.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.997.559.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.770.389.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.770.389.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	24.770.389.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	227.170.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	227.170.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.170.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**91.708.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.508.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	89.508.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.508.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.700.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**884.438.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	78.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.250.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	155.250.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.250.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.345.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.345.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.345.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.279.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	246.279.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	246.279.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.184.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.184.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.184.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	222.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	42.676.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.676.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.2	BELANJA MODAL	179.324.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.324.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**424.295.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	136.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.295.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	288.295.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.295.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.186.166.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.964.666.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.964.666.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.964.666.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**529.803.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.553.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	112.553.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.553.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.300.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	67.300.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	151.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.750.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	88.750.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.750.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.469.708.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**629.084.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	26.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12.785.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.785.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.785.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	61.819.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.819.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.819.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	450.980.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	23.300.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.2	BELANJA MODAL	427.680.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	427.680.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	23.620.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	23.620.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.620.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	28.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	28.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.380.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**840.624.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	182.294.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	182.294.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	182.294.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	286.316.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	286.316.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	286.316.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	342.014.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	342.014.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342.014.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**102.581.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**46.535.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	6.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**21.430.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	11.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.535.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	9.895.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.895.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.895.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**14.326.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	14.326.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.326.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.326.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**20.290.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	8.800.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.280.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.2	BELANJA MODAL	2.520.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.520.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	11.490.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.490.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.490.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**597.827.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**261.125.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	116.125.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	116.125.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.125.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**177.927.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	13.508.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.308.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.308.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.2	BELANJA MODAL	2.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	34.225.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	34.225.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.225.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	130.194.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	130.194.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.194.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**158.775.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	83.775.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	83.775.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.775.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**20.065.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**6.053.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.053.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.053.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.053.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**9.012.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	9.012.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.012.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.012.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**5.000.000**	**-**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.700.000	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.700.000	-
	Jumlah Belanja	**32.500.166.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(32.456.028.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**17.749.767.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.749.767.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	17.749.767.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**89.763.598.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**63.857.762.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**453.691.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	208.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.691.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	195.691.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.691.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.977.993.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.055.093.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.055.093.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	43.055.093.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	851.400.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	851.400.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	851.400.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	71.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**136.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.784.894.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204.856.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	204.856.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.856.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.688.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	212.932.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	212.932.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	216.756.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.756.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	154.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.080.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	57.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	828.770.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	828.770.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	828.770.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.927.734.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.680.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	37.680.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.680.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.193.320.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.193.320.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.193.320.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.696.734.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.696.734.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.696.734.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.427.450.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	699.930.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	699.930.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	699.930.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.099.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	292.099.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.099.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.254.421.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.030.421.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.421.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	224.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	24.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	181.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**1.381.911.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**890.601.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	347.334.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	345.734.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	345.734.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	1.600.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	469.199.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	469.199.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	469.199.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	74.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	74.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**491.310.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.245.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.245.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.245.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	421.065.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	421.065.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.065.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.5	Belanja Hibah	400.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**9.248.576.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**4.147.175.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	44.100.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.285.225.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.285.225.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.285.225.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	2.000.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	817.850.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	817.850.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0010.5.1.5	Belanja Hibah	806.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**260.035.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	260.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	260.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**4.841.366.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	178.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	178.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.068.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.577.909.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.211.461.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.461.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	2.366.448.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.351.448.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.085.389.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.002.839.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.839.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	82.550.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.550.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**12.612.050.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**1.657.998.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	46.050.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	46.050.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	105.200.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.2	BELANJA MODAL	103.800.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.800.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.194.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.194.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	394.500.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004.5.1.5	Belanja Hibah	800.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	43.358.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	43.358.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.358.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	220.325.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	220.325.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.325.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.565.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0013.5.1	BELANJA OPERASI	48.565.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.565.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**10.954.052.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.848.164.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.190.164.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.930.164.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.1.5	Belanja Hibah	1.260.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	2.658.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.336.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.105.888.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	550.045.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.045.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004.5.2	BELANJA MODAL	3.555.843.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	761.300.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.794.543.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.663.227.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**1.609.497.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	68.510.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	68.510.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.510.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	530.354.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	530.354.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	530.354.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	46.625.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	46.625.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.625.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	18.341.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	18.341.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.341.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	8.285.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	8.285.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.285.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	918.235.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	918.235.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.235.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0017.5.1.5	Belanja Hibah	880.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	19.147.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	19.147.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.147.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**53.730.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.910.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.000.072.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**132.037.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	82.037.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	82.037.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.037.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**866.035.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	866.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	866.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	781.035.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1.5	Belanja Hibah	85.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2.000.000**	**-**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	-
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	-
	Jumlah Belanja	**89.763.598.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(72.013.831.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI : 3.26.2.22.0.00.02 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.316.715.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.316.715.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	3.316.715.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3.26.3.26.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**88.020.152.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.262.477.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.133.641.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.533.641.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.533.641.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	22.533.641.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**190.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.180.673.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	162.192.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	162.192.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.192.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.568.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	195.568.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.568.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.053.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	161.053.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.053.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.400.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	92.400.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.888.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.888.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.888.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	299.580.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	299.580.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	299.580.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991.992.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	991.992.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	991.992.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.239.415.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.176.915.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.176.915.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.176.915.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.500.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	57.500.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.500.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.895.682.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.276.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.276.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.276.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.464.600.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.464.600.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.464.600.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	82.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.316.906.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.316.906.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.316.906.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.923.066.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	309.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	105.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	181.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.900.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	32.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.722.761.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.722.761.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.722.761.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.605.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	313.605.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.605.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.800.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	158.800.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.800.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**22.675.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**21.525.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	14.000.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	620.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.5	Belanja Hibah	13.380.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.225.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	4.225.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0010.5.1.5	Belanja Hibah	3.000.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.150.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**1.750.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.750.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.750.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**150.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**150.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.205.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**475.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	475.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	475.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**730.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	280.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.900.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.900.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	675.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	675.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	675.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	975.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	975.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	975.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	250.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.525.625.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**6.000.625.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	6.000.625.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.625.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.625.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**175.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	175.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**350.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0013.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**8.652.050.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**8.652.050.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	165.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	590.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	590.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7.897.050.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.897.050.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.897.050.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**850.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**250.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	50.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**600.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0015.5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.050.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**750.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0014.5.1.5	Belanja Hibah	250.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**300.000.000**	**-**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
	Jumlah Belanja	**88.020.152.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(84.703.437.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**22.278.321.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.278.321.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	22.278.321.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**569.520.940.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**168.558.597.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.741.911.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.016.754.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.016.754.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.016.754.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	725.157.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	725.157.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	725.157.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**110.646.685.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.642.685.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	109.642.685.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	109.642.685.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	954.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	954.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	954.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**467.835.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	360.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.240.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	87.240.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.240.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20.595.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.595.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.595.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**96.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**278.621.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.294.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	258.294.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.294.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.487.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	12.487.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.487.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.592.967.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	224.021.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	224.021.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224.021.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.306.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	419.806.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	419.806.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	182.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	332.573.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	281.073.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	281.073.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	51.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	554.722.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	554.722.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	554.722.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.570.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	336.570.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.570.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	527.074.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	527.074.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.074.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.951.431.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.951.431.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.951.431.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.270.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	58.270.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.270.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.210.755.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	235.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	215.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.163.418.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	13.122.418.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.122.418.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	860.800.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	816.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.700.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	560.775.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	460.775.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.900.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.875.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.390.762.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	615.284.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	615.284.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	2.775.478.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.787.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.743.220.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	870.471.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.999.563.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.650.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	47.650.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.650.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.506.338.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.506.338.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.506.338.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.420.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	393.420.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	393.420.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.052.155.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	18.052.155.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.052.155.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.524.260.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.875.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.384.875.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.875.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.760.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	205.760.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	205.760.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.191.290.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.191.290.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.191.290.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	580.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	530.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	530.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	59.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	59.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.713.551.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	4.012.276.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.012.276.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	701.275.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	701.275.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.157.084.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	526.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	526.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.2	BELANJA MODAL	630.584.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.584.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**159.281.528.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**98.300.013.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	42.259.586.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	42.177.086.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.527.086.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	2.650.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	82.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	56.040.427.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	56.040.427.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.860.427.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0002.5.1.5	Belanja Hibah	180.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**15.940.914.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.547.659.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.077.549.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.549.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	470.110.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.110.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.266.712.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.266.712.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.266.712.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	687.582.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	687.582.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	687.582.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.954.415.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.954.415.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.954.415.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	7.445.208.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	7.404.708.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.404.708.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013.5.2	BELANJA MODAL	40.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.500.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	442.303.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0018.5.1	BELANJA OPERASI	442.303.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442.303.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	210.398.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	210.398.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.398.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	290.637.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	290.637.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	290.637.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**6.337.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	6.337.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.337.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03.0003.5.1.5	Belanja Hibah	5.747.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**37.843.601.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	8.352.946.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.352.946.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.432.946.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0001.5.1.5	Belanja Hibah	4.920.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	29.490.655.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	29.490.655.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.370.655.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0004.5.1.5	Belanja Hibah	17.120.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**860.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	860.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	860.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**178.234.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**178.234.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	75.580.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.580.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0004.5.1.5	Belanja Hibah	580.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	102.654.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	102.654.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.201.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0009.5.1.5	Belanja Hibah	3.453.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.637.563.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.080.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.080.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**150.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**3.407.563.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	910.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	910.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	910.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.497.563.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.497.563.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.497.563.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**5.850.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**5.850.000.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.550.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**52.959.252.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**34.304.978.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.111.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.111.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.111.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	31.193.978.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	31.193.978.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.193.978.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**18.654.274.000**	**-**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	17.904.274.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	17.904.274.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.739.274.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0005.5.1.5	Belanja Hibah	14.165.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	750.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
	Jumlah Belanja	**569.520.940.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(547.242.619.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.384.441.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.384.441.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.594.300.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.790.141.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**54.922.127.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.653.595.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**557.500.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.592.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	160.592.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.592.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.701.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	334.701.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.701.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	31.427.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	31.427.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.427.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.780.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	30.780.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.780.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.181.286.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.149.286.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.149.286.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	36.149.286.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	822.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	822.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	822.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**318.218.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	294.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	294.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	294.500.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.718.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	23.718.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.718.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.901.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.901.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	14.901.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.901.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.388.107.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.418.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	55.418.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.418.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.287.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.267.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.267.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	23.020.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.020.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.944.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	68.144.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.144.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	800.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.712.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	196.712.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.712.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	33.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.535.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	50.535.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.535.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849.231.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	849.231.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	849.231.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	23.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.490.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.600.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	50.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.938.491.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.207.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.627.207.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.627.207.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.279.034.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.279.034.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.279.034.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.119.492.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	423.192.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	423.192.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	423.192.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	371.758.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	371.758.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.758.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.542.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	204.542.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.542.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**923.631.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**251.266.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	251.266.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	251.266.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.266.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**672.365.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	300.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	372.365.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	372.365.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.365.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**1.077.356.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**95.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**858.902.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	145.880.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	145.880.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.880.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	713.022.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	713.022.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	713.022.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**123.454.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.454.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	123.454.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.454.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.135.551.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05	**Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**	**647.600.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	647.600.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05.0008.5.1	BELANJA OPERASI	647.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05.0008.5.1.5	Belanja Hibah	590.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**1.387.951.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	400.631.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.631.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.631.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	987.320.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	987.320.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.320.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1.5	Belanja Hibah	540.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007.5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	407.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09	**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**	**100.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**2.131.994.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**154.194.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	154.194.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	154.194.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.194.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**136.800.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	136.800.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	136.800.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136.800.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.841.000.000**	**-**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	16.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	600.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.225.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.225.000.000	-
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000.000	-
	Jumlah Belanja	**54.922.127.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(51.537.686.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**3.968.248.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.968.248.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	3.918.248.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**108.871.091.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.787.345.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**786.693.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	261.693.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	261.693.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	261.693.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.207.106.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.761.706.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.761.706.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	30.761.706.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.395.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.395.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.395.400.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**265.960.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.960.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	240.960.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.960.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**615.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	510.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.089.904.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	176.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	235.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	235.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675.070.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	675.070.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	675.070.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.350.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.350.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	178.025.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	178.025.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.025.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.959.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	686.959.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	686.959.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**858.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	98.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	580.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	580.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.536.019.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.050.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.690.050.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.690.050.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.844.969.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	11.844.969.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.844.969.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.428.663.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	381.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.214.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	456.214.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	456.214.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.209.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.209.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.949.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	258.949.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.949.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**70.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**70.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	70.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**200.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**200.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	200.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**33.550.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**95.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	95.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**33.455.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	140.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.315.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	33.315.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.991.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002.5.1.4	Belanja Subsidi	324.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**2.150.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**2.150.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.000.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	500.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	650.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**999.054.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**574.054.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	190.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	200.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	200.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.712.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	183.342.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	183.342.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	183.342.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**125.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	125.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**6.791.546.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**6.336.546.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	6.336.546.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.336.546.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.336.546.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**455.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	455.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	455.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002.5.1.5	Belanja Hibah	425.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**10.761.146.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**10.761.146.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.875.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.875.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.233.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.083.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.083.500.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.830.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004.5.1.5	Belanja Hibah	1.355.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.822.646.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.822.646.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.822.646.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**502.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**502.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	477.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	477.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	477.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**60.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**60.000.000**	**-**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
	Jumlah Belanja	**108.871.091.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(104.902.843.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**1.020.490.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.020.490.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.020.490.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**702.716.857.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**275.716.004.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**103.175.104.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.550.104.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.550.104.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	100.550.104.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	475.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.250.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**516.300.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	80.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.682.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.996.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	54.996.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.996.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.622.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	380.622.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.622.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.749.623.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	550.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	68.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.725.223.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	5.725.223.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.725.223.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.461.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.461.400.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.461.400.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.004.338.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.304.338.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	27.304.338.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.304.338.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.508.016.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.268.016.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.268.016.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.268.016.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.100.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**27.371.691.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.743.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	2.743.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.168.597.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.168.597.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004.5.1.1	Belanja Pegawai	24.168.597.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**9.385.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.185.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.185.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.185.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**29.064.057.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24.071.431.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.071.431.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.071.431.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	4.492.626.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.492.626.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.492.626.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**3.371.875.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.001.846.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.001.846.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.001.846.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	70.029.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003.5.1	BELANJA OPERASI	70.029.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.029.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.410.458.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**508.115.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	199.101.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	199.101.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.101.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	144.920.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	144.920.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.920.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	164.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	164.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.094.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**902.343.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	265.600.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	265.600.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.600.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	214.847.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	214.847.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	214.847.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	217.896.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	217.896.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.896.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	204.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	204.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**2.919.557.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**675.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	480.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	90.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	105.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**558.263.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	378.263.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	378.263.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	378.263.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**1.686.294.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1.214.294.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.214.294.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.214.294.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	347.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	347.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**411.638.757.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**410.388.757.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	407.327.057.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	407.327.057.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001.5.1.5	Belanja Hibah	407.077.057.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.061.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.061.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.061.700.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**600.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**650.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	450.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.856.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**1.383.134.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	456.963.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	456.963.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	456.963.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	64.361.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	64.361.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.361.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	345.497.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	345.497.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	345.497.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	516.313.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	516.313.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	516.313.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.472.866.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.321.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.321.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.321.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	151.540.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	151.540.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.540.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**4.640.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**815.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	215.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	215.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**1.845.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.462.912.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.462.912.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.462.912.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	175.870.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	175.870.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.870.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	206.218.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	206.218.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.218.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**1.980.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	875.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	875.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	875.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	180.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.781.081.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**839.176.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	289.850.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	289.850.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	289.850.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	312.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	312.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.326.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	237.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**475.139.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	130.282.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.282.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.282.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.374.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.374.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.374.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.483.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	44.483.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.483.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**466.766.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	130.063.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.063.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.063.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	86.703.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	86.703.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.703.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**1.755.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**1.365.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	575.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	575.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	740.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	740.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	740.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**390.000.000**	**-**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	195.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	195.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	95.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
	Jumlah Belanja	**702.716.857.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(701.696.367.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**1.753.060.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.753.060.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	1.753.060.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**567.582.249.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**231.064.554.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**827.739.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	526.015.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	526.015.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	526.015.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.724.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	251.724.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.724.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.578.455.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.570.007.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.570.007.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	18.570.007.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.008.448.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.448.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.448.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.330.474.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.330.474.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.330.474.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.474.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**586.602.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	436.602.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	436.602.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	436.602.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.019.369.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.485.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	244.485.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.485.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.269.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	187.269.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	187.269.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	136.750.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	136.750.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136.750.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.453.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	780.453.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	780.453.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	170.412.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	170.412.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.412.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.309.086.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.002.240.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	4.002.240.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.002.240.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.048.833.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.048.833.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.833.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.443.188.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	612.974.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	612.974.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	830.214.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	830.214.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.814.825.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.711.325.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.711.325.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	103.500.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.500.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.904.952.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.542.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	179.542.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	179.542.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.474.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.474.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.474.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.047.586.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.047.586.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.047.586.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.203.824.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	23.203.824.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.203.824.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.435.453.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.253.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	596.253.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	596.253.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.865.858.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.865.858.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.865.858.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	86.425.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	86.425.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.425.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.191.084.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	5.191.084.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.191.084.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.695.833.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.695.833.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.695.833.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**150.072.424.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	148.113.423.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001.5.1	BELANJA OPERASI	148.113.423.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	148.113.423.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.392.880.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	566.121.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**336.517.695.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**7.206.440.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.262.440.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.262.440.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.262.440.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	2.944.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.944.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.944.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.210.534.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.210.534.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.210.534.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.210.534.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**12.515.582.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.169.722.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.169.722.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.169.722.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.095.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.095.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.095.860.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**137.039.088.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.939.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.939.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.939.086.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	418.741.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	418.741.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	418.741.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12.781.261.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.781.261.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.781.261.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	117.520.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	117.520.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.520.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**50.243.046.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.461.502.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.461.502.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.461.502.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	38.606.544.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	38.606.544.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.606.544.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**1.152.000.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	1.152.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**101.840.000.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	101.840.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.840.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	101.840.000.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**24.311.005.000**	**-**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.311.005.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.311.005.000	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.311.005.000	-
	Jumlah Belanja	**567.582.249.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(565.829.189.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**13.065.294.070.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.065.294.070.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	5.455.885.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	160.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**262.070.644.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**230.746.052.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**374.757.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.138.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	202.138.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.138.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.619.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	172.619.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.619.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**141.834.433.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.514.175.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	139.514.175.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	114.866.175.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.648.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.209.689.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.209.689.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.209.689.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.569.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	110.569.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.569.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**649.230.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	649.230.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	649.230.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	649.230.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**234.144.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	184.144.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	184.144.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.144.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12.855.022.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	318.076.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	318.076.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.076.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.623.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	344.623.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	344.623.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.107.685.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.107.685.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.107.685.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.884.094.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.884.094.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.884.094.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.333.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	61.333.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.333.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.427.414.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.427.414.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.427.414.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.008.558.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.558.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.558.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.646.089.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.646.089.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.646.089.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	51.150.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	51.150.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.150.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.606.387.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.106.387.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	3.106.387.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.106.387.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.710.738.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.472.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	66.472.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.472.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.052.322.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.052.322.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.052.322.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.181.904.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.181.904.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.181.904.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.410.040.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	44.410.040.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.410.040.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.481.341.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	756.257.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	756.257.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	756.257.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.252.908.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.252.908.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.252.908.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	54.335.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	54.335.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.335.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.220.080.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.080.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.080.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	198.188.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	198.188.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.188.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.090.930.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	2.090.930.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.090.930.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	969.892.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	969.892.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	969.892.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	938.751.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	938.751.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	938.751.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**315.905.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**315.905.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	315.905.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	315.905.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	315.905.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**31.008.687.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**31.008.687.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	850.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	850.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.700.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	520.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	520.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	230.327.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	230.327.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.327.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	332.956.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	332.956.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.956.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.941.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.941.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.941.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	916.030.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	916.030.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	916.030.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.571.581.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	11.571.581.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.571.581.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	723.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	723.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	723.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	369.673.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	369.673.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	369.673.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.503.420.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	3.503.420.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.503.420.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000	-
	Jumlah Belanja	**262.070.644.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**12.803.223.426.000**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**30.240.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.240.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	30.240.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5.01.5.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**41.074.576.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.989.576.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**495.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.008.081.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.391.201.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.391.201.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	20.391.201.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	341.880.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	341.880.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	341.880.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**237.001.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	47.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**334.174.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138.729.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	138.729.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	138.729.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.445.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	195.445.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.445.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.047.492.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.500.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	155.500.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.500.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	850.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.001.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.480.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	61.480.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.480.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	510.511.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	510.511.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	510.511.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**720.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	440.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	440.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.165.478.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.115.478.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.115.478.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.115.478.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.982.350.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	720.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.350.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	338.350.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	338.350.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	34.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.850.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**3.100.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.920.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**450.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.300.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.235.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.915.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	605.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	605.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	710.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	710.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	710.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	330.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1.680.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	655.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	655.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	655.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	475.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	475.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.640.000.000**	**-**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	490.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	490.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	665.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	665.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	665.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	235.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000	-
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	-
	Jumlah Belanja	**41.074.576.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(41.044.336.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**8.198.935.341.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	775.919.450.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	8.521.080.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
			1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan

5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	701.832.870.000	Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	65.565.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.397.415.721.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000	Surat DJPK Kementrian Keuangan RI Nomor: S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.600.170.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	25.600.170.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**6.939.063.376.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**78.751.028.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**685.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	80.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.829.727.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.639.727.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	53.639.727.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	53.639.727.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	215.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	185.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.470.500.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	505.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	505.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	505.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	440.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	440.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.070.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	405.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	405.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.144.810.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	190.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	190.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	954.810.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	954.810.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	954.810.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.402.155.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.760.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.760.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.980.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.980.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.210.395.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.210.395.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210.395.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.668.836.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	73.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	73.500.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.793.940.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.793.940.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.793.940.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.777.596.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.174.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.174.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	1.603.596.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.603.596.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.783.800.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.783.800.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.783.800.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**6.857.812.348.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**6.518.200.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.731.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.731.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.731.200.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.029.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	2.029.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.029.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.642.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.642.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.642.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**607.520.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	125.720.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	125.720.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.720.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	144.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	144.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.600.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**900.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	400.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**3.374.280.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	273.286.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	273.286.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	273.286.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.830.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	59.830.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	59.830.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.624.625.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.624.625.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.624.625.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	682.149.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	682.149.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	682.149.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	292.165.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009.5.1	BELANJA OPERASI	292.165.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.165.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	442.225.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011.5.1	BELANJA OPERASI	442.225.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	442.225.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**6.846.312.348.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008.5.4	BELANJA TRANSFER	2.425.944.120.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008.5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009.5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4.400.368.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010.5.4	BELANJA TRANSFER	4.400.368.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010.5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.500.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.500.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	74.880.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	74.880.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.880.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	223.875.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	223.875.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.875.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	584.864.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	584.864.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	584.864.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	518.381.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	518.381.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	518.381.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	318.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	318.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000	-
	Jumlah Belanja	**6.939.063.376.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**1.259.871.965.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6	**PEMBIAYAAN**	**414.500.000.000**	**-**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	484.500.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	**414.500.000.000**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**724.400.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	724.400.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	14.400.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	710.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**36.244.682.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.372.842.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**306.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	136.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.226.255.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.317.611.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.317.611.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	25.317.611.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	858.644.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	858.644.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	858.644.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**110.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.087.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.087.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	74.087.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.087.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**737.500.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	140.500.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	140.500.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.500.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**375.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008.5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.992.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	710.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	710.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	710.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.248.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.248.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.248.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.000.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	242.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**5.871.840.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.200.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	155.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**675.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	145.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	400.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**3.315.000.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	620.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	620.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	620.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.490.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	160.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0015.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**681.840.000**	**-**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	170.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	41.840.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	41.840.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.840.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000	-
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	-
	Jumlah Belanja	**36.244.682.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(35.520.282.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**22.800.000.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.800.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	3.202.915.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	19.597.085.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**72.408.777.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**45.516.428.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**380.500.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	261.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	261.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.975.423.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.578.023.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.578.023.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	23.578.023.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	77.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	65.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.700.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	54.700.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.700.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**255.000.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	255.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	255.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**77.600.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	77.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	77.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**257.970.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.770.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	233.770.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	233.770.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.253.243.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	400.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.560.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	303.560.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.560.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.987.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	73.987.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.987.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	96.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.750.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.846.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	364.846.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	364.846.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.150.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	31.150.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	514.950.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	514.950.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	514.950.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.421.500.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	993.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	993.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	35.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.393.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.393.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.393.500.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.949.942.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.975.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.975.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.964.942.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.964.942.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.964.942.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.945.250.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	171.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.673.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.673.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.673.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.081.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**26.892.349.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.307.244.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	87.551.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	87.551.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.551.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	97.440.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	97.440.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.440.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.100.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.253.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	22.253.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.253.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**4.262.061.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	125.290.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	125.290.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.290.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	110.922.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.922.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.922.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	318.383.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	318.383.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.383.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	123.334.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	123.334.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.334.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	384.132.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	384.132.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	384.132.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri**	**20.323.044.000**	**-**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	20.000.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	323.044.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	323.044.000	-
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	323.044.000	-
	Jumlah Belanja	**72.408.777.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(49.608.777.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.01 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**17.173.842.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.794.842.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**220.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.300.499.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.955.499.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.955.499.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	8.955.499.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	225.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.500.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**157.508.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.508.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	12.508.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.508.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**487.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**205.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	175.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.599.080.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	473.580.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	473.580.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	473.580.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	166.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.956.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.956.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.956.500.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**711.255.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.255.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	137.255.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137.255.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**3.379.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**1.263.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	380.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	233.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	233.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02	**Invensi dan Inovasi**	**2.116.000.000**	**-**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	223.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	223.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0013.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	396.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	396.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0016.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0020.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	650.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0023.5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0023.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	97.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	97.000.000	-
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0025.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000	-
	Jumlah Belanja	**17.173.842.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(17.173.842.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG
ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4	**PENDAPATAN**	**745.000.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	745.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2	Retribusi Daerah	745.000.000	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5.07.5.07.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**26.244.475.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.512.206.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.735.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.535.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.535.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.535.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.648.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	16.648.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.648.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.776.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.776.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	3.776.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.776.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.506.572.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.433.572.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.433.572.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	9.433.572.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**307.787.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	307.787.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	307.787.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.787.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**130.487.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.271.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	34.271.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.271.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.216.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	96.216.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.216.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.788.997.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.035.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.035.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.035.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.556.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	158.556.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.556.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	436.859.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	436.859.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	436.859.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.967.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	74.967.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	74.967.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	630.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	630.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	397.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.580.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.127.220.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	362.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	362.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	765.220.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	765.220.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.220.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.547.088.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.036.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	87.036.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.036.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.325.052.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.325.052.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.325.052.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.049.320.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.319.720.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.319.720.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.319.720.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	27.500.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	47.100.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	47.100.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.305.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.305.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**4.732.269.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**4.732.269.000**	**-**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.681.080.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.681.080.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.681.080.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.051.189.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.051.189.000	-
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.189.000	-
	Jumlah Belanja	**26.244.475.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(25.499.475.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**36.109.160.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.616.394.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**189.983.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.765.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	144.765.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.765.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.218.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.218.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.218.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.388.628.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.378.628.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.378.628.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	24.378.628.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**208.006.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	208.006.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	208.006.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.006.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**365.819.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.819.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	325.819.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	325.819.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**883.944.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.820.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.820.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.602.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	34.602.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.602.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.350.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	169.350.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.350.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	251.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	251.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.172.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	240.172.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.172.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.500.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	34.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.779.168.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.768.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.768.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.768.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**766.346.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.025.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	380.025.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	380.025.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.010.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	11.010.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.511.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	181.511.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	181.511.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	161.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.300.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.568.089.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**3.703.249.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.246.920.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.246.920.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.246.920.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	982.440.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	982.440.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	982.440.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.278.120.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.278.120.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.278.120.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	195.769.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	195.769.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.769.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**864.840.000**	**-**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	864.840.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	864.840.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	864.840.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.924.677.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**127.180.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	127.180.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	127.180.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.180.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.797.497.000**	**-**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114.520.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	114.520.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	114.520.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.572.219.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.572.219.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.572.219.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.758.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	110.758.000	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.758.000	-
	Jumlah Belanja	**36.109.160.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(36.109.160.000)**	**-**

PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5	**BELANJA**	**326.696.548.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.545.275.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.372.000.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.266.033.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.266.033.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.266.033.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.055.967.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.055.967.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.967.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.867.419.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.496.019.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.496.019.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001.5.1.1	Belanja Pegawai	8.496.019.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**203.500.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	150.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.500.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.218.135.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.135.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	656.135.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	656.135.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**246.031.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.031.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	196.031.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.031.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.848.131.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.941.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	587.941.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	587.941.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.259.190.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.259.190.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.259.190.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**710.059.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	271.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	271.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.059.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	76.059.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.059.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.608.336.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.608.336.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	710.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	710.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	710.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.103.336.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.103.336.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.103.336.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	98.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	15.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	15.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	15.110.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	15.110.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.110.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	56.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	610.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	610.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	610.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**61.299.273.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**61.299.273.000**	**-**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.890.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.133.065.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.133.065.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.133.065.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	645.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	645.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57.425.318.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	57.425.318.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	296.045.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	57.129.273.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**36.626.664.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**36.626.664.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.211.664.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.211.664.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.664.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.065.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.065.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.065.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	34.350.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	34.265.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.373.400.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.373.400.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.173.966.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.173.966.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.173.966.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.169.434.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.169.434.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.169.434.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**207.243.600.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**207.243.600.000**	**-**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	73.661.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	73.661.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.661.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	819.379.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	819.379.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	819.379.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	636.490.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	636.490.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	636.490.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.714.070.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	204.714.070.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.470.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005.5.1.5	Belanja Hibah	204.643.600.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000	-

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	-
	Jumlah Belanja	**326.696.548.000**	**-**
	Surplus / (Defisit)	**(326.696.548.000)**	**-**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN IV: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH

REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA

TAHUN ANGGARAN 2026

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.799.723.744.500**	**1.551.196.214.500**	**-**	**-**	**13.350.919.959.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**7.984.741.844.000**	**440.796.201.000**	**-**	**-**	**8.425.538.045.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02	**Dinas Pendidikan**	**7.984.741.844.000**	**440.796.201.000**	**-**	**-**	**8.425.538.045.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.389.909.931.000**	**6.308.312.000**	**-**	**-**	**5.396.218.243.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.259.167.000	-	-	-	92.259.167.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.279.167.000	-	-	-	91.279.167.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000	-	-	-	800.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.155.662.053.000	-	-	-	5.155.662.053.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.153.515.173.000	-	-	-	5.153.515.173.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.146.880.000	-	-	-	2.146.880.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	867.000.000	-	-	-	867.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	-	-	-	55.000.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	592.000.000	-	-	-	592.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (100.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Cabdin XII (2.00 Dokumen)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	165.000.000	-	-	-	165.000.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	-	-	-	55.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)*	537.500.000	-	-	-	537.500.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	275.000.000	-	-	-	275.000.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	55.000.000	-	-	-	55.000.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	27.493.000	-	-	-	27.493.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	100.007.000	-	-	-	100.007.000
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.220.100.000	51.900.000	-	-	8.272.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	689.500.000	-	-	-	689.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	910.100.000	51.900.000	-	-	962.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	634.000.000	-	-	-	634.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	599.000.000	-	-	-	599.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	228.000.000	-	-	-	228.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.000.000	-	-	-	43.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.341.500.000	-	-	-	1.341.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.825.000.000	-	-	-	2.825.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (97.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	850.000.000	-	-	-	850.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (68.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.288.000	6.256.412.000	-	-	6.416.700.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000	625.000.000	-	-	655.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.288.000	1.184.912.000	-	-	1.195.200.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	26.500.000	-	-	26.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	600.000.000	-	-	700.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	820.000.000	-	-	820.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (24.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII (4.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.318.733.000	-	-	-	127.318.733.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.550.000	-	-	-	79.550.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (5.00 Laporan)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.690.000.000	-	-	-	4.690.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (5.00 Laporan)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.500.000	-	-	-	373.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (5.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.175.683.000	-	-	-	122.175.683.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (15.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (5.00 Laporan)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.885.090.000	-	-	-	4.885.090.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441.790.000	-	-	-	441.790.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	253.000.000	-	-	-	253.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	641.600.000	-	-	-	641.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	91.000.000	-	-	-	91.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.102.300.000	-	-	-	2.102.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	820.000.000	-	-	-	820.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (290.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.400.000	-	-	-	295.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (120.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (374.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (47.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (48.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (60.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (87.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII (30.00 Unit)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2.593.801.913.000**	**434.487.889.000**	**-**	**-**	**3.028.289.802.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	883.447.028.000	198.734.776.000	-	-	1.082.181.804.000
	Angka Putus Sekolah SMA (0.01 Angka)					
	APK SMA (30.32 %)					
	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA (64.45 Angka)					
	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi (76.84 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan (25.00 %)					
	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional (35.89 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (59.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (49.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (80.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (49.71 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (83.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (84.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (68.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (89.17 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (84.19 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (85.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (92.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (95.95 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (80.51 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (87.90 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (88.66 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (98.74 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (88.84 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.61 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (80.50 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (88.30 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (82.77 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (85.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (96.67 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (83.10 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (83.80 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (70.50 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (70.56 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (88.15 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (79.00 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (84.16 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (86.20 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (76.30 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (77.52 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (79.25 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (80.15 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	22.000.000.000	-	-	22.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19.517.962.000	-	-	-	19.517.962.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	-	750.000.000	-	-	750.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11.200.000.000	-	-	-	11.200.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	276.620.844.000	-	-	-	276.620.844.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	558.487.034.000	160.984.776.000	-	-	719.471.810.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (6741.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (6741.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.735.000.000	-	-	-	8.735.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA (0.48 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional (38.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (38980.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA (60.31 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I (1667.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II (1015.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III (1383.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV (1094.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX (2066.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V (1630.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI (1750.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII (1996.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII (1112.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X (1296.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI (1.01 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII (575.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (62.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (65.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (79.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (7.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (66.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (100.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (45.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (62.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (68.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30217.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (41.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (60.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (90.00 Angkatan)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (32.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (43.00 Angka)					
	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (66.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.036.188.000	-	-	-	1.036.188.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Bersertifikat Kompetensi (20750.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.605.540.620.000	217.266.749.000	-	-	1.822.807.369.000
	Angka Putus Sekolah SMK (0.03 Angka)					
	APK SMK (53.75 %)					
	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja (67.77 Angka)					
	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK (60.86 Angka)					
	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan (25.00 %)					
	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi (62.13 %)					
	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian (1.74 %)					
	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional (58.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (59.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (49.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (80.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (49.71 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (83.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (84.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (68.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (89.17 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (84.19 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (85.15 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (92.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (95.95 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (80.51 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (87.90 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (88.66 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (98.74 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (88.84 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.61 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (80.50 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (88.30 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (82.77 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (85.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (96.67 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (83.10 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (83.80 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (70.50 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (70.56 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (88.15 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (79.00 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (84.16 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (86.20 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (76.30 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (77.52 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (79.25 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (80.15 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (77.90 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (75.16 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (72.70 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (62.00 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (82.87 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (75.50 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (68.49 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (46.86 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (43.33 %)					
	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (65.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	13.115.731.000	-	-	13.115.731.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30.000.000	400.000.000	-	-	430.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	-	750.000.000	-	-	750.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16.797.200.000	-	-	-	16.797.200.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	52.000.000.000	-	-	52.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	65.045.734.000	1.588.766.000	-	-	66.634.500.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	262.332.616.000	-	-	-	262.332.616.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.219.828.458.000	149.412.252.000	-	-	1.369.240.710.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (11901.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	-	-	-	300.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (11901.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.475.000.000	-	-	-	25.475.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	2.357.673.000	-	-	-	2.357.673.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi (29060.00 Orang)					
	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian (815.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	-	-	-	5.100.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.225.278.000	-	-	-	4.225.278.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK (0.50 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional (31.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (57253.00 Angka)					
	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI (189837.00 Siswa)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I (1716.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II (1270.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III (2800.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV (1412.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX (3849.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V (2820.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI (3113.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII (2249.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII (1471.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X (2263.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI (1.99 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII (1195.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (10.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (105.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (112.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (109.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (123.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (146.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I (118.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II (120.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III (308.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX (528.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI (185.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X (180.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI (90.00 Angka)					
	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII (1.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (123.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (85.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (102.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (58.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (157.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (30843.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (116.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (81.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (123.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (17.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (109.00 Angka)					
	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (150.00 Angka)					
	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian (225190.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK (54.75 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	318.661.000	-	-	-	318.661.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi (29060.00 Orang)					
	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian (815.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	104.814.265.000	18.486.364.000	-	-	123.300.629.000
	Angka Putus Sekolah SLB (0.04 Angka)					
	APK SLB (91.74 %)					
	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB (65.61 Angka)					
	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi (57.72 %)					
	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan (25.00 %)					
	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional (54.05 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (59.70 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (49.83 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (80.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (49.71 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (83.18 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (84.50 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.90 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (68.00 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (89.17 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (84.19 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (85.15 %)					
	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (92.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (95.95 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (80.51 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (87.90 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (88.66 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (98.74 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (88.84 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (89.61 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (80.50 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (88.30 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (82.77 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (85.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (96.67 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (83.10 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (83.80 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (70.50 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (70.56 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (88.15 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (79.00 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (84.16 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (86.20 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (76.30 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (77.52 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (79.25 %)					
	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (80.15 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	-	500.000.000	-	-	500.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV (68.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.080.000.000	-	-	-	1.080.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	-	450.000.000	-	-	450.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I (162.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III (111.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV (68.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX (248.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V (454.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII (1060.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII (147.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X (58.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI (40.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII (96.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (32.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (8.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (3.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (11.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (314.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (3.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (4.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	26.125.133.000	-	-	-	26.125.133.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I (162.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III (111.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV (68.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX (248.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V (454.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII (1060.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII (147.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X (58.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI (40.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII (96.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (11.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (32.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (8.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (3.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (314.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (3.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (4.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (5.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	71.695.466.000	11.036.364.000	-	-	82.731.830.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (712.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan (712.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.900.000.000	-	-	-	2.900.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I (162.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III (111.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV (68.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX (248.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V (454.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII (1060.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII (147.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X (58.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI (40.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII (96.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (32.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (25.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (8.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (3.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (14.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (314.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (3.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (4.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (5.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	223.666.000	-	-	-	223.666.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Bersertifikat Kompetensi (1623.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB (0.94 Angka)					
	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional (15.00 Angka)					
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah (4710.00 Angka)					
	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I (162.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II (55.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III (111.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV (68.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX (248.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V (454.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI (361.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII (1060.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII (147.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X (58.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI (40.00 Angka)					
	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII (96.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I (1.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V (32.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII (24.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X (8.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI (3.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V (314.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI (25.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X (3.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI (4.00 Angka)					
	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII (5.00 Angka)					
	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB (52.78 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**330.000.000**	**-**	**-**	**-**	**330.000.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (75.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (87.92 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (75.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (75.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (55.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4 (170.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I (225.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II (125.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III (103.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX (225.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V (182.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI (169.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII (141.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII (213.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X (225.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI (156.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII (215.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (75.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (100.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (87.92 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (75.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (75.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (55.00 %)					
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4 (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I (24.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II (2.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX (14.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V (32.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI (25.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII (24.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII (11.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X (9.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI (4.00 Angka)					
	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII (5.00 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**400.000.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Indeks Distribusi Guru SLB (0.25 Angka)					
	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK (0.43 Angka)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus yang didistribusikan (251.00 Orang)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah yang didistribusikan (2265.00 Orang)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**300.000.000**	**-**	**-**	**-**	**300.000.000**
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (60.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (94.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (70.36 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (60.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (12.40 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (93.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (60.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (50.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII (6.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin 4 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin I (6.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin II (4.00 Angka)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin III (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin IX (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin V (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VI (12.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VII (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VIII (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin X (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin XI (2.00 Dokumen)					
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII (25.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I (74.20 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II (2.57 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX (25.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V (12.40 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI (91.80 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII (25.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X (100.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI (50.00 %)					
	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.01.1.01.0.00.0.00.02.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin 4 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin I (1.00 Angka)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin II (1.00 Angka)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin IX (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan khusus Cabdin V (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VI (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VII (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VIII (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin X (1.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII (1.00 Dokumen)					
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**2.971.063.969.000**	**898.346.311.000**	**-**	**-**	**3.869.410.280.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01	**Dinas Kesehatan**	**2.971.063.969.000**	**898.346.311.000**	**-**	**-**	**3.869.410.280.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.515.022.067.000**	**803.973.199.000**	**-**	**-**	**3.318.995.266.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.083.000	-	-	-	344.083.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan (94.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (96.94 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.835.000	-	-	-	218.835.000
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (94.00 %)					
	persentase dokumen perencanaan & evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.248.000	-	-	-	125.248.000
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (94.00 %)					
	persentase dokumen perencanaan & evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	600.951.733.000	-	-	-	600.951.733.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	590.370.913.000	-	-	-	590.370.913.000
	jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 %)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
	persentase ketercapaian tata kelola anggaran,perbendaharaan,dan akuntansi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.525.820.000	-	-	-	10.525.820.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	persentase ketercapaian tata kelola anggaran,perbendaharaan,dan akuntansi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 %)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	376.800.000	-	-	-	376.800.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	268.000.000	-	-	-	268.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	108.800.000	-	-	-	108.800.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	-	-	-	35.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Layanan (100.00 %)					
	Persentasi layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.520.430.000	-	-	-	3.520.430.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.052.000	-	-	-	244.052.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.519.000	-	-	-	217.519.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.639.000	-	-	-	173.639.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	492.721.000	-	-	-	492.721.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	401.279.000	-	-	-	401.279.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	507.088.000	-	-	-	507.088.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.425.512.000	-	-	-	1.425.512.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.620.000	-	-	-	57.620.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai Standar Layanan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.000.000	640.000.000	-	-	1.020.000.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	280.000.000	40.000.000	-	-	320.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Paket)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	500.000.000	-	-	500.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Paket)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	100.000.000	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Paket)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Paket)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.698.901.000	-	-	-	19.698.901.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.271.000	-	-	-	164.271.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.514.325.000	-	-	-	7.514.325.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.200.000	-	-	-	141.200.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.879.105.000	-	-	-	11.879.105.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (4.00 Laporan)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.004.323.000	100.000.000	-	-	4.104.323.000
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan (90.50 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.045.825.000	-	-	-	1.045.825.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.020.000	-	-	-	753.020.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	234.000.000	100.000.000	-	-	334.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeljharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)*	1.231.170.000	-	-	-	1.231.170.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)* Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.200.000	-	-	-	568.200.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (56.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (10.00 Unit)* Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.108.000	-	-	-	134.108.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.885.710.797.000	803.233.199.000	-	-	2.688.943.996.000
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo (37.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (33.01 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (40.88 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH (49.27 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi (82.20 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA (52.00 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (91.00 %)					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.885.710.797.000	803.233.199.000	-	-	2.688.943.996.000
	Cost recovery Rate (CRR) Parsial RSUD dr. Adhyatma, MPH (93.42 %)					
	Cost Recovery Rate (CRR) Parsial RSUD Dr. MOEWARDI (100.00 %)					
	CRR Parsial RSJD Dr. Amino Gondohutomo (93.00 %)					
	CRR Parsial RSJD Dr. Arif Zainudin (95.30 %)					
	CRR Parsial RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (89.64 %)					
	CRR Parsial RSUD dr. Rehatta (90.00 %)					
	Persentase peningkatan pendapatan RS (13.27 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi CRR Parsial RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (101.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**452.878.465.000**	**94.373.112.000**	**-**	**-**	**547.251.577.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	67.386.137.000	93.973.112.000	-	-	161.359.249.000
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar (72.82 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna (98.27 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar (60.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar (72.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (60.00 %)					
	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr. Moewardi (90.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (60.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD Dr. Moewardi (90.00 %)					
	Persentase Rumah Sakit dengan peningkatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uro Nefrologi/KJSU sesuai pedoman (Keputusan Menteri Kesehatan) (24.00 %)					
	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (85.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.027.500.000	1.000.000.000	-	-	3.027.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (27.00 Unit)					
	Jumlah RS dengan layanan kJSU (10.00 Unit)					
	Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 2:1.000 (1.50 %)					
	Persentase kabupaten/kota yg memiliki kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas (51.43 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (10.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (30.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS) (2.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (70.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (72.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (60.00 %)					
	Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas (40.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7.815.215.000	71.500.000.000	-	-	79.315.215.000
	Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (27.00 Unit)					
	Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					
	Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (85.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (10.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (30.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS) (2.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (70.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (72.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit (100.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS (100.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan utuk mendukung pelayana unggula dan pelayanan RS di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.moewardi Surakarta (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayana Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan pelayaan rumah sakit laiya di RSUD Margoo Soekarjo (60.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan BHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat, BHP-BMHP RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					
	Persentase penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (60.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase peyediaan Sarana di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	102.166.000	-	-	-	102.166.000
	Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (27.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (72.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	426.888.000	573.112.000	-	-	1.000.000.000
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	907.891.000	-	-	-	907.891.000
	Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (27.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (85.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (10.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (30.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS) (2.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (70.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (72.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	270.000.000	-	-	-	270.000.000
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar (85.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar (85.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	20.900.000.000	-	-	20.900.000.000
	Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (85.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit (100.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan alat kesehatan utuk mendukung pelayana unggula dan pelayanan RS di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.moewardi Surakarta (60.00 %)					
	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayana Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan pelayaan rumah sakit laiya di RSUD Margoo Soekarjo (60.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan BHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat, BHP-BMHP RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (60.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase peyediaan Sarana di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	55.336.477.000	-	-	-	55.336.477.000
	Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (27.00 Unit)					
	Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					
	Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" (100.00 %)					
	Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (85.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar (85.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar (85.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (10.00 %)					
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (30.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS) (2.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 Unit)					
	Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (70.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan (72.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit (100.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS (100.00 %)					
	Persentase penyediaan alat kesehatan utuk mendukung pelayana unggula dan pelayanan RS di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.moewardi Surakarta (60.00 %)					
	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayana Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan pelayaan rumah sakit laiya di RSUD Margoo Soekarjo (60.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan BHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat, BHP-BMHP RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP (100.00 %)					
	Persentase penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (90.00 %)					
	Persentase penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi (60.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan (100.00 %)					
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan (100.00 %)					
	Persentase peyediaan Sarana di RSUD Margono Soekarjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS (100.00 %)					
	Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan (100.00 %)					
	Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	380.980.711.000	-	-	-	380.980.711.000
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (90.00 %)					
	Angka Kematian Bayi (AKB) (10.30 1.000/KH)					
	Angka kematian Dengue (0.50 %)					
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (92.00 %)					
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (40.00 %)					
	Insidensi Hepatitis B (1.10 %)					
	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV) (8.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali) (35.00 %)					
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar (72.82 %)					
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian (35.00 %)					
	Persentase Kabupatan/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna (85.71 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana (83.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu (37.14 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana					
	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran (71.42 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran (42.85 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (8.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% (71.42 %)					
	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (25.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan (50.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar (51.19 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok (42.86 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja (55.00 %)					
	Persentase lanjut usia yang mandiri (91.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif (74.28 %)					
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun (60.00 %)					
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase penurunan kasus kematian ibu (2.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (100.00 %)					
	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (28.57 %)					
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (59.00 %)					
	Prevalensi wasting balita (6.70 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	358.654.000	-	-	-	358.654.000
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (62.85 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target (42.86 %)					
	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR					
	Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan (42.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (80.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% (31.40 %)					
	Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (5.71 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % (31.43 %)					
	Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% (62.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% (71.43 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat (57.10 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat (20.00 %)					
	Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (20.00 %)					
	Persentase Kab/kota sehat (45.71 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% (62.80 %)					
	Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (5.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50% (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (71.42 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana (83.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas (31.43 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit (70.00 %)					
	Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (42.85 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue (50.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	469.570.000	-	-	-	469.570.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50% (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (71.42 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (42.85 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	32.000.000	-	-	-	32.000.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	503.086.000	-	-	-	503.086.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (71.42 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (42.85 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (62.85 %)					
	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target (42.86 %)					
	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR					
	Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan (42.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (80.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% (31.40 %)					
	Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (5.71 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % (31.43 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% (62.90 %)					
	Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% (71.43 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat (57.10 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat (20.00 %)					
	Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (20.00 %)					
	Persentase Kab/kota sehat (45.71 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% (62.80 %)					
	Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (5.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar (20.00 %)					
	persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% (48.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana (83.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit (70.00 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue (50.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.000.000	-	-	-	21.000.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.677.412.000	-	-	-	1.677.412.000
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (62.85 %)					
	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target (42.86 %)					
	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR					
	Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan (42.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (80.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% (31.40 %)					
	Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (5.71 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % (31.43 %)					
	Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% (62.90 %)					
	Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% (71.43 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat (57.10 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat (20.00 %)					
	Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (20.00 %)					
	Persentase Kab/kota sehat (45.71 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% (62.80 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (5.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (57.14 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (71.42 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% (28.57 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana (83.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit (70.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan (100.00 %)					
	Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (100.00 %)					
	Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular kusta (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan kesehatan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten (30.00 %)					
	Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (42.85 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue (50.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa (28.57 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	79.500.000	-	-	-	79.500.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (100.00 %)					
	Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan (100.00 %)					
	Persentase penyediaan layanan kesehatan (100.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	372.662.615.000	-	-	-	372.662.615.000
	Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif (77.40 %)					
	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (40.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	709.990.000	-	-	-	709.990.000
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (62.85 %)					
	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target (42.86 %)					
	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target (2.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR					
	Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan (42.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (80.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% (31.40 %)					
	Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (5.71 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % (31.43 %)					
	Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% (62.90 %)					
	Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% (71.43 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat (57.10 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat (20.00 %)					
	Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (20.00 %)					
	Persentase Kab/kota sehat (45.71 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% (62.80 %)					
	Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (5.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar (20.00 %)					
	persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana (83.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit (70.00 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue (50.00 %)					
	Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	356.800.000	-	-	-	356.800.000
	Angka kematian neonatal (6.80 1.000/KH)					
	Cakupan skrining Bayi Baru Lahir (40.00 %)					
	Persentase ANC 6 Kali (K6) (82.00 %)					
	Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (55.00 %)					
	Persentase depresi yang medapatkan layanan (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (51.19 %)					
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (60.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal (51.40 %)					
	Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar (92.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik (71.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar (17.14 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik (37.14 Dokumen)					
	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (40.00 %)					
	Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91.00 %)					
	Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna (94.87 %)					
	prevalensi anemia pada ibu hamil (25.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	prevalensi anemia pada remaja putri (23.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.356.500.000	-	-	-	1.356.500.000
	Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif (77.40 %)					
	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (40.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (62.85 %)					
	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target (42.86 %)					
	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR					
	Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan (42.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (80.00 %)					
	Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% (31.40 %)					
	Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (5.71 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % (31.43 %)					
	Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% (62.90 %)					
	Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% (71.43 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat (57.10 %)					
	Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat (20.00 %)					
	Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (20.00 %)					
	Persentase Kab/kota sehat (45.71 %)					
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% (62.80 %)					
	Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (5.71 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% (48.57 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) (20.00 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana (83.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan (25.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (28.57 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas (31.43 %)					
	Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit (70.00 %)					
	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.248.584.000	-	-	-	2.248.584.000
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	225.000.000	400.000.000	-	-	625.000.000
	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (63.05 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	225.000.000	400.000.000	-	-	625.000.000
	Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSUD prof DR.Margono Soekarjo (1.00 Paket)					
	Persentase fasilitas kesehatan yang terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (76.16 %)					
	Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional (17.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.286.617.000	-	-	-	4.286.617.000
	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi (28.00 %)					
	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi (25.00 %)					
	Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang prasarana sarana yang sesuai standar di RSUD Dr. Moewardi (33.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna (98.27 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar (54.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar (60.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar (100.00 %)					
	Rasio Tempat Tidur terhadap populasi (1.50 Angka)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	135.830.000	-	-	-	135.830.000
	Persentase Faskes Lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna (95.20 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)sesuai standar (42.86 %)					
	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon (AMPSR) sesuai standar (56.25 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.150.787.000	-	-	-	4.150.787.000
	Jumlah Instansi yang memiliki MOU dengan RSUD Margono Soekarjo (50.00 Instansi)					
	Persentase Faskes Lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna (95.20 %)					
	Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi yang sesuai standar (33.00 %)					
	persentase indikator mutu pelayanan penunjang sarpras medis dan non medis yang sesuai dengan standar RS (33.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)sesuai standar (42.86 %)					
	Persentase pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan di Rumah Sakit sesuai target (100.00 %)					
	Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten (85.00 %)					
	Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)					
	Persentase Penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase Peningkatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar (54.00 %)					
	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon (AMPSR) sesuai standar (56.25 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian idikator mutunya sesuai target (100.00 %)					
	persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian indikator mutunya sesuai target (30.00 %)					
	Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator capaian mutunya sesuai target (100.00 %)					
	persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target (30.00 %)					
	Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target (80.00 %)					
	Persentase unit kerja pelayanan penunjang sarpras medis yang capaian indikator mutunya mencapai target (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.928.215.000**	**-**	**-**	**-**	**1.928.215.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	273.215.000	-	-	-	273.215.000
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (2.85 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	268.025.000	-	-	-	268.025.000
	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Mamusia Kesehatan sesuai dengan standart (66.17 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai dengan standar (67.16 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.190.000	-	-	-	5.190.000
	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Mamusia Kesehatan sesuai dengan standart (66.17 %)					
	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai dengan standar (67.16 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.655.000.000	-	-	-	1.655.000.000
	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas (99.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo (86.72 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (60.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (98.50 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. ADHYATMA, MPH (86.95 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Dr. Moewardi (34.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. REHATTA (40.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (30.00 %)					
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (2.85 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Jumlah jenis pelatihan internal dan eksternal yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah Jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah jenis pendidikan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi (11.00 Kegiatan)					
	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi (5.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kompetensi (5.00 Kegiatan)					
	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai program prioritas nasional yang diselenggarakan Bapelkes (80.00 %)					
	Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan (80.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	405.000.000	-	-	-	405.000.000
	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai program prioritas nasional yang diselenggarakan Bapelkes (80.00 %)					
	Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan (80.00 %)					
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten (90.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**75.000.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (30.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK (87.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.160.222.000**	**-**	**-**	**-**	**1.160.222.000**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	824.000.000	-	-	-	824.000.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat (34.28 %)					
	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam (100.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo (10.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (4.44 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH (5.24 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Dr. Moewardi (3.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. REHATTA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Prof Dr Margono SoekarjoRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (100.00 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	824.000.000	-	-	-	824.000.000
	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS (4.00 Kegiatan)					
	Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS (765.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh rumah sakit (1175.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Moewardi (4405.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Rehatta (3.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Adhyatma, MPH (1105.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (3.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (57.14 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	336.222.000	-	-	-	336.222.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat (34.28 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo (10.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN (100.00 %)					
	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (5.58 %)					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	336.222.000	-	-	-	336.222.000
	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan Rumah Sakit (5.00 Kegiatan)					
	Jumlah pemerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh rumah sakit (14380.00 Orang)					
	Jumlah penerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh RS (765.00 Orang)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye pembudayaan hidup sehat (51.42 %)					
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**432.708.959.500**	**206.624.937.500**	**-**	**-**	**639.333.897.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**432.708.959.500**	**206.624.937.500**	**-**	**-**	**639.333.897.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**184.240.821.000**	**2.490.609.000**	**-**	**-**	**186.731.430.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.121.000.000	-	-	-	1.121.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	571.000.000	-	-	-	571.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.626.945.000	-	-	-	137.626.945.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.578.493.000	-	-	-	134.578.493.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (59.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.435.280.000	-	-	-	2.435.280.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (59.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	613.172.000	-	-	-	613.172.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (59.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.271.324.000	241.116.000	-	-	1.512.440.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.271.324.000	241.116.000	-	-	1.512.440.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (14.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (20.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (25.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (35.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (5.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (7.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.169.000	-	-	-	300.169.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.700.000	-	-	-	56.700.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.469.000	-	-	-	243.469.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.131.514.000	-	-	-	6.131.514.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	275.899.000	-	-	-	275.899.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	751.493.000	-	-	-	751.493.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	776.848.000	-	-	-	776.848.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	484.319.000	-	-	-	484.319.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	81.520.000	-	-	-	81.520.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.750.000	-	-	-	32.750.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.941.826.000	-	-	-	2.941.826.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	357.360.000	-	-	-	357.360.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	429.499.000	-	-	-	429.499.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.577.473.000	-	-	1.577.473.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.577.473.000	-	-	1.577.473.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (82.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.727.881.000	-	-	-	27.727.881.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.186.000	-	-	-	95.186.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (55.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.110.834.000	-	-	-	5.110.834.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (55.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.521.861.000	-	-	-	22.521.861.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (26.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (55.00 Laporan)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.061.988.000	672.020.000	-	-	10.734.008.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.929.180.000	-	-	-	3.929.180.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (216.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (51.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (62.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (64.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (712.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (73.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (88.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.852.550.000	672.020.000	-	-	4.524.570.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (216.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (51.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (62.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (64.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (712.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (73.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (88.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.280.258.000	-	-	-	2.280.258.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (216.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (37.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (51.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (62.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (64.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (712.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (72.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (73.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (74.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (88.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**38.025.318.000**	**10.595.984.000**	**-**	**-**	**48.621.302.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.349.950.000	10.055.508.000	-	-	24.405.458.000
	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi (2688058.55 m3)					
	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik (58.97 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto (100.00 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo (67.35 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna (56.96 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal (35.08 %)					
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto (76.50 %)					
	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna (50.10 %)					
	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal (53.00 %)					
	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik (52.38 %)					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	-	-	-	250.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama (2.00 Dokumen)					
	Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau (100.00 %)					
	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun (101.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.759.106.000	-	-	-	3.759.106.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (81.48 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	487.974.000	-	-	-	487.974.000
	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0125	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama (2.00 Dokumen)					
	Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau (100.00 %)					
	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun (101.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	44.492.000	9.955.508.000	-	-	10.000.000.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	4.852.312.000	100.000.000	-	-	4.952.312.000
	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun (4.00 Km)					
	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA (1.00 Kegiatan)					
	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir (0.50 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (81.48 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	2.606.066.000	-	-	-	2.606.066.000
	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA (5.00 Dokumen)					
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (100.00 %)					
	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA (81.48 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.675.368.000	540.476.000	-	-	24.215.844.000
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo (69.30 Angka)					
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna (69.64 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal (65.71 Angka)					
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto (75.90 Angka)					
	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi (68.45 %)					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	24.524.000	540.476.000	-	-	565.000.000
	Jumlah DI yang direhab (2.00 Daerah)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	23.113.818.000	-	-	-	23.113.818.000
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA (60.30 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA (67.05 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA (73.01 %)					
	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA (73.45 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah DI yang direhab (2.00 Daerah)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	187.026.000	-	-	-	187.026.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah DI yang direhab (2.00 Daerah)					
	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**9.413.637.000**	**13.599.672.000**	**-**	**-**	**23.013.309.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	9.413.637.000	13.599.672.000	-	-	23.013.309.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (100.00 %)					
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (31.02 %)					
	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (42.60 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	7.808.462.000	-	-	-	7.808.462.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik) (12.00 Liter/Detik)					
	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga) (109004.00 Sambungan Rumah (SR))					
	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional (154181.00 Sambungan Rumah (SR))					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	13.599.672.000	-	-	13.599.672.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik) (12.00 Liter/Detik)					
	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga) (109004.00 Sambungan Rumah (SR))					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional (154181.00 Sambungan Rumah (SR))					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik) (12.00 Liter/Detik)					
	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga) (109004.00 Sambungan Rumah (SR))					
	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional (154181.00 Sambungan Rumah (SR))					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.355.175.000	-	-	-	1.355.175.000
	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik) (12.00 Liter/Detik)					
	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga) (109004.00 Sambungan Rumah (SR))					
	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional (154181.00 Sambungan Rumah (SR))					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**11.770.900.000**	**-**	**-**	**-**	**11.770.900.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.770.900.000	-	-	-	11.770.900.000
	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.325.900.000	-	-	-	11.325.900.000
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit) (6.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	445.000.000	-	-	-	445.000.000
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit) (6.00 Unit)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.793.451.000**	**-**	**-**	**-**	**2.793.451.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.793.451.000	-	-	-	2.793.451.000
	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga) (1746439.00 Rumah Tangga)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.693.451.000	-	-	-	2.693.451.000
	Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga) (1746439.00 Rumah Tangga)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1.961.642.000**	**11.508.474.000**	**-**	**-**	**13.470.116.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.961.642.000	11.508.474.000	-	-	13.470.116.000
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis (11.17 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	109.668.000	-	-	-	109.668.000
	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi) (115.00 Lokasi)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.851.974.000	11.508.474.000	-	-	13.360.448.000
	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi) (115.00 Lokasi)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**181.365.278.500**	**168.424.198.500**	**-**	**-**	**349.789.477.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	181.365.278.500	168.424.198.500	-	-	349.789.477.000
	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor (1189.63 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (100.00 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (75.41 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (73.40 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (70.53 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (50.84 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (64.59 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (65.54 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (59.50 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (59.12 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap (95.37 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang (94.17 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati (92.03 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi (91.36 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang (94.95 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta (92.25 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal (95.70 %)					
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo (94.11 %)					
	Persentase Panjang Jalan yang Dileger (59.69 %)					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan (99.81 %)					
	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan (100.00 %)					
	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi (19.67 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	10.560.000	24.337.600.000	-	-	24.348.160.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (163.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (173.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (178.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (233.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (246.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (320.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal (290.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (154.00 Unit)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap (155.24 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang (190.93 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati (175.49 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (195.28 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang (195.10 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta (277.64 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal (223.71 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (146.12 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (196.33 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (244.96 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (228.99 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (350.96 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (286.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (383.74 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (359.80 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (232.62 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.275.000.000	3.105.000.000	-	-	4.380.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (6.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM) (1456.52 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (6.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM) (1456.52 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	380.000.000	-	-	-	380.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (6.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM) (1456.52 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	161.619.722.000	716.400.000	-	-	162.336.122.000
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (163.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (173.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (178.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (233.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (246.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (320.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal (290.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (154.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Peralatan yang Tersedia (1142.00 Unit)					
	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat) (1430.00 Sertifikat)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap (155.24 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang (190.93 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati (175.49 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (195.28 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang (195.10 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta (277.64 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal (223.71 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (146.12 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (196.33 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (244.96 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (228.99 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (350.96 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (286.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (383.74 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (359.80 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (232.62 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	104.520.096.000	-	-	104.520.096.000
	Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (4.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor (15.00 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	-	3.982.000.000	-	-	3.982.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (163.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (173.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (178.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (233.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (246.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (320.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal (290.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (154.00 Unit)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap (155.24 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang (190.93 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati (175.49 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (195.28 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang (195.10 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta (277.64 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal (223.71 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (146.12 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (196.33 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (244.96 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (228.99 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (350.96 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (286.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (383.74 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (359.80 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (232.62 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
	Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (4.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor (15.00 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	-	28.140.000.000	-	-	28.140.000.000
	Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (4.00 Dokumen)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor (15.00 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.420.342.000	-	-	-	15.420.342.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap (163.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang (173.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati (178.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi (233.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang (246.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta (320.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal (290.00 Unit)					
	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo (154.00 Unit)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap (155.24 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang (190.93 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati (175.49 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (195.28 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang (195.10 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta (277.64 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal (223.71 Km)					
	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (146.12 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap (196.33 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang (244.96 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati (228.99 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi (350.96 Km)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang (286.82 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta (383.74 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal (359.80 Km)					
	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo (232.62 Km)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	1.159.654.500	1.623.102.500	-	-	2.782.757.000
	Jumlah Peralatan yang Tersedia (1142.00 Unit)					
	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat) (1430.00 Sertifikat)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**2.140.224.000**	**6.000.000**	**-**	**-**	**2.146.224.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.397.224.000	-	-	-	1.397.224.000
	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi (100.00 %)					
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi (49.31 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	115.000.000	-	-	-	115.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	469.537.000	-	-	-	469.537.000
	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	146.224.000	-	-	-	146.224.000
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (4.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	666.463.000	-	-	-	666.463.000
	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N (3.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	591.000.000	6.000.000	-	-	597.000.000
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi (49.31 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	538.000.000	6.000.000	-	-	544.000.000
	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	53.000.000	-	-	-	53.000.000
	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	152.000.000	-	-	-	152.000.000
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi (49.31 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.000.000	-	-	-	28.000.000
	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	124.000.000	-	-	-	124.000.000
	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**997.688.000**	**-**	**-**	**-**	**997.688.000**
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota (39.87 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (9.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	300.000.000	-	-	-	300.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program (58.86 %)					
	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (100.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	147.389.000	-	-	-	147.389.000
	Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	152.611.000	-	-	-	152.611.000
	Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	397.688.000	-	-	-	397.688.000
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto (100.00 %)					
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang (42.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (52.00 %)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	290.545.000	-	-	-	290.545.000
	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA (1.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	62.789.000	-	-	-	62.789.000
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (2.00 Dokumen)					
1.03.1.03.0.00.0.00.14.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	44.354.000	-	-	-	44.354.000
	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (2.00 Dokumen)					
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**39.560.871.000**	**250.000.000**	**-**	**-**	**39.810.871.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**39.560.871.000**	**250.000.000**	**-**	**-**	**39.810.871.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.466.548.000**	**-**	**-**	**-**	**19.466.548.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	839.389.000	-	-	-	839.389.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	497.234.000	-	-	-	497.234.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (20.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.155.000	-	-	-	292.155.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (20.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (20.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (20.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.844.944.000	-	-	-	13.844.944.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.368.944.000	-	-	-	13.368.944.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)*	386.000.000	-	-	-	386.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)*	170.000.000	-	-	-	170.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)*	155.000.000	-	-	-	155.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)*	62.305.000	-	-	-	62.305.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-	-	-	15.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	-	-	-	11.641.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	-	-	-	15.664.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.000.000	-	-	-	1.115.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	-	-	-	33.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	-	-	-	28.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	13.000.000	-	-	-	13.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	12.000.000	-	-	-	12.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	78.000.000	-	-	-	78.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	630.000.000	-	-	-	630.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	21.000.000	-	-	-	21.000.000
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.830.515.000	-	-	-	2.830.515.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	-	-	-	2.325.515.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.395.000	-	-	-	604.395.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	-	-	-	89.395.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	-	-	-	13.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	-	-	-	42.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (294.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.755.000.000**	**90.000.000**	**-**	**-**	**12.845.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	170.000.000	-	-	-	170.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan (0.47 %)					
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (16.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (16.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	130.000.000	-	-	-	130.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.963.000.000	-	-	-	10.963.000.000
	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan (0.47 %)					
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (16.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.635.000.000	-	-	-	1.635.000.000
	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (111.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi (20.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (100.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.008.000.000	-	-	-	4.008.000.000
	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (111.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi (20.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (100.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	5.320.000.000	-	-	-	5.320.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (111.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi (20.00 Unit)					
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (100.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.492.000.000	90.000.000	-	-	1.582.000.000
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (16.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1.492.000.000	90.000.000	-	-	1.582.000.000
	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (10000.00 Unit)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.106.323.000**	**160.000.000**	**-**	**-**	**3.266.323.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.327.300.000	70.000.000	-	-	1.397.300.000
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (100.00 %)					
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (14.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	705.000.000	70.000.000	-	-	775.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	142.500.000	-	-	-	142.500.000
	Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (7.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	479.800.000	-	-	-	479.800.000
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (2.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.779.023.000	90.000.000	-	-	1.869.023.000
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (14.90 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.520.000	-	-	-	14.520.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (2.00 Laporan)					
	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (100.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	81.950.000	90.000.000	-	-	171.950.000
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (2.00 Laporan)					
	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (100.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.682.553.000	-	-	-	1.682.553.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (2.00 Laporan)					
	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (100.00 Ha)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.663.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.663.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.663.000.000	-	-	-	2.663.000.000
	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan (7.69 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman (1.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.638.000.000	-	-	-	2.638.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman (1.00 Laporan)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**370.000.000**	**-**	**-**	**-**	**370.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	370.000.000	-	-	-	370.000.000
	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan (6.84 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	370.000.000	-	-	-	370.000.000
	Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan (50.00 Orang)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**270.000.000**	**-**	**-**	**-**	**270.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	270.000.000	-	-	-	270.000.000
	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	270.000.000	-	-	-	270.000.000
	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (2.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**500.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	375.000.000	-	-	-	375.000.000
	Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi (1.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**430.000.000**	**-**	**-**	**-**	**430.000.000**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	430.000.000	-	-	-	430.000.000
	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (100.00 %)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	365.000.000	-	-	-	365.000.000
	Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria (3.00 Dokumen)					
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria (3.00 Dokumen)					
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**42.483.545.000**	**448.457.000**	**-**	**-**	**42.932.002.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**22.187.101.000**	**348.457.000**	**-**	**-**	**22.535.558.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.394.411.000**	**348.457.000**	**-**	**-**	**17.742.868.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.365.000	-	-	-	152.365.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.305.000	-	-	-	103.305.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.060.000	-	-	-	44.060.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	-	-	-	2.500.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	-	-	-	2.500.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.148.333.000	-	-	-	13.148.333.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.333.000	-	-	-	12.846.333.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	-	-	-	282.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (13.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.835.000	-	-	-	415.835.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.835.000	-	-	-	130.835.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	35.000.000	-	-	-	35.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	250.000.000	-	-	-	250.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)*	655.707.000	-	-	-	655.707.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	75.400.000	-	-	-	75.400.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	45.000.000	-	-	-	45.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.155.000	-	-	-	95.155.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	-	-	-	320.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.152.000	-	-	-	40.152.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.559.171.000	-	-	-	2.559.171.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	-	-	-	330.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.227.171.000	-	-	-	2.227.171.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.000.000	348.457.000	-	-	761.457.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	-	-	-	309.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	348.457.000	-	-	348.457.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	-	-	-	39.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.432.690.000**	**-**	**-**	**-**	**4.432.690.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.182.890.000	-	-	-	2.182.890.000
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik (8.57 %)					
	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (85.71 %)					
	Persentase Pengendalian Tibumtranmas (80.71 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	200.000	-	-	-	200.000
	Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	231.940.000	-	-	-	231.940.000
	Jumlah tindakan penanganan gangguan Tibumtranmas (32.00 Kegiatan)					
	Jumlah tindakan pencegahan gangguan Tibumtranmas (81.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.340.750.000	-	-	-	1.340.750.000
	Jumlah tindakan penanganan gangguan Tibumtranmas (32.00 Kegiatan)					
	Jumlah tindakan pencegahan gangguan Tibumtranmas (81.00 Kegiatan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Jumlah Komandan Regu (Danru) Satlinmas yang dibina (225.00 Orang)					
	Persentase Linmas yang diberdayakan (0.09 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah Komandan Regu (Danru) Satlinmas yang dibina (225.00 Orang)					
	Persentase Linmas yang diberdayakan (0.09 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2.221.680.000	-	-	-	2.221.680.000
	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (85.71 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.850.000	-	-	-	70.850.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (125.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.790.000	-	-	-	20.790.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (125.00 Orang)					
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.130.040.000	-	-	-	2.130.040.000
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi (125.00 Orang)					
	Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani (100.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	28.120.000	-	-	-	28.120.000
	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (85.71 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	19.920.000	-	-	-	19.920.000
	Jumlah PPNS yang dilakukan pembinaan (100.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	8.200.000	-	-	-	8.200.000
	Jumlah PPNS yang dilakukan pembinaan (100.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**360.000.000**	**-**	**-**	**-**	**360.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	360.000.000	-	-	-	360.000.000
	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM (29.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase Kab/Kota yang dibina terkait penanganan kebakaran (29.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang telah dilakukan Pemetaan Rawan Kebakaran (29.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase Kab/Kota yang dibina terkait penanganan kebakaran (29.00 %)					
	Persentase Kab/Kota yang telah dilakukan Pemetaan Rawan Kebakaran (29.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**20.296.444.000**	**100.000.000**	**-**	**-**	**20.396.444.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.321.444.000**	**100.000.000**	**-**	**-**	**14.421.444.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.182.223.000	-	-	-	7.182.223.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.832.223.000	-	-	-	6.832.223.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)*	61.500.000	-	-	-	61.500.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	61.500.000	-	-	-	61.500.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)*	537.500.000	-	-	-	537.500.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	-	-	-	15.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.500.000	-	-	-	130.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.000.000	-	-	-	316.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)*	1.428.000.000	100.000.000	-	-	1.528.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (31.00 Unit)*	728.000.000	100.000.000	-	-	828.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (31.00 Unit)*	700.000.000	-	-	-	700.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)*	3.931.721.000	-	-	-	3.931.721.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)*	1.500.000	-	-	-	1.500.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)*	529.000.000	-	-	-	529.000.000
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.401.221.000	-	-	-	3.401.221.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.500.000	-	-	-	905.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.500.000	-	-	-	685.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (163.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (163.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (163.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (163.00 Unit)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.975.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.975.000.000**
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	700.000.000	-	-	-	700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana (6.80 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana (0.02 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.125.000.000	-	-	-	2.125.000.000
	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana (6.80 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase penanganan pra bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase penanganan pra bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase penanganan pra bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Persentase penanganan pra bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase penanganan pra bencana (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000
	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam (90.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana (100.00 %)					
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana (100.00 %)					
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.100.000.000	-	-	-	2.100.000.000
	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana (100.00 %)					
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kejadian bencana yang tertangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase kejadian bencana yang tertangani (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam (90.00 %)					
	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana (100.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana (1.00 Kegiatan)					
	Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana (20.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana (1.00 Kegiatan)					
	Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana (20.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana (1.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana (20.00 %)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah personil kab/kota yang di tingkatkan kapasitas pengolahan data dan informasi bencana (70.00 Orang)					
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana (1.00 Kegiatan)					
	Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana (20.00 %)					
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**329.164.556.000**	**4.730.308.000**	**-**	**-**	**333.894.864.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01	**Dinas Sosial**	**329.164.556.000**	**4.730.308.000**	**-**	**-**	**333.894.864.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**132.083.376.000**	**2.043.213.000**	**-**	**-**	**134.126.589.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.930.738.000	-	-	-	95.930.738.000
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.255.738.000	-	-	-	94.255.738.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)*	175.000.000	-	-	-	175.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)*	225.000.000	-	-	-	225.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.601.579.000	-	-	-	4.601.579.000
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	297.089.000	-	-	-	297.089.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.820.000	-	-	-	117.820.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	262.452.000	-	-	-	262.452.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	666.854.000	-	-	-	666.854.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.785.000	-	-	-	185.785.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.350.000	-	-	-	36.350.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	434.767.000	-	-	-	434.767.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	238.750.000	-	-	-	238.750.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.286.712.000	-	-	-	2.286.712.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	2.043.213.000	-	-	2.051.213.000
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	17.500.000	-	-	17.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	734.193.000	-	-	734.193.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	443.000.000	-	-	443.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	848.520.000	-	-	856.520.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (1.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.063.583.000	-	-	-	22.063.583.000
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.140.000	-	-	-	80.140.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (16.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Laporan)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.808.250.000	-	-	-	3.808.250.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (16.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (4.00 Laporan)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (16.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.975.193.000	-	-	-	17.975.193.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (16.00 Laporan)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.254.476.000	-	-	-	8.254.476.000
	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.676.000	-	-	-	773.676.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.000.000	-	-	-	253.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.687.280.000	-	-	-	6.687.280.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.520.000	-	-	-	390.520.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (2.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (4.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede (4.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.286.000.000**	**-**	**-**	**-**	**10.286.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (8.88 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (100.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	10.086.000.000	-	-	-	10.086.000.000
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (8.88 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.384.000.000	-	-	-	4.384.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	4.002.000.000	-	-	-	4.002.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	355.720.000	-	-	-	355.720.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	44.280.000	-	-	-	44.280.000
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2300.00 Orang)					
	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (670.00 Orang)					
	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (1733.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal (100.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**71.403.028.000**	**2.687.095.000**	**-**	**-**	**74.090.123.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	24.032.621.000	370.350.000	-	-	24.402.971.000
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.774.010.000	19.050.000	-	-	17.793.060.000
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti (2100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.542.882.000	-	-	-	2.542.882.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	809.507.000	314.100.000	-	-	1.123.607.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	500.800.000	1.000.000	-	-	501.800.000
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti (2100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	152.900.000	-	-	-	152.900.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.011.321.000	26.200.000	-	-	1.037.521.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	81.660.000	10.000.000	-	-	91.660.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	324.810.000	-	-	-	324.810.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.830.000	-	-	-	70.830.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	76.909.000	-	-	-	76.909.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	12.000.000	-	-	-	12.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0019	Pemulasaraan	146.800.000	-	-	-	146.800.000
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	528.192.000	-	-	-	528.192.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti (2100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (185.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo (115.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (130.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (60.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra (135.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (35.00 Orang)					
	Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (200.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Mardi Yuwono (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabiltasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu (190.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	20.629.734.000	1.612.495.000	-	-	22.242.229.000
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Pengasuhan	7.750.000	-	-	-	7.750.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.753.140.000	-	-	-	2.753.140.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	562.892.000	1.539.880.000	-	-	2.102.772.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.450.000	-	-	-	60.450.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	659.256.000	36.500.000	-	-	695.756.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	119.070.000	-	-	-	119.070.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.857.939.000	-	-	-	3.857.939.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	35.490.000	-	-	-	35.490.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	89.250.000	-	-	-	89.250.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program,	Kelompok Belanja				
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	12.025.798.000	36.115.000	-	-	12.061.913.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (1700.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	421.606.000	-	-	-	421.606.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (1700.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	7.300.000	-	-	-	7.300.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	29.793.000	-	-	-	29.793.000
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (310.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatunan sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (80.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono (70.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (75.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo (50.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	19.990.689.000	577.250.000	-	-	20.567.939.000
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	13.229.965.000	71.850.000	-	-	13.301.815.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	3.799.320.000	-	-	-	3.799.320.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	648.619.000	458.400.000	-	-	1.107.019.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	59.500.000	25.500.000	-	-	85.000.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	233.890.000	-	-	-	233.890.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	904.565.000	7.500.000	-	-	912.065.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	96.300.000	4.000.000	-	-	100.300.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.140.000	-	-	-	70.140.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.090.000	-	-	-	59.090.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012	Pemulasaraan	421.125.000	-	-	-	421.125.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	249.910.000	10.000.000	-	-	259.910.000
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	210.265.000	-	-	-	210.265.000
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti (400.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo (160.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata (215.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata (195.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (210.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (140.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan (85.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo (90.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede (145.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (210.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.396.190.000	93.950.000	-	-	2.490.140.000
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	1.753.350.000	9.950.000	-	-	1.763.300.000
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	202.940.000	-	-	-	202.940.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	63.650.000	84.000.000	-	-	147.650.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.800.000	-	-	-	19.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	16.200.000	-	-	-	16.200.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	76.490.000	-	-	-	76.490.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	20.660.000	-	-	-	20.660.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	192.100.000	-	-	-	192.100.000
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (250.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial (110.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera (50.00 Orang)					
	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo (110.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	4.353.794.000	33.050.000	-	-	4.386.844.000
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo (100.00 %)					
	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (100.00 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.091.380.000	10.350.000	-	-	3.101.730.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	562.514.000	-	-	-	562.514.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	176.410.000	16.700.000	-	-	193.110.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	31.270.000	-	-	-	31.270.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	23.100.000	-	-	-	23.100.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	14.424.000	6.000.000	-	-	20.424.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	211.700.000	-	-	-	211.700.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.346.000	-	-	-	50.346.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	26.000.000	-	-	-	26.000.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	165.150.000	-	-	-	165.150.000
	Jumlah PMKS lain diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti (20.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo (170.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo (40.00 Orang)					
	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama (120.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**110.594.572.000**	**-**	**-**	**-**	**110.594.572.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan (200.00 Dokumen)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	110.244.572.000	-	-	-	110.244.572.000
	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (0.27 %)					
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.500.000.000	-	-	-	24.500.000.000
	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Kelompok) (7500.00 Orang)					
	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Perseorangan) (2000.00 Orang)					
	Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data (35.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	84.044.572.000	-	-	-	84.044.572.000
	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (10250.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000
	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Kelompok) (7500.00 Orang)					
	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Perseorangan) (2000.00 Orang)					
	Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data (35.00 Kabupaten/Kota)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**4.397.580.000**	**-**	**-**	**-**	**4.397.580.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.397.580.000	-	-	-	4.397.580.000
	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.349.018.000	-	-	-	2.349.018.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	824.312.000	-	-	-	824.312.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00011	Penyediaan Sandang	247.500.000	-	-	-	247.500.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	247.000.000	-	-	-	247.000.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	364.750.000	-	-	-	364.750.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.00022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	165.000.000	-	-	-	165.000.000
	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (5000.00 Orang)					
	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial (500.00 Orang)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase Taman makam pahlawan terkelola (100.00 %)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (1.00 Unit)					
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (1.00 Unit)					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**815.883.908.000**	**51.127.300.000**	**-**	**-**	**867.011.208.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**89.463.558.000**	**204.378.000**	**-**	**-**	**89.667.936.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**89.463.558.000**	**204.378.000**	**-**	**-**	**89.667.936.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**77.419.394.000**	**196.378.000**	**-**	**-**	**77.615.772.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.365.000	-	-	-	378.365.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.284.000	-	-	-	237.284.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (81.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.691.000	-	-	-	100.691.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (81.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.290.000	-	-	-	28.290.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (81.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.100.000	-	-	-	12.100.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (81.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.986.623.000	-	-	-	62.986.623.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.251.652.000	-	-	-	62.251.652.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.666.000	-	-	-	642.666.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.345.000	-	-	-	91.345.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	960.000	-	-	-	960.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	-	-	-	70.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.100.000	-	-	-	36.100.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.300.000	-	-	-	7.300.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.900.000	-	-	-	10.900.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.900.000	-	-	-	7.900.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.876.213.000	-	-	-	1.876.213.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.622.000	-	-	-	83.622.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.008.000	-	-	-	101.008.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.085.000	-	-	-	110.085.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.792.000	-	-	-	195.792.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.206.000	-	-	-	50.206.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	158.000	-	-	-	158.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.220.000	-	-	-	93.220.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.224.122.000	-	-	-	1.224.122.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.048.000	196.378.000	-	-	222.426.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.048.000	170.177.000	-	-	196.225.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (18.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (30.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	26.201.000	-	-	26.201.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (18.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (22.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (30.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.458.953.000	-	-	-	10.458.953.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.632.000	-	-	-	22.632.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (40.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.160.358.000	-	-	-	2.160.358.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (40.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.939.000	-	-	-	145.939.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (40.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.130.024.000	-	-	-	8.130.024.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (27.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (40.00 Laporan)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.587.092.000	-	-	-	1.587.092.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.386.000	-	-	-	416.386.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.983.000	-	-	-	150.983.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	94.300.000	-	-	-	94.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564.128.000	-	-	-	564.128.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.010.000	-	-	-	62.010.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.285.000	-	-	-	214.285.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (75.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (9.00 Unit)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**121.635.000**	**-**	**-**	**-**	**121.635.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	121.635.000	-	-	-	121.635.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (85.71 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	51.510.000	-	-	-	51.510.000
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (84.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	31.605.000	-	-	-	31.605.000
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (84.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	38.520.000	-	-	-	38.520.000
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (84.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**7.564.217.000**	**8.000.000**	**-**	**-**	**7.572.217.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.059.256.000	8.000.000	-	-	7.067.256.000
	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (9.28 %)					
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian (9.60 %)					
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri (83.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata (23.38 %)					
	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas (73.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.857.609.000	-	-	-	6.857.609.000
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan (23.38 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (100.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (27.78 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (40.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (9.09 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan (72.99 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (55.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (50.65 %)					
	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (33.33 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (22.22 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	146.647.000	-	-	-	146.647.000
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan (23.38 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (100.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (27.78 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (40.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (9.09 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan (72.99 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (55.60 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (50.65 %)					
	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri (33.33 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (22.22 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	55.000.000	8.000.000	-	-	63.000.000
	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan (23.38 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (100.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (27.78 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (40.00 %)					
	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK (9.09 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan (72.99 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (55.60 %)					
	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri (50.65 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (100.00 %)					
	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (22.22 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	93.677.000	-	-	-	93.677.000
	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi (14.29 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	93.677.000	-	-	-	93.677.000
	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga (31.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	370.284.000	-	-	-	370.284.000
	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (68.00 %)					
	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas (73.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	370.284.000	-	-	-	370.284.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (21.11 %)					
	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (10.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	41.000.000	-	-	-	41.000.000
	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (68.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.000.000	-	-	-	41.000.000
	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (2.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.510.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.510.000.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	691.279.000	-	-	-	691.279.000
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (21.75 %)					
	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (68.50 %)					
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (71.07 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	69.870.000	-	-	-	69.870.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	245.290.000	-	-	-	245.290.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24.860.000	-	-	-	24.860.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	16.360.000	-	-	-	16.360.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	320.609.000	-	-	-	320.609.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14.290.000	-	-	-	14.290.000
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja (75.00 %)					
	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . (47.68 %)					
	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan (58.82 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.820.000	-	-	-	3.820.000
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (71.07 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.820.000	-	-	-	3.820.000
	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan (60.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	675.510.000	-	-	-	675.510.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (67.30 %)					
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (71.07 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	37.470.000	-	-	-	37.470.000
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (38.63 %)					
	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja (83.33 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	638.040.000	-	-	-	638.040.000
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (38.63 %)					
	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja (83.33 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	130.306.000	-	-	-	130.306.000
	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (68.50 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.063.000	-	-	-	27.063.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (1.68 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (51.25 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	15.089.000	-	-	-	15.089.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (1.68 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (51.25 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.520.000	-	-	-	4.520.000
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (1.68 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (51.25 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	83.634.000	-	-	-	83.634.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal (1.68 %)					
	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (51.25 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.085.000	-	-	-	9.085.000
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (71.07 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.085.000	-	-	-	9.085.000
	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing) (100.00 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**950.000.000**	**-**	**-**	**-**	**950.000.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	141.605.000	-	-	-	141.605.000
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (41.99 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	53.333.000	-	-	-	53.333.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (93.75 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	14.158.000	-	-	-	14.158.000
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (93.75 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	74.114.000	-	-	-	74.114.000
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB (93.75 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	511.356.000	-	-	-	511.356.000
	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk (49.80 %)					
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (96.75 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	169.000.000	-	-	-	169.000.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (50.66 %)					
	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) (96.77 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.74 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (86.85 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	47.272.000	-	-	-	47.272.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (50.66 %)					
	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) (96.77 %)					
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.74 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (86.85 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.316.000	-	-	-	13.316.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (50.66 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) (96.77 %)					
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.74 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (86.85 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	195.220.000	-	-	-	195.220.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (50.66 %)					
	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) (96.77 %)					
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.74 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (86.85 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	86.548.000	-	-	-	86.548.000
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (50.66 %)					
	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) (96.77 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan (96.74 %)					
	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi (86.85 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	297.039.000	-	-	-	297.039.000
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah (96.75 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	245.476.000	-	-	-	245.476.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (1.41 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	23.197.000	-	-	-	23.197.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (1.41 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	28.366.000	-	-	-	28.366.000
	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota (1.41 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**1.748.312.000**	**-**	**-**	**-**	**1.748.312.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.748.312.000	-	-	-	1.748.312.000
	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan (80.80 %)					
	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (27.06 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	761.720.000	-	-	-	761.720.000
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.21 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (37.87 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.92 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	231.305.000	-	-	-	231.305.000
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.21 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (37.87 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.92 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	755.287.000	-	-	-	755.287.000
	Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan) (62.86 %)					
	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan (55.21 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (37.87 %)					
	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (62.92 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (1.20 %)					
	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi (2.06 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi (10.31 %)					
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan (100.00 %)					
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**21.461.962.000**	**74.962.000**	**-**	**-**	**21.536.924.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**21.461.962.000**	**74.962.000**	**-**	**-**	**21.536.924.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.266.862.000**	**74.962.000**	**-**	**-**	**16.341.824.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.000.000	-	-	-	207.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (55.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	-	-	-	62.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (50.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.916.389.000	-	-	-	11.916.389.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000	-	-	-	11.457.489.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.200.000	-	-	-	366.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.700.000	-	-	-	72.700.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000	-	-	-	60.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.570.000	-	-	-	46.570.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.570.000	-	-	-	16.570.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (90.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-	-	-	15.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.169.000	65.462.000	-	-	628.631.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	-	-	-	9.999.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	64.462.000	-	-	64.462.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.921.000	-	-	-	116.921.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	-	-	-	17.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.000.000	1.000.000	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.749.000	-	-	-	281.749.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	-	-	-	7.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.000.000	-	-	-	71.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (90.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	9.500.000	-	-	9.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	2.500.000	-	-	2.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA (3.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	7.000.000	-	-	7.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.836.581.000	-	-	-	2.836.581.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447.536.000	-	-	-	447.536.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA (1.00 Laporan)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.387.045.000	-	-	-	2.387.045.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA (1.00 Laporan)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.153.000	-	-	-	637.153.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (90.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.400.000	-	-	-	11.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA (1.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	-	-	-	1.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA (1.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.128.000	-	-	-	355.128.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA (1.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.625.000	-	-	-	94.625.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA (1.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**2.698.800.000**	**-**	**-**	**-**	**2.698.800.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	121.730.000	-	-	-	121.730.000
	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi (12.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.800.000	-	-	-	25.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai Evaluasi PUG Provinsi (900.00 Nilai)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Nilai Evaluasi PUG Provinsi (900.00 Nilai)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	40.930.000	-	-	-	40.930.000
	Nilai Evaluasi PUG Provinsi (900.00 Nilai)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.577.070.000	-	-	-	2.577.070.000
	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha (80.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.439.500.000	-	-	-	1.439.500.000
	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya (40.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	705.070.000	-	-	-	705.070.000
	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya (40.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	432.500.000	-	-	-	432.500.000
	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya (40.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**770.432.000**	**-**	**-**	**-**	**770.432.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	115.750.000	-	-	-	115.750.000
	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan (85.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	14.750.000	-	-	-	14.750.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	-	-	-	51.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	136.040.000	-	-	-	136.040.000
	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	-	-	-	9.270.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	-	-	-	17.720.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	-	-	-	87.300.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-	-	-	3.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	518.642.000	-	-	-	518.642.000
	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan (85.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	347.642.000	-	-	-	347.642.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi (15.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	-	-	-	115.000.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi (15.00 Unit)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	56.000.000	-	-	-	56.000.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi (15.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**328.408.000**	**-**	**-**	**-**	**328.408.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	312.808.000	-	-	-	312.808.000
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga (20.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	312.808.000	-	-	-	312.808.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga (20.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000	-	-	-	15.600.000
	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih (24.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000	-	-	-	15.600.000
	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**373.720.000**	**-**	**-**	**-**	**373.720.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	271.100.000	-	-	-	271.100.000
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (61.50 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	271.100.000	-	-	-	271.100.000
	Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya (30.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	102.620.000	-	-	-	102.620.000
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (61.50 Angka)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	43.840.000	-	-	-	43.840.000
	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak (35.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	51.780.000	-	-	-	51.780.000
	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak (35.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	7.000.000	-	-	-	7.000.000
	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak (35.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**296.720.000**	**-**	**-**	**-**	**296.720.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	-	-	-	96.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (79.00 Angka)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	-	-	-	51.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak (25.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	136.040.000	-	-	-	136.040.000
	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	-	-	-	17.720.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	-	-	-	87.300.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	-	-	-	9.270.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-	-	-	3.500.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	-	-	-	6.750.000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (100.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	64.680.000	-	-	-	64.680.000
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (79.00 Angka)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya (50.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	34.680.000	-	-	-	34.680.000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya (50.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya (50.00 Lembaga)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**160.000.000**	**-**	**-**	**-**	**160.000.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.230.000	-	-	-	151.230.000
	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah (75.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	36.170.000	-	-	-	36.170.000
	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan (28.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	22.488.000	-	-	-	22.488.000
	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan (28.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	26.780.000	-	-	-	26.780.000
	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan (28.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	65.792.000	-	-	-	65.792.000
	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan (28.00 Kabupaten/Kota)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	8.770.000	-	-	-	8.770.000
	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah (75.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	8.770.000	-	-	-	8.770.000
	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan. (1.00 Dokumen)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**389.667.000**	**-**	**-**	**-**	**389.667.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	352.667.000	-	-	-	352.667.000
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (69.48 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	148.000.000	-	-	-	148.000.000
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP (27.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	35.856.000	-	-	-	35.856.000
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP (27.90 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	168.811.000	-	-	-	168.811.000
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP (27.90 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.000.000	-	-	-	37.000.000
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (69.48 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.000.000	-	-	-	37.000.000
	Unmetneed KB (9.25 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**177.353.000**	**-**	**-**	**-**	**177.353.000**
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	88.586.000	-	-	-	88.586.000
	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan (34.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	27.109.000	-	-	-	27.109.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (16.00 per 1000 WUS 15 -19 tahun)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	25.570.000	-	-	-	25.570.000
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (16.00 per 1000 WUS 15 -19 tahun)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	35.907.000	-	-	-	35.907.000
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (16.00 per 1000 WUS 15 -19 tahun)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	88.767.000	-	-	-	88.767.000
	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan (34.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	13.210.000	-	-	-	13.210.000
	Persentase kelomppok tribina yang aktif (95.00 %)					
	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif (95.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	35.928.000	-	-	-	35.928.000
	Persentase kelomppok tribina yang aktif (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif (95.00 %)					
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	39.629.000	-	-	-	39.629.000
	Persentase kelomppok tribina yang aktif (95.00 %)					
	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif (95.00 %)					
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**41.154.706.000**	**4.014.589.000**	**-**	**-**	**45.169.295.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	**41.154.706.000**	**4.014.589.000**	**-**	**-**	**45.169.295.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.995.803.000**	**2.990.367.000**	**-**	**-**	**23.986.170.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (90.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)*	14.873.531.000	-	-	-	14.873.531.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)*	14.317.257.000	-	-	-	14.317.257.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)*	376.274.000	-	-	-	376.274.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (3.00 Dokumen)*	180.000.000	-	-	-	180.000.000
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	154.000.000	-	-	-	154.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (87.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.000.000	-	-	-	14.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (12.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.501.000	-	-	-	763.501.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (87.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	-	-	-	55.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.000.000	-	-	-	68.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.000.000	-	-	-	53.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.200.000	-	-	-	156.200.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000	-	-	-	335.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000	-	-	-	9.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.301.000	-	-	-	87.301.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	635.200.000	-	-	-	635.200.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (87.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	635.200.000	-	-	-	635.200.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (30.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.372.660.000	-	-	-	3.372.660.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (87.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.000.000	-	-	-	438.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.934.660.000	-	-	-	2.934.660.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.911.000	2.990.367.000	-	-	3.731.278.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (87.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan (87.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	-	-	-	210.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.911.000	2.990.367.000	-	-	3.190.278.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.000.000	-	-	-	331.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (11.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**13.614.995.000**	**-**	**-**	**-**	**13.614.995.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.078.791.000	-	-	-	8.078.791.000
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (87.30 kg/kapita/tahun)					
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku (62.50 %)					
	Rata-rata Ketersediaan Pangan (1.21 Angka)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.138.440.000	-	-	-	3.138.440.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (1.00 Dokumen)					
	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan (10.00 Angka)					
	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (100.00 %)					
	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN (725.00 Ton)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	346.990.000	-	-	-	346.990.000
	JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI (10.00 Kelompok)					
	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA (42.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.006.835.000	-	-	-	1.006.835.000
	JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI (10.00 Kelompok)					
	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA (42.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	3.138.440.000	-	-	-	3.138.440.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (1.00 Dokumen)					
	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan (10.00 Angka)					
	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (100.00 %)					
	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN (725.00 Ton)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	377.226.000	-	-	-	377.226.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (1.00 Dokumen)					
	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan (10.00 Angka)					
	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (100.00 %)					
	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN (725.00 Ton)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	70.860.000	-	-	-	70.860.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (1.00 Dokumen)					
	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan (10.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (100.00 %)					
	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN (725.00 Ton)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	5.025.529.000	-	-	-	5.025.529.000
	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) (0.47 Angka)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.025.529.000	-	-	-	5.025.529.000
	persentase penyaluran cppd (50.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	510.675.000	-	-	-	510.675.000
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (87.30 kg/kapita/tahun)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.675.000	-	-	-	510.675.000
	Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal (7.00 Kali)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**4.975.924.000**	**-**	**-**	**-**	**4.975.924.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	4.975.924.000	-	-	-	4.975.924.000
	Persentase Daerah Rawan Pangan (14.60 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	275.000.000	-	-	-	275.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (12.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI (6.00 %)					
	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan (3.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	317.317.000	-	-	-	317.317.000
	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (12.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI (6.00 %)					
	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan (3.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	2.750.402.000	-	-	-	2.750.402.000
	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (12.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI (6.00 %)					
	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan (3.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1.633.205.000	-	-	-	1.633.205.000
	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (12.00 Dokumen)					
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI (6.00 %)					
	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**1.567.984.000**	**1.024.222.000**	**-**	**-**	**2.592.206.000**
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.567.984.000	1.024.222.000	-	-	2.592.206.000
	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar (40.00 %)					
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (90.10 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan (100.00 Dokumen)					
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan (80.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	446.378.000	-	-	-	446.378.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan (50.00 Kelompok)					
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran (84.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	338.743.000	-	-	-	338.743.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan (50.00 Kelompok)					
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran (84.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	412.863.000	1.024.222.000	-	-	1.437.085.000
	Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan (100.00 Dokumen)					
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan (80.00 %)					
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan (50.00 Kelompok)					
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran (84.00 %)					
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**140.625.650.000**	**40.500.000**	**-**	**-**	**140.666.150.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**140.625.650.000**	**40.500.000**	**-**	**-**	**140.666.150.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**135.118.313.000**	**40.500.000**	**-**	**-**	**135.158.813.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)*	385.500.000	-	-	-	385.500.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	225.500.000	-	-	-	225.500.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)*	120.250.739.000	-	-	-	120.250.739.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	120.165.739.000	-	-	-	120.165.739.000
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000	-	-	-	35.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	313.345.000	-	-	-	313.345.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	313.345.000	-	-	-	313.345.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BPL2H (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BSPTH (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 10 (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 11 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 2 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 3 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 6 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 7 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 8 (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 9 (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah KRB (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.605.604.000	-	-	-	1.605.604.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500.000	-	-	-	62.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.229.000	-	-	-	100.229.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.777.000	-	-	-	111.777.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.618.000	-	-	-	131.618.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.035.000	-	-	-	84.035.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.260.000	-	-	-	227.260.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.185.000	-	-	-	886.185.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	40.500.000	-	-	40.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	34.000.000	-	-	34.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 11 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	6.500.000	-	-	6.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 4 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.752.311.000	-	-	-	10.752.311.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.807.000	-	-	-	23.807.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.988.000	-	-	-	1.703.988.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.760.000	-	-	-	161.760.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.862.756.000	-	-	-	8.862.756.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5 (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9 (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA (1.00 Laporan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.765.814.000	-	-	-	1.765.814.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.315.914.000	-	-	-	1.315.914.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.600.000	-	-	-	9.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.300.000	-	-	-	255.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	-	-	-	145.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	145.772.000	-	-	-	145.772.000
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.088.000	-	-	-	101.088.000
	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (3.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	44.684.000	-	-	-	44.684.000
	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (3.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	54.228.000	-	-	-	54.228.000
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	54.228.000	-	-	-	54.228.000
	Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi (10.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**965.614.000**	**-**	**-**	**-**	**965.614.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	965.614.000	-	-	-	965.614.000
	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup (100.00 %)					
	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan (3.26 %)					
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (4.76 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14.370.000	-	-	-	14.370.000
	Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak (50.00 Lokasi)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu (105.00 Usaha/Kegiatan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	201.244.000	-	-	-	201.244.000
	Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak (50.00 Lokasi)					
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu (105.00 Usaha/Kegiatan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan (70.00 Dokumen)					
	Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup (360.00 sampel)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak (50.00 Lokasi)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu (105.00 Usaha/Kegiatan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan (70.00 Dokumen)					
	Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup (360.00 sampel)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**158.986.000**	**-**	**-**	**-**	**158.986.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	158.986.000	-	-	-	158.986.000
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (0.40 %)					
	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden (2.60 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	94.600.000	-	-	-	94.600.000
	Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden (2.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64.386.000	-	-	-	64.386.000
	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (10.00 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**25.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola (80.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola (1476440.00 Ton)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**400.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (57.00 %)					
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan (10.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah pelaku usaha berizin yang taat (20.00 Pelaku Usaha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (50.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	115.000.000	-	-	-	115.000.000
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (50.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah laporan aduan yang ditangani (12.00 Pengaduan)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**245.000.000**	**-**	**-**	**-**	**245.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	245.000.000	-	-	-	245.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Timbulan sampah yang terkelola (61.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	155.000.000	-	-	-	155.000.000
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (18.46 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (18.46 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**2.676.375.000**	**-**	**-**	**-**	**2.676.375.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (21.96 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan (1.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (21.96 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan (1.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.333.000.000	-	-	-	2.333.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase lahan kritis tertangani (0.11 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2 (0.02 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4 (0.02 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5 (0.08 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9 (0.01 %)					
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I (0.01 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) (385.40 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	804.754.000	-	-	-	804.754.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10 (14.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11 (21.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1 (33.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2 (53.40 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3 (19.70 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4 (70.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5 (37.50 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6 (28.20 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7 (43.50 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8 (39.10 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9 (26.00 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	34.220.000	-	-	-	34.220.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10 (14.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11 (21.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1 (33.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2 (53.40 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3 (19.70 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4 (70.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5 (37.50 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6 (28.20 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7 (43.50 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8 (39.10 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9 (26.00 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) (385.40 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10 (14.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11 (21.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1 (33.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2 (53.40 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3 (19.70 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4 (70.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5 (37.50 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6 (28.20 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7 (43.50 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8 (39.10 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9 (26.00 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.434.026.000	-	-	-	1.434.026.000
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1 (33.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2 (53.40 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3 (19.70 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4 (70.00 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5 (37.50 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6 (28.20 Ha)					
	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8 (39.10 Ha)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2 (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7 (100.00 %)					
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9 (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 10 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 1 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 2 (1.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 3 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 4 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 5 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 6 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 7 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 8 (1.00 Kelompok)					
	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 9 (2.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (21.96 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (8.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang (8.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (21.96 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan (183.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	73.375.000	-	-	-	73.375.000
	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	2.610.000	-	-	-	2.610.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	2.610.000	-	-	-	2.610.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	14.490.000	-	-	-	14.490.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.480.000	-	-	-	3.480.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	20.150.000	-	-	-	20.150.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	27.425.000	-	-	-	27.425.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	2.610.000	-	-	-	2.610.000
	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi (45000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH (36.00 Sertifikat)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**191.362.000**	**-**	**-**	**-**	**191.362.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan (73.00 Angka)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	55.000.000	-	-	-	55.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi (20.00 Ha)					
	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura (12.00 Kali)					
	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan (2.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	51.362.000	-	-	-	51.362.000
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani (5.00 %)					
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	51.362.000	-	-	-	51.362.000
	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani (2.00 Jenis)					
	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden (554.00 Jenis)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP (7.00 Dokumen)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**300.000.000**	**-**	**-**	**-**	**300.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (2.50 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1 (0.30 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5 (0.30 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7 (0.30 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8 (0.20 %)					
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9 (0.20 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	211.000.000	-	-	-	211.000.000
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 10 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 1 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 2 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 3 (2.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 4 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 5 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 6 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 7 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 8 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 9 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	49.000.000	-	-	-	49.000.000
	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 10 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 11 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 1 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 2 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 3 (2.00 Kelompok)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 4 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 5 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 6 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 7 (3.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 8 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 9 (2.00 Kelompok)					
	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya (25.00 Kelompok)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**115.000.000**	**-**	**-**	**-**	**115.000.000**
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	115.000.000	-	-	-	115.000.000
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani (100.00 %)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (5.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (5.00 Unit)					
2.11.2.11.3.28.0.00.02.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya (5.00 Unit)					
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**23.835.191.000**	**74.250.000**	**-**	**-**	**23.909.441.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**23.835.191.000**	**74.250.000**	**-**	**-**	**23.909.441.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (99.40 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el (99.40 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**60.000.000**	**-**	**-**	**-**	**60.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (99.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Presentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran (98.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**75.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan *Persentase sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang terpublish (100.00 %)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.571.651.000**	**74.250.000**	**-**	**-**	**18.645.901.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	285.000.000	-	-	-	285.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	180.000.000	-	-	-	180.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	105.000.000	-	-	-	105.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	14.069.218.000	-	-	-	14.069.218.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	13.712.218.000	-	-	-	13.712.218.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	357.000.000	-	-	-	357.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	651.683.000	-	-	-	651.683.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	9.000.000	-	-	-	9.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.000.000	-	-	-	53.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	-	-	-	115.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000	-	-	-	205.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	142.683.000	-	-	-	142.683.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	750.000	74.250.000	-	-	75.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)*	750.000	74.250.000	-	-	75.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	2.945.000.000	-	-	-	2.945.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	496.000.000	-	-	-	496.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	2.424.000.000	-	-	-	2.424.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (100.00 %)*	520.000.000	-	-	-	520.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	170.000.000	-	-	-	170.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	130.000.000	-	-	-	130.000.000
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**155.000.000**	**-**	**-**	**-**	**155.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	155.000.000	-	-	-	155.000.000
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) (57.05 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	155.000.000	-	-	-	155.000.000
	Jumlah pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi (1.00 Kawasan)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.033.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.033.540.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.033.540.000	-	-	-	1.033.540.000
	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	85.000.000	-	-	-	85.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades (29.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa (8.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (29.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa (200.00 Orang)					
	Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa (29.00 Daerah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data (50.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	85.000.000	-	-	-	85.000.000
	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa (200.00 Orang)					
	Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa (29.00 Daerah)					
	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data (50.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades (29.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa (8.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (29.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades (29.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa (8.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (29.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	418.540.000	-	-	-	418.540.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa (200.00 Orang)					
	Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa (29.00 Daerah)					
	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data (50.00 Dokumen)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa (200.00 Orang)					
	Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa (29.00 Daerah)					
	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data (50.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades (29.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa (8.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (29.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades (29.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa (8.00 Daerah)					
	Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (29.00 Desa)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.870.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.870.000.000**
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.870.000.000	-	-	-	3.870.000.000
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah (45.96 %)					
	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya (100.00 %)					
	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (100.00 %)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	165.000.000	-	-	-	165.000.000
	Jumlah pengelola BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang yang ditingkatkan kapasitasnya (300.00 Orang)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K (116.00 Orang)					
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (29.00 Daerah)					
	Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya (175.00 Orang)					
	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (35.00 Kabupaten/Kota)					
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**192.575.128.000**	**14.973.362.000**	**-**	**-**	**207.548.490.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01	**Dinas Perhubungan**	**192.575.128.000**	**14.973.362.000**	**-**	**-**	**207.548.490.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**66.907.811.000**	**1.885.000.000**	**-**	**-**	**68.792.811.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.683.000	-	-	-	245.683.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.064.000	-	-	-	120.064.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.619.000	-	-	-	62.619.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.000.000	-	-	-	13.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.183.594.000	-	-	-	47.183.594.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.366.833.000	-	-	-	46.366.833.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (36.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.200.000	-	-	-	766.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (36.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (12.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.561.000	-	-	-	50.561.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (36.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	955.000.000	-	-	-	955.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	955.000.000	-	-	-	955.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192.500.000	-	-	-	192.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.500.000	-	-	-	42.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.554.352.000	-	-	-	1.554.352.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	-	-	-	257.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	-	-	-	89.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	-	-	-	28.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.852.000	-	-	-	199.852.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	-	-	5.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	812.500.000	-	-	-	812.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37.500.000	-	-	-	37.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.885.000.000	-	-	1.885.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (11.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	80.000.000	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (11.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	105.000.000	-	-	105.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (11.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.692.712.000	-	-	-	14.692.712.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (24.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (24.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	-	-	-	1.589.225.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.093.487.000	-	-	-	13.093.487.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (36.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (24.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (12.00 Laporan)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.083.970.000	-	-	-	2.083.970.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	-	-	-	857.400.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (288.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (288.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (7.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	-	-	-	700.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (288.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (9.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (16.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (7.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	-	-	-	129.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (288.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (21.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (6.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (9.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (8.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (16.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (7.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A (7.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.070.000	-	-	-	117.070.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (288.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**124.221.660.000**	**12.217.036.000**	**-**	**-**	**136.438.696.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	101.800.000	-	-	-	101.800.000
	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis (52.95 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	101.800.000	-	-	-	101.800.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ (43.90 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	389.096.000	5.868.098.000	-	-	6.257.194.000
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (6.94 %)					
	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng) (4.42 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	389.096.000	5.868.098.000	-	-	6.257.194.000
	Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi (28.06 %)					
	Persentase perlengkapan jalan terpenuhi (64.51 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	379.992.000	5.432.008.000	-	-	5.812.000.000
	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B (70.14 %)					
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (3.99 %)					
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (22.04 %)					
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (8.04 %)					
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (28.16 %)					
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (43.53 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (45.11 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	-	155.000.000	-	-	155.000.000
	Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B (53.48 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	24.992.000	1.082.008.000	-	-	1.107.000.000
	Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B (53.48 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	4.195.000.000	-	-	4.195.000.000
	Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B (53.48 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	355.000.000	-	-	-	355.000.000
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (28.44 %)					
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (40.06 %)					
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (31.91 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (38.31 %)					
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (42.94 %)					
	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (31.71 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.878.391.000	438.930.000	-	-	3.317.321.000
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (6.94 %)					
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (3.00 %)					
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (3.00 %)					
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (3.00 %)					
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (3.00 %)					
	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (3.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	22.916.000	-	-	-	22.916.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (19.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ (12.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	864.240.000	-	-	-	864.240.000
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (55.56 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (43.75 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (33.33 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (33.33 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (45.83 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (75.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	58.624.000	-	-	-	58.624.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng (19.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ (12.00 Dokumen)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.932.611.000	438.930.000	-	-	2.371.541.000
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (55.56 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (43.75 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (33.33 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (33.33 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (45.83 %)					
	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (75.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	37.316.000	-	-	-	37.316.000
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (6.94 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	37.316.000	-	-	-	37.316.000
	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin (73.13 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.358.496.000	-	-	-	1.358.496.000
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (81.84 %)					
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (86.20 %)					
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (57.12 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (92.83 %)					
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (88.66 %)					
	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (87.09 %)					
	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah (98.03 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.078.653.000	-	-	-	1.078.653.000
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (6889.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (1261.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (2241.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (6889.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (3500.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (3353.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	173.460.000	-	-	-	173.460.000
	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah (317984.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	106.383.000	-	-	-	106.383.000
	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah (317984.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (6889.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A (1261.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (2241.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (6889.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (3500.00 Unit)					
	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A (3353.00 Unit)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.312.622.000	478.000.000	-	-	118.790.622.000
	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng) (4.42 %)					
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum (69.85 %)					
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	696.815.000	-	-	-	696.815.000
	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani (35063886.00 Orang)					
	Persentase angkutan barang yang berijin (68.95 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	117.615.807.000	478.000.000	-	-	118.093.807.000
	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani (35063886.00 Orang)					
	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan (9557771.00 Orang)					
	Persentase angkutan barang yang berijin (68.95 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	660.173.000	-	-	-	660.173.000
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	586.551.000	-	-	-	586.551.000
	Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (48.72 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	73.622.000	-	-	-	73.622.000
	Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (48.72 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan (13.04 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	48.400.000	-	-	-	48.400.000
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.400.000	-	-	-	48.400.000
	Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin (53.10 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.374.000	-	-	-	17.374.000
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.374.000	-	-	-	17.374.000
	Persentase angkutan taksi terpenuhi (18.85 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Rasio Trayek Angkutan Jalan (46.74 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif (100.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**137.223.000**	**579.760.000**	**-**	**-**	**716.983.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	56.400.000	-	-	-	56.400.000
	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP (0.47 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.400.000	-	-	-	56.400.000
	Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya (51.52 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	37.387.000	-	-	-	37.387.000
	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP (0.47 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.387.000	-	-	-	37.387.000
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi (56.84 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	38.536.000	-	-	-	38.536.000
	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP (0.47 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	38.536.000	-	-	-	38.536.000
	Berth occupancy ratio (20.44 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.900.000	579.760.000	-	-	584.660.000
	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP (0.47 Angka)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	77.000.000	-	-	77.000.000
	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (60.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	483.000.000	-	-	483.000.000
	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (60.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.900.000	19.760.000	-	-	24.660.000
	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi (60.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.308.434.000**	**291.566.000**	**-**	**-**	**1.600.000.000**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.308.434.000	291.566.000	-	-	1.600.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan (28.00 %)					
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.308.434.000	291.566.000	-	-	1.600.000.000
	Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian (70.48 %)					
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**67.194.992.000**	**30.178.340.000**	**-**	**-**	**97.373.332.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital**	**67.194.992.000**	**30.178.340.000**	**-**	**-**	**97.373.332.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.762.703.000**	**-**	**-**	**-**	**36.762.703.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.887.000	-	-	-	335.887.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (76.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.887.000	-	-	-	135.887.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.824.042.000	-	-	-	19.824.042.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.000.242.000	-	-	-	19.000.242.000
	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	763.800.000	-	-	-	763.800.000
	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.000.000	-	-	-	21.000.000
	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.000.000	-	-	-	19.000.000
	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (100.00 Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	220.678.000	-	-	-	220.678.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (6.00 Dokumen)*	9.000.000	-	-	-	9.000.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (6.00 Dokumen)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (6.00 Dokumen)*	7.178.000	-	-	-	7.178.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (6.00 Dokumen)*	4.500.000	-	-	-	4.500.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)*	93.000.000	-	-	-	93.000.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	13.000.000	-	-	-	13.000.000
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	-	-	-	5.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.095.586.000	-	-	-	1.095.586.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.226.000	-	-	-	34.226.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.200.000	-	-	-	165.200.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.800.000	-	-	-	54.800.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	-	-	-	80.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	196.580.000	-	-	-	196.580.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	88.780.000	-	-	-	88.780.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.200.000.000	-	-	-	5.200.000.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000.000	-	-	-	5.200.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.900.210.000	-	-	-	8.900.210.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.616.000	-	-	-	8.616.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPT Pusat Data (100.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan / Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.000.000	-	-	-	1.600.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan / Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan / Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.273.594.000	-	-	-	7.273.594.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan / Dokumen)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.300.000	-	-	-	1.093.300.000
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (79.50 %)					
	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	-	-	-	400.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	-	-	-	11.000.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (100.00 %)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	37.000.000	-	-	-	37.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.000.000	-	-	-	408.000.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (100.00 %)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.000.000	-	-	-	101.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.300.000	-	-	-	46.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (30.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**15.337.500.000**	**7.500.000**	**-**	**-**	**15.345.000.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.337.500.000	7.500.000	-	-	15.345.000.000
	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik (85.00 Angka)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0014	Relasi Media	2.588.285.000	-	-	-	2.588.285.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	3.884.375.000	-	-	-	3.884.375.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	4.712.500.000	7.500.000	-	-	4.720.000.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	601.800.000	-	-	-	601.800.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	614.817.000	-	-	-	614.817.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.140.723.000	-	-	-	1.140.723.000
	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan (190.00 Konten)					
	Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun (135.00 Rekomendasi)					
	Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi (40.00 %)					
	Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan (84.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**12.761.829.000**	**29.980.000.000**	**-**	**-**	**42.741.829.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	12.761.829.000	29.980.000.000	-	-	42.741.829.000
	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi (65.00 %)					
	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi (12.00 %)					
	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital (25.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1.181.000.000	-	-	-	1.181.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi (250.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya (250.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	146.725.000	-	-	-	146.725.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi (250.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya (250.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi (10.00 Aplikasi)					
	Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas (10.00 Entitas)					
	Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE (5.00 Rekomendasi)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	1.213.000.000	-	-	-	1.213.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi (250.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya (250.00 Unit)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	5.347.500.000	13.680.000.000	-	-	19.027.500.000
	Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi (10.00 Aplikasi)					
	Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas (10.00 Entitas)					
	Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE (5.00 Rekomendasi)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi (10.00 Aplikasi)					
	Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas (10.00 Entitas)					
	Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE (5.00 Rekomendasi)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.873.604.000	16.300.000.000	-	-	20.173.604.000
	Persentase penyimpanan yang termanfaatkan (70.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**740.000.000**	**-**	**-**	**-**	**740.000.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	740.000.000	-	-	-	740.000.000
	Indeks Satu Data Indonesia (86.00 Indeks)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Jumlah data geospasial yang dipublikasikan (30.00 Data)					
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai prinsip SDI (10.00 Unit)					
	Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik (30.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	Jumlah data geospasial yang dipublikasikan (30.00 Data)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai prinsip SDI (10.00 Unit)					
	Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik (30.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Jumlah data geospasial yang dipublikasikan (30.00 Data)					
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai prinsip SDI (10.00 Unit)					
	Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik (30.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**1.592.960.000**	**190.840.000**	**-**	**-**	**1.783.800.000**
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.164.140.000	-	-	-	1.164.140.000
	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (3.59 Angka)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	429.500.000	-	-	-	429.500.000
	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian (50.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik (50.00 Unit)					
	Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya (4.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	457.600.000	-	-	-	457.600.000
	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian (50.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik (50.00 Unit)					
	Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya (4.00 Orang)					
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	63.520.000	-	-	-	63.520.000
	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian (50.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik (50.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya (4.00 Orang)					
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	213.520.000	-	-	-	213.520.000
	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian (50.00 Unit)					
	Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik (50.00 Unit)					
	Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya (4.00 Orang)					
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian (100.00 %)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	428.820.000	190.840.000	-	-	619.660.000
	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (3.59 Angka)					
2.16.2.16.2.20.2.21.01.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	428.820.000	190.840.000	-	-	619.660.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi (50.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**33.933.698.000**	**-**	**-**	**-**	**33.933.698.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**33.933.698.000**	**-**	**-**	**-**	**33.933.698.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.089.628.000**	**-**	**-**	**-**	**28.089.628.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)*	120.000.000	-	-	-	120.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (11.00 %)*	75.000.000	-	-	-	75.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (11.00 %)*	35.000.000	-	-	-	35.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (11.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (11.00 %)*	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.433.081.000	-	-	-	14.433.081.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.008.081.000	-	-	-	14.008.081.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.000.000	-	-	-	410.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.975.000	-	-	-	582.975.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.500.000	-	-	-	27.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.550.000	-	-	-	82.550.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.925.000	-	-	-	12.925.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	-	-	-	325.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.555.222.000	-	-	-	12.555.222.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	-	-	-	4.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (12.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.310.000	-	-	-	1.087.310.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (12.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (12.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.443.412.000	-	-	-	11.443.412.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (12.00 Laporan)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.350.000	-	-	-	300.350.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.000.000	-	-	-	91.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.350.000	-	-	-	48.350.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000	-	-	-	46.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (12.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan (80.00 Unit)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**938.680.000**	**-**	**-**	**-**	**938.680.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase Koperasi Berkualitas (27.10 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi (13.72 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	538.680.000	-	-	-	538.680.000
	Persentase Koperasi Berkualitas (27.10 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	538.680.000	-	-	-	538.680.000
	Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan (100.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**195.000.000**	**-**	**-**	**-**	**195.000.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	195.000.000	-	-	-	195.000.000
	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas (91.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	195.000.000	-	-	-	195.000.000
	Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (91.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**577.000.000**	**-**	**-**	**-**	**577.000.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	577.000.000	-	-	-	577.000.000
	Persentase Koperasi Produktif (53.30 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	238.500.000	-	-	-	238.500.000
	Presentase pertumbuhan modal Koperasi (5.25 %)					
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (4.10 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	53.500.000	-	-	-	53.500.000
	Presentase pertumbuhan modal Koperasi (5.25 %)					
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (4.10 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Presentase pertumbuhan modal Koperasi (5.25 %)					
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (4.10 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	235.000.000	-	-	-	235.000.000
	Presentase pertumbuhan modal Koperasi (5.25 %)					
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (4.10 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**855.000.000**	**-**	**-**	**-**	**855.000.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	855.000.000	-	-	-	855.000.000
	Persentase SDM UMKM yang berkualitas (91.00 %)					
	Persentase Wirausaha yang berkualitas (85.00 %)					
	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh (17.15 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	178.422.000	-	-	-	178.422.000
	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya (91.00 %)					
	Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya (85.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	151.578.000	-	-	-	151.578.000
	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya (91.00 %)					
	Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya (85.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM (51.77 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM (5.00 %)					
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM (51.77 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	52.000.000	-	-	-	52.000.000
	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM (5.00 %)					
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM (51.77 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	270.000.000	-	-	-	270.000.000
	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM (5.00 %)					
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM (51.77 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	73.000.000	-	-	-	73.000.000
	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM (5.00 %)					
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM (51.77 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**3.278.390.000**	**-**	**-**	**-**	**3.278.390.000**
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	3.278.390.000	-	-	-	3.278.390.000
	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha (30.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	185.551.000	-	-	-	185.551.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya (60.00 %)					
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya (27.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	20.799.000	-	-	-	20.799.000
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya (60.00 %)					
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya (27.00 %)					
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	3.072.040.000	-	-	-	3.072.040.000
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya (60.00 %)					
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya (27.00 %)					
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**22.835.331.000**	**218.000.000**	**-**	**-**	**23.053.331.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**22.835.331.000**	**218.000.000**	**-**	**-**	**23.053.331.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.303.177.000**	**218.000.000**	**-**	**-**	**19.521.177.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	266.660.000	-	-	-	266.660.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	121.660.000	-	-	-	121.660.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	115.000.000	-	-	-	115.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)*	14.720.401.000	-	-	-	14.720.401.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	14.394.401.000	-	-	-	14.394.401.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	326.000.000	-	-	-	326.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.500.000	-	-	-	56.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)*	624.110.000	-	-	-	624.110.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	60.000.000	-	-	-	60.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	70.891.000	-	-	-	70.891.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	56.000.000	-	-	-	56.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	55.000.000	-	-	-	55.000.000
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	-	-	-	3.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.000.000	-	-	-	79.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.219.000	-	-	-	244.219.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.500.000	-	-	-	13.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	218.000.000	-	-	218.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	178.000.000	-	-	178.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	40.000.000	-	-	40.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.049.660.000	-	-	-	3.049.660.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	-	-	-	9.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.000.000	-	-	-	534.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000	-	-	-	53.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.453.660.000	-	-	-	2.453.660.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.846.000	-	-	-	505.846.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.846.000	-	-	-	305.846.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (160.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**667.200.000**	**-**	**-**	**-**	**667.200.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	667.200.000	-	-	-	667.200.000
	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	357.200.000	-	-	-	357.200.000
	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan (2.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan (2.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	210.000.000	-	-	-	210.000.000
	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan (2.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.514.954.000**	**-**	**-**	**-**	**1.514.954.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.514.954.000	-	-	-	1.514.954.000
	Persentase kepeminatan yang terealisasi (62.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.439.954.000	-	-	-	1.439.954.000
	Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan (40.00 Unit)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan (40.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**790.000.000**	**-**	**-**	**-**	**790.000.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	-	-	-	310.000.000
	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	310.000.000	-	-	-	310.000.000
	Jumlah dokumen ISO yang diterapkan (2.00 Dokumen)					
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	480.000.000	-	-	-	480.000.000
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (91.50 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan (7200.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah perizinan yang diterbitkan (1500.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan (7200.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah perizinan yang diterbitkan (1500.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan (7200.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah perizinan yang diterbitkan (1500.00 Dokumen)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**350.000.000**	**-**	**-**	**-**	**350.000.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui (25.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Persentase LKPM yang disetujui (22.00 %)					
	Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan (90.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	225.000.000	-	-	-	225.000.000
	Persentase LKPM yang disetujui (22.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan (90.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**210.000.000**	**-**	**-**	**-**	**210.000.000**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	210.000.000	-	-	-	210.000.000
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan (10.00 %)					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	210.000.000	-	-	-	210.000.000
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit)					
	Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan (100.00 %)					
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**151.542.445.000**	**110.000.000**	**-**	**-**	**151.652.445.000**
2.19.2.19.0.00.0.00.02	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**151.542.445.000**	**110.000.000**	**-**	**-**	**151.652.445.000**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.132.745.000**	**110.000.000**	**-**	**-**	**39.242.745.000**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.683.731.000	-	-	-	17.683.731.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.917.871.000	-	-	-	16.917.871.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	765.860.000	-	-	-	765.860.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	-	-	-	75.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.350.463.000	-	-	-	1.350.463.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	-	-	-	43.600.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.463.000	-	-	-	30.463.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000	-	-	-	165.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.400.000	-	-	-	871.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000.000	110.000.000	-	-	3.110.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	50.000.000	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	60.000.000	-	-	60.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.183.551.000	-	-	-	13.183.551.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.000.000	-	-	-	31.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	90.000.000	-	-	-	90.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)*	9.562.551.000	-	-	-	9.562.551.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (100.00 %)* *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)*	2.560.000.000	-	-	-	2.560.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	985.000.000	-	-	-	985.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.965.000.000**	**-**	**-**	**-**	**11.965.000.000**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.720.000.000	-	-	-	3.720.000.000
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi (8.60 %)					
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (80.60 %)					
	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (20.85 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	720.000.000	-	-	-	720.000.000
	Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya (3775.00 Orang)					
	Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda (13.15 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya (3775.00 Orang)					
	Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi (1.00 Unit)					
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda (13.15 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya (3775.00 Orang)					
	Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi (1.00 Unit)					
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda (13.15 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepeloporan (500.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar) (0.56 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepeloporan (500.00 Orang)					
	Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar) (0.56 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya (3775.00 Orang)					
	Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi (1.00 Unit)					
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda (13.15 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	900.000.000	-	-	-	900.000.000
	Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepeloporan (500.00 Orang)					
	Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar) (0.56 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	8.245.000.000	-	-	-	8.245.000.000
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi (8.60 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan (1000.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	7.245.000.000	-	-	-	7.245.000.000
	Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan (1000.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100.444.700.000**	**-**	**-**	**-**	**100.444.700.000**
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional (79.00 %)					
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir (0.34 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	150.000.000	-	-	-	150.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swas (1.00 Kegiatan)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	14.064.700.000	-	-	-	14.064.700.000
	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional (79.00 %)					
	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional (79.00 %)					
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir (0.34 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.300.000.000	-	-	-	3.300.000.000
	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional (50.00 Buah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional antar PPLOP (50.00 Orang)					
	Jumlah kejuaraan olahraga Paralympic yang diselenggarakan level provinsi (1.00 Kegiatan)					
	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar (PPLOP) yang diselenggarakan level provinsi (1.00 Kegiatan)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional (50.00 Buah)					
	Jumlah kejuaraan olahraga Paralympic yang diselenggarakan level provinsi (1.00 Kegiatan)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	10.364.700.000	-	-	-	10.364.700.000
	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional antar PPLOP (50.00 Orang)					
	Jumlah kejuaraan olahraga masyarakat yang diselenggarakan level provinsi (sportourisme) (3.00 Kegiatan)					
	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar (PPLOP) yang diselenggarakan level provinsi (1.00 Kegiatan)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	27.100.000.000	-	-	-	27.100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional (79.00 %)					
	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional (79.00 %)					
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir (0.34 %)					
	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional (10.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah Atlet Daerah yang terseleksi (81.00 Orang)					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pelajar prestasi tingkat nasional (PPLOP) (222.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	9.500.000.000	-	-	-	9.500.000.000
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional (700.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	14.450.000.000	-	-	-	14.450.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Atlet Daerah yang terseleksi (81.00 Orang)					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pelajar prestasi tingkat nasional (PPLOP) (222.00 Orang)					
	Jumlah Sport Science yang dikembangkan (1.00 Unit)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional (700.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.700.000.000	-	-	-	2.700.000.000
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi (1.00 Dokumen)					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional (700.00 Orang)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	58.780.000.000	-	-	-	58.780.000.000
	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional (10.00 %)					
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	58.580.000.000	-	-	-	58.580.000.000
	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (6.00 Organisasi)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.19.2.19.0.00.0.00.02.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (6.00 Organisasi)					
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**31.261.247.000**	**1.238.919.000**	**-**	**-**	**32.500.166.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**31.261.247.000**	**1.238.919.000**	**-**	**-**	**32.500.166.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.515.166.000**	**794.819.000**	**-**	**-**	**30.309.985.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.316.000	-	-	-	178.316.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.396.000	-	-	-	143.396.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.920.000	-	-	-	24.920.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.997.559.000	-	-	-	24.997.559.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.770.389.000	-	-	-	24.770.389.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	227.170.000	-	-	-	227.170.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.708.000	-	-	-	91.708.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000	-	-	-	2.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.508.000	-	-	-	89.508.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)*	17.700.000	-	-	-	17.700.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	2.500.000	-	-	-	2.500.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	5.200.000	-	-	-	5.200.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)*	705.114.000	179.324.000	-	-	884.438.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.380.000	-	-	-	78.380.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.250.000	-	-	-	155.250.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.345.000	-	-	-	12.345.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.279.000	-	-	-	246.279.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	5.184.000	-	-	-	5.184.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	42.676.000	179.324.000	-	-	222.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)*	-	424.295.000	-	-	424.295.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (45.00 Unit)*	-	136.000.000	-	-	136.000.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (45.00 Unit)*	-	288.295.000	-	-	288.295.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)*	3.186.166.000	-	-	-	3.186.166.000
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	-	-	1.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.964.666.000	-	-	-	1.964.666.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.603.000	191.200.000	-	-	529.803.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (100.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.553.000	-	-	-	112.553.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.300.000	40.000.000	-	-	107.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	151.200.000	-	-	151.200.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.750.000	-	-	-	88.750.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (165.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.032.028.000**	**437.680.000**	**-**	**-**	**1.469.708.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	191.404.000	437.680.000	-	-	629.084.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (85.20 Angka)					
	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (45.27 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	26.500.000	-	-	-	26.500.000
	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (3166650.00 Orang)					
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (12.00 Jenis)					
	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12.785.000	-	-	-	12.785.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (4.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP (270.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi (25.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	61.819.000	-	-	-	61.819.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (4.00 Perpustakaan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP (270.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi (25.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	23.300.000	427.680.000	-	-	450.980.000
	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (3166650.00 Orang)					
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (12.00 Jenis)					
	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (3166650.00 Orang)					
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (12.00 Jenis)					
	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.000.000	10.000.000	-	-	20.000.000
	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (3166650.00 Orang)					
	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (12.00 Jenis)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (5.00 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	23.620.000	-	-	-	23.620.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (4.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP (270.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi (25.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	28.380.000	-	-	-	28.380.000
	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi (4.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP (270.00 Perpustakaan)					
	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi (25.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	840.624.000	-	-	-	840.624.000
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (85.20 Angka)					
	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (45.27 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus (2.00 Kegiatan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	182.294.000	-	-	-	182.294.000
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus (2.00 Kegiatan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	286.316.000	-	-	-	286.316.000
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (1070.00 Orang)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	342.014.000	-	-	-	342.014.000
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus (2.00 Kegiatan)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**100.061.000**	**2.520.000**	**-**	**-**	**102.581.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	46.535.000	-	-	-	46.535.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah (9.43 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	6.535.000	-	-	-	6.535.000
	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (88.00 Penerbit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (88.00 Penerbit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	21.430.000	-	-	-	21.430.000
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah (9.43 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	11.535.000	-	-	-	11.535.000
	Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan (2.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	9.895.000	-	-	-	9.895.000
	Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan (2.00 Dokumen)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	14.326.000	-	-	-	14.326.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah (9.43 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	14.326.000	-	-	-	14.326.000
	Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan (269.00 Eksemplar)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17.770.000	2.520.000	-	-	20.290.000
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah (9.43 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	6.280.000	2.520.000	-	-	8.800.000
	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah (415.00 Eksemplar)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	11.490.000	-	-	-	11.490.000
	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah (415.00 Eksemplar)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**595.627.000**	**2.200.000**	**-**	**-**	**597.827.000**
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	261.125.000	-	-	-	261.125.000
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya (44.74 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	116.125.000	-	-	-	116.125.000
	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah (5.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan (51.00 Instansi)					
	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik (34.00 Lembaga)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah (5.00 Orang)					
	Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan (51.00 Instansi)					
	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik (34.00 Lembaga)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	135.000.000	-	-	-	135.000.000
	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah (5.00 Orang)					
	Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan (51.00 Instansi)					
	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik (34.00 Lembaga)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	175.727.000	2.200.000	-	-	177.927.000
	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi (79.15 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	11.308.000	2.200.000	-	-	13.508.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah arsip statis yang terkelola (146012.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	34.225.000	-	-	-	34.225.000
	Jumlah arsip statis yang terkelola (146012.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	130.194.000	-	-	-	130.194.000
	Jumlah arsip statis yang terkelola (146012.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	158.775.000	-	-	-	158.775.000
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (85.70 Angka)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah Arsip yang terlayankan (1000.00 Arsip)					
	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip (41.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	83.775.000	-	-	-	83.775.000
	Jumlah Arsip yang terlayankan (1000.00 Arsip)					
	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip (41.00 Unit)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**18.365.000**	**1.700.000**	**-**	**-**	**20.065.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	6.053.000	-	-	-	6.053.000
	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis (66.67 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.053.000	-	-	-	6.053.000
	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn (10000.00 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	9.012.000	-	-	-	9.012.000
	Persentase pemulihan arsip akibat bencana (20.34 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	9.012.000	-	-	-	9.012.000
	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana (11.40 Arsip)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	3.300.000	1.700.000	-	-	5.000.000
	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media (11.40 %)					
2.23.2.23.2.24.0.00.02.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3.300.000	1.700.000	-	-	5.000.000
	Jumlah Arsip yang dialih-mediakan (20.34 Arsip)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**878.060.736.000**	**33.037.172.000**	**-**	**-**	**911.097.908.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**78.492.601.000**	**11.270.997.000**	**-**	**-**	**89.763.598.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**78.492.601.000**	**11.270.997.000**	**-**	**-**	**89.763.598.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**63.355.006.000**	**502.756.000**	**-**	**-**	**63.857.762.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	453.691.000	-	-	-	453.691.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.000.000	-	-	-	208.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.691.000	-	-	-	195.691.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)*	43.977.993.000	-	-	-	43.977.993.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	43.055.093.000	-	-	-	43.055.093.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	851.400.000	-	-	-	851.400.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	71.500.000	-	-	-	71.500.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.000.000	-	-	-	136.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.000.000	-	-	-	16.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.556.138.000	228.756.000	-	-	1.784.894.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204.856.000	-	-	-	204.856.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.932.000	216.756.000	-	-	429.688.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.080.000	-	-	-	154.080.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.500.000	-	-	-	57.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	828.770.000	-	-	-	828.770.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	-	-	-	8.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	12.000.000	-	-	72.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.000.000	-	-	50.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	50.000.000	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.927.734.000	-	-	-	14.927.734.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.680.000	-	-	-	37.680.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.193.320.000	-	-	-	2.193.320.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.696.734.000	-	-	-	12.696.734.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.203.450.000	224.000.000	-	-	2.427.450.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	699.930.000	-	-	-	699.930.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.099.000	-	-	-	292.099.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.030.421.000	224.000.000	-	-	1.254.421.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (21.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.000.000	-	-	-	181.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**1.380.311.000**	**1.600.000**	**-**	**-**	**1.381.911.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	889.001.000	1.600.000	-	-	890.601.000
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (0.07 %)					
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (0.16 %)					
	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (0.19 %)					
	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan (25.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	345.734.000	1.600.000	-	-	347.334.000
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (1.00 Kawasan)					
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (2.00 Kawasan)					
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (3.00 Kawasan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan (1.00 Lokasi)					
	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (5.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	469.199.000	-	-	-	469.199.000
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (1.00 Kawasan)					
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (2.00 Kawasan)					
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (3.00 Kawasan)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	74.068.000	-	-	-	74.068.000
	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan (1.00 Lokasi)					
	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (5.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	491.310.000	-	-	-	491.310.000
	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi (50.17 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.245.000	-	-	-	70.245.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan (10.00 Kelompok)					
	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya (10.00 Kelompok)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	421.065.000	-	-	-	421.065.000
	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan (10.00 Kelompok)					
	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya (10.00 Kelompok)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**4.799.578.000**	**4.448.998.000**	**-**	**-**	**9.248.576.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.147.175.000	2.000.000.000	-	-	4.147.175.000
	Produksi Perikanan Tangkap (354029.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	44.100.000	-	-	-	44.100.000
	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa (30.00 Data)					
	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya (30.00 Orang)					
	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan (10000.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.285.225.000	2.000.000.000	-	-	3.285.225.000
	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa (30.00 Data)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya (30.00 Orang)					
	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan (10000.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	817.850.000	-	-	-	817.850.000
	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa (30.00 Data)					
	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya (30.00 Orang)					
	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan (10000.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	260.035.000	-	-	-	260.035.000
	Produksi Perikanan Tangkap (354029.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	260.035.000	-	-	-	260.035.000
	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan (1000.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.392.368.000	2.448.998.000	-	-	4.841.366.000
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak (91.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang (100.00 %)					
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto (100.00 %)					
	Produksi Perikanan Tangkap (354029.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	178.068.000	-	-	-	178.068.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun (1.00 Dokumen)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.211.461.000	2.366.448.000	-	-	3.577.909.000
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (1200.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (150.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (4050.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (4500.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (50.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (52.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (6600.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (800.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (950.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (9725.00 Dokumen)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (1.00 kg/kapita/tahun)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (1.00 Unit)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (2.00 Unit)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah (1.00 Unit)					
	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.002.839.000	82.550.000	-	-	1.085.389.000
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (1200.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (150.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (4050.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (4500.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (50.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (52.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (6600.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (800.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (950.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan (9725.00 Dokumen)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (1.00 kg/kapita/tahun)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (1.00 Unit)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi (2.00 Unit)					
	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah (1.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi (1.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**6.294.407.000**	**6.317.643.000**	**-**	**-**	**12.612.050.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.554.198.000	103.800.000	-	-	1.657.998.000
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %)					
	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut (5.00 %)					
	Produksi Perikanan Budidaya (600000.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	46.050.000	-	-	-	46.050.000
	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan (3.00 Jenis)					
	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana (10.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.400.000	103.800.000	-	-	105.200.000
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya (1.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.194.500.000	-	-	-	1.194.500.000
	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan (3.00 Jenis)					
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya (1.00 Lokasi)					
	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana (10.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	43.358.000	-	-	-	43.358.000
	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan (3.00 Jenis)					
	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana (10.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	220.325.000	-	-	-	220.325.000
	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium (450.00 sampel)					
	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya (40.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.565.000	-	-	-	48.565.000
	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium (450.00 sampel)					
	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya (40.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4.740.209.000	6.213.843.000	-	-	10.954.052.000
	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut (5.00 %)					
	Produksi Perikanan Budidaya (600000.00 Ton)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.190.164.000	2.658.000.000	-	-	6.848.164.000
	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan (1.00 Jenis)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya (3.00 Jenis)					
	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya (9.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	550.045.000	3.555.843.000	-	-	4.105.888.000
	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan (1.00 Jenis)					
	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya (9.00 Lokasi)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.663.227.000**	**-**	**-**	**-**	**1.663.227.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.609.497.000	-	-	-	1.609.497.000
	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (72.00 %)					
	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (50.00 %)					
	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (61.00 %)					
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat (17.00 %)					
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan (50.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur (17.00 %)					
	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (70.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	68.510.000	-	-	-	68.510.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan (50.00 Orang)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan (90.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil (80.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	530.354.000	-	-	-	530.354.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil (80.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	46.625.000	-	-	-	46.625.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan (50.00 Orang)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan (90.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	18.341.000	-	-	-	18.341.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil (80.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	8.285.000	-	-	-	8.285.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil (80.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	918.235.000	-	-	-	918.235.000
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (10.00 Dokumen)					
	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (3.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan (50.00 Orang)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (50.00 %)					
	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan (75.00 %)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan (90.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil (100.00 %)					
	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil (80.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	19.147.000	-	-	-	19.147.000
	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan (50.00 Orang)					
	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan (90.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	53.730.000	-	-	-	53.730.000
	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (70.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-	-	-	17.910.000
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (90.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya (90.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-	-	-	17.910.000
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (90.00 Orang)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya (90.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	-	-	-	17.910.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP (90.00 Orang)					
	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya (90.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.000.072.000**	**-**	**-**	**-**	**1.000.072.000**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	132.037.000	-	-	-	132.037.000
	Angka Konsumsi Ikan (17.71 kg/kapita/tahun)					
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan (4.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Produk Olahan Ikan (161604.00 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	82.037.000	-	-	-	82.037.000
	Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya (85.00 Unit)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	866.035.000	-	-	-	866.035.000
	Angka Konsumsi Ikan (17.71 kg/kapita/tahun)					
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan (4.00 %)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	866.035.000	-	-	-	866.035.000
	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan (550.00 Dokumen)					
	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan (2000.00 Orang)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Angka Konsumsi Ikan (17.71 kg/kapita/tahun)					
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2.000.000	-	-	-	2.000.000
	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	dan distrbusi produk perikanan (1.00 Kegiatan)					
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**86.780.737.000**	**1.239.415.000**	**-**	**-**	**88.020.152.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**86.780.737.000**	**1.239.415.000**	**-**	**-**	**88.020.152.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**22.675.000.000**	**-**	**-**	**-**	**22.675.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.525.000.000	-	-	-	21.525.000.000
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna (27.11 %)					
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional (26.10 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	14.000.000.000	-	-	-	14.000.000.000
	Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan (14.00 Orang)					
	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (12.12 %)					
	Persentase peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian (16.66 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.225.000.000	-	-	-	4.225.000.000
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (10.30 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.300.000.000	-	-	-	3.300.000.000
	Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan (14.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (12.12 %)					
	Persentase peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian (16.66 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000
	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan (72.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000
	Persentase kesenian yang direvitalisasi dan dikembangkan (1.21 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.750.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (1.12 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000
	Persentase SDM & lembaga kesenian yang dilakukan pembinaan (0.14 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi (53.55 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah literasi tradisi (317.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.205.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.205.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	475.000.000	-	-	-	475.000.000
	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional (13.60 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	475.000.000	-	-	-	475.000.000
	Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi (9.65 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	730.000.000	-	-	-	730.000.000
	Persentase Cagar Budaya berdayaguna (16.12 %)					
	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional (13.60 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi yang dilindungi (43.75 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan (13.00 Angka)					
	Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan (224.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan (13.00 Angka)					
	Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan (224.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	280.000.000	-	-	-	280.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan (13.00 Angka)					
	Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan (224.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.900.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.900.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	1.900.000.000	-	-	-	1.900.000.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (90.10 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	675.000.000	-	-	-	675.000.000
	Jumlah pengunjung museum (60000.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	975.000.000	-	-	-	975.000.000
	Jumlah pengunjung museum (60000.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah pengunjung museum (60000.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**42.023.062.000**	**1.239.415.000**	**-**	**-**	**43.262.477.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.133.641.000	-	-	-	23.133.641.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.533.641.000	-	-	-	22.533.641.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.180.673.000	-	-	-	2.180.673.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	162.192.000	-	-	-	162.192.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.568.000	-	-	-	195.568.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.053.000	-	-	-	161.053.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.400.000	-	-	-	92.400.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.888.000	-	-	-	12.888.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	299.580.000	-	-	-	299.580.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991.992.000	-	-	-	991.992.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.239.415.000	-	-	1.239.415.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	5.000.000	-	-	5.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (31.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.176.915.000	-	-	1.176.915.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (31.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	57.500.000	-	-	57.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (31.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.895.682.000	-	-	-	11.895.682.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.276.000	-	-	-	31.276.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.464.600.000	-	-	-	2.464.600.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.900.000	-	-	-	82.900.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.316.906.000	-	-	-	9.316.906.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.923.066.000	-	-	-	3.923.066.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (86.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah (100.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	-	-	-	309.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.900.000	-	-	-	181.900.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	32.000.000	-	-	-	32.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.722.761.000	-	-	-	2.722.761.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.605.000	-	-	-	313.605.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.800.000	-	-	-	158.800.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (117.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (26.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.525.625.000**	**-**	**-**	**-**	**6.525.625.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	6.000.625.000	-	-	-	6.000.625.000
	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (10.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	6.000.625.000	-	-	-	6.000.625.000
	Daya Tarik Wisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (2.00 Lokasi)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (10.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (1.00 Lokasi)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan (10.00 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	150.000.000	-	-	-	150.000.000
3.26.3.26.2.22.0.00.02.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	200.000.000	-	-	-	200.000.000
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**8.652.050.000**	**-**	**-**	**-**	**8.652.050.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.652.050.000	-	-	-	8.652.050.000
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (75348282.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	165.000.000	-	-	-	165.000.000
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (70.79 Ribu Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	590.000.000	-	-	-	590.000.000
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (70.79 Ribu Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7.897.050.000	-	-	-	7.897.050.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (70.79 Ribu Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**850.000.000**	**-**	**-**	**-**	**850.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) (1.00 Kabupaten/Kota)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Uji Petik PMK3I Kab/Kota (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Uji Petik PMK3I Kab/Kota (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Uji Petik PMK3I Kab/Kota (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) (1.00 Kabupaten/Kota)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya (1.00 Dokumen)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.050.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.050.000.000**
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi (4.30 %)					
	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi (3.30 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan (25.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	-	-	150.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (100.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan (25.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan (25.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi (4.30 %)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (150.00 Orang)					
3.26.3.26.2.22.0.00.02.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (150.00 Orang)					
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**549.916.600.000**	**19.604.340.000**	**-**	**-**	**569.520.940.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10	**Dinas Pertanian dan Peternakan**	**549.916.600.000**	**19.604.340.000**	**-**	**-**	**569.520.940.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**149.547.367.000**	**19.011.230.000**	**-**	**-**	**168.558.597.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.741.911.000	-	-	-	1.741.911.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.016.754.000	-	-	-	1.016.754.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	725.157.000	-	-	-	725.157.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.646.685.000	-	-	-	110.646.685.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.642.685.000	-	-	-	109.642.685.000
	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	954.000.000	-	-	-	954.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	467.835.000	-	-	-	467.835.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	360.000.000	-	-	-	360.000.000
	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.240.000	-	-	-	87.240.000
	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah (1.00 %)					
	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20.595.000	-	-	-	20.595.000
	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	96.000.000	-	-	-	96.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	96.000.000	-	-	-	96.000.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.621.000	-	-	-	278.621.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.920.000	-	-	-	3.920.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.920.000	-	-	-	3.920.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.294.000	-	-	-	258.294.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.487.000	-	-	-	12.487.000
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.353.967.000	239.000.000	-	-	4.592.967.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	224.021.000	-	-	-	224.021.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.806.000	182.500.000	-	-	602.306.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	281.073.000	51.500.000	-	-	332.573.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	554.722.000	-	-	-	554.722.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.570.000	-	-	-	336.570.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	527.074.000	-	-	-	527.074.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.951.431.000	-	-	-	1.951.431.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (1.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.270.000	5.000.000	-	-	63.270.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	820.384.000	17.390.371.000	-	-	18.210.755.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	215.000.000	-	-	235.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	13.122.418.000	-	-	13.163.418.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	44.100.000	816.700.000	-	-	860.800.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	460.775.000	-	-	560.775.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	615.284.000	2.775.478.000	-	-	3.390.762.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.999.563.000	-	-	-	22.999.563.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.650.000	-	-	-	47.650.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (100.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.506.338.000	-	-	-	4.506.338.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (100.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.420.000	-	-	-	393.420.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (100.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.052.155.000	-	-	-	18.052.155.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (100.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.142.401.000	1.381.859.000	-	-	9.524.260.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.875.000	-	-	-	1.384.875.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.760.000	-	-	-	205.760.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.200.000	-	-	-	42.200.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.191.290.000	-	-	-	1.191.290.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	530.500.000	50.000.000	-	-	580.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	59.000.000	-	-	-	59.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.012.276.000	701.275.000	-	-	4.713.551.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	526.500.000	630.584.000	-	-	1.157.084.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (100.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (7.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**158.688.418.000**	**593.110.000**	**-**	**-**	**159.281.528.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	98.217.513.000	82.500.000	-	-	98.300.013.000
	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan (100.00 %)					
	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi (3.00 %)					
	Produksi Bawang Merah (617015.00 Ton)					
	Produksi Cabai (456621.00 Ton)					
	Produksi Jagung (3301024.00 Ton)					
	Produksi Kedelai (52790.00 Ton)					
	Produksi Kelapa (166955.00 Ton)					
	Produksi Kopi (26875.00 Ton)					
	Produksi Padi (9380811.00 Ton)					
	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat (392201.00 Ton)					
	Produksi Tebu (3674236.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	42.177.086.000	82.500.000	-	-	42.259.586.000
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Jagung dan serealia (3200.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Kedelai, Aneka kacang dan Umbi (3100.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Padi (47300.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan bawang merah (25.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan cabai (310.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman buah (20.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman obat (3.00 Ha)					
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan (12.00 Dokumen)					
	Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan (1.00 Dokumen)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	56.040.427.000	-	-	-	56.040.427.000
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kelapa dan tanaman tahunan lainnya (630.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kopi dan rempah penyegar lainnya (960.00 Ha)					
	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tebu dan tanaman semusim lainnya (1408.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	15.430.304.000	510.610.000	-	-	15.940.914.000
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang (100.00 %)					
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura (100.00 %)					
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan (100.00 %)					
	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.077.549.000	470.110.000	-	-	1.547.659.000
	Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan (12.00 Bulan)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah (700000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran (6000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih perkebunan (874180.00 Batang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (1000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (20800.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (938.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.266.712.000	-	-	-	3.266.712.000
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk (6500.00 Batang)					
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura (12725.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih padi bersertifikat (30.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (41.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih rempah penyegar (1.00 Setek)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.20 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (3.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (10000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (30.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (5000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (212.20 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat (2.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (0.50 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (20000.00 Setek)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (2357.00 Pohon)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (24.00 Ton)					
	Jumlah tanaman produksi perkebunan (12.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	96.000.000	-	-	-	96.000.000
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk (6500.00 Batang)					
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura (12725.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih padi bersertifikat (30.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (41.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih rempah penyegar (1.00 Setek)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.20 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (3.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (10000.00 Batang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah produksi benih tanaman buah (30.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (5000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (212.20 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat (2.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (0.50 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (20000.00 Setek)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (2357.00 Pohon)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (24.00 Ton)					
	Jumlah tanaman produksi perkebunan (12.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	687.582.000	-	-	-	687.582.000
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk (6500.00 Batang)					
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura (12725.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih padi bersertifikat (30.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (41.00 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah produksi benih rempah penyegar (1.00 Setek)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.20 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (3.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (10000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (30.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (5000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (212.20 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat (2.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (0.50 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (20000.00 Setek)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (2357.00 Pohon)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (24.00 Ton)					
	Jumlah tanaman produksi perkebunan (12.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.954.415.000	-	-	-	1.954.415.000
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk (6500.00 Batang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura (12725.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih padi bersertifikat (30.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (41.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih rempah penyegar (1.00 Setek)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.20 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (3.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (10000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (30.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (5000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (212.20 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat (2.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (0.50 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (20000.00 Setek)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (2357.00 Pohon)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (24.00 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah tanaman produksi perkebunan (12.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	7.404.708.000	40.500.000	-	-	7.445.208.000
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk (6500.00 Batang)					
	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura (12725.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih padi bersertifikat (30.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (41.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih rempah penyegar (1.00 Setek)					
	Jumlah produksi benih sayuran (0.20 Batang)					
	Jumlah produksi benih sayuran (3.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (10000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (30.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman buah (5000.00 Batang)					
	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat (212.20 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat (2.00 Ton)					
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (0.50 Batang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar (20000.00 Setek)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (2357.00 Pohon)					
	Jumlah produksi tanaman perkebunan (24.00 Ton)					
	Jumlah tanaman produksi perkebunan (12.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	442.303.000	-	-	-	442.303.000
	Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan (12.00 Bulan)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah (700000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran (6000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih perkebunan (874180.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (1000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (20800.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (938.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	210.398.000	-	-	-	210.398.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan (12.00 Bulan)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah (700000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran (6000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih perkebunan (874180.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (1000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (20800.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (938.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	290.637.000	-	-	-	290.637.000
	Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih perkebunan (12.00 Bulan)					
	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan (12.00 Bulan)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah (700000.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran (6000.00 Ton)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah sertifikasi benih perkebunan (874180.00 Batang)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (1000.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (20800.00 Ton)					
	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan (938.00 Ton)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	6.337.000.000	-	-	-	6.337.000.000
	Jumlah Populasi ternak (6135083.00 (ST)/(AU))					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	6.337.000.000	-	-	-	6.337.000.000
	Jumlah kelompok atau usaha budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practices (3.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	37.843.601.000	-	-	-	37.843.601.000
	Jumlah Populasi ternak (6135083.00 (ST)/(AU))					
	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging (1.00 %)					
	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu (1.00 %)					
	Persentase produksi dan distribusi semen beku (1.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	8.352.946.000	-	-	-	8.352.946.000
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang produknya sesuai standar kualitas pakan (3.00 Unit)					
	Jumlah produksi semen segar (15.36 Liter)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan (3.00 Buah)					
	Presentase semen beku layak edar (80.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	29.490.655.000	-	-	-	29.490.655.000
	Jumlah bibit ternak ruminansia pedaging yang ber sklb (62.00 Ekor)					
	Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber sklb (4.00 Ekor)					
	Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang produknya sesuai standar kualitas pakan (3.00 Unit)					
	Jumlah produksi semen segar (15.36 Liter)					
	Jumlah produksi ternak non ruminansia pedaging yang diedarkan (14433.00 Ekor)					
	Jumlah produksi ternak non ruminansia petelur yang diedarkan (16399.00 Ekor)					
	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan (3.00 Buah)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Presentase semen beku layak edar (80.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	860.000.000	-	-	-	860.000.000
	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis (81.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	860.000.000	-	-	-	860.000.000
	Jumlah laporan pemeriksaan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan (4.00 Laporan)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**178.234.000.000**	**-**	**-**	**-**	**178.234.000.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	178.234.000.000	-	-	-	178.234.000.000
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan (5.00 %)					
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	75.580.000.000	-	-	-	75.580.000.000
	Jumlah fasilitasi pupuk/pembenah tanah (14800.00 Ha)					
	Jumlah fasilitasi sarpras peternakan (10.00 Unit)					
	Jumlah jaringan irigasi alternatif yang difasilitasi (75.00 Paket)					
	jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi (334.00 Paket)					
	jumlah kelembagaan pengelola alsintan (240.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	jumlah luasan lahan yang dioptimasi (50.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	102.654.000.000	-	-	-	102.654.000.000
	Jumlah fasilitasi pupuk/pembenah tanah (14800.00 Ha)					
	Jumlah fasilitasi sarpras peternakan (10.00 Unit)					
	Jumlah jaringan irigasi alternatif yang difasilitasi (75.00 Paket)					
	jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi (334.00 Paket)					
	jumlah kelembagaan pengelola alsintan (240.00 Unit)					
	jumlah luasan lahan yang dioptimasi (50.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.637.563.000**	**-**	**-**	**-**	**4.637.563.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.080.000.000	-	-	-	1.080.000.000
	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.080.000.000	-	-	-	1.080.000.000
	Jumlah laporan Situasi Penyakit Menular Strategis (PHMS) (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS (1.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah Ternak yang diberikan rekomendasi keluar masuk Jawa Tengah (2920000.00 Ekor)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.407.563.000	-	-	-	3.407.563.000
	Persentase Layanan Veteriner (100.00 %)					
	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV (30.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	910.000.000	-	-	-	910.000.000
	Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV (45.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.497.563.000	-	-	-	2.497.563.000
	Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Jawa Tengah (24950.00 Ekor)					
	Jumlah Pengujian di Laboratorium Veteriner di Jawa Tengah (44930.00 sampel)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**5.850.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.850.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.850.000.000	-	-	-	5.850.000.000
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura (10.00 %)					
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan (10.00 %)					
	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan (20.00 %)					
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura (5.00 %)					
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan (5.00 %)					
	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan (5.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.550.000.000	-	-	-	5.550.000.000
	Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan (29.00 Unit)					
	Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura (152542.00 Ha)					
	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas perkebunan (1929741.00 Ha)					
	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan (4014129.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan (29.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura (152542.00 Ha)					
	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas perkebunan (1929741.00 Ha)					
	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan (4014129.00 Ha)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**52.959.252.000**	**-**	**-**	**-**	**52.959.252.000**
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	34.304.978.000	-	-	-	34.304.978.000
	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi (0.20 %)					
	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak (1.25 %)					
	Persentase SDM pertanian yang dilatih (100.00 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.111.000.000	-	-	-	3.111.000.000
	Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis (1410.00 Orang)					
	Jumlah SDM peternak yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis (690.00 Orang)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	31.193.978.000	-	-	-	31.193.978.000
	jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian (1.00 Dokumen)					
	jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi (23.00 Kelompok)					
	Jumlah luas lahan petani yang terfasilitasi asuransi (10130.00 Ha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (800.00 Orang)					
	Jumlah peternak yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan (30.00 Orang)					
	Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis (1410.00 Orang)					
	Jumlah SDM peternak yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis (690.00 Orang)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	18.654.274.000	-	-	-	18.654.274.000
	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi (0.20 %)					
	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak (1.25 %)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	17.904.274.000	-	-	-	17.904.274.000
	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak menuju korporasi (2.00 Kelompok)					
	jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menuju korporasi (5.00 Unit)					
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak menuju korporasi (2.00 Kelompok)					
	jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menuju korporasi (5.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**54.847.707.000**	**74.420.000**	**-**	**-**	**54.922.127.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**54.847.707.000**	**74.420.000**	**-**	**-**	**54.922.127.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.579.175.000**	**74.420.000**	**-**	**-**	**48.653.595.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)*	557.500.000	-	-	-	557.500.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	160.592.000	-	-	-	160.592.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	334.701.000	-	-	-	334.701.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	31.427.000	-	-	-	31.427.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	30.780.000	-	-	-	30.780.000
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.181.286.000	-	-	-	37.181.286.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.149.286.000	-	-	-	36.149.286.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	822.000.000	-	-	-	822.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	318.218.000	-	-	-	318.218.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	294.500.000	-	-	-	294.500.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.718.000	-	-	-	23.718.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.901.000	-	-	-	99.901.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.901.000	-	-	-	14.901.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.364.287.000	23.820.000	-	-	1.388.107.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.418.000	-	-	-	55.418.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.267.000	23.020.000	-	-	110.287.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.144.000	800.000	-	-	68.944.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.712.000	-	-	-	196.712.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.490.000	-	-	-	33.490.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.535.000	-	-	-	50.535.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849.231.000	-	-	-	849.231.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.490.000	-	-	-	23.490.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.600.000	-	-	50.600.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	50.600.000	-	-	50.600.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.938.491.000	-	-	-	7.938.491.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	-	-	-	19.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.207.000	-	-	-	1.627.207.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	-	-	-	13.250.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.279.034.000	-	-	-	6.279.034.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.492.000	-	-	-	1.119.492.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (42.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	423.192.000	-	-	-	423.192.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (42.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	-	80.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (42.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	371.758.000	-	-	-	371.758.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (42.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.542.000	-	-	-	204.542.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (10.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (42.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (5.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (6.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**923.631.000**	**-**	**-**	**-**	**923.631.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	251.266.000	-	-	-	251.266.000
	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah (27.58 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	251.266.000	-	-	-	251.266.000
	Jumlah Cakupan Wilayah Penyediaan Data Geologi Untuk Konservasi Di Jawa Tengah (35.00 Kabupaten/Kota)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	672.365.000	-	-	-	672.365.000
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah (27.58 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (3.30 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (2.27 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (2.65 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (6.99 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.98 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (1.49 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (1.58 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (2.60 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (3.95 %)					
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (2.98 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	372.365.000	-	-	-	372.365.000
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**1.077.356.000**	**-**	**-**	**-**	**1.077.356.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	858.902.000	-	-	-	858.902.000
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah (72.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (72.90 %)					
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (72.90 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	145.880.000	-	-	-	145.880.000
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (4.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak (6.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (2.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (4.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (5.00 Kabupaten/Kota)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	713.022.000	-	-	-	713.022.000
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah (35.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (4.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak (6.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (3.00 Kabupaten/Kota)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (3.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (2.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (4.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (5.00 Kabupaten/Kota)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.454.000	-	-	-	123.454.000
	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah (72.90 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.454.000	-	-	-	123.454.000
	Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (9.88 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.135.551.000**	**-**	**-**	**-**	**2.135.551.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	647.600.000	-	-	-	647.600.000
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria (26.08 SBM)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi (28.97 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak (127.91 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan (57.95 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara (144.05 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan (165.42 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara (45.11 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo (179.64 SBM)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	647.600.000	-	-	-	647.600.000
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria (8.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi (24.00 Orang)					
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak (24.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan (40.00 Orang)					
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo (84.00 Orang)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1.387.951.000	-	-	-	1.387.951.000
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah (972.99 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria (26.08 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi (28.97 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak (127.91 SBM)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan (57.95 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara (144.05 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan (165.42 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara (45.11 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo (179.64 SBM)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	400.631.000	-	-	-	400.631.000
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah (990.00 Orang)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	987.320.000	-	-	-	987.320.000
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (150.00 Orang)					
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak (150.00 Orang)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah (150.00 Orang)					
	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara (320.00 Orang)					
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan (20.00 Orang)					
	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara (20.00 Orang)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah (972.99 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria (26.08 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi (28.97 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak (127.91 SBM)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan (57.95 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah (98.93 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara (144.05 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan (165.42 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara (45.11 SBM)					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo (179.64 SBM)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Bangunan yang Telah Menerapkan Konservasi Energi (2.00 Unit)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**2.131.994.000**	**-**	**-**	**-**	**2.131.994.000**
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	154.194.000	-	-	-	154.194.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria (43.13 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan (43.10 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi (43.03 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak (42.31 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan (43.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara (43.11 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan (43.11 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo (43.11 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	154.194.000	-	-	-	154.194.000
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang - Demak (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (100.00 %)					
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Solo (100.00 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	136.800.000	-	-	-	136.800.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria (43.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan (43.10 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi (43.03 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak (42.31 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan (43.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara (43.11 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan (43.11 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo (43.11 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	136.800.000	-	-	-	136.800.000
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (42.81 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.04 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.12 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.17 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.29 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.31 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.33 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.37 %)					
	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) (43.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.841.000.000	-	-	-	1.841.000.000
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah (43.02 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria (43.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan (43.10 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi (43.03 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak (42.31 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan (43.13 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara (43.11 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan (43.11 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara (43.07 %)					
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo (43.11 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	16.000.000	-	-	-	16.000.000
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak (97.40 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah (97.50 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo (97.40 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	600.000.000	-	-	-	600.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Jawa Tengah (97.40 %)					
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.225.000.000	-	-	-	1.225.000.000
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan (97.40 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah (97.50 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara (97.40 %)					
	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo (97.40 %)					
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**108.023.091.000**	**848.000.000**	**-**	**-**	**108.871.091.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**108.023.091.000**	**848.000.000**	**-**	**-**	**108.871.091.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah (9.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal (4.65 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan (3.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	200.000.000	-	-	-	200.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**33.550.000.000**	**-**	**-**	**-**	**33.550.000.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau (0.52 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	95.000.000	-	-	-	95.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.455.000.000	-	-	-	33.455.000.000
	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau (0.52 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	140.000.000	-	-	-	140.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.315.000.000	-	-	-	33.315.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**2.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.150.000.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	2.150.000.000	-	-	-	2.150.000.000
	Ekspor Barang dan Jasa (11.12 % PDRB)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Komoditi Potensi Ekspor yang ditingkatkan citra produknya (5.00 Komoditi)					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor Produk Jawa Tengah (1450.00 Pelaku Usaha)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Komoditi Potensi Ekspor yang ditingkatkan citra produknya (5.00 Komoditi)					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor Produk Jawa Tengah (1450.00 Pelaku Usaha)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi (3.00 Dokumen)					
	Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Komoditi Potensi Ekspor yang ditingkatkan citra produknya (5.00 Komoditi)					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor Produk Jawa Tengah (1450.00 Pelaku Usaha)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**999.054.000**	**-**	**-**	**-**	**999.054.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen (1.05 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	300.000.000	-	-	-	300.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kasus yang ditangani BPSK (12.00 Kasus)					
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi tentang perlindungan konsumen (300.00 Orang)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	574.054.000	-	-	-	574.054.000
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (5.00 %)					
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (2.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2100.00 Sertifikat)					
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2695.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (45.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (5.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	200.712.000	-	-	-	200.712.000
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2100.00 Sertifikat)					
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2695.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (45.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (5.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	183.342.000	-	-	-	183.342.000
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2100.00 Sertifikat)					
	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi (2695.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (45.00 Dokumen)					
	Jumlah pelaksanaan sertifikasi (5.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen (1.05 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (30.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**6.791.546.000**	**-**	**-**	**-**	**6.791.546.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	6.336.546.000	-	-	-	6.336.546.000
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (10.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	6.336.546.000	-	-	-	6.336.546.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	455.000.000	-	-	-	455.000.000
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri (10.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	455.000.000	-	-	-	455.000.000
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.089.345.000**	**698.000.000**	**-**	**-**	**53.787.345.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	786.693.000	-	-	-	786.693.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	261.693.000	-	-	-	261.693.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.207.106.000	-	-	-	32.207.106.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.761.706.000	-	-	-	30.761.706.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.395.400.000	-	-	-	1.395.400.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (404.00 Dokumen)					
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (5.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	265.960.000	-	-	-	265.960.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.960.000	-	-	-	240.960.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	615.000.000	-	-	-	615.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	-	-	-	55.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	510.000.000	-	-	-	510.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.089.904.000	-	-	-	2.089.904.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000	-	-	-	65.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.000.000	-	-	-	176.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	235.500.000	-	-	-	235.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675.070.000	-	-	-	675.070.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.350.000	-	-	-	43.350.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	178.025.000	-	-	-	178.025.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.959.000	-	-	-	686.959.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.000.000	698.000.000	-	-	858.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	98.000.000	-	-	258.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (23.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	20.000.000	-	-	20.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (23.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	580.000.000	-	-	580.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (13.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (23.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.536.019.000	-	-	-	14.536.019.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	-	-	1.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (6.00 Laporan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.050.000	-	-	-	2.690.050.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (6.00 Laporan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.844.969.000	-	-	-	11.844.969.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (2.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (24.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (3.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (6.00 Laporan)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.663.000	-	-	-	2.428.663.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) (100.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.000.000	-	-	-	381.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.500.000	-	-	-	42.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.214.000	-	-	-	456.214.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.209.000.000	-	-	-	1.209.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000	-	-	-	56.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.949.000	-	-	-	258.949.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (33.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (36.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (40.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (77.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (82.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**10.611.146.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**10.761.146.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	10.611.146.000	150.000.000	-	-	10.761.146.000
	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri (10.00 %)					
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.40 %)					
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (5.00 %)					
	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri (2.41 %)					
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (86.00 %)					
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi (6.23 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.875.000.000	-	-	-	1.875.000.000
	Jumlah Dokumen Pengembangan Perwilayahan Industri (2.00 Kegiatan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah SDM Industri Yang dilatih dan Jumlah Kegiatan fasiliatasi Pengembangan Teknologi Industri (95.00 Orang)					
	Jumlah Sentra Yang di Fasilitasi Kelembagaannya (4.00 Wilayah)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.083.500.000	150.000.000	-	-	1.233.500.000
	Jumlah Dokumen Pengembangan Perwilayahan Industri (2.00 Kegiatan)					
	Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (180.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan (20.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (70.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki (100.00 Orang)					
	Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil (200.00 Orang)					
	Jumlah SDM Industri Yang dilatih dan Jumlah Kegiatan fasiliatasi Pengembangan Teknologi Industri (95.00 Orang)					
	Jumlah Sentra Yang di Fasilitasi Kelembagaannya (4.00 Wilayah)					
	Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (1.00 Industri)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.830.000.000	-	-	-	1.830.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Sertifikasi Industri (87.00 Industri)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.822.646.000	-	-	-	5.822.646.000
	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi implementasi Idustri Hijau (103.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan industri (256.00 Industri)					
	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi promosi dan Kerjasama produk industri (65.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (180.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan (20.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan (70.00 Pelaku Usaha)					
	Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki (100.00 Orang)					
	Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil (200.00 Orang)					
	Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan (1.00 Industri)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**502.000.000**	**-**	**-**	**-**	**502.000.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	502.000.000	-	-	-	502.000.000
	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan (6.00 %)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	477.000.000	-	-	-	477.000.000
	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan (6.00 Laporan / Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan (6.00 Laporan / Dokumen)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**60.000.000**	**-**	**-**	**-**	**60.000.000**
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (10.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS (1200.00 Unit)					
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS (1200.00 Unit)					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.237.358.814.000**	**32.940.292.000**	**-**	**-**	**1.270.299.106.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**674.712.519.000**	**28.004.338.000**	**-**	**-**	**702.716.857.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**413.268.912.000**	**-**	**-**	**-**	**413.268.912.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.985.353.000**	**-**	**-**	**-**	**1.985.353.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO HUKUM**	**3.487.018.000**	**-**	**-**	**-**	**3.487.018.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH**	**2.401.074.000**	**-**	**-**	**-**	**2.401.074.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEREKONOMIAN**	**2.877.884.000**	**-**	**-**	**-**	**2.877.884.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.271.500.000**	**-**	**-**	**-**	**2.271.500.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	**3.431.513.000**	**-**	**-**	**-**	**3.431.513.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ORGANISASI**	**2.000.522.000**	**-**	**-**	**-**	**2.000.522.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01	**BIRO UMUM**	**242.988.743.000**	**28.004.338.000**	**-**	**-**	**270.993.081.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**631.018.000**	**-**	**-**	**-**	**631.018.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**217.884.000**	**-**	**-**	**-**	**217.884.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**204.272.000**	**-**	**-**	**-**	**204.272.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**242.988.743.000**	**28.004.338.000**	**-**	**-**	**270.993.081.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**511.956.000**	**-**	**-**	**-**	**511.956.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**421.074.000**	**-**	**-**	**-**	**421.074.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**590.064.000**	**-**	**-**	**-**	**590.064.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**516.500.000**	**-**	**-**	**-**	**516.500.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.630.155.000**	**-**	**-**	**-**	**1.630.155.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah (90.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.175.104.000	-	-	-	103.175.104.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.550.104.000	-	-	-	100.550.104.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475.000.000	-	-	-	475.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (12.00 Dokumen)*	500.000.000	-	-	-	500.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (12.00 Laporan)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum (100.00 %)*	380.622.000	-	-	-	380.622.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)*	135.678.000	-	-	-	135.678.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi (100.00 %)*	80.682.000	-	-	-	80.682.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.996.000	-	-	-	54.996.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.622.000	-	-	-	380.622.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.884.000	-	-	-	217.884.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.500.000	-	-	-	346.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.272.000	-	-	-	204.272.000
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.155.000	-	-	-	1.630.155.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.386.000	-	-	-	454.386.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.074.000	-	-	-	421.074.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.956.000	-	-	-	511.956.000
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.713.000.000	-	-	-	14.713.000.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.396.000	-	-	-	250.396.000
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	550.000.000	-	-	-	550.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000	-	-	-	700.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	68.000.000	-	-	-	68.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000.000	-	-	-	9.000.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.120.000	-	-	-	565.120.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (100.00 %)*	386.283.000	-	-	-	386.283.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian (100.00 %)*	202.884.000	-	-	-	202.884.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (100.00 %)*	331.281.000	-	-	-	331.281.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)*	395.969.000	-	-	-	395.969.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum (100.00 %)*	213.686.000	-	-	-	213.686.000
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	-	-	-	180.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.272.000	-	-	-	24.272.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.417.000	-	-	-	58.417.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.065.035.000	-	-	-	1.065.035.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.791.000	-	-	-	34.791.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.219.000	-	-	-	15.219.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.956.000	-	-	-	61.956.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.710.000	-	-	-	36.710.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	28.004.338.000	-	-	28.004.338.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	700.000.000	-	-	700.000.000
	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Paket)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	27.304.338.000	-	-	27.304.338.000
	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (2.00 Paket)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.508.016.000	-	-	-	39.508.016.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	-	-	-	40.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000.000	-	-	-	8.000.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.268.016.000	-	-	-	30.268.016.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda (12.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.100.000.000	-	-	-	15.100.000.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000.000	-	-	-	8.000.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (833.00 Unit)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27.371.691.000	-	-	-	27.371.691.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	-	-	-	2.743.094.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.168.597.000	-	-	-	24.168.597.000
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.385.000.000	-	-	-	9.385.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.185.000.000	-	-	-	2.185.000.000
	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	29.064.057.000	-	-	-	29.064.057.000
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24.071.431.000	-	-	-	24.071.431.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	4.492.626.000	-	-	-	4.492.626.000
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol (12.00 Laporan)					
	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan (12.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	3.371.875.000	-	-	-	3.371.875.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.001.846.000	-	-	-	3.001.846.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (1.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (1.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	70.029.000	-	-	-	70.029.000
	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun (1.00 Laporan)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.410.458.000**	**-**	**-**	**-**	**1.410.458.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	508.115.000	-	-	-	508.115.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya (91.43 %)					
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif (92.00 %)					
	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi (71.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	199.101.000	-	-	-	199.101.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	144.920.000	-	-	-	144.920.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	164.094.000	-	-	-	164.094.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	902.343.000	-	-	-	902.343.000
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB (71.42 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat (71.43 %)					
	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan (93.00 %)					
	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A (59.52 %)					
	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas (39.21 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	265.600.000	-	-	-	265.600.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	214.847.000	-	-	-	214.847.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	217.896.000	-	-	-	217.896.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	204.000.000	-	-	-	204.000.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**2.919.557.000**	**-**	**-**	**-**	**2.919.557.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	675.000.000	-	-	-	675.000.000
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	480.000.000	-	-	-	480.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	105.000.000	-	-	-	105.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	558.263.000	-	-	-	558.263.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	378.263.000	-	-	-	378.263.000
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)					
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (100.00 %)					
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.686.294.000	-	-	-	1.686.294.000
	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1.214.294.000	-	-	-	1.214.294.000
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	347.000.000	-	-	-	347.000.000
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125.000.000	-	-	-	125.000.000
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (100.00 %)					
	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah (95.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**411.638.757.000**	**-**	**-**	**-**	**411.638.757.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	410.388.757.000	-	-	-	410.388.757.000
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik (63.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	407.327.057.000	-	-	-	407.327.057.000
	Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan (100.00 %)					
	Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.061.700.000	-	-	-	3.061.700.000
	Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan (100.00 %)					
	Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	200.000.000	-	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar (85.00 %)					
	Persentase rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar (4.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.856.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.856.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.383.134.000	-	-	-	1.383.134.000
	Indeks Reformasi Hukum (92.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (96.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	456.963.000	-	-	-	456.963.000
	Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan (30.00 %)					
	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (91.00 %)					
	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji (96.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (91.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (89.50 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	64.361.000	-	-	-	64.361.000
	Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan (30.00 %)					
	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (91.00 %)					
	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji (96.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (91.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (89.50 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	345.497.000	-	-	-	345.497.000
	Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan (30.00 %)					
	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (91.00 %)					
	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji (96.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (91.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (89.50 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	516.313.000	-	-	-	516.313.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan (30.00 %)					
	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (91.00 %)					
	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji (96.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (91.00 %)					
	Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan (89.50 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.472.866.000	-	-	-	1.472.866.000
	Capaian Pemberian Bantuan Hukum (100.00 %)					
	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (86.00 Angka)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.321.326.000	-	-	-	1.321.326.000
	Persentase bantuan hukum yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase Fasilitasi HAM Daerah (100.00 %)					
	Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	151.540.000	-	-	-	151.540.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase bantuan hukum yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase Fasilitasi HAM Daerah (100.00 %)					
	Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.980.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.980.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.660.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.660.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	815.000.000	-	-	-	815.000.000
	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (85.00 %)					
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan (80.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	215.000.000	-	-	-	215.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen)					
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.845.000.000	-	-	-	1.845.000.000
	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral (85.00 %)					
	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup (85.00 %)					
	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (87.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.462.912.000	-	-	-	1.462.912.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	175.870.000	-	-	-	175.870.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	206.218.000	-	-	-	206.218.000
	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan (2.00 Dokumen)					
	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.980.000.000	-	-	-	1.980.000.000
	Persentase nilai kemandirian BLUD (55.00 %)					
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha (2.30 %)					
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan (1.95 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	875.000.000	-	-	-	875.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD (2.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.781.081.000**	**-**	**-**	**-**	**1.781.081.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	839.176.000	-	-	-	839.176.000
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	289.850.000	-	-	-	289.850.000
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif (75.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	312.326.000	-	-	-	312.326.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif (75.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	237.000.000	-	-	-	237.000.000
	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif (75.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	475.139.000	-	-	-	475.139.000
	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (85.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	130.282.000	-	-	-	130.282.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.374.000	-	-	-	300.374.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.483.000	-	-	-	44.483.000
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	466.766.000	-	-	-	466.766.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ (83.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	130.063.000	-	-	-	130.063.000
	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	86.703.000	-	-	-	86.703.000
	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**1.755.000.000**	**-**	**-**	**-**	**1.755.000.000**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.365.000.000	-	-	-	1.365.000.000
	Persentase realisasi bantuan keuangan (86.00 %)					
	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN (90.00 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	575.000.000	-	-	-	575.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	740.000.000	-	-	-	740.000.000
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah (4.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	390.000.000	-	-	-	390.000.000
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan (100.00 %)					
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah (86.50 %)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	195.000.000	-	-	-	195.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	95.000.000	-	-	-	95.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (1.00 Dokumen)					
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (4.00 Dokumen)					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (1.00 Dokumen)					
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**562.646.295.000**	**4.935.954.000**	**-**	**-**	**567.582.249.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01	**Sekretariat DPRD**	**562.646.295.000**	**4.935.954.000**	**-**	**-**	**567.582.249.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**226.128.600.000**	**4.935.954.000**	**-**	**-**	**231.064.554.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.739.000	-	-	-	827.739.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	526.015.000	-	-	-	526.015.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.724.000	-	-	-	251.724.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.578.455.000	-	-	-	19.578.455.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.570.007.000	-	-	-	18.570.007.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.008.448.000	-	-	-	1.008.448.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (24.00 Dokumen)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.330.474.000	-	-	-	1.330.474.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (14.00 Dokumen)*	1.330.474.000	-	-	-	1.330.474.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)*	586.602.000	-	-	-	586.602.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	436.602.000	-	-	-	436.602.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)*	8.019.369.000	-	-	-	8.019.369.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	244.485.000	-	-	-	244.485.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.269.000	-	-	-	187.269.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	136.750.000	-	-	-	136.750.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000.000	-	-	-	6.500.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.453.000	-	-	-	780.453.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	170.412.000	-	-	-	170.412.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.373.132.000	4.935.954.000	-	-	10.309.086.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	4.002.240.000	-	-	4.002.240.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (279.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.048.833.000	-	-	-	2.048.833.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (279.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	612.974.000	830.214.000	-	-	1.443.188.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (279.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.711.325.000	103.500.000	-	-	2.814.825.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (279.00 Unit)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.904.952.000	-	-	-	28.904.952.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.542.000	-	-	-	179.542.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.474.000.000	-	-	-	4.474.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)*	1.047.586.000	-	-	-	1.047.586.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (48.00 Laporan)*	23.203.824.000	-	-	-	23.203.824.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)*	11.435.453.000	-	-	-	11.435.453.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (495.00 Unit)*	596.253.000	-	-	-	596.253.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (495.00 Unit)*	2.865.858.000	-	-	-	2.865.858.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (495.00 Unit)*	86.425.000	-	-	-	86.425.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (495.00 Unit)*	5.191.084.000	-	-	-	5.191.084.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (495.00 Unit)*	2.695.833.000	-	-	-	2.695.833.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)* *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD (100.00 %)*	150.072.424.000	-	-	-	150.072.424.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD *Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)*	148.113.423.000	-	-	-	148.113.423.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD *Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)*	1.392.880.000	-	-	-	1.392.880.000
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD *Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar (100.00 %)*	566.121.000	-	-	-	566.121.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**336.517.695.000**	**-**	**-**	**-**	**336.517.695.000**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7.206.440.000	-	-	-	7.206.440.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.262.440.000	-	-	-	4.262.440.000
	Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA (22.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	2.944.000.000	-	-	-	2.944.000.000
	Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA (22.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.210.534.000	-	-	-	2.210.534.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.210.534.000	-	-	-	2.210.534.000
	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran (2.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12.515.582.000	-	-	-	12.515.582.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.169.722.000	-	-	-	1.169.722.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.095.860.000	-	-	-	2.095.860.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (3.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	137.039.088.000	-	-	-	137.039.088.000
	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan (75.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	-	-	-	4.380.000.000
	Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas (120.00 Orang)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.939.086.000	-	-	-	1.939.086.000
	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan (4.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	418.741.000	-	-	-	418.741.000
	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan (4.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12.781.261.000	-	-	-	12.781.261.000
	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan (4.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	117.520.000.000	-	-	-	117.520.000.000
	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan (4.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	50.243.046.000	-	-	-	50.243.046.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.461.502.000	-	-	-	11.461.502.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (5.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	-	-	-	175.000.000
	Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (5.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	38.606.544.000	-	-	-	38.606.544.000
	Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (5.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.152.000.000	-	-	-	1.152.000.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	1.152.000.000	-	-	-	1.152.000.000
	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik (45.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	101.840.000.000	-	-	-	101.840.000.000
	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	101.840.000.000	-	-	-	101.840.000.000
	Jumlah publikasi melalui berbagai media (4.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	24.311.005.000	-	-	-	24.311.005.000
	Nilai survei kepuasan layanan persidangan (75.00 Angka)					
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.311.005.000	-	-	-	24.311.005.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD (30.00 Angka)					
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**536.567.511.000**	**11.400.513.000**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**7.394.280.372.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**40.342.576.000**	**732.000.000**	**-**	**-**	**41.074.576.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**40.342.576.000**	**732.000.000**	**-**	**-**	**41.074.576.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.257.576.000**	**732.000.000**	**-**	**-**	**30.989.576.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000	-	-	-	495.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.008.081.000	-	-	-	21.008.081.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.391.201.000	-	-	-	20.391.201.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	341.880.000	-	-	-	341.880.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	237.001.000	-	-	-	237.001.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	-	-	-	190.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.001.000	-	-	-	47.001.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.174.000	-	-	-	334.174.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138.729.000	-	-	-	138.729.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.445.000	-	-	-	195.445.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.035.492.000	12.000.000	-	-	2.047.492.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	70.000.000	-	-	-	70.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	100.000.000	-	-	-	100.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	8.000.000	12.000.000	-	-	20.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	155.500.000	-	-	-	155.500.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.001.000	-	-	-	850.001.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.480.000	-	-	-	61.480.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	510.511.000	-	-	-	510.511.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	720.000.000	-	-	720.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	180.000.000	-	-	180.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	440.000.000	-	-	440.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100.000.000	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (4.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)*	4.165.478.000	-	-	-	4.165.478.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	3.115.478.000	-	-	-	3.115.478.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (100.00 %)*	1.982.350.000	-	-	-	1.982.350.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)*	720.000.000	-	-	-	720.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)*	30.000.000	-	-	-	30.000.000
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.350.000	-	-	-	338.350.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	34.000.000	-	-	-	34.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (57.00 Unit)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.850.000.000**	**-**	**-**	**-**	**4.850.000.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.100.000.000	-	-	-	3.100.000.000
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah (76.08 %)					
	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah (98.55 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun penjenjangan kinerja selaras dengan kinerja daerah (43.00 OPD)					
	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Perencanaan Berbasis Risiko (27.00 Urusan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.920.000.000	-	-	-	2.920.000.000
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun penjenjangan kinerja selaras dengan kinerja daerah (43.00 OPD)					
	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Perencanaan Berbasis Risiko (27.00 Urusan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah (76.08 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis Data (27.00 Urusan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis Data (27.00 Urusan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah (76.08 %)					
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (80.23 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Yang Selaras Dengan Nasional (27.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis hasil evaluasi (27.00 Urusan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Yang Selaras Dengan Nasional (27.00 Kabupaten/Kota)					
	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis hasil evaluasi (27.00 Urusan)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.235.000.000**	**-**	**-**	**-**	**5.235.000.000**
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.915.000.000	-	-	-	1.915.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (65.56 %)					
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (82.21 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	605.000.000	-	-	-	605.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	710.000.000	-	-	-	710.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	330.000.000	-	-	-	330.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah (15.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah (10.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (7.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia (67.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan (67.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.680.000.000	-	-	-	1.680.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (65.81 %)					
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (82.48 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	655.000.000	-	-	-	655.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	475.000.000	-	-	-	475.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	-	-	-	50.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah (5.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah (13.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (5.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (4.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian (77.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA (77.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.640.000.000	-	-	-	1.640.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100.00 %)					
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (66.67 %)					
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (82.92 %)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	490.000.000	-	-	-	490.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	665.000.000	-	-	-	665.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.01.5.01.0.00.0.00.02.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	235.000.000	-	-	-	235.000.000
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah (9.00 %)					
	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					
	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko (3.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur (15.00 Angka)					
	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan (15.00 Angka)					
5.02	**KEUANGAN**	**348.281.879.000**	**6.539.793.000**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**7.201.134.020.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	**258.464.257.000**	**3.606.387.000**	**-**	**-**	**262.070.644.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**227.139.665.000**	**3.606.387.000**	**-**	**-**	**230.746.052.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.757.000	-	-	-	374.757.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (90.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.138.000	-	-	-	202.138.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.619.000	-	-	-	172.619.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.834.433.000	-	-	-	141.834.433.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.514.175.000	-	-	-	139.514.175.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.209.689.000	-	-	-	2.209.689.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.569.000	-	-	-	110.569.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	649.230.000	-	-	-	649.230.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	649.230.000	-	-	-	649.230.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
	Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.144.000	-	-	-	234.144.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	184.144.000	-	-	-	184.144.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (4.00 Laporan)					
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.855.022.000	-	-	-	12.855.022.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	318.076.000	-	-	-	318.076.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.623.000	-	-	-	344.623.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.107.685.000	-	-	-	1.107.685.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.884.094.000	-	-	-	5.884.094.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.333.000	-	-	-	61.333.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.427.414.000	-	-	-	1.427.414.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.008.558.000	-	-	-	1.008.558.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.646.089.000	-	-	-	2.646.089.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	51.150.000	-	-	-	51.150.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3.606.387.000	-	-	3.606.387.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	500.000.000	-	-	500.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3.106.387.000	-	-	3.106.387.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.710.738.000	-	-	-	58.710.738.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.472.000	-	-	-	66.472.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.052.322.000	-	-	-	11.052.322.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.181.904.000	-	-	-	3.181.904.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.410.040.000	-	-	-	44.410.040.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.481.341.000	-	-	-	12.481.341.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo (95.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri (95.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo (95.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	756.257.000	-	-	-	756.257.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.252.908.000	-	-	-	5.252.908.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	54.335.000	-	-	-	54.335.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.220.080.000	-	-	-	2.220.080.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	198.188.000	-	-	-	198.188.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.090.930.000	-	-	-	2.090.930.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	969.892.000	-	-	-	969.892.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	938.751.000	-	-	-	938.751.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**315.905.000**	**-**	**-**	**-**	**315.905.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	315.905.000	-	-	-	315.905.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	315.905.000	-	-	-	315.905.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**31.008.687.000**	**-**	**-**	**-**	**31.008.687.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	31.008.687.000	-	-	-	31.008.687.000
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	850.700.000	-	-	-	850.700.000
	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	520.000.000	-	-	-	520.000.000
	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	230.327.000	-	-	-	230.327.000
	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	332.956.000	-	-	-	332.956.000
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.941.000.000	-	-	-	1.941.000.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	916.030.000	-	-	-	916.030.000
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.571.581.000	-	-	-	11.571.581.000
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD kendal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	723.000.000	-	-	-	723.000.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	369.673.000	-	-	-	369.673.000
	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.503.420.000	-	-	-	3.503.420.000
	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD kendal (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri (100.00 %)					
	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**89.817.622.000**	**2.933.406.000**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**6.939.063.376.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**75.817.622.000**	**2.933.406.000**	**-**	**-**	**78.751.028.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	685.000.000	-	-	-	685.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.000.000	-	-	-	305.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.000.000	-	-	-	240.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.829.727.000	-	-	-	55.829.727.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.639.727.000	-	-	-	53.639.727.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (1.00 Dokumen)*	200.000.000	-	-	-	200.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)*	215.000.000	185.000.000	-	-	400.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	215.000.000	185.000.000	-	-	400.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)* *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan (81.50 %)*	4.470.500.000	-	-	-	4.470.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	505.000.000	-	-	-	505.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000.000	-	-	-	850.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	440.000.000	-	-	-	440.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (81.50 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	-	-	-	1.070.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	405.500.000	-	-	-	405.500.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.144.810.000	-	-	1.144.810.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	190.000.000	-	-	190.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	954.810.000	-	-	954.810.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (15.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (20.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.402.155.000	-	-	-	8.402.155.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.760.000	-	-	-	11.760.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.980.000.000	-	-	-	1.980.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.210.395.000	-	-	-	6.210.395.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.065.240.000	1.603.596.000	-	-	7.668.836.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan (81.50 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	73.500.000	-	-	-	73.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.793.940.000	-	-	-	1.793.940.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.174.000.000	1.603.596.000	-	-	2.777.596.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (50.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.783.800.000	-	-	-	1.783.800.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (730.00 Unit)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**11.500.000.000**	**-**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**6.857.812.348.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.518.200.000	-	-	-	6.518.200.000
	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.000.000	-	-	-	58.000.000
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku (105.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.000.000	-	-	-	58.000.000
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku (105.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.731.200.000	-	-	-	2.731.200.000
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku (105.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.029.000.000	-	-	-	2.029.000.000
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku (105.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.642.000.000	-	-	-	1.642.000.000
	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku (105.00 Laporan)					
	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (2.00 Laporan)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	607.520.000	-	-	-	607.520.000
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu (100.00 %)					
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	-	-	-	168.600.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun (70.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	-	-	-	168.600.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun (70.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	125.720.000	-	-	-	125.720.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun (35.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	144.600.000	-	-	-	144.600.000
	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun (70.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	900.000.000	-	-	-	900.000.000
	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000	-	-	-	250.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai (2.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.374.280.000	-	-	-	3.374.280.000
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	273.286.000	-	-	-	273.286.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.830.000	-	-	-	59.830.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.624.625.000	-	-	-	1.624.625.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	682.149.000	-	-	-	682.149.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	292.165.000	-	-	-	292.165.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	442.225.000	-	-	-	442.225.000
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan (1.00 Dokumen)					
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	20.000.000.000	6.826.312.348.000	6.846.312.348.000
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	2.425.944.120.000	2.425.944.120.000
	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000
	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-	-	-	4.400.368.228.000	4.400.368.228.000
	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun (1.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan yang tersusun (2.00 Dokumen)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000.000**
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000
	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (50.50 %)					
	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (9.00 %)					
	Tingkat Administrasi BMD yang Andal (70.50 %)					
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	74.880.000	-	-	-	74.880.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	-	-	-	330.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	223.875.000	-	-	-	223.875.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	584.864.000	-	-	-	584.864.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	518.381.000	-	-	-	518.381.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	318.000.000	-	-	-	318.000.000
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD (1.00 Dokumen)					
	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD (1.00 Dokumen)					
	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD (100.00 %)					
	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (100.00 %)					
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**35.869.682.000**	**375.000.000**	**-**	**-**	**36.244.682.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**35.869.682.000**	**375.000.000**	**-**	**-**	**36.244.682.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.997.842.000**	**375.000.000**	**-**	**-**	**30.372.842.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.000.000	-	-	-	306.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000	-	-	-	136.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.226.255.000	-	-	-	26.226.255.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.317.611.000	-	-	-	25.317.611.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	858.644.000	-	-	-	858.644.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (14.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (2.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.087.000	-	-	-	99.087.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.087.000	-	-	-	74.087.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.500.000	-	-	-	737.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	42.000.000	-	-	-	42.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	60.000.000	-	-	-	60.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	140.500.000	-	-	-	140.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	340.000.000	-	-	-	340.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	65.000.000	-	-	-	65.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)*	-	375.000.000	-	-	375.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)*	-	100.000.000	-	-	100.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)*	-	75.000.000	-	-	75.000.000
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	200.000.000	-	-	200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (5.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.992.000.000	-	-	-	1.992.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	710.000.000	-	-	-	710.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.248.000.000	-	-	-	1.248.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.000.000	-	-	-	517.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah (100.00 %)					
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.000.000	-	-	-	242.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (27.00 Unit)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**5.871.840.000**	**-**	**-**	**-**	**5.871.840.000**
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi (100.00 %)					
	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN (70.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	600.000.000	-	-	-	600.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	75.000.000	-	-	-	75.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	155.000.000	-	-	-	155.000.000
	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi (70.00 %)					
	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	675.000.000	-	-	-	675.000.000
	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	130.000.000	-	-	-	130.000.000
	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu (100.00 %)					
	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	145.000.000	-	-	-	145.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu (100.00 %)					
	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu (100.00 %)					
	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi (92.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.315.000.000	-	-	-	3.315.000.000
	Persentase pemetaan kompetensi ASN (100.00 %)					
	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN (85.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	620.000.000	-	-	-	620.000.000
	Persentase ASN yang dinilai kompetensinya (100.00 %)					
	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.490.000.000	-	-	-	2.490.000.000
	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi (100.00 %)					
	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	160.000.000	-	-	-	160.000.000
	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi (100.00 %)					
	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN (100.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	681.840.000	-	-	-	681.840.000
	Persentase peningkatan kinerja ASN (85.00 %)					
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN (10.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa (100.00 %)					
	Persentase pembinaan disiplin ASN (20.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	170.000.000	-	-	-	170.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa (100.00 %)					
	Persentase pembinaan disiplin ASN (20.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	41.840.000	-	-	-	41.840.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa (100.00 %)					
	Persentase pembinaan disiplin ASN (20.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	-	-	-	180.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa (100.00 %)					
	Persentase pembinaan disiplin ASN (20.00 %)					
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	140.000.000	-	-	-	140.000.000
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya (100.00 %)					
	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa (100.00 %)					
	Persentase pembinaan disiplin ASN (20.00 %)					
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**69.987.277.000**	**2.421.500.000**	**-**	**-**	**72.408.777.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**69.987.277.000**	**2.421.500.000**	**-**	**-**	**72.408.777.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.094.928.000**	**2.421.500.000**	**-**	**-**	**45.516.428.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)*	380.500.000	-	-	-	380.500.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	84.000.000	-	-	-	84.000.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	261.500.000	-	-	-	261.500.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)*	26.975.423.000	-	-	-	26.975.423.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.578.023.000	-	-	-	23.578.023.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.200.000	-	-	-	77.200.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.500.000	-	-	-	65.500.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.700.000	-	-	-	54.700.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (6.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	255.000.000	-	-	-	255.000.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	255.000.000	-	-	-	255.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	77.600.000	-	-	-	77.600.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	77.600.000	-	-	-	77.600.000
	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.970.000	-	-	-	257.970.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.200.000	-	-	-	24.200.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.770.000	-	-	-	233.770.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.253.243.000	-	-	-	2.253.243.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	-	-	-	200.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	400.000.000	-	-	-	400.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.560.000	-	-	-	303.560.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.987.000	-	-	-	73.987.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	-	-	-	18.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	96.750.000	-	-	-	96.750.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	364.846.000	-	-	-	364.846.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	31.150.000	-	-	-	31.150.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	514.950.000	-	-	-	514.950.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)*	-	2.421.500.000	-	-	2.421.500.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)*	-	993.000.000	-	-	993.000.000
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	35.000.000	-	-	35.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.393.500.000	-	-	1.393.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (1.00 Unit)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.949.942.000	-	-	-	9.949.942.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.975.000.000	-	-	-	2.975.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.964.942.000	-	-	-	6.964.942.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.945.250.000	-	-	-	2.945.250.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.000.000	-	-	-	171.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.250.000	-	-	-	20.250.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.673.000.000	-	-	-	1.673.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.000.000	-	-	-	1.081.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**26.892.349.000**	**-**	**-**	**-**	**26.892.349.000**
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.307.244.000	-	-	-	2.307.244.000
	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan) (3.50 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis (100.00 %)					
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	87.551.000	-	-	-	87.551.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	97.440.000	-	-	-	97.440.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.100.000.000	-	-	-	2.100.000.000
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis (23000.00 Orang)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.253.000	-	-	-	22.253.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis (3.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.262.061.000	-	-	-	4.262.061.000
	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan) (3.50 Angka)					
	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi (100.00 %)					
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional (100.00 %)					
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	125.290.000	-	-	-	125.290.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	110.922.000	-	-	-	110.922.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	318.383.000	-	-	-	318.383.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	123.334.000	-	-	-	123.334.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.200.000.000	-	-	-	3.200.000.000
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (1338.00 Orang)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	384.132.000	-	-	-	384.132.000
	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (3.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (3.00 Dokumen)					
	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi (2.00 Dokumen)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	20.323.044.000	-	-	-	20.323.044.000
	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi (100.00 %)					
	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri (100.00 %)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000
	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Dalam Negeri (1300.00 Orang)					
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	323.044.000	-	-	-	323.044.000
	Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (1.00 Dokumen)					
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**16.968.842.000**	**205.000.000**	**-**	**-**	**17.173.842.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**16.968.842.000**	**205.000.000**	**-**	**-**	**17.173.842.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.589.842.000**	**205.000.000**	**-**	**-**	**13.794.842.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	-	-	-	220.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	130.000.000	-	-	-	130.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	40.000.000	-	-	-	40.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)*	9.300.499.000	-	-	-	9.300.499.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	8.955.499.000	-	-	-	8.955.499.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	225.000.000	-	-	-	225.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.500.000	-	-	-	114.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	-	-	-	110.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	-	-	-	4.500.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.508.000	-	-	-	157.508.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.000.000	-	-	-	120.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	12.508.000	-	-	-	12.508.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)*	487.000.000	-	-	-	487.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	15.000.000	-	-	-	15.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	4.000.000	-	-	-	4.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	-	-	-	20.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	-	-	-	12.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	-	-	-	70.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)*	-	205.000.000	-	-	205.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)*	-	175.000.000	-	-	175.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (3.00 Unit)*	-	30.000.000	-	-	30.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)*	2.599.080.000	-	-	-	2.599.080.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	3.000.000	-	-	-	3.000.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)*	473.580.000	-	-	-	473.580.000
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.000.000	-	-	-	166.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.956.500.000	-	-	-	1.956.500.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.255.000	-	-	-	711.255.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	-	-	-	300.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	-	-	-	30.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.255.000	-	-	-	137.255.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.000.000	-	-	-	104.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (1.00 Unit)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**3.379.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.379.000.000**
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1.263.000.000	-	-	-	1.263.000.000
	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target (100.00 %)					
	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target (100.00 %)					
	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah (100.00 %)					
	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (1.00 Naskah)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (1.00 Dokumen)					
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (1.00 Naskah)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	380.000.000	-	-	-	380.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (1.00 Pelatihan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	233.000.000	-	-	-	233.000.000
	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02	Invensi dan Inovasi	2.116.000.000	-	-	-	2.116.000.000
	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target (100.00 %)					
	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target (100.00 %)					
	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah (100.00 %)					
	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan (100.00 %)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	223.000.000	-	-	-	223.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	450.000.000	-	-	-	450.000.000
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	396.000.000	-	-	-	396.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (1.00 Laporan)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	50.000.000	-	-	-	50.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	650.000.000	-	-	-	650.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (1.00 Laporan)					
5.05.5.05.0.00.0.00.01.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	97.000.000	-	-	-	97.000.000
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (1.00 Laporan)					
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (1.00 Laporan)					
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**25.117.255.000**	**1.127.220.000**	**-**	**-**	**26.244.475.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01	**Badan Penghubung**	**25.117.255.000**	**1.127.220.000**	**-**	**-**	**26.244.475.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.384.986.000**	**1.127.220.000**	**-**	**-**	**21.512.206.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.735.000	-	-	-	54.735.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.535.000	-	-	-	30.535.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.648.000	-	-	-	16.648.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	-	-	-	3.776.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	-	-	-	3.776.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.506.572.000	-	-	-	9.506.572.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.433.572.000	-	-	-	9.433.572.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	65.000.000	-	-	-	65.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	8.000.000	-	-	-	8.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)*	307.787.000	-	-	-	307.787.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)*	307.787.000	-	-	-	307.787.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)*	130.487.000	-	-	-	130.487.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)*	34.271.000	-	-	-	34.271.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.216.000	-	-	-	96.216.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.788.997.000	-	-	-	1.788.997.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.035.000	-	-	-	56.035.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.556.000	-	-	-	158.556.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	436.859.000	-	-	-	436.859.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.967.000	-	-	-	74.967.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	-	-	-	35.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	630.000.000	-	-	-	630.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	397.580.000	-	-	-	397.580.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)*	-	1.127.220.000	-	-	1.127.220.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (9.00 Unit)*	-	362.000.000	-	-	362.000.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (9.00 Unit)*	-	765.220.000	-	-	765.220.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)*	5.547.088.000	-	-	-	5.547.088.000
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	-	-	-	35.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	-	-	-	1.100.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.036.000	-	-	-	87.036.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.325.052.000	-	-	-	4.325.052.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (12.00 Laporan)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.049.320.000	-	-	-	3.049.320.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.319.720.000	-	-	-	1.319.720.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	27.500.000	-	-	-	27.500.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	-	-	-	350.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	47.100.000	-	-	-	47.100.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.305.000.000	-	-	-	1.305.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (4.00 Unit)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**4.732.269.000**	**-**	**-**	**-**	**4.732.269.000**
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.732.269.000	-	-	-	4.732.269.000
	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung (100.00 %)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.681.080.000	-	-	-	3.681.080.000
	Jumlah Jenis Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (18.00 Dokumen)					
5.07.5.07.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.051.189.000	-	-	-	1.051.189.000
	Jumlah Jenis Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (18.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**36.074.660.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**36.109.160.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**36.074.660.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**36.109.160.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01	**INSPEKTORAT**	**36.074.660.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**36.109.160.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.581.894.000**	**34.500.000**	**-**	**-**	**29.616.394.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.983.000	-	-	-	189.983.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.765.000	-	-	-	144.765.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.218.000	-	-	-	35.218.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	-	-	-	5.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)*	24.388.628.000	-	-	-	24.388.628.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (2.00 Dokumen)*	24.378.628.000	-	-	-	24.378.628.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (2.00 Dokumen)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)*	208.006.000	-	-	-	208.006.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (2.00 Dokumen)*	208.006.000	-	-	-	208.006.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)*	365.819.000	-	-	-	365.819.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	-	-	-	40.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.819.000	-	-	-	325.819.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.944.000	-	-	-	883.944.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.820.000	-	-	-	13.820.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.602.000	-	-	-	34.602.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.350.000	-	-	-	169.350.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	251.000.000	-	-	-	251.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	240.172.000	-	-	-	240.172.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	25.000.000	-	-	-	25.000.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)*	-	34.500.000	-	-	34.500.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (6.00 Unit)*	-	34.500.000	-	-	34.500.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)*	2.779.168.000	-	-	-	2.779.168.000
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	-	-	-	14.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	-	-	-	14.400.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.768.000	-	-	-	2.250.768.000
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (4.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.346.000	-	-	-	766.346.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.025.000	-	-	-	380.025.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.010.000	-	-	-	11.010.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.511.000	-	-	-	181.511.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000	-	-	-	6.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.300.000	-	-	-	161.300.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.500.000	-	-	-	26.500.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (136.00 Unit)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.568.089.000**	**-**	**-**	**-**	**4.568.089.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.703.249.000	-	-	-	3.703.249.000
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (100.00 %)					
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (100.00 %)					
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti (96.23 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.246.920.000	-	-	-	1.246.920.000
	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang terbit (80.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	982.440.000	-	-	-	982.440.000
	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit (100.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.278.120.000	-	-	-	1.278.120.000
	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit (64.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	195.769.000	-	-	-	195.769.000
	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (14.00 Dokumen)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	864.840.000	-	-	-	864.840.000
	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	864.840.000	-	-	-	864.840.000
	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit (23.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.924.677.000**	**-**	**-**	**-**	**1.924.677.000**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	127.180.000	-	-	-	127.180.000
	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT (100.00 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	127.180.000	-	-	-	127.180.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (1.00 Dokumen)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.797.497.000	-	-	-	1.797.497.000
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80 (61.90 %)					
	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas (42.85 %)					
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3 (35.71 %)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114.520.000	-	-	-	114.520.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD (8.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah (84.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah (3.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.572.219.000	-	-	-	1.572.219.000
	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD (8.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah (84.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah (3.00 Laporan)					
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.758.000	-	-	-	110.758.000
	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD (8.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah (84.00 Laporan)					
	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah (3.00 Laporan)					
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**326.450.517.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**326.696.548.000**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**326.450.517.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**326.696.548.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**326.450.517.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**326.696.548.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.299.244.000**	**246.031.000**	**-**	**-**	**16.545.275.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.372.000.000	-	-	-	2.372.000.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.266.033.000	-	-	-	1.266.033.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.055.967.000	-	-	-	1.055.967.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	-	-	-	25.000.000
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.867.419.000	-	-	-	8.867.419.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	8.496.019.000	-	-	-	8.496.019.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	350.000.000	-	-	-	350.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	700.000	-	-	-	700.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	700.000	-	-	-	700.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (12.00 Dokumen)*	20.000.000	-	-	-	20.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	-	-	-	80.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (4.00 Dokumen)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.500.000	-	-	-	203.500.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000	-	-	-	33.000.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.500.000	-	-	-	150.500.000
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)*	1.218.135.000	-	-	-	1.218.135.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	10.000.000	-	-	-	10.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	115.000.000	-	-	-	115.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	80.000.000	-	-	-	80.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	150.000.000	-	-	-	150.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)*	50.000.000	-	-	-	50.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	-	-	-	7.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	-	-	-	90.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.135.000	-	-	-	656.135.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	-	-	15.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.000.000	-	-	-	45.000.000
	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	246.031.000	-	-	246.031.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	50.000.000	-	-	50.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (32.00 Unit)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (32.00 Unit)*	-	196.031.000	-	-	196.031.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)*	2.848.131.000	-	-	-	2.848.131.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	1.000.000	-	-	-	1.000.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	587.941.000	-	-	-	587.941.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (84.00 Laporan)*	2.259.190.000	-	-	-	2.259.190.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (100.00 %)*	710.059.000	-	-	-	710.059.000
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	-	-	-	280.000.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	-	-	-	3.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	-	80.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.000.000	-	-	-	271.000.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.059.000	-	-	-	76.059.000
	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (352.00 Unit)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.608.336.000**	**-**	**-**	**-**	**2.608.336.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.608.336.000	-	-	-	2.608.336.000
	Indeks Aktualisasi Pancasila (76.31 Angka)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	710.000.000	-	-	-	710.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.103.336.000	-	-	-	1.103.336.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98.000.000	-	-	-	98.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	15.890.000	-	-	-	15.890.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	15.110.000	-	-	-	15.110.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	56.000.000	-	-	-	56.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	610.000.000	-	-	-	610.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (86.00 %)					
	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa (86.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**61.299.273.000**	**-**	**-**	**-**	**61.299.273.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	61.299.273.000	-	-	-	61.299.273.000
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi (76.50 Angka)					
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan (76.50 Angka)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95.890.000	-	-	-	95.890.000
	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.70 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.60 %)					
	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (89.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.133.065.000	-	-	-	3.133.065.000
	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.70 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.60 %)					
	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (89.70 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	645.000.000	-	-	-	645.000.000
	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.70 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.60 %)					
	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (89.70 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57.425.318.000	-	-	-	57.425.318.000
	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (89.70 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (89.60 %)					
	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (89.70 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**36.626.664.000**	**-**	**-**	**-**	**36.626.664.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36.626.664.000	-	-	-	36.626.664.000
	Indeks Kinerja Ormas (78.26 Angka)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.211.664.000	-	-	-	1.211.664.000
	PersentaseMasyarakat yangpaham terhadappemberdayaan Ormas (92.00 %)					
	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas (100.00 %)					

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.065.000.000	-	-	-	1.065.000.000
	PersentaseMasyarakat yangpaham terhadappemberdayaan Ormas (92.00 %)					
	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.350.000.000	-	-	-	34.350.000.000
	PersentaseMasyarakat yangpaham terhadappemberdayaan Ormas (92.00 %)					
	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas (100.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.373.400.000**	**-**	**-**	**-**	**2.373.400.000**
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.373.400.000	-	-	-	2.373.400.000
	Indeks ketahanan Ekonomi (2.89 Angka)					
	Indeks Toleransi (75.40 Angka)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.173.966.000	-	-	-	1.173.966.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (75.40 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi (88.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.169.434.000	-	-	-	1.169.434.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (75.40 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi (88.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000	-	-	-	30.000.000
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (75.40 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi (88.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**207.243.600.000**	**-**	**-**	**-**	**207.243.600.000**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	207.243.600.000	-	-	-	207.243.600.000
	Indeks Kewaspadaan Nasional (74.00 Angka)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	73.661.000	-	-	-	73.661.000
	Persentase konflik sosial yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional (80.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	819.379.000	-	-	-	819.379.000
	Persentase konflik sosial yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional (80.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	636.490.000	-	-	-	636.490.000

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah
	Persentase konflik sosial yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional (80.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.714.070.000	-	-	-	204.714.070.000
	Persentase konflik sosial yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional (80.00 %)					
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
	Persentase konflik sosial yang tertangani (100.00 %)					
	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional (80.00 %)					
	Total	**15.630.119.890.500**	**1.679.982.022.500**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**24.156.414.261.000**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN V : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	**Pelayanan Umum**	**15.402.713.503.500**	**1.678.702.107.500**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**23.927.727.959.000**
01.01.1.01	Pendidikan	7.984.741.844.000	440.796.201.000	-	-	8.425.538.045.000
01.01.1.02	Kesehatan	2.971.063.969.000	898.346.311.000	-	-	3.869.410.280.000
01.01.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	432.708.959.500	206.624.937.500	-	-	639.333.897.000
01.01.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.560.871.000	250.000.000	-	-	39.810.871.000
01.01.1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	42.483.545.000	448.457.000	-	-	42.932.002.000
01.01.1.06	Sosial	329.164.556.000	4.730.308.000	-	-	333.894.864.000
01.01.2.07	Tenaga Kerja	89.463.558.000	204.378.000	-	-	89.667.936.000
01.01.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.461.962.000	74.962.000	-	-	21.536.924.000
01.01.2.09	Pangan	41.154.706.000	4.014.589.000	-	-	45.169.295.000
01.01.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.835.191.000	74.250.000	-	-	23.909.441.000
01.01.2.15	Perhubungan	192.575.128.000	14.973.362.000	-	-	207.548.490.000
01.01.2.16	Komunikasi dan Informatika	67.194.992.000	30.178.340.000	-	-	97.373.332.000
01.01.2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	33.933.698.000	-	-	-	33.933.698.000
01.01.2.18	Penanaman Modal	22.835.331.000	218.000.000	-	-	23.053.331.000
01.01.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	151.542.445.000	110.000.000	-	-	151.652.445.000
01.01.2.23	Perpustakaan	31.261.247.000	1.238.919.000	-	-	32.500.166.000
01.01.3.25	Kelautan dan Perikanan	78.492.601.000	11.270.997.000	-	-	89.763.598.000
01.01.3.27	Pertanian	549.916.600.000	19.604.340.000	-	-	569.520.940.000
01.01.3.29	Energi dan Sumber Daya Mineral	54.847.707.000	74.420.000	-	-	54.922.127.000
01.01.3.31	Perindustrian	108.023.091.000	848.000.000	-	-	108.871.091.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.01.4.01	Sekretariat Daerah	674.712.519.000	28.004.338.000	-	-	702.716.857.000
01.01.4.02	Sekretariat DPRD	562.646.295.000	4.935.954.000	-	-	567.582.249.000
01.01.5.01	Perencanaan	40.342.576.000	732.000.000	-	-	41.074.576.000
01.01.5.02	Keuangan	348.281.879.000	6.539.793.000	20.000.000.000	6.826.312.348.000	7.201.134.020.000
01.01.5.03	Kepegawaian	35.869.682.000	375.000.000	-	-	36.244.682.000
01.01.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	69.987.277.000	2.421.500.000	-	-	72.408.777.000
01.01.5.04	Penelitian dan Pengembangan	69.987.277.000	2.421.500.000	-	-	72.408.777.000
01.01.5.04	Penelitian dan Pengembangan	16.968.842.000	205.000.000	-	-	17.173.842.000
01.01.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	16.968.842.000	205.000.000	-	-	17.173.842.000
01.01.5.07	Penghubung	25.117.255.000	1.127.220.000	-	-	26.244.475.000
01.01.6.01	Inspektorat	36.074.660.000	34.500.000	-	-	36.109.160.000
01.01.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	326.450.517.000	246.031.000	-	-	326.696.548.000
04	**Perlindungan Lingkungan Hidup**	**140.625.650.000**	**40.500.000**	**-**	**-**	**140.666.150.000**
04.05.2.11	Lingkungan Hidup	140.625.650.000	40.500.000	-	-	140.666.150.000
	Jumlah	**15.543.339.153.500**	**1.678.742.607.500**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**24.068.394.109.000**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	**2**	**3**	**4**
A	**SPM Bidang Pendidikan**		
1	Pendidikan Menengah Atas		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.225.278.000
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	121.336.963.000
2	Pendidikan Menengah Kejuruan		
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	463.666.000
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	240.000.000
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	90.000.000
		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	400.000.000
		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	240.000.000
		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.000.000
3	Pendidikan Khusus		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	161.359.249.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	379.624.211.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.286.617.000
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	273.215.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000
		Total	**673.849.199.000**
C	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**		

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	44.354.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota		
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	130.000.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.643.000.000
		Total	**5.817.354.000**
D	**SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		
		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	360.000.000
		Total	**360.000.000**
E	**SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS**		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu		
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.907.720.000
		Total	**4.907.720.000**
F	**SPM BIDANG SOSIAL**		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	4.194.194.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	192.650.000
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	350.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	108.544.572.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.700.000.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.232.580.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	165.000.000
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	200.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	121.635.000
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.067.256.000
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	93.677.000
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	370.284.000
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	41.000.000
		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69.870.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi		
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.820.000
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	675.510.000
		Total	**128.022.048.000**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN VII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.583.776.113.000**	**13.350.919.959.000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**8.760.453.446.000**	**8.425.538.045.000**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.314.349.596.000	5.396.218.243.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.444.461.861.000	3.028.289.802.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	480.000.000	330.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	681.989.000	400.000.000
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	480.000.000	300.000.000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.728.724.024.000**	**3.869.410.280.000**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.962.532.308.000	3.318.995.266.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	754.020.416.000	547.251.577.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.491.300.000	1.928.215.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	170.000.000	75.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.510.000.000	1.160.222.000
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**619.043.015.000**	**639.333.897.000**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.343.848.000	186.731.430.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	152.200.690.000	48.621.302.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.660.675.000	23.013.309.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	105.000.000	11.770.900.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.060.000.000	2.793.451.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	730.000.000	13.470.116.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	207.138.702.000	349.789.477.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.994.100.000	2.146.224.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.810.000.000	997.688.000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**52.179.812.000**	**39.810.871.000**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.022.812.000	19.466.548.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.342.000.000	12.845.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.915.000.000	3.266.323.000
1.04.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	270.000.000
1.04.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	630.000.000	500.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.900.000.000	2.663.000.000
1.04.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	570.000.000	430.000.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	400.000.000	370.000.000
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**45.673.426.000**	**42.932.002.000**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.448.426.000	32.164.312.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000.000	4.432.690.000

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.325.000.000	5.975.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	900.000.000	360.000.000
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**377.702.390.000**	**333.894.864.000**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	170.624.110.000	134.126.589.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	11.907.948.000	10.286.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	200.000.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	83.439.457.000	74.090.123.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	104.700.000.000	110.594.572.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6.510.875.000	4.397.580.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	320.000.000	200.000.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**942.677.511.000**	**867.011.208.000**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**106.581.363.000**	**89.667.936.000**
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91.947.853.000	77.615.772.000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	246.740.000	121.635.000
2.07.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	146.673.000	150.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9.469.888.000	7.572.217.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.645.081.000	1.510.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.191.461.000	950.000.000
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.933.667.000	1.748.312.000
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**20.817.258.000**	**21.536.924.000**
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.382.117.000	16.341.824.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.085.000.000	2.698.800.000
2.08.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	114.700.000	160.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.458.140.000	770.432.000
2.08.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	477.000.000	389.667.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	94.000.000	328.408.000
2.08.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	248.000.000	177.353.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	601.301.000	373.720.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	357.000.000	296.720.000
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**74.171.213.000**	**45.169.295.000**
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.732.793.000	23.986.170.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.882.500.000	13.614.995.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	7.650.000.000	4.975.924.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	14.905.920.000	2.592.206.000
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**153.037.422.000**	**140.666.150.000**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.287.422.000	135.158.813.000
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	660.000.000	200.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.820.000.000	965.614.000
2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.675.000.000	2.676.375.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.370.000.000	158.986.000
2.11.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.610.000.000	191.362.000
2.11.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.740.000.000	300.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	35.000.000	25.000.000

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	630.000.000	400.000.000
2.11.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	370.000.000	115.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	930.000.000	200.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	30.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	740.000.000	245.000.000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.553.933.000**	**23.909.441.000**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.013.933.000	18.645.901.000
2.13.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	210.000.000	70.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	20.000.000	-
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	550.000.000	155.000.000
2.13.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000	60.000.000
2.13.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	200.000.000	75.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.270.000.000	1.033.540.000
2.13.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.090.000.000	3.870.000.000
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**209.220.884.000**	**207.548.490.000**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.408.998.000	68.792.811.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	139.492.485.000	136.438.696.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.126.390.000	716.983.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.193.011.000	1.600.000.000
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**51.638.499.000**	**97.373.332.000**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.982.544.296	36.762.703.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.894.813.780	15.345.000.000
2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	531.110.970	740.000.000
2.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.524.754.436	1.783.800.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.705.275.518	42.741.829.000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**34.212.143.000**	**33.933.698.000**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.855.000.000	28.089.628.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.404.628.000	938.680.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	431.856.000	195.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.967.582.000	577.000.000
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.994.495.000	855.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.558.582.000	3.278.390.000
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**24.925.387.000**	**23.053.331.000**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.764.168.000	19.521.177.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	719.514.000	667.200.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.215.000.000	1.514.954.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.193.390.000	790.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	632.500.000	350.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	400.815.000	210.000.000
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**205.189.860.000**	**151.652.445.000**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.889.860.000	39.242.745.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	26.450.000.000	11.965.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	139.850.000.000	100.444.700.000
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**37.329.549.000**	**32.500.166.000**

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.159.549.000	30.309.985.000
2.23.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.000.000	597.827.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.975.000.000	1.469.708.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	145.000.000	102.581.000
2.23.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50.000.000	20.065.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**779.408.710.000**	**911.097.908.000**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**136.836.437.000**	**89.763.598.000**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.963.885.500	63.857.762.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.878.427.000	1.381.911.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	45.291.427.500	9.248.576.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	23.462.603.000	12.612.050.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.852.984.000	1.663.227.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.387.110.000	1.000.072.000
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**74.048.139.000**	**88.020.152.000**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.506.140.000	43.262.477.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.750.000.000	6.525.625.000
3.26.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	13.863.383.000	22.675.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.508.609.000	8.652.050.000
3.26.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100.000.000	1.750.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.635.000.000	850.000.000
3.26.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	700.007.000	150.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.365.000.000	1.050.000.000
3.26.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.120.000.000	1.205.000.000
3.26.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.500.000.000	1.900.000.000
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**423.415.992.000**	**569.520.940.000**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	166.892.964.000	168.558.597.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	98.890.302.000	159.281.528.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	121.169.497.000	178.234.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	10.167.362.000	4.637.563.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	6.351.907.000	5.850.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	19.943.960.000	52.959.252.000
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**63.814.530.000**	**54.922.127.000**
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.630.568.000	48.653.595.000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.647.531.000	923.631.000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.031.349.000	1.077.356.000
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.912.031.000	2.135.551.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.593.051.000	2.131.994.000
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**81.293.612.000**	**108.871.091.000**
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.797.192.000	53.787.345.000
3.31.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	398.365.000	70.000.000
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.163.036.000	10.761.146.000
3.31.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	451.100.000	200.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	145.376.000	502.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	320.752.000	60.000.000
3.31.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	5.431.100.000	33.550.000.000
3.31.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.041.041.000	2.150.000.000

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
3.31.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.595.650.000	999.054.000
3.31.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	950.000.000	6.791.546.000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.195.347.310.000**	**1.270.299.106.000**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**614.461.329.000**	**702.716.857.000**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.107.143.000	275.716.004.000
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.739.028.000	1.410.458.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.715.000.000	2.919.557.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	340.259.994.000	411.638.757.000
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.312.898.000	2.856.000.000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.722.952.000	4.640.000.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.279.314.000	1.781.081.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.325.000.000	1.755.000.000
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**580.885.981.000**	**567.582.249.000**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	231.872.417.000	231.064.554.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	349.013.564.000	336.517.695.000
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.827.470.783.000**	**7.394.280.372.000**
5.01	**PERENCANAAN**	**46.575.825.000**	**41.074.576.000**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.039.825.000	30.989.576.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.900.000.000	4.850.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.636.000.000	5.235.000.000
5.02	**KEUANGAN**	**7.616.807.364.000**	**7.201.134.020.000**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	301.692.139.000	309.497.080.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.270.161.584.000	6.857.812.348.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.826.533.000	2.815.905.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	40.127.108.000	31.008.687.000
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**41.743.629.000**	**36.244.682.000**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.543.109.000	30.372.842.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.200.520.000	5.871.840.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**74.030.005.000**	**72.408.777.000**
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.233.000.000	45.516.428.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.797.005.000	26.892.349.000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**22.571.348.000**	**17.173.842.000**
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.171.348.000	13.794.842.000
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	6.400.000.000	3.379.000.000
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**25.742.612.000**	**26.244.475.000**
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.811.581.500	21.512.206.000
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.931.030.500	4.732.269.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.847.534.000**	**36.109.160.000**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**39.847.534.000**	**36.109.160.000**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.323.014.000	29.616.394.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.799.520.000	4.568.089.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.725.000.000	1.924.677.000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**146.381.698.000**	**326.696.548.000**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**146.381.698.000**	**326.696.548.000**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.206.698.000	16.545.275.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.160.000.000	2.608.336.000

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	95.915.000.000	61.299.273.000
	POLITIK		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.850.000.000	36.626.664.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	750.000.000	2.373.400.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	26.500.000.000	207.243.600.000
	Total Anggaran	**24.514.909.659.000**	**24.156.414.261.000**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN VIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN KUA PPAS DENGAN RANCANGAN APBD

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02	**Dinas Pendidikan**	**8.425.538.045.000**	**8.425.538.045.000**	**8.425.538.045.000**
1.01.0.00.0.00.02.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**8.425.538.045.000**	**8.425.538.045.000**	**8.425.538.045.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**5.396.218.243.000**	**5.396.218.243.000**	**5.396.218.243.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.396.218.243.000**	**5.396.218.243.000**	**5.396.218.243.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.259.167.000**	**92.259.167.000**	**92.259.167.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.279.167.000	91.279.167.000	91.279.167.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.155.662.053.000**	**5.155.662.053.000**	**5.155.662.053.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.153.515.173.000	5.153.515.173.000	5.153.515.173.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.146.880.000	2.146.880.000	2.146.880.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**867.000.000**	**867.000.000**	**867.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	55.000.000	55.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	592.000.000	592.000.000	592.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	165.000.000	165.000.000	165.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000	55.000.000	55.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**537.500.000**	**537.500.000**	**537.500.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	275.000.000	275.000.000	275.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	55.000.000	55.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.493.000	27.493.000	27.493.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.007.000	100.007.000	100.007.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.272.000.000**	**8.272.000.000**	**8.272.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	689.500.000	689.500.000	689.500.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	962.000.000	962.000.000	962.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	634.000.000	634.000.000	634.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	599.000.000	599.000.000	599.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	228.000.000	228.000.000	228.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.000.000	43.000.000	43.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.341.500.000	1.341.500.000	1.341.500.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.825.000.000	2.825.000.000	2.825.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	850.000.000	850.000.000	850.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.416.700.000**	**6.416.700.000**	**6.416.700.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	655.000.000	655.000.000	655.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.195.200.000	1.195.200.000	1.195.200.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	26.500.000	26.500.000	26.500.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	820.000.000	820.000.000	820.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.318.733.000**	**127.318.733.000**	**127.318.733.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.550.000	79.550.000	79.550.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.690.000.000	4.690.000.000	4.690.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.500.000	373.500.000	373.500.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.175.683.000	122.175.683.000	122.175.683.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.885.090.000**	**4.885.090.000**	**4.885.090.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441.790.000	441.790.000	441.790.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	253.000.000	253.000.000	253.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	641.600.000	641.600.000	641.600.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	91.000.000	91.000.000	91.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.102.300.000	2.102.300.000	2.102.300.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	820.000.000	820.000.000	820.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	295.400.000	295.400.000	295.400.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**3.029.319.802.000**	**3.029.319.802.000**	**3.029.319.802.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.028.289.802.000**	**3.028.289.802.000**	**3.028.289.802.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**1.082.181.804.000**	**1.082.181.804.000**	**1.082.181.804.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19.517.962.000	19.517.962.000	19.517.962.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	220.000.000	220.000.000	220.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000	750.000.000	750.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11.200.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	276.620.844.000	276.620.844.000	276.620.844.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	719.471.810.000	719.471.810.000	719.471.810.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.735.000.000	8.735.000.000	8.735.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	1.036.188.000	1.036.188.000	1.036.188.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.822.807.369.000**	**1.822.807.369.000**	**1.822.807.369.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	13.115.731.000	13.115.731.000	13.115.731.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.000.000	430.000.000	430.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000	750.000.000	750.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16.797.200.000	16.797.200.000	16.797.200.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	66.634.500.000	66.634.500.000	66.634.500.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	262.332.616.000	262.332.616.000	262.332.616.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.369.240.710.000	1.369.240.710.000	1.369.240.710.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	550.000.000	550.000.000	550.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.475.000.000	25.475.000.000	25.475.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	2.357.673.000	2.357.673.000	2.357.673.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.225.278.000	4.225.278.000	4.225.278.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	318.661.000	318.661.000	318.661.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**123.300.629.000**	**123.300.629.000**	**123.300.629.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	26.125.133.000	26.125.133.000	26.125.133.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	82.731.830.000	82.731.830.000	82.731.830.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	223.666.000	223.666.000	223.666.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-
1.01.0.00.0.00.02.1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**330.000.000**	**330.000.000**	**330.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**240.000.000**	**240.000.000**	**240.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	240.000.000	240.000.000	240.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**240.000.000**	**240.000.000**	**240.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01.0.00.0.00.02.1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	240.000.000	240.000.000	240.000.000
1.01.0.00.0.00.02.1.01.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
1.01.0.00.0.00.02.1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.0.00.0.00.01	**Dinas Kesehatan**	**3.869.410.280.000**	**3.869.410.280.000**	**3.869.410.280.000**
1.02.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.869.410.280.000**	**3.869.410.280.000**	**3.869.410.280.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.318.995.266.000**	**3.318.995.266.000**	**3.318.995.266.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.318.995.266.000**	**3.318.995.266.000**	**3.318.995.266.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**344.083.000**	**344.083.000**	**344.083.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.835.000	218.835.000	218.835.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.248.000	125.248.000	125.248.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**600.951.733.000**	**600.951.733.000**	**600.951.733.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	590.370.913.000	590.370.913.000	590.370.913.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.525.820.000	10.525.820.000	10.525.820.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**376.800.000**	**376.800.000**	**376.800.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	268.000.000	268.000.000	268.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	108.800.000	108.800.000	108.800.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.520.430.000**	**3.520.430.000**	**3.520.430.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.052.000	244.052.000	244.052.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.519.000	217.519.000	217.519.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.639.000	173.639.000	173.639.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	492.721.000	492.721.000	492.721.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	401.279.000	401.279.000	401.279.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	507.088.000	507.088.000	507.088.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.425.512.000	1.425.512.000	1.425.512.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.620.000	57.620.000	57.620.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.020.000.000**	**1.020.000.000**	**1.020.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	320.000.000	320.000.000	320.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.698.901.000**	**19.698.901.000**	**19.698.901.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.271.000	164.271.000	164.271.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.514.325.000	7.514.325.000	7.514.325.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.200.000	141.200.000	141.200.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.879.105.000	11.879.105.000	11.879.105.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.104.323.000**	**4.104.323.000**	**4.104.323.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.045.825.000	1.045.825.000	1.045.825.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.020.000	753.020.000	753.020.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.000.000	18.000.000	18.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	334.000.000	334.000.000	334.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.231.170.000	1.231.170.000	1.231.170.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.200.000	568.200.000	568.200.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	134.108.000	134.108.000	134.108.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.688.943.996.000**	**2.688.943.996.000**	**2.688.943.996.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.688.943.996.000	2.688.943.996.000	2.688.943.996.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**550.415.014.000**	**550.415.014.000**	**550.415.014.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**547.251.577.000**	**547.251.577.000**	**547.251.577.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**161.359.249.000**	**161.359.249.000**	**161.359.249.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.027.500.000	3.027.500.000	3.027.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	79.315.215.000	79.315.215.000	79.315.215.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	102.166.000	102.166.000	102.166.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	907.891.000	907.891.000	907.891.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	270.000.000	270.000.000	270.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	20.900.000.000	20.900.000.000	20.900.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	55.336.477.000	55.336.477.000	55.336.477.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat**	**380.980.711.000**	**380.980.711.000**	**380.980.711.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	358.654.000	358.654.000	358.654.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	469.570.000	469.570.000	469.570.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	55.000.000	55.000.000	55.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	32.000.000	32.000.000	32.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	503.086.000	503.086.000	503.086.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	21.000.000	21.000.000	21.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.677.412.000	1.677.412.000	1.677.412.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	79.500.000	79.500.000	79.500.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	372.662.615.000	372.662.615.000	372.662.615.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	709.990.000	709.990.000	709.990.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	356.800.000	356.800.000	356.800.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.356.500.000	1.356.500.000	1.356.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.248.584.000	2.248.584.000	2.248.584.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**625.000.000**	**625.000.000**	**625.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	625.000.000	625.000.000	625.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah**	**4.286.617.000**	**4.286.617.000**	**4.286.617.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	135.830.000	135.830.000	135.830.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	-	-
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.150.787.000	4.150.787.000	4.150.787.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.928.215.000**	**1.928.215.000**	**1.928.215.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**273.215.000**	**273.215.000**	**273.215.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	268.025.000	268.025.000	268.025.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.190.000	5.190.000	5.190.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.655.000.000**	**1.655.000.000**	**1.655.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	405.000.000	405.000.000	405.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.160.222.000**	**1.160.222.000**	**1.160.222.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**824.000.000**	**824.000.000**	**824.000.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	824.000.000	824.000.000	824.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**336.222.000**	**336.222.000**	**336.222.000**
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	336.222.000	336.222.000	336.222.000
1.03.0.00.0.00.14	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**639.333.897.000**	**639.333.897.000**	**639.333.897.000**
1.03.0.00.0.00.14.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**639.333.897.000**	**639.333.897.000**	**639.333.897.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**186.731.430.000**	**186.731.430.000**	**186.731.430.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**186.731.430.000**	**186.731.430.000**	**186.731.430.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.121.000.000**	**1.121.000.000**	**1.121.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	571.000.000	571.000.000	571.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**137.626.945.000**	**137.626.945.000**	**137.626.945.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.578.493.000	134.578.493.000	134.578.493.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.435.280.000	2.435.280.000	2.435.280.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	613.172.000	613.172.000	613.172.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.512.440.000**	**1.512.440.000**	**1.512.440.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.512.440.000	1.512.440.000	1.512.440.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**300.169.000**	**300.169.000**	**300.169.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.700.000	56.700.000	56.700.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.469.000	243.469.000	243.469.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.131.514.000**	**6.131.514.000**	**6.131.514.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	275.899.000	275.899.000	275.899.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	751.493.000	751.493.000	751.493.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	776.848.000	776.848.000	776.848.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	484.319.000	484.319.000	484.319.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	81.520.000	81.520.000	81.520.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.750.000	32.750.000	32.750.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.941.826.000	2.941.826.000	2.941.826.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	357.360.000	357.360.000	357.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	429.499.000	429.499.000	429.499.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.577.473.000**	**1.577.473.000**	**1.577.473.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.577.473.000	1.577.473.000	1.577.473.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.727.881.000**	**27.727.881.000**	**27.727.881.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.186.000	95.186.000	95.186.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.110.834.000	5.110.834.000	5.110.834.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.521.861.000	22.521.861.000	22.521.861.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.734.008.000**	**10.734.008.000**	**10.734.008.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.929.180.000	3.929.180.000	3.929.180.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.524.570.000	4.524.570.000	4.524.570.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.280.258.000	2.280.258.000	2.280.258.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**452.602.467.000**	**452.602.467.000**	**452.602.467.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**48.621.302.000**	**48.621.302.000**	**48.621.302.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**24.405.458.000**	**24.405.458.000**	**24.405.458.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.759.106.000	3.759.106.000	3.759.106.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	487.974.000	487.974.000	487.974.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0125	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0134	Rehabilitasi Embung	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	4.952.312.000	4.952.312.000	4.952.312.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	2.606.066.000	2.606.066.000	2.606.066.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**24.215.844.000**	**24.215.844.000**	**24.215.844.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	565.000.000	565.000.000	565.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	23.113.818.000	23.113.818.000	23.113.818.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	187.026.000	187.026.000	187.026.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**23.013.309.000**	**23.013.309.000**	**23.013.309.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas**	**23.013.309.000**	**23.013.309.000**	**23.013.309.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	7.808.462.000	7.808.462.000	7.808.462.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	13.599.672.000	13.599.672.000	13.599.672.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.355.175.000	1.355.175.000	1.355.175.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**11.770.900.000**	**11.770.900.000**	**11.770.900.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**11.770.900.000**	**11.770.900.000**	**11.770.900.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.325.900.000	11.325.900.000	11.325.900.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	445.000.000	445.000.000	445.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.793.451.000**	**2.793.451.000**	**2.793.451.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**2.793.451.000**	**2.793.451.000**	**2.793.451.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2.693.451.000	2.693.451.000	2.693.451.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**13.470.116.000**	**13.470.116.000**	**13.470.116.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**13.470.116.000**	**13.470.116.000**	**13.470.116.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	109.668.000	109.668.000	109.668.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.360.448.000	13.360.448.000	13.360.448.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**349.789.477.000**	**349.789.477.000**	**349.789.477.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**349.789.477.000**	**349.789.477.000**	**349.789.477.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	24.348.160.000	24.348.160.000	24.348.160.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	380.000.000	380.000.000	380.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	162.336.122.000	162.336.122.000	162.336.122.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0048	Pembangunan Underpass	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0049	Pelebaran Jembatan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	104.520.096.000	104.520.096.000	104.520.096.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	3.982.000.000	3.982.000.000	3.982.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	28.140.000.000	28.140.000.000	28.140.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0055	Pembangunan Flyover	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.420.342.000	15.420.342.000	15.420.342.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	2.782.757.000	2.782.757.000	2.782.757.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**2.146.224.000**	**2.146.224.000**	**2.146.224.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**1.397.224.000**	**1.397.224.000**	**1.397.224.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	115.000.000	115.000.000	115.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	469.537.000	469.537.000	469.537.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	146.224.000	146.224.000	146.224.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	666.463.000	666.463.000	666.463.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**597.000.000**	**597.000.000**	**597.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	544.000.000	544.000.000	544.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	53.000.000	53.000.000	53.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**152.000.000**	**152.000.000**	**152.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.000.000	28.000.000	28.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa	124.000.000	124.000.000	124.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**997.688.000**	**997.688.000**	**997.688.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**-**	**-**	**-**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	170.000.000	170.000.000	170.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	147.389.000	147.389.000	147.389.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-	-	-
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	152.611.000	152.611.000	152.611.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**397.688.000**	**397.688.000**	**397.688.000**
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	290.545.000	290.545.000	290.545.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	62.789.000	62.789.000	62.789.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	44.354.000	44.354.000	44.354.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**39.810.871.000**	**39.810.871.000**	**39.810.871.000**
1.04.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**39.810.871.000**	**39.810.871.000**	**39.810.871.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**19.466.548.000**	**19.466.548.000**	**19.466.548.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.466.548.000**	**19.466.548.000**	**19.466.548.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**839.389.000**	**839.389.000**	**839.389.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	497.234.000	497.234.000	497.234.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.155.000	292.155.000	292.155.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.844.944.000**	**13.844.944.000**	**13.844.944.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.368.944.000	13.368.944.000	13.368.944.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	386.000.000	386.000.000	386.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**170.000.000**	**170.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	155.000.000	155.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**62.305.000**	**62.305.000**	**62.305.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.641.000	11.641.000	11.641.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.664.000	15.664.000	15.664.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.115.000.000**	**1.115.000.000**	**1.115.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.000.000	33.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	28.000.000	28.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	13.000.000	13.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000	78.000.000	78.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630.000.000	630.000.000	630.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000.000	21.000.000	21.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.830.515.000**	**2.830.515.000**	**2.830.515.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.325.515.000	2.325.515.000	2.325.515.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**604.395.000**	**604.395.000**	**604.395.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.395.000	89.395.000	89.395.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	13.000.000	13.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	42.000.000	42.000.000	42.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**19.144.323.000**	**19.144.323.000**	**19.144.323.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**12.845.000.000**	**12.845.000.000**	**12.845.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**170.000.000**	**170.000.000**	**170.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**130.000.000**	**130.000.000**	**130.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	130.000.000	130.000.000	130.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**10.963.000.000**	**10.963.000.000**	**10.963.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.635.000.000	1.635.000.000	1.635.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.008.000.000	4.008.000.000	4.008.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	5.320.000.000	5.320.000.000	5.320.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**	**1.582.000.000**	**1.582.000.000**	**1.582.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1.582.000.000	1.582.000.000	1.582.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.266.323.000**	**3.266.323.000**	**3.266.323.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.397.300.000**	**1.397.300.000**	**1.397.300.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	775.000.000	775.000.000	775.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	142.500.000	142.500.000	142.500.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	479.800.000	479.800.000	479.800.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.869.023.000**	**1.869.023.000**	**1.869.023.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	14.520.000	14.520.000	14.520.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	171.950.000	171.950.000	171.950.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.682.553.000	1.682.553.000	1.682.553.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.663.000.000**	**2.663.000.000**	**2.663.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**2.663.000.000**	**2.663.000.000**	**2.663.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	2.638.000.000	2.638.000.000	2.638.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**370.000.000**	**370.000.000**	**370.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	**370.000.000**	**370.000.000**	**370.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	370.000.000	370.000.000	370.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**270.000.000**	**270.000.000**	**270.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**270.000.000**	**270.000.000**	**270.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	270.000.000	270.000.000	270.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	375.000.000	375.000.000	375.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**430.000.000**	**430.000.000**	**430.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**430.000.000**	**430.000.000**	**430.000.000**
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	365.000.000	365.000.000	365.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat	65.000.000	65.000.000	65.000.000
1.05.0.00.0.00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**22.535.558.000**	**22.535.558.000**	**22.535.558.000**
1.05.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**22.535.558.000**	**22.535.558.000**	**22.535.558.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.742.868.000**	**17.742.868.000**	**17.742.868.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.742.868.000**	**17.742.868.000**	**17.742.868.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**152.365.000**	**152.365.000**	**152.365.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.305.000	103.305.000	103.305.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.060.000	44.060.000	44.060.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.148.333.000**	**13.148.333.000**	**13.148.333.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.333.000	12.846.333.000	12.846.333.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	282.000.000	282.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**415.835.000**	**415.835.000**	**415.835.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.835.000	130.835.000	130.835.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**655.707.000**	**655.707.000**	**655.707.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.400.000	75.400.000	75.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.155.000	95.155.000	95.155.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	320.000.000	320.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.152.000	40.152.000	40.152.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.559.171.000**	**2.559.171.000**	**2.559.171.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	330.000.000	330.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.227.171.000	2.227.171.000	2.227.171.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**761.457.000**	**761.457.000**	**761.457.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	309.000.000	309.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	65.000.000	65.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.457.000	348.457.000	348.457.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	39.000.000	39.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**4.792.690.000**	**4.792.690.000**	**4.792.690.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.432.690.000**	**4.432.690.000**	**4.432.690.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2.182.890.000**	**2.182.890.000**	**2.182.890.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	200.000	200.000	200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	231.940.000	231.940.000	231.940.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.340.750.000	1.340.750.000	1.340.750.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	260.000.000	260.000.000	260.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**2.221.680.000**	**2.221.680.000**	**2.221.680.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	70.850.000	70.850.000	70.850.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.790.000	20.790.000	20.790.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.130.040.000	2.130.040.000	2.130.040.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**28.120.000**	**28.120.000**	**28.120.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	19.920.000	19.920.000	19.920.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan	8.200.000	8.200.000	8.200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**360.000.000**	**360.000.000**	**360.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**360.000.000**	**360.000.000**	**360.000.000**
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	160.000.000	160.000.000	160.000.000
1.05.0.00.0.00.04	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**20.396.444.000**	**20.396.444.000**	**20.396.444.000**
1.05.0.00.0.00.04.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**20.396.444.000**	**20.396.444.000**	**20.396.444.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**14.421.444.000**	**14.421.444.000**	**14.421.444.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.421.444.000**	**14.421.444.000**	**14.421.444.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**260.000.000**	**260.000.000**	**260.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.182.223.000**	**7.182.223.000**	**7.182.223.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.832.223.000	6.832.223.000	6.832.223.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**61.500.000**	**61.500.000**	**61.500.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	61.500.000	61.500.000	61.500.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**537.500.000**	**537.500.000**	**537.500.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.500.000	130.500.000	130.500.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.000.000	316.000.000	316.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.528.000.000**	**1.528.000.000**	**1.528.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	828.000.000	828.000.000	828.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.931.721.000**	**3.931.721.000**	**3.931.721.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.000.000	529.000.000	529.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.401.221.000	3.401.221.000	3.401.221.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**905.500.000**	**905.500.000**	**905.500.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.500.000	685.500.000	685.500.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.975.000.000**	**5.975.000.000**	**5.975.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.975.000.000**	**5.975.000.000**	**5.975.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**700.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**2.125.000.000**	**2.125.000.000**	**2.125.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	-	-	-
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**2.750.000.000**	**2.750.000.000**	**2.750.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.06.0.00.0.00.01	**Dinas Sosial**	**333.894.864.000**	**333.894.864.000**	**333.894.864.000**
1.06.0.00.0.00.01.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**333.894.864.000**	**333.894.864.000**	**333.894.864.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**134.126.589.000**	**134.126.589.000**	**134.126.589.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**134.126.589.000**	**134.126.589.000**	**134.126.589.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**850.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95.930.738.000**	**95.930.738.000**	**95.930.738.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.255.738.000	94.255.738.000	94.255.738.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	175.000.000	175.000.000	175.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**225.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.601.579.000**	**4.601.579.000**	**4.601.579.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	297.089.000	297.089.000	297.089.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.820.000	117.820.000	117.820.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	262.452.000	262.452.000	262.452.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	666.854.000	666.854.000	666.854.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.785.000	185.785.000	185.785.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.350.000	36.350.000	36.350.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	434.767.000	434.767.000	434.767.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	238.750.000	238.750.000	238.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.286.712.000	2.286.712.000	2.286.712.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.051.213.000**	**2.051.213.000**	**2.051.213.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.500.000	17.500.000	17.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	734.193.000	734.193.000	734.193.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.000.000	443.000.000	443.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	856.520.000	856.520.000	856.520.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.063.583.000**	**22.063.583.000**	**22.063.583.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.140.000	80.140.000	80.140.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.808.250.000	3.808.250.000	3.808.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.975.193.000	17.975.193.000	17.975.193.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.254.476.000**	**8.254.476.000**	**8.254.476.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.676.000	773.676.000	773.676.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.000.000	253.000.000	253.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.687.280.000	6.687.280.000	6.687.280.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.520.000	390.520.000	390.520.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**199.768.275.000**	**199.768.275.000**	**199.768.275.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.286.000.000**	**10.286.000.000**	**10.286.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**10.086.000.000**	**10.086.000.000**	**10.086.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	750.000.000	750.000.000	750.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.384.000.000	4.384.000.000	4.384.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan	4.002.000.000	4.002.000.000	4.002.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	355.720.000	355.720.000	355.720.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	44.280.000	44.280.000	44.280.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**74.090.123.000**	**74.090.123.000**	**74.090.123.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**24.402.971.000**	**24.402.971.000**	**24.402.971.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	17.793.060.000	17.793.060.000	17.793.060.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	2.542.882.000	2.542.882.000	2.542.882.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.123.607.000	1.123.607.000	1.123.607.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	501.800.000	501.800.000	501.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	152.900.000	152.900.000	152.900.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.037.521.000	1.037.521.000	1.037.521.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	91.660.000	91.660.000	91.660.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	324.810.000	324.810.000	324.810.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.830.000	70.830.000	70.830.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	76.909.000	76.909.000	76.909.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan	146.800.000	146.800.000	146.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	528.192.000	528.192.000	528.192.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**22.242.229.000**	**22.242.229.000**	**22.242.229.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	7.750.000	7.750.000	7.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.753.140.000	2.753.140.000	2.753.140.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.102.772.000	2.102.772.000	2.102.772.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.450.000	60.450.000	60.450.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	695.756.000	695.756.000	695.756.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	119.070.000	119.070.000	119.070.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.857.939.000	3.857.939.000	3.857.939.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	35.490.000	35.490.000	35.490.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	89.250.000	89.250.000	89.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	12.061.913.000	12.061.913.000	12.061.913.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	421.606.000	421.606.000	421.606.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	7.300.000	7.300.000	7.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	29.793.000	29.793.000	29.793.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**20.567.939.000**	**20.567.939.000**	**20.567.939.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	13.301.815.000	13.301.815.000	13.301.815.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	3.799.320.000	3.799.320.000	3.799.320.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.107.019.000	1.107.019.000	1.107.019.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	85.000.000	85.000.000	85.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	233.890.000	233.890.000	233.890.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	912.065.000	912.065.000	912.065.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	100.300.000	100.300.000	100.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.140.000	70.140.000	70.140.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.090.000	59.090.000	59.090.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	421.125.000	421.125.000	421.125.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	259.910.000	259.910.000	259.910.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	210.265.000	210.265.000	210.265.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**2.490.140.000**	**2.490.140.000**	**2.490.140.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	1.763.300.000	1.763.300.000	1.763.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	202.940.000	202.940.000	202.940.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	147.650.000	147.650.000	147.650.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.800.000	19.800.000	19.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	16.200.000	16.200.000	16.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	76.490.000	76.490.000	76.490.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	20.660.000	20.660.000	20.660.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	192.100.000	192.100.000	192.100.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**4.386.844.000**	**4.386.844.000**	**4.386.844.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.101.730.000	3.101.730.000	3.101.730.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	562.514.000	562.514.000	562.514.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	193.110.000	193.110.000	193.110.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	31.270.000	31.270.000	31.270.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	23.100.000	23.100.000	23.100.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.424.000	20.424.000	20.424.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	211.700.000	211.700.000	211.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.346.000	50.346.000	50.346.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	26.000.000	26.000.000	26.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	165.150.000	165.150.000	165.150.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**110.594.572.000**	**110.594.572.000**	**110.594.572.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**110.244.572.000**	**110.244.572.000**	**110.244.572.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.500.000.000	24.500.000.000	24.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	84.044.572.000	84.044.572.000	84.044.572.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**4.397.580.000**	**4.397.580.000**	**4.397.580.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**4.397.580.000**	**4.397.580.000**	**4.397.580.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.349.018.000	2.349.018.000	2.349.018.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	824.312.000	824.312.000	824.312.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.00011	Penyediaan Sandang	247.500.000	247.500.000	247.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.00013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	247.000.000	247.000.000	247.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.00016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	364.750.000	364.750.000	364.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.00022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	165.000.000	165.000.000	165.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.07.3.32.0.00.02	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**89.667.936.000**	**89.667.936.000**	**89.667.936.000**
2.07.3.32.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**89.667.936.000**	**89.667.936.000**	**89.667.936.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**77.615.772.000**	**77.615.772.000**	**77.615.772.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**77.615.772.000**	**77.615.772.000**	**77.615.772.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**378.365.000**	**378.365.000**	**378.365.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.284.000	237.284.000	237.284.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.691.000	100.691.000	100.691.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.290.000	28.290.000	28.290.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.100.000	12.100.000	12.100.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62.986.623.000**	**62.986.623.000**	**62.986.623.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.251.652.000	62.251.652.000	62.251.652.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.666.000	642.666.000	642.666.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.345.000	91.345.000	91.345.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	960.000	960.000	960.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.100.000**	**36.100.000**	**36.100.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.300.000	7.300.000	7.300.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.900.000	10.900.000	10.900.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.900.000	7.900.000	7.900.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.876.213.000**	**1.876.213.000**	**1.876.213.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.622.000	83.622.000	83.622.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.008.000	101.008.000	101.008.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.085.000	110.085.000	110.085.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.792.000	195.792.000	195.792.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.206.000	50.206.000	50.206.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	158.000	158.000	158.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.220.000	93.220.000	93.220.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.224.122.000	1.224.122.000	1.224.122.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**222.426.000**	**222.426.000**	**222.426.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.225.000	196.225.000	196.225.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.201.000	26.201.000	26.201.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.458.953.000**	**10.458.953.000**	**10.458.953.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.632.000	22.632.000	22.632.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.160.358.000	2.160.358.000	2.160.358.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.939.000	145.939.000	145.939.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.130.024.000	8.130.024.000	8.130.024.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.587.092.000**	**1.587.092.000**	**1.587.092.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.386.000	416.386.000	416.386.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.983.000	150.983.000	150.983.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	94.300.000	94.300.000	94.300.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564.128.000	564.128.000	564.128.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.010.000	62.010.000	62.010.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	214.285.000	214.285.000	214.285.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**11.902.164.000**	**11.902.164.000**	**11.902.164.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**121.635.000**	**121.635.000**	**121.635.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**121.635.000**	**121.635.000**	**121.635.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	51.510.000	51.510.000	51.510.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	31.605.000	31.605.000	31.605.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	38.520.000	38.520.000	38.520.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**7.572.217.000**	**7.572.217.000**	**7.572.217.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**7.067.256.000**	**7.067.256.000**	**7.067.256.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.857.609.000	6.857.609.000	6.857.609.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	146.647.000	146.647.000	146.647.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	63.000.000	63.000.000	63.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**93.677.000**	**93.677.000**	**93.677.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	93.677.000	93.677.000	93.677.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	**370.284.000**	**370.284.000**	**370.284.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	370.284.000	370.284.000	370.284.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.000.000	41.000.000	41.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.510.000.000**	**1.510.000.000**	**1.510.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**691.279.000**	**691.279.000**	**691.279.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	69.870.000	69.870.000	69.870.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	245.290.000	245.290.000	245.290.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24.860.000	24.860.000	24.860.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	16.360.000	16.360.000	16.360.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	320.609.000	320.609.000	320.609.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14.290.000	14.290.000	14.290.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.820.000**	**3.820.000**	**3.820.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.820.000	3.820.000	3.820.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**675.510.000**	**675.510.000**	**675.510.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	37.470.000	37.470.000	37.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	638.040.000	638.040.000	638.040.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**130.306.000**	**130.306.000**	**130.306.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.063.000	27.063.000	27.063.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	15.089.000	15.089.000	15.089.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.520.000	4.520.000	4.520.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	83.634.000	83.634.000	83.634.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**9.085.000**	**9.085.000**	**9.085.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.085.000	9.085.000	9.085.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**950.000.000**	**950.000.000**	**950.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**141.605.000**	**141.605.000**	**141.605.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	53.333.000	53.333.000	53.333.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	14.158.000	14.158.000	14.158.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	74.114.000	74.114.000	74.114.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**511.356.000**	**511.356.000**	**511.356.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	169.000.000	169.000.000	169.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	47.272.000	47.272.000	47.272.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.316.000	13.316.000	13.316.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	195.220.000	195.220.000	195.220.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	86.548.000	86.548.000	86.548.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**297.039.000**	**297.039.000**	**297.039.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	245.476.000	245.476.000	245.476.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	23.197.000	23.197.000	23.197.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	28.366.000	28.366.000	28.366.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**1.748.312.000**	**1.748.312.000**	**1.748.312.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**1.748.312.000**	**1.748.312.000**	**1.748.312.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	761.720.000	761.720.000	761.720.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	231.305.000	231.305.000	231.305.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	755.287.000	755.287.000	755.287.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**21.536.924.000**	**21.536.924.000**	**21.536.924.000**
2.08.2.14.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**21.536.924.000**	**21.536.924.000**	**21.536.924.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**16.341.824.000**	**16.341.824.000**	**16.341.824.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.341.824.000**	**16.341.824.000**	**16.341.824.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**207.000.000**	**207.000.000**	**207.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	62.000.000	62.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.916.389.000**	**11.916.389.000**	**11.916.389.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000	11.457.489.000	11.457.489.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.200.000	366.200.000	366.200.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.700.000	72.700.000	72.700.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**46.570.000**	**46.570.000**	**46.570.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.570.000	16.570.000	16.570.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**628.631.000**	**628.631.000**	**628.631.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	9.999.000	9.999.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.462.000	64.462.000	64.462.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.921.000	116.921.000	116.921.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.749.000	281.749.000	281.749.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.000.000	71.000.000	71.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.500.000**	**9.500.000**	**9.500.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.836.581.000**	**2.836.581.000**	**2.836.581.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447.536.000	447.536.000	447.536.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.387.045.000	2.387.045.000	2.387.045.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**637.153.000**	**637.153.000**	**637.153.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	175.000.000	175.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.400.000	11.400.000	11.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.128.000	355.128.000	355.128.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.625.000	94.625.000	94.625.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	-
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.468.080.000**	**4.468.080.000**	**4.468.080.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**2.698.800.000**	**2.698.800.000**	**2.698.800.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**	**121.730.000**	**121.730.000**	**121.730.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.800.000	25.800.000	25.800.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	40.930.000	40.930.000	40.930.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**2.577.070.000**	**2.577.070.000**	**2.577.070.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.439.500.000	1.439.500.000	1.439.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	705.070.000	705.070.000	705.070.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	432.500.000	432.500.000	432.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**770.432.000**	**770.432.000**	**770.432.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**115.750.000**	**115.750.000**	**115.750.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	14.750.000	14.750.000	14.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	51.000.000	51.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**136.040.000**	**136.040.000**	**136.040.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	9.270.000	9.270.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	17.720.000	17.720.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	6.750.000	6.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	87.300.000	87.300.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**518.642.000**	**518.642.000**	**518.642.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	347.642.000	347.642.000	347.642.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	56.000.000	56.000.000	56.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**328.408.000**	**328.408.000**	**328.408.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**312.808.000**	**312.808.000**	**312.808.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	312.808.000	312.808.000	312.808.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000	15.600.000	15.600.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**373.720.000**	**373.720.000**	**373.720.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**271.100.000**	**271.100.000**	**271.100.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	271.100.000	271.100.000	271.100.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**102.620.000**	**102.620.000**	**102.620.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	43.840.000	43.840.000	43.840.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	51.780.000	51.780.000	51.780.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**296.720.000**	**296.720.000**	**296.720.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**96.000.000**	**96.000.000**	**96.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	51.000.000	51.000.000	51.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**136.040.000**	**136.040.000**	**136.040.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.720.000	17.720.000	17.720.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.300.000	87.300.000	87.300.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.270.000	9.270.000	9.270.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000	6.750.000	6.750.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**64.680.000**	**64.680.000**	**64.680.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	34.680.000	34.680.000	34.680.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**727.020.000**	**727.020.000**	**727.020.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**160.000.000**	**160.000.000**	**160.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**151.230.000**	**151.230.000**	**151.230.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	36.170.000	36.170.000	36.170.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	22.488.000	22.488.000	22.488.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	26.780.000	26.780.000	26.780.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	65.792.000	65.792.000	65.792.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**8.770.000**	**8.770.000**	**8.770.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	8.770.000	8.770.000	8.770.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**389.667.000**	**389.667.000**	**389.667.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**352.667.000**	**352.667.000**	**352.667.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	148.000.000	148.000.000	148.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	35.856.000	35.856.000	35.856.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	168.811.000	168.811.000	168.811.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**37.000.000**	**37.000.000**	**37.000.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	37.000.000	37.000.000	37.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**177.353.000**	**177.353.000**	**177.353.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**88.586.000**	**88.586.000**	**88.586.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	27.109.000	27.109.000	27.109.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	25.570.000	25.570.000	25.570.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	35.907.000	35.907.000	35.907.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**88.767.000**	**88.767.000**	**88.767.000**
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	13.210.000	13.210.000	13.210.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	35.928.000	35.928.000	35.928.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	39.629.000	39.629.000	39.629.000
2.09.0.00.0.00.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	**45.169.295.000**	**45.169.295.000**	**45.169.295.000**
2.09.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**45.169.295.000**	**45.169.295.000**	**45.169.295.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**23.986.170.000**	**23.986.170.000**	**23.986.170.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.986.170.000**	**23.986.170.000**	**23.986.170.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.873.531.000**	**14.873.531.000**	**14.873.531.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.317.257.000	14.317.257.000	14.317.257.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.274.000	376.274.000	376.274.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**154.000.000**	**154.000.000**	**154.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	140.000.000	140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.000.000	14.000.000	14.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**763.501.000**	**763.501.000**	**763.501.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.000.000	68.000.000	68.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.000.000	53.000.000	53.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.200.000	156.200.000	156.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000	335.000.000	335.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	87.301.000	87.301.000	87.301.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**635.200.000**	**635.200.000**	**635.200.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	635.200.000	635.200.000	635.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.372.660.000**	**3.372.660.000**	**3.372.660.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.000.000	438.000.000	438.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.934.660.000	2.934.660.000	2.934.660.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.731.278.000**	**3.731.278.000**	**3.731.278.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	210.000.000	210.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.190.278.000	3.190.278.000	3.190.278.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.000.000	331.000.000	331.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**21.183.125.000**	**21.183.125.000**	**21.183.125.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**13.614.995.000**	**13.614.995.000**	**13.614.995.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**8.078.791.000**	**8.078.791.000**	**8.078.791.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.138.440.000	3.138.440.000	3.138.440.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	346.990.000	346.990.000	346.990.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.006.835.000	1.006.835.000	1.006.835.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	3.138.440.000	3.138.440.000	3.138.440.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	377.226.000	377.226.000	377.226.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	70.860.000	70.860.000	70.860.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**5.025.529.000**	**5.025.529.000**	**5.025.529.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.025.529.000	5.025.529.000	5.025.529.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**510.675.000**	**510.675.000**	**510.675.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.675.000	510.675.000	510.675.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**4.975.924.000**	**4.975.924.000**	**4.975.924.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**4.975.924.000**	**4.975.924.000**	**4.975.924.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	275.000.000	275.000.000	275.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	317.317.000	317.317.000	317.317.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	2.750.402.000	2.750.402.000	2.750.402.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1.633.205.000	1.633.205.000	1.633.205.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**2.592.206.000**	**2.592.206.000**	**2.592.206.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah**	**2.592.206.000**	**2.592.206.000**	**2.592.206.000**
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	446.378.000	446.378.000	446.378.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	338.743.000	338.743.000	338.743.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.437.085.000	1.437.085.000	1.437.085.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.11.3.28.0.00.02	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**140.666.150.000**	**140.666.150.000**	**140.666.150.000**
2.11.3.28.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**140.666.150.000**	**140.666.150.000**	**140.666.150.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**135.158.813.000**	**135.158.813.000**	**135.158.813.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**135.158.813.000**	**135.158.813.000**	**135.158.813.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**385.500.000**	**385.500.000**	**385.500.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.500.000	225.500.000	225.500.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**120.250.739.000**	**120.250.739.000**	**120.250.739.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.165.739.000	120.165.739.000	120.165.739.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**313.345.000**	**313.345.000**	**313.345.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	313.345.000	313.345.000	313.345.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**45.000.000**	**45.000.000**	**45.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.605.604.000**	**1.605.604.000**	**1.605.604.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500.000	62.500.000	62.500.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.229.000	100.229.000	100.229.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.777.000	111.777.000	111.777.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.618.000	131.618.000	131.618.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.035.000	84.035.000	84.035.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.260.000	227.260.000	227.260.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.185.000	886.185.000	886.185.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.500.000**	**40.500.000**	**40.500.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000	34.000.000	34.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.752.311.000**	**10.752.311.000**	**10.752.311.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.807.000	23.807.000	23.807.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.988.000	1.703.988.000	1.703.988.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.760.000	161.760.000	161.760.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.862.756.000	8.862.756.000	8.862.756.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.765.814.000**	**1.765.814.000**	**1.765.814.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.315.914.000	1.315.914.000	1.315.914.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.600.000	9.600.000	9.600.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.300.000	255.300.000	255.300.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	145.000.000	145.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**2.224.600.000**	**2.224.600.000**	**2.224.600.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**145.772.000**	**145.772.000**	**145.772.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.088.000	101.088.000	101.088.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	44.684.000	44.684.000	44.684.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**54.228.000**	**54.228.000**	**54.228.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	54.228.000	54.228.000	54.228.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**965.614.000**	**965.614.000**	**965.614.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**965.614.000**	**965.614.000**	**965.614.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14.370.000	14.370.000	14.370.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	201.244.000	201.244.000	201.244.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**158.986.000**	**158.986.000**	**158.986.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**158.986.000**	**158.986.000**	**158.986.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	94.600.000	94.600.000	94.600.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64.386.000	64.386.000	64.386.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**245.000.000**	**245.000.000**	**245.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**245.000.000**	**245.000.000**	**245.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	155.000.000	155.000.000	155.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**3.282.737.000**	**3.282.737.000**	**3.282.737.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**2.676.375.000**	**2.676.375.000**	**2.676.375.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.01.0011	Review atau revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.333.000.000**	**2.333.000.000**	**2.333.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	804.754.000	804.754.000	804.754.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	34.220.000	34.220.000	34.220.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1.434.026.000	1.434.026.000	1.434.026.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**105.000.000**	**105.000.000**	**105.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**45.000.000**	**45.000.000**	**45.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**73.375.000**	**73.375.000**	**73.375.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	2.610.000	2.610.000	2.610.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	2.610.000	2.610.000	2.610.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	14.490.000	14.490.000	14.490.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.480.000	3.480.000	3.480.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	20.150.000	20.150.000	20.150.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	27.425.000	27.425.000	27.425.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	2.610.000	2.610.000	2.610.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**191.362.000**	**191.362.000**	**191.362.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**51.362.000**	**51.362.000**	**51.362.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	51.362.000	51.362.000	51.362.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	211.000.000	211.000.000	211.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	49.000.000	49.000.000	49.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**115.000.000**	**115.000.000**	**115.000.000**
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**115.000.000**	**115.000.000**	**115.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	-	-	-
2.11.3.28.0.00.02.2.11.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.13.2.12.0.00.03	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**23.909.441.000**	**23.909.441.000**	**23.909.441.000**
2.13.2.12.0.00.03.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**23.909.441.000**	**23.909.441.000**	**23.909.441.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**18.645.901.000**	**18.645.901.000**	**18.645.901.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.645.901.000**	**18.645.901.000**	**18.645.901.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**285.000.000**	**285.000.000**	**285.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.069.218.000**	**14.069.218.000**	**14.069.218.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.712.218.000	13.712.218.000	13.712.218.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357.000.000	357.000.000	357.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**651.683.000**	**651.683.000**	**651.683.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.000.000	53.000.000	53.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000	205.000.000	205.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	142.683.000	142.683.000	142.683.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.945.000.000**	**2.945.000.000**	**2.945.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.000.000	496.000.000	496.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.424.000.000	2.424.000.000	2.424.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**520.000.000**	**520.000.000**	**520.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	170.000.000	170.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000	130.000.000	130.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**205.000.000**	**205.000.000**	**205.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	60.000.000	60.000.000	60.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.058.540.000**	**5.058.540.000**	**5.058.540.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**-**	**-**	**-**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**155.000.000**	**155.000.000**	**155.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**155.000.000**	**155.000.000**	**155.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	155.000.000	155.000.000	155.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.033.540.000**	**1.033.540.000**	**1.033.540.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.033.540.000**	**1.033.540.000**	**1.033.540.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	85.000.000	85.000.000	85.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	418.540.000	418.540.000	418.540.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	120.000.000	120.000.000	120.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.870.000.000**	**3.870.000.000**	**3.870.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.870.000.000**	**3.870.000.000**	**3.870.000.000**
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	165.000.000	165.000.000	165.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.15.0.00.0.00.01	**Dinas Perhubungan**	**207.548.490.000**	**207.548.490.000**	**207.548.490.000**
2.15.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**207.548.490.000**	**207.548.490.000**	**207.548.490.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**68.792.811.000**	**68.792.811.000**	**68.792.811.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.792.811.000**	**68.792.811.000**	**68.792.811.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**245.683.000**	**245.683.000**	**245.683.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.064.000	120.064.000	120.064.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.619.000	62.619.000	62.619.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**47.183.594.000**	**47.183.594.000**	**47.183.594.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.366.833.000	46.366.833.000	46.366.833.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.200.000	766.200.000	766.200.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.561.000	50.561.000	50.561.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**955.000.000**	**955.000.000**	**955.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	955.000.000	955.000.000	955.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**192.500.000**	**192.500.000**	**192.500.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.500.000	42.500.000	42.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.554.352.000**	**1.554.352.000**	**1.554.352.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	257.000.000	257.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	89.500.000	89.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	28.000.000	28.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.852.000	199.852.000	199.852.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	812.500.000	812.500.000	812.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37.500.000	37.500.000	37.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.885.000.000**	**1.885.000.000**	**1.885.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.692.712.000**	**14.692.712.000**	**14.692.712.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	1.589.225.000	1.589.225.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.093.487.000	13.093.487.000	13.093.487.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.083.970.000**	**2.083.970.000**	**2.083.970.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	857.400.000	857.400.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	700.000.000	700.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	129.500.000	129.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	117.070.000	117.070.000	117.070.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**138.755.679.000**	**138.755.679.000**	**138.755.679.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**136.438.696.000**	**136.438.696.000**	**136.438.696.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**101.800.000**	**101.800.000**	**101.800.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	101.800.000	101.800.000	101.800.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**6.257.194.000**	**6.257.194.000**	**6.257.194.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.257.194.000	6.257.194.000	6.257.194.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**5.812.000.000**	**5.812.000.000**	**5.812.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	155.000.000	155.000.000	155.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.107.000.000	1.107.000.000	1.107.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	4.195.000.000	4.195.000.000	4.195.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	355.000.000	355.000.000	355.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**3.317.321.000**	**3.317.321.000**	**3.317.321.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	22.916.000	22.916.000	22.916.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	864.240.000	864.240.000	864.240.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	58.624.000	58.624.000	58.624.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa	2.371.541.000	2.371.541.000	2.371.541.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**37.316.000**	**37.316.000**	**37.316.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	37.316.000	37.316.000	37.316.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**1.358.496.000**	**1.358.496.000**	**1.358.496.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.078.653.000	1.078.653.000	1.078.653.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	173.460.000	173.460.000	173.460.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	106.383.000	106.383.000	106.383.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**118.790.622.000**	**118.790.622.000**	**118.790.622.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	696.815.000	696.815.000	696.815.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.093.807.000	118.093.807.000	118.093.807.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**660.173.000**	**660.173.000**	**660.173.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	586.551.000	586.551.000	586.551.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	73.622.000	73.622.000	73.622.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**48.400.000**	**48.400.000**	**48.400.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.400.000	48.400.000	48.400.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17.374.000**	**17.374.000**	**17.374.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.374.000	17.374.000	17.374.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**716.983.000**	**716.983.000**	**716.983.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.03	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**56.400.000**	**56.400.000**	**56.400.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.400.000	56.400.000	56.400.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**37.387.000**	**37.387.000**	**37.387.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.387.000	37.387.000	37.387.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan**	**38.536.000**	**38.536.000**	**38.536.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	38.536.000	38.536.000	38.536.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**584.660.000**	**584.660.000**	**584.660.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.000.000	77.000.000	77.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	483.000.000	483.000.000	483.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.660.000	24.660.000	24.660.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
2.16.2.20.2.21.01	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital**	**97.373.332.000**	**97.373.332.000**	**97.373.332.000**
2.16.2.20.2.21.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**97.373.332.000**	**97.373.332.000**	**97.373.332.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**36.762.703.000**	**36.762.703.000**	**36.762.703.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.762.703.000**	**36.762.703.000**	**36.762.703.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**335.887.000**	**335.887.000**	**335.887.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.887.000	135.887.000	135.887.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.824.042.000**	**19.824.042.000**	**19.824.042.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.000.242.000	19.000.242.000	19.000.242.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	763.800.000	763.800.000	763.800.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.000.000	19.000.000	19.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**220.678.000**	**220.678.000**	**220.678.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.178.000	7.178.000	7.178.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**93.000.000**	**93.000.000**	**93.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.095.586.000**	**1.095.586.000**	**1.095.586.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.226.000	34.226.000	34.226.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.200.000	165.200.000	165.200.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.800.000	54.800.000	54.800.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	196.580.000	196.580.000	196.580.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	400.000.000	400.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	88.780.000	88.780.000	88.780.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.200.000.000**	**5.200.000.000**	**5.200.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.900.210.000**	**8.900.210.000**	**8.900.210.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.616.000	8.616.000	8.616.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.273.594.000	7.273.594.000	7.273.594.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.093.300.000**	**1.093.300.000**	**1.093.300.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	11.000.000	11.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	37.000.000	37.000.000	37.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.000.000	408.000.000	408.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.000.000	101.000.000	101.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	46.300.000	46.300.000	46.300.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**58.086.829.000**	**58.086.829.000**	**58.086.829.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**15.345.000.000**	**15.345.000.000**	**15.345.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**15.345.000.000**	**15.345.000.000**	**15.345.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	2.588.285.000	2.588.285.000	2.588.285.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	95.000.000	95.000.000	95.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	3.884.375.000	3.884.375.000	3.884.375.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	4.720.000.000	4.720.000.000	4.720.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	601.800.000	601.800.000	601.800.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	614.817.000	614.817.000	614.817.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.140.723.000	1.140.723.000	1.140.723.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**42.741.829.000**	**42.741.829.000**	**42.741.829.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**42.741.829.000**	**42.741.829.000**	**42.741.829.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	1.181.000.000	1.181.000.000	1.181.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	146.725.000	146.725.000	146.725.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	1.213.000.000	1.213.000.000	1.213.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	19.027.500.000	19.027.500.000	19.027.500.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	550.000.000	550.000.000	550.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	20.173.604.000	20.173.604.000	20.173.604.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**740.000.000**	**740.000.000**	**740.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**740.000.000**	**740.000.000**	**740.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**740.000.000**	**740.000.000**	**740.000.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	260.000.000	260.000.000	260.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	260.000.000	260.000.000	260.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.783.800.000**	**1.783.800.000**	**1.783.800.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**1.783.800.000**	**1.783.800.000**	**1.783.800.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.164.140.000**	**1.164.140.000**	**1.164.140.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non	429.500.000	429.500.000	429.500.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	457.600.000	457.600.000	457.600.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	63.520.000	63.520.000	63.520.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	213.520.000	213.520.000	213.520.000
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**619.660.000**	**619.660.000**	**619.660.000**
2.16.2.20.2.21.01.2.16.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	619.660.000	619.660.000	619.660.000
2.17.0.00.0.00.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**33.933.698.000**	**33.933.698.000**	**33.933.698.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**33.933.698.000**	**33.933.698.000**	**33.933.698.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**28.089.628.000**	**28.089.628.000**	**28.089.628.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.089.628.000**	**28.089.628.000**	**28.089.628.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**120.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.433.081.000**	**14.433.081.000**	**14.433.081.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.008.081.000	14.008.081.000	14.008.081.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.000.000	410.000.000	410.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**582.975.000**	**582.975.000**	**582.975.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.500.000	27.500.000	27.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.550.000	82.550.000	82.550.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.925.000	12.925.000	12.925.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	325.000.000	325.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.555.222.000**	**12.555.222.000**	**12.555.222.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.310.000	1.087.310.000	1.087.310.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.443.412.000	11.443.412.000	11.443.412.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300.350.000**	**300.350.000**	**300.350.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.000.000	91.000.000	91.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.350.000	48.350.000	48.350.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000	46.000.000	46.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**5.844.070.000**	**5.844.070.000**	**5.844.070.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**938.680.000**	**938.680.000**	**938.680.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**538.680.000**	**538.680.000**	**538.680.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	538.680.000	538.680.000	538.680.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**195.000.000**	**195.000.000**	**195.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**195.000.000**	**195.000.000**	**195.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	195.000.000	195.000.000	195.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**577.000.000**	**577.000.000**	**577.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**577.000.000**	**577.000.000**	**577.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	238.500.000	238.500.000	238.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	53.500.000	53.500.000	53.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	235.000.000	235.000.000	235.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**855.000.000**	**855.000.000**	**855.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**855.000.000**	**855.000.000**	**855.000.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	178.422.000	178.422.000	178.422.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	151.578.000	151.578.000	151.578.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	105.000.000	105.000.000	105.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	52.000.000	52.000.000	52.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	270.000.000	270.000.000	270.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	73.000.000	73.000.000	73.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**3.278.390.000**	**3.278.390.000**	**3.278.390.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**3.278.390.000**	**3.278.390.000**	**3.278.390.000**
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	185.551.000	185.551.000	185.551.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	20.799.000	20.799.000	20.799.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	3.072.040.000	3.072.040.000	3.072.040.000
2.18.0.00.0.00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**23.053.331.000**	**23.053.331.000**	**23.053.331.000**
2.18.0.00.0.00.01.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**23.053.331.000**	**23.053.331.000**	**23.053.331.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**19.521.177.000**	**19.521.177.000**	**19.521.177.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.521.177.000**	**19.521.177.000**	**19.521.177.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**266.660.000**	**266.660.000**	**266.660.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.660.000	121.660.000	121.660.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	115.000.000	115.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.720.401.000**	**14.720.401.000**	**14.720.401.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.394.401.000	14.394.401.000	14.394.401.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	326.000.000	326.000.000	326.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**56.500.000**	**56.500.000**	**56.500.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**624.110.000**	**624.110.000**	**624.110.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.891.000	70.891.000	70.891.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000	56.000.000	56.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	55.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.000.000	79.000.000	79.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.219.000	244.219.000	244.219.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**218.000.000**	**218.000.000**	**218.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.000.000	178.000.000	178.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.049.660.000**	**3.049.660.000**	**3.049.660.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.000.000	534.000.000	534.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000	53.000.000	53.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.453.660.000	2.453.660.000	2.453.660.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**505.846.000**	**505.846.000**	**505.846.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.846.000	305.846.000	305.846.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.532.154.000**	**3.532.154.000**	**3.532.154.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**667.200.000**	**667.200.000**	**667.200.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**667.200.000**	**667.200.000**	**667.200.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	357.200.000	357.200.000	357.200.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	210.000.000	210.000.000	210.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.514.954.000**	**1.514.954.000**	**1.514.954.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.514.954.000**	**1.514.954.000**	**1.514.954.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.439.954.000	1.439.954.000	1.439.954.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**790.000.000**	**790.000.000**	**790.000.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**310.000.000**	**310.000.000**	**310.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	310.000.000	310.000.000	310.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**480.000.000**	**480.000.000**	**480.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	125.000.000	125.000.000	125.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**210.000.000**	**210.000.000**	**210.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**210.000.000**	**210.000.000**	**210.000.000**
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	210.000.000	210.000.000	210.000.000
2.19.0.00.0.00.02	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**151.652.445.000**	**151.652.445.000**	**151.652.445.000**
2.19.0.00.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**151.652.445.000**	**151.652.445.000**	**151.652.445.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**39.242.745.000**	**39.242.745.000**	**39.242.745.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.242.745.000**	**39.242.745.000**	**39.242.745.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**850.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.683.731.000**	**17.683.731.000**	**17.683.731.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.917.871.000	16.917.871.000	16.917.871.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	765.860.000	765.860.000	765.860.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.000.000**	**105.000.000**	**105.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.350.463.000**	**1.350.463.000**	**1.350.463.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	43.600.000	43.600.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.463.000	30.463.000	30.463.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000	165.000.000	165.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.400.000	871.400.000	871.400.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.110.000.000**	**3.110.000.000**	**3.110.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.183.551.000**	**13.183.551.000**	**13.183.551.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.000.000	31.000.000	31.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.562.551.000	9.562.551.000	9.562.551.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.560.000.000**	**2.560.000.000**	**2.560.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	175.000.000	175.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	985.000.000	985.000.000	985.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**112.409.700.000**	**112.409.700.000**	**112.409.700.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.965.000.000**	**11.965.000.000**	**11.965.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.720.000.000**	**3.720.000.000**	**3.720.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	720.000.000	720.000.000	720.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	-	-	-
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	700.000.000	700.000.000	700.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	900.000.000	900.000.000	900.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**8.245.000.000**	**8.245.000.000**	**8.245.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	7.245.000.000	7.245.000.000	7.245.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100.444.700.000**	**100.444.700.000**	**100.444.700.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**14.064.700.000**	**14.064.700.000**	**14.064.700.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	400.000.000	400.000.000	400.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	10.364.700.000	10.364.700.000	10.364.700.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**27.100.000.000**	**27.100.000.000**	**27.100.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	14.450.000.000	14.450.000.000	14.450.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**58.780.000.000**	**58.780.000.000**	**58.780.000.000**
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	58.580.000.000	58.580.000.000	58.580.000.000
2.19.0.00.0.00.02.2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.23.2.24.0.00.02	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**32.500.166.000**	**32.500.166.000**	**32.500.166.000**
2.23.2.24.0.00.02.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**32.500.166.000**	**32.500.166.000**	**32.500.166.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**30.309.985.000**	**30.309.985.000**	**30.309.985.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.309.985.000**	**30.309.985.000**	**30.309.985.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**178.316.000**	**178.316.000**	**178.316.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.396.000	143.396.000	143.396.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.920.000	24.920.000	24.920.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.997.559.000**	**24.997.559.000**	**24.997.559.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.770.389.000	24.770.389.000	24.770.389.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	227.170.000	227.170.000	227.170.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**91.708.000**	**91.708.000**	**91.708.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.508.000	89.508.000	89.508.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.700.000**	**17.700.000**	**17.700.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000	5.200.000	5.200.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**884.438.000**	**884.438.000**	**884.438.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.380.000	78.380.000	78.380.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.250.000	155.250.000	155.250.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.345.000	12.345.000	12.345.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.279.000	246.279.000	246.279.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.184.000	5.184.000	5.184.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	222.000.000	222.000.000	222.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**424.295.000**	**424.295.000**	**424.295.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.000.000	136.000.000	136.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.295.000	288.295.000	288.295.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.186.166.000**	**3.186.166.000**	**3.186.166.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	120.000.000	120.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.964.666.000	1.964.666.000	1.964.666.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**529.803.000**	**529.803.000**	**529.803.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.553.000	112.553.000	112.553.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.300.000	107.300.000	107.300.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.200.000	151.200.000	151.200.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	88.750.000	88.750.000	88.750.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**1.572.289.000**	**1.572.289.000**	**1.572.289.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.469.708.000**	**1.469.708.000**	**1.469.708.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**629.084.000**	**629.084.000**	**629.084.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	26.500.000	26.500.000	26.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12.785.000	12.785.000	12.785.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	61.819.000	61.819.000	61.819.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	450.980.000	450.980.000	450.980.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	23.620.000	23.620.000	23.620.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	28.380.000	28.380.000	28.380.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**840.624.000**	**840.624.000**	**840.624.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	182.294.000	182.294.000	182.294.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	286.316.000	286.316.000	286.316.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	342.014.000	342.014.000	342.014.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**102.581.000**	**102.581.000**	**102.581.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**46.535.000**	**46.535.000**	**46.535.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	6.535.000	6.535.000	6.535.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**21.430.000**	**21.430.000**	**21.430.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	11.535.000	11.535.000	11.535.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	9.895.000	9.895.000	9.895.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**14.326.000**	**14.326.000**	**14.326.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	14.326.000	14.326.000	14.326.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah**	**20.290.000**	**20.290.000**	**20.290.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	8.800.000	8.800.000	8.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	11.490.000	11.490.000	11.490.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**617.892.000**	**617.892.000**	**617.892.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**597.827.000**	**597.827.000**	**597.827.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**261.125.000**	**261.125.000**	**261.125.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	116.125.000	116.125.000	116.125.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	135.000.000	135.000.000	135.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**177.927.000**	**177.927.000**	**177.927.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	13.508.000	13.508.000	13.508.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	34.225.000	34.225.000	34.225.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	130.194.000	130.194.000	130.194.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**158.775.000**	**158.775.000**	**158.775.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	83.775.000	83.775.000	83.775.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**20.065.000**	**20.065.000**	**20.065.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**6.053.000**	**6.053.000**	**6.053.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.053.000	6.053.000	6.053.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**9.012.000**	**9.012.000**	**9.012.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	9.012.000	9.012.000	9.012.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
2.23.2.24.0.00.02.2.23.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.25.0.00.0.00.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**89.763.598.000**	**89.763.598.000**	**89.763.598.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**89.763.598.000**	**89.763.598.000**	**89.763.598.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**63.857.762.000**	**63.857.762.000**	**63.857.762.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**63.857.762.000**	**63.857.762.000**	**63.857.762.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**453.691.000**	**453.691.000**	**453.691.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.000.000	208.000.000	208.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.691.000	195.691.000	195.691.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.977.993.000**	**43.977.993.000**	**43.977.993.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.055.093.000	43.055.093.000	43.055.093.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	851.400.000	851.400.000	851.400.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.500.000	71.500.000	71.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**136.000.000**	**136.000.000**	**136.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.000.000	16.000.000	16.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	75.000.000	75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.784.894.000**	**1.784.894.000**	**1.784.894.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	204.856.000	204.856.000	204.856.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.688.000	429.688.000	429.688.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.080.000	154.080.000	154.080.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.500.000	57.500.000	57.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	828.770.000	828.770.000	828.770.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	72.000.000	72.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.927.734.000**	**14.927.734.000**	**14.927.734.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.680.000	37.680.000	37.680.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.193.320.000	2.193.320.000	2.193.320.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.696.734.000	12.696.734.000	12.696.734.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.427.450.000**	**2.427.450.000**	**2.427.450.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	699.930.000	699.930.000	699.930.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.099.000	292.099.000	292.099.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.254.421.000	1.254.421.000	1.254.421.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.000.000	181.000.000	181.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**25.905.836.000**	**25.905.836.000**	**25.905.836.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**1.381.911.000**	**1.381.911.000**	**1.381.911.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**890.601.000**	**890.601.000**	**890.601.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	347.334.000	347.334.000	347.334.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	469.199.000	469.199.000	469.199.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	74.068.000	74.068.000	74.068.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**491.310.000**	**491.310.000**	**491.310.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	70.245.000	70.245.000	70.245.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	421.065.000	421.065.000	421.065.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**9.248.576.000**	**9.248.576.000**	**9.248.576.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**4.147.175.000**	**4.147.175.000**	**4.147.175.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	44.100.000	44.100.000	44.100.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.285.225.000	3.285.225.000	3.285.225.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	817.850.000	817.850.000	817.850.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**260.035.000**	**260.035.000**	**260.035.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	260.035.000	260.035.000	260.035.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**4.841.366.000**	**4.841.366.000**	**4.841.366.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	178.068.000	178.068.000	178.068.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.577.909.000	3.577.909.000	3.577.909.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.085.389.000	1.085.389.000	1.085.389.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**12.612.050.000**	**12.612.050.000**	**12.612.050.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**1.657.998.000**	**1.657.998.000**	**1.657.998.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	46.050.000	46.050.000	46.050.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	105.200.000	105.200.000	105.200.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.194.500.000	1.194.500.000	1.194.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	43.358.000	43.358.000	43.358.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	220.325.000	220.325.000	220.325.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	48.565.000	48.565.000	48.565.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**10.954.052.000**	**10.954.052.000**	**10.954.052.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.848.164.000	6.848.164.000	6.848.164.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah	4.105.888.000	4.105.888.000	4.105.888.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.663.227.000**	**1.663.227.000**	**1.663.227.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**1.609.497.000**	**1.609.497.000**	**1.609.497.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	68.510.000	68.510.000	68.510.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	530.354.000	530.354.000	530.354.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan	46.625.000	46.625.000	46.625.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	18.341.000	18.341.000	18.341.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	8.285.000	8.285.000	8.285.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	918.235.000	918.235.000	918.235.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	19.147.000	19.147.000	19.147.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**53.730.000**	**53.730.000**	**53.730.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	17.910.000	17.910.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	17.910.000	17.910.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	17.910.000	17.910.000	17.910.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.000.072.000**	**1.000.072.000**	**1.000.072.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**132.037.000**	**132.037.000**	**132.037.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	82.037.000	82.037.000	82.037.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**866.035.000**	**866.035.000**	**866.035.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	866.035.000	866.035.000	866.035.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.03.0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.26.2.22.0.00.02	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**88.020.152.000**	**88.020.152.000**	**88.020.152.000**
3.26.2.22.0.00.02.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**88.020.152.000**	**88.020.152.000**	**88.020.152.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**43.262.477.000**	**43.262.477.000**	**43.262.477.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.262.477.000**	**43.262.477.000**	**43.262.477.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.133.641.000**	**23.133.641.000**	**23.133.641.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.533.641.000	22.533.641.000	22.533.641.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**190.000.000**	**190.000.000**	**190.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	190.000.000	190.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.180.673.000**	**2.180.673.000**	**2.180.673.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	162.192.000	162.192.000	162.192.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.568.000	195.568.000	195.568.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.053.000	161.053.000	161.053.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	160.000.000	160.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.400.000	92.400.000	92.400.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.888.000	12.888.000	12.888.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	299.580.000	299.580.000	299.580.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991.992.000	991.992.000	991.992.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.239.415.000**	**1.239.415.000**	**1.239.415.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.176.915.000	1.176.915.000	1.176.915.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.500.000	57.500.000	57.500.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.895.682.000**	**11.895.682.000**	**11.895.682.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.276.000	31.276.000	31.276.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.464.600.000	2.464.600.000	2.464.600.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.900.000	82.900.000	82.900.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.316.906.000	9.316.906.000	9.316.906.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.923.066.000**	**3.923.066.000**	**3.923.066.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.000.000	309.000.000	309.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.900.000	181.900.000	181.900.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	32.000.000	32.000.000	32.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.722.761.000	2.722.761.000	2.722.761.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.605.000	313.605.000	313.605.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	158.800.000	158.800.000	158.800.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**27.680.000.000**	**27.680.000.000**	**27.680.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**22.675.000.000**	**22.675.000.000**	**22.675.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**21.525.000.000**	**21.525.000.000**	**21.525.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.225.000.000	4.225.000.000	4.225.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.150.000.000**	**1.150.000.000**	**1.150.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**1.750.000.000**	**1.750.000.000**	**1.750.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.750.000.000**	**1.750.000.000**	**1.750.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.205.000.000**	**1.205.000.000**	**1.205.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**475.000.000**	**475.000.000**	**475.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	475.000.000	475.000.000	475.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**730.000.000**	**730.000.000**	**730.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	280.000.000	280.000.000	280.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.900.000.000**	**1.900.000.000**	**1.900.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.900.000.000**	**1.900.000.000**	**1.900.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	675.000.000	675.000.000	675.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	975.000.000	975.000.000	975.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**17.077.675.000**	**17.077.675.000**	**17.077.675.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.525.625.000**	**6.525.625.000**	**6.525.625.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**6.000.625.000**	**6.000.625.000**	**6.000.625.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	6.000.625.000	6.000.625.000	6.000.625.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	175.000.000	175.000.000	175.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**8.652.050.000**	**8.652.050.000**	**8.652.050.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**8.652.050.000**	**8.652.050.000**	**8.652.050.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	165.000.000	165.000.000	165.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	590.000.000	590.000.000	590.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7.897.050.000	7.897.050.000	7.897.050.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**850.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.050.000.000**	**1.050.000.000**	**1.050.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**750.000.000**	**750.000.000**	**750.000.000**
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	-	-	-
3.26.2.22.0.00.02.3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.27.0.00.0.00.10	**Dinas Pertanian dan Peternakan**	**569.520.940.000**	**569.520.940.000**	**569.520.940.000**
3.27.0.00.0.00.10.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**569.520.940.000**	**569.520.940.000**	**569.520.940.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**168.558.597.000**	**168.558.597.000**	**168.558.597.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**168.558.597.000**	**168.558.597.000**	**168.558.597.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.741.911.000**	**1.741.911.000**	**1.741.911.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.016.754.000	1.016.754.000	1.016.754.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	725.157.000	725.157.000	725.157.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**110.646.685.000**	**110.646.685.000**	**110.646.685.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.642.685.000	109.642.685.000	109.642.685.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	954.000.000	954.000.000	954.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**467.835.000**	**467.835.000**	**467.835.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	360.000.000	360.000.000	360.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.240.000	87.240.000	87.240.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20.595.000	20.595.000	20.595.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**96.000.000**	**96.000.000**	**96.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	96.000.000	96.000.000	96.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**278.621.000**	**278.621.000**	**278.621.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.920.000	3.920.000	3.920.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.920.000	3.920.000	3.920.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.294.000	258.294.000	258.294.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.487.000	12.487.000	12.487.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.592.967.000**	**4.592.967.000**	**4.592.967.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	224.021.000	224.021.000	224.021.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.306.000	602.306.000	602.306.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	332.573.000	332.573.000	332.573.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	554.722.000	554.722.000	554.722.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	336.570.000	336.570.000	336.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	527.074.000	527.074.000	527.074.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.951.431.000	1.951.431.000	1.951.431.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.270.000	63.270.000	63.270.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.210.755.000**	**18.210.755.000**	**18.210.755.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	235.000.000	235.000.000	235.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.163.418.000	13.163.418.000	13.163.418.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	860.800.000	860.800.000	860.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	560.775.000	560.775.000	560.775.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.390.762.000	3.390.762.000	3.390.762.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.999.563.000**	**22.999.563.000**	**22.999.563.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.650.000	47.650.000	47.650.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.506.338.000	4.506.338.000	4.506.338.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.420.000	393.420.000	393.420.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.052.155.000	18.052.155.000	18.052.155.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.524.260.000**	**9.524.260.000**	**9.524.260.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.384.875.000	1.384.875.000	1.384.875.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.760.000	205.760.000	205.760.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.200.000	42.200.000	42.200.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.191.290.000	1.191.290.000	1.191.290.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	580.500.000	580.500.000	580.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	59.000.000	59.000.000	59.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.713.551.000	4.713.551.000	4.713.551.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.157.084.000	1.157.084.000	1.157.084.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	190.000.000	190.000.000	190.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**400.962.343.000**	**400.962.343.000**	**400.962.343.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**159.281.528.000**	**159.281.528.000**	**159.281.528.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**98.300.013.000**	**98.300.013.000**	**98.300.013.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	42.259.586.000	42.259.586.000	42.259.586.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	56.040.427.000	56.040.427.000	56.040.427.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**15.940.914.000**	**15.940.914.000**	**15.940.914.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.547.659.000	1.547.659.000	1.547.659.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.266.712.000	3.266.712.000	3.266.712.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	96.000.000	96.000.000	96.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	687.582.000	687.582.000	687.582.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.954.415.000	1.954.415.000	1.954.415.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	7.445.208.000	7.445.208.000	7.445.208.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	442.303.000	442.303.000	442.303.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	210.398.000	210.398.000	210.398.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	290.637.000	290.637.000	290.637.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**6.337.000.000**	**6.337.000.000**	**6.337.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	6.337.000.000	6.337.000.000	6.337.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**37.843.601.000**	**37.843.601.000**	**37.843.601.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	8.352.946.000	8.352.946.000	8.352.946.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	29.490.655.000	29.490.655.000	29.490.655.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**860.000.000**	**860.000.000**	**860.000.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	860.000.000	860.000.000	860.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**178.234.000.000**	**178.234.000.000**	**178.234.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**178.234.000.000**	**178.234.000.000**	**178.234.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	75.580.000.000	75.580.000.000	75.580.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	102.654.000.000	102.654.000.000	102.654.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.637.563.000**	**4.637.563.000**	**4.637.563.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.080.000.000**	**1.080.000.000**	**1.080.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**3.407.563.000**	**3.407.563.000**	**3.407.563.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	910.000.000	910.000.000	910.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.497.563.000	2.497.563.000	2.497.563.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**5.850.000.000**	**5.850.000.000**	**5.850.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**5.850.000.000**	**5.850.000.000**	**5.850.000.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.550.000.000	5.550.000.000	5.550.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**52.959.252.000**	**52.959.252.000**	**52.959.252.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**34.304.978.000**	**34.304.978.000**	**34.304.978.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.111.000.000	3.111.000.000	3.111.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	31.193.978.000	31.193.978.000	31.193.978.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**18.654.274.000**	**18.654.274.000**	**18.654.274.000**
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	17.904.274.000	17.904.274.000	17.904.274.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	750.000.000	750.000.000	750.000.000
3.29.0.00.0.00.01	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**54.922.127.000**	**54.922.127.000**	**54.922.127.000**
3.29.0.00.0.00.01.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**54.922.127.000**	**54.922.127.000**	**54.922.127.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**48.653.595.000**	**48.653.595.000**	**48.653.595.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.653.595.000**	**48.653.595.000**	**48.653.595.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**557.500.000**	**557.500.000**	**557.500.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.592.000	160.592.000	160.592.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.701.000	334.701.000	334.701.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	31.427.000	31.427.000	31.427.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.780.000	30.780.000	30.780.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.181.286.000**	**37.181.286.000**	**37.181.286.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.149.286.000	36.149.286.000	36.149.286.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	822.000.000	822.000.000	822.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**318.218.000**	**318.218.000**	**318.218.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	294.500.000	294.500.000	294.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.718.000	23.718.000	23.718.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.901.000**	**99.901.000**	**99.901.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.901.000	14.901.000	14.901.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.388.107.000**	**1.388.107.000**	**1.388.107.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.418.000	55.418.000	55.418.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.287.000	110.287.000	110.287.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.944.000	68.944.000	68.944.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.712.000	196.712.000	196.712.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.490.000	33.490.000	33.490.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.535.000	50.535.000	50.535.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849.231.000	849.231.000	849.231.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.490.000	23.490.000	23.490.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.600.000**	**50.600.000**	**50.600.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.600.000	50.600.000	50.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.938.491.000**	**7.938.491.000**	**7.938.491.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.207.000	1.627.207.000	1.627.207.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	13.250.000	13.250.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.279.034.000	6.279.034.000	6.279.034.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.119.492.000**	**1.119.492.000**	**1.119.492.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	423.192.000	423.192.000	423.192.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	371.758.000	371.758.000	371.758.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.542.000	204.542.000	204.542.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**6.268.532.000**	**6.268.532.000**	**6.268.532.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**923.631.000**	**923.631.000**	**923.631.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**251.266.000**	**251.266.000**	**251.266.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	251.266.000	251.266.000	251.266.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**672.365.000**	**672.365.000**	**672.365.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	372.365.000	372.365.000	372.365.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**1.077.356.000**	**1.077.356.000**	**1.077.356.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	95.000.000	95.000.000	95.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**858.902.000**	**858.902.000**	**858.902.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	145.880.000	145.880.000	145.880.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	713.022.000	713.022.000	713.022.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**123.454.000**	**123.454.000**	**123.454.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.454.000	123.454.000	123.454.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.135.551.000**	**2.135.551.000**	**2.135.551.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.05	**Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**	**647.600.000**	**647.600.000**	**647.600.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	647.600.000	647.600.000	647.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**1.387.951.000**	**1.387.951.000**	**1.387.951.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	400.631.000	400.631.000	400.631.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	987.320.000	987.320.000	987.320.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.09	**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**2.131.994.000**	**2.131.994.000**	**2.131.994.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**154.194.000**	**154.194.000**	**154.194.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	154.194.000	154.194.000	154.194.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**136.800.000**	**136.800.000**	**136.800.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	136.800.000	136.800.000	136.800.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.841.000.000**	**1.841.000.000**	**1.841.000.000**
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	16.000.000	16.000.000	16.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
3.31.3.30.0.00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**108.871.091.000**	**108.871.091.000**	**108.871.091.000**
3.31.3.30.0.00.02.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**108.871.091.000**	**108.871.091.000**	**108.871.091.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**53.787.345.000**	**53.787.345.000**	**53.787.345.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.787.345.000**	**53.787.345.000**	**53.787.345.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**786.693.000**	**786.693.000**	**786.693.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	261.693.000	261.693.000	261.693.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.207.106.000**	**32.207.106.000**	**32.207.106.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.761.706.000	30.761.706.000	30.761.706.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**265.960.000**	**265.960.000**	**265.960.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.960.000	240.960.000	240.960.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**615.000.000**	**615.000.000**	**615.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000	55.000.000	55.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	510.000.000	510.000.000	510.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.089.904.000**	**2.089.904.000**	**2.089.904.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000	65.000.000	65.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.000.000	176.000.000	176.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	235.500.000	235.500.000	235.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675.070.000	675.070.000	675.070.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.350.000	43.350.000	43.350.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	178.025.000	178.025.000	178.025.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.959.000	686.959.000	686.959.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**858.000.000**	**858.000.000**	**858.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.000.000	258.000.000	258.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	580.000.000	580.000.000	580.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.536.019.000**	**14.536.019.000**	**14.536.019.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.690.050.000	2.690.050.000	2.690.050.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.844.969.000	11.844.969.000	11.844.969.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.428.663.000**	**2.428.663.000**	**2.428.663.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.000.000	381.000.000	381.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.500.000	42.500.000	42.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.214.000	456.214.000	456.214.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000	56.000.000	56.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	258.949.000	258.949.000	258.949.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**43.760.600.000**	**43.760.600.000**	**43.760.600.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	70.000.000	70.000.000	70.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**33.550.000.000**	**33.550.000.000**	**33.550.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**	**95.000.000**	**95.000.000**	**95.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	95.000.000	95.000.000	95.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**33.455.000.000**	**33.455.000.000**	**33.455.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	140.000.000	140.000.000	140.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.315.000.000	33.315.000.000	33.315.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	650.000.000	650.000.000	650.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**999.054.000**	**999.054.000**	**999.054.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**574.054.000**	**574.054.000**	**574.054.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	190.000.000	190.000.000	190.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	200.712.000	200.712.000	200.712.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	183.342.000	183.342.000	183.342.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**125.000.000**	**125.000.000**	**125.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	125.000.000	125.000.000	125.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**6.791.546.000**	**6.791.546.000**	**6.791.546.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**6.336.546.000**	**6.336.546.000**	**6.336.546.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	6.336.546.000	6.336.546.000	6.336.546.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**455.000.000**	**455.000.000**	**455.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	455.000.000	455.000.000	455.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**-**	**-**	**-**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**11.323.146.000**	**11.323.146.000**	**11.323.146.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**10.761.146.000**	**10.761.146.000**	**10.761.146.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**10.761.146.000**	**10.761.146.000**	**10.761.146.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.875.000.000	1.875.000.000	1.875.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.233.500.000	1.233.500.000	1.233.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.830.000.000	1.830.000.000	1.830.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.822.646.000	5.822.646.000	5.822.646.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**502.000.000**	**502.000.000**	**502.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**502.000.000**	**502.000.000**	**502.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	477.000.000	477.000.000	477.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	-	-
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	**3.431.513.000**	**3.431.513.000**	**3.431.513.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.985.353.000**	**1.985.353.000**	**1.985.353.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO UMUM**	**270.993.081.000**	**270.993.081.000**	**270.993.081.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO HUKUM**	**3.487.018.000**	**3.487.018.000**	**3.487.018.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ORGANISASI**	**2.000.522.000**	**2.000.522.000**	**2.000.522.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH**	**2.401.074.000**	**2.401.074.000**	**2.401.074.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.271.500.000**	**2.271.500.000**	**2.271.500.000**
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**413.268.912.000**	**413.268.912.000**	**413.268.912.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01	**BIRO PEREKONOMIAN**	**2.877.884.000**	**2.877.884.000**	**2.877.884.000**
4.01.0.00.0.00.01.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**702.716.857.000**	**702.716.857.000**	**702.716.857.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**275.716.004.000**	**275.716.004.000**	**275.716.004.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**275.716.004.000**	**275.716.004.000**	**275.716.004.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**170.000.000**	**170.000.000**	**170.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	70.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**103.175.104.000**	**103.175.104.000**	**103.175.104.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.550.104.000	100.550.104.000	100.550.104.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475.000.000	475.000.000	475.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**516.300.000**	**516.300.000**	**516.300.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.682.000	80.682.000	80.682.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.996.000	54.996.000	54.996.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.622.000	380.622.000	380.622.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.749.623.000**	**18.749.623.000**	**18.749.623.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	550.000.000	550.000.000	550.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000	700.000.000	700.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000	175.000.000	175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	68.000.000	68.000.000	68.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.725.223.000	5.725.223.000	5.725.223.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.461.400.000	1.461.400.000	1.461.400.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.000.000	170.000.000	170.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.004.338.000**	**28.004.338.000**	**28.004.338.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	700.000.000	700.000.000	700.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.304.338.000	27.304.338.000	27.304.338.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.508.016.000**	**39.508.016.000**	**39.508.016.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.268.016.000	30.268.016.000	30.268.016.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.100.000.000**	**15.100.000.000**	**15.100.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**27.371.691.000**	**27.371.691.000**	**27.371.691.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	2.743.094.000	2.743.094.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.168.597.000	24.168.597.000	24.168.597.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**9.385.000.000**	**9.385.000.000**	**9.385.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.185.000.000	2.185.000.000	2.185.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**29.064.057.000**	**29.064.057.000**	**29.064.057.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24.071.431.000	24.071.431.000	24.071.431.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	4.492.626.000	4.492.626.000	4.492.626.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**3.371.875.000**	**3.371.875.000**	**3.371.875.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.001.846.000	3.001.846.000	3.001.846.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	70.029.000	70.029.000	70.029.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**427.000.853.000**	**427.000.853.000**	**427.000.853.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.410.458.000**	**1.410.458.000**	**1.410.458.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**508.115.000**	**508.115.000**	**508.115.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	199.101.000	199.101.000	199.101.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	144.920.000	144.920.000	144.920.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	164.094.000	164.094.000	164.094.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**902.343.000**	**902.343.000**	**902.343.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	265.600.000	265.600.000	265.600.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	214.847.000	214.847.000	214.847.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	217.896.000	217.896.000	217.896.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	204.000.000	204.000.000	204.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**2.919.557.000**	**2.919.557.000**	**2.919.557.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**675.000.000**	**675.000.000**	**675.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	480.000.000	480.000.000	480.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	90.000.000	90.000.000	90.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	105.000.000	105.000.000	105.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**558.263.000**	**558.263.000**	**558.263.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	378.263.000	378.263.000	378.263.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**1.686.294.000**	**1.686.294.000**	**1.686.294.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1.214.294.000	1.214.294.000	1.214.294.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	347.000.000	347.000.000	347.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125.000.000	125.000.000	125.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**411.638.757.000**	**411.638.757.000**	**411.638.757.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**410.388.757.000**	**410.388.757.000**	**410.388.757.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	407.327.057.000	407.327.057.000	407.327.057.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.061.700.000	3.061.700.000	3.061.700.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**650.000.000**	**650.000.000**	**650.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.856.000.000**	**2.856.000.000**	**2.856.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**1.383.134.000**	**1.383.134.000**	**1.383.134.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	456.963.000	456.963.000	456.963.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	64.361.000	64.361.000	64.361.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	345.497.000	345.497.000	345.497.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	516.313.000	516.313.000	516.313.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.472.866.000**	**1.472.866.000**	**1.472.866.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.321.326.000	1.321.326.000	1.321.326.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	151.540.000	151.540.000	151.540.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**4.640.000.000**	**4.640.000.000**	**4.640.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**815.000.000**	**815.000.000**	**815.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	215.000.000	215.000.000	215.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**1.845.000.000**	**1.845.000.000**	**1.845.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.462.912.000	1.462.912.000	1.462.912.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	175.870.000	175.870.000	175.870.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	206.218.000	206.218.000	206.218.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**1.980.000.000**	**1.980.000.000**	**1.980.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	875.000.000	875.000.000	875.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	750.000.000	750.000.000	750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	180.000.000	180.000.000	180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	175.000.000	175.000.000	175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.781.081.000**	**1.781.081.000**	**1.781.081.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**839.176.000**	**839.176.000**	**839.176.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	289.850.000	289.850.000	289.850.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	312.326.000	312.326.000	312.326.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	237.000.000	237.000.000	237.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**475.139.000**	**475.139.000**	**475.139.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	130.282.000	130.282.000	130.282.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.374.000	300.374.000	300.374.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.483.000	44.483.000	44.483.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**466.766.000**	**466.766.000**	**466.766.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	130.063.000	130.063.000	130.063.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	86.703.000	86.703.000	86.703.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000	250.000.000	250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**1.755.000.000**	**1.755.000.000**	**1.755.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**1.365.000.000**	**1.365.000.000**	**1.365.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	575.000.000	575.000.000	575.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	740.000.000	740.000.000	740.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**390.000.000**	**390.000.000**	**390.000.000**
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	195.000.000	195.000.000	195.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	95.000.000	95.000.000	95.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4.02.0.00.0.00.01	**Sekretariat DPRD**	**567.582.249.000**	**567.582.249.000**	**567.582.249.000**
4.02.0.00.0.00.01.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**567.582.249.000**	**567.582.249.000**	**567.582.249.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**231.064.554.000**	**231.064.554.000**	**231.064.554.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**231.064.554.000**	**231.064.554.000**	**231.064.554.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**827.739.000**	**827.739.000**	**827.739.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	526.015.000	526.015.000	526.015.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.724.000	251.724.000	251.724.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.578.455.000**	**19.578.455.000**	**19.578.455.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.570.007.000	18.570.007.000	18.570.007.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.008.448.000	1.008.448.000	1.008.448.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.330.474.000**	**1.330.474.000**	**1.330.474.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.330.474.000	1.330.474.000	1.330.474.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**586.602.000**	**586.602.000**	**586.602.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	436.602.000	436.602.000	436.602.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.019.369.000**	**8.019.369.000**	**8.019.369.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.485.000	244.485.000	244.485.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.269.000	187.269.000	187.269.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	136.750.000	136.750.000	136.750.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.453.000	780.453.000	780.453.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	170.412.000	170.412.000	170.412.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.309.086.000**	**10.309.086.000**	**10.309.086.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.002.240.000	4.002.240.000	4.002.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.048.833.000	2.048.833.000	2.048.833.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.443.188.000	1.443.188.000	1.443.188.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.814.825.000	2.814.825.000	2.814.825.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.904.952.000**	**28.904.952.000**	**28.904.952.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.542.000	179.542.000	179.542.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.474.000.000	4.474.000.000	4.474.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.047.586.000	1.047.586.000	1.047.586.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.203.824.000	23.203.824.000	23.203.824.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.435.453.000**	**11.435.453.000**	**11.435.453.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.253.000	596.253.000	596.253.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.865.858.000	2.865.858.000	2.865.858.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	86.425.000	86.425.000	86.425.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.191.084.000	5.191.084.000	5.191.084.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.695.833.000	2.695.833.000	2.695.833.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**150.072.424.000**	**150.072.424.000**	**150.072.424.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	148.113.423.000	148.113.423.000	148.113.423.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	1.392.880.000	1.392.880.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	566.121.000	566.121.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**336.517.695.000**	**336.517.695.000**	**336.517.695.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**336.517.695.000**	**336.517.695.000**	**336.517.695.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**7.206.440.000**	**7.206.440.000**	**7.206.440.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.262.440.000	4.262.440.000	4.262.440.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	2.944.000.000	2.944.000.000	2.944.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.210.534.000**	**2.210.534.000**	**2.210.534.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.210.534.000	2.210.534.000	2.210.534.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**12.515.582.000**	**12.515.582.000**	**12.515.582.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	1.169.722.000	1.169.722.000	1.169.722.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.095.860.000	2.095.860.000	2.095.860.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**137.039.088.000**	**137.039.088.000**	**137.039.088.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.939.086.000	1.939.086.000	1.939.086.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	418.741.000	418.741.000	418.741.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12.781.261.000	12.781.261.000	12.781.261.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	117.520.000.000	117.520.000.000	117.520.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**50.243.046.000**	**50.243.046.000**	**50.243.046.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.461.502.000	11.461.502.000	11.461.502.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	175.000.000	175.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	38.606.544.000	38.606.544.000	38.606.544.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**1.152.000.000**	**1.152.000.000**	**1.152.000.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	1.152.000.000	1.152.000.000	1.152.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**101.840.000.000**	**101.840.000.000**	**101.840.000.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	101.840.000.000	101.840.000.000	101.840.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**24.311.005.000**	**24.311.005.000**	**24.311.005.000**
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.311.005.000	24.311.005.000	24.311.005.000
5.01.0.00.0.00.02	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**41.074.576.000**	**41.074.576.000**	**41.074.576.000**
5.01.0.00.0.00.02.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**41.074.576.000**	**41.074.576.000**	**41.074.576.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01	**PERENCANAAN**	**30.989.576.000**	**30.989.576.000**	**30.989.576.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.989.576.000**	**30.989.576.000**	**30.989.576.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**495.000.000**	**495.000.000**	**495.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	240.000.000	240.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.008.081.000**	**21.008.081.000**	**21.008.081.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.391.201.000	20.391.201.000	20.391.201.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	341.880.000	341.880.000	341.880.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**237.001.000**	**237.001.000**	**237.001.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.000.000	190.000.000	190.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.001.000	47.001.000	47.001.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**334.174.000**	**334.174.000**	**334.174.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	138.729.000	138.729.000	138.729.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.445.000	195.445.000	195.445.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.047.492.000**	**2.047.492.000**	**2.047.492.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.500.000	155.500.000	155.500.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.001.000	850.001.000	850.001.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.480.000	61.480.000	61.480.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	510.511.000	510.511.000	510.511.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**720.000.000**	**720.000.000**	**720.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	180.000.000	180.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	440.000.000	440.000.000	440.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.165.478.000**	**4.165.478.000**	**4.165.478.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.115.478.000	3.115.478.000	3.115.478.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.982.350.000**	**1.982.350.000**	**1.982.350.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	720.000.000	720.000.000	720.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.350.000	338.350.000	338.350.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	34.000.000	34.000.000	34.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01	**PERENCANAAN**	**10.085.000.000**	**10.085.000.000**	**10.085.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.850.000.000**	**4.850.000.000**	**4.850.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**3.100.000.000**	**3.100.000.000**	**3.100.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	180.000.000	180.000.000	180.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.920.000.000	2.920.000.000	2.920.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	**450.000.000**	**450.000.000**	**450.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	350.000.000	350.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.235.000.000**	**5.235.000.000**	**5.235.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.915.000.000**	**1.915.000.000**	**1.915.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	605.000.000	605.000.000	605.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	710.000.000	710.000.000	710.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	330.000.000	330.000.000	330.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1.680.000.000**	**1.680.000.000**	**1.680.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	655.000.000	655.000.000	655.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	475.000.000	475.000.000	475.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	150.000.000	150.000.000	150.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.640.000.000**	**1.640.000.000**	**1.640.000.000**
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	490.000.000	490.000.000	490.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	665.000.000	665.000.000	665.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.01.0.00.0.00.02.5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	235.000.000	235.000.000	235.000.000
5.02.0.00.0.00.02	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	**262.070.644.000**	**262.070.644.000**	**262.070.644.000**
5.02.0.00.0.00.02.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**262.070.644.000**	**262.070.644.000**	**262.070.644.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02	**KEUANGAN**	**230.746.052.000**	**230.746.052.000**	**230.746.052.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**230.746.052.000**	**230.746.052.000**	**230.746.052.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**374.757.000**	**374.757.000**	**374.757.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.138.000	202.138.000	202.138.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.619.000	172.619.000	172.619.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**141.834.433.000**	**141.834.433.000**	**141.834.433.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.514.175.000	139.514.175.000	139.514.175.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.209.689.000	2.209.689.000	2.209.689.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.569.000	110.569.000	110.569.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**649.230.000**	**649.230.000**	**649.230.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	649.230.000	649.230.000	649.230.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**234.144.000**	**234.144.000**	**234.144.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	184.144.000	184.144.000	184.144.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12.855.022.000**	**12.855.022.000**	**12.855.022.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	318.076.000	318.076.000	318.076.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.623.000	344.623.000	344.623.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.107.685.000	1.107.685.000	1.107.685.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.884.094.000	5.884.094.000	5.884.094.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.333.000	61.333.000	61.333.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.427.414.000	1.427.414.000	1.427.414.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.008.558.000	1.008.558.000	1.008.558.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.646.089.000	2.646.089.000	2.646.089.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	51.150.000	51.150.000	51.150.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.606.387.000**	**3.606.387.000**	**3.606.387.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.106.387.000	3.106.387.000	3.106.387.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.710.738.000**	**58.710.738.000**	**58.710.738.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.472.000	66.472.000	66.472.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.052.322.000	11.052.322.000	11.052.322.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.181.904.000	3.181.904.000	3.181.904.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.410.040.000	44.410.040.000	44.410.040.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.481.341.000**	**12.481.341.000**	**12.481.341.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	756.257.000	756.257.000	756.257.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.252.908.000	5.252.908.000	5.252.908.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	54.335.000	54.335.000	54.335.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.220.080.000	2.220.080.000	2.220.080.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	198.188.000	198.188.000	198.188.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.090.930.000	2.090.930.000	2.090.930.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	969.892.000	969.892.000	969.892.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	938.751.000	938.751.000	938.751.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02	**KEUANGAN**	**31.324.592.000**	**31.324.592.000**	**31.324.592.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**315.905.000**	**315.905.000**	**315.905.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**315.905.000**	**315.905.000**	**315.905.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	315.905.000	315.905.000	315.905.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**31.008.687.000**	**31.008.687.000**	**31.008.687.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**31.008.687.000**	**31.008.687.000**	**31.008.687.000**
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	850.700.000	850.700.000	850.700.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	520.000.000	520.000.000	520.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	230.327.000	230.327.000	230.327.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	332.956.000	332.956.000	332.956.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.941.000.000	1.941.000.000	1.941.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	916.030.000	916.030.000	916.030.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.571.581.000	11.571.581.000	11.571.581.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	723.000.000	723.000.000	723.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	369.673.000	369.673.000	369.673.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.503.420.000	3.503.420.000	3.503.420.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**6.939.063.376.000**	**6.939.063.376.000**	**6.939.063.376.000**
5.02.0.00.0.00.03.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.939.063.376.000**	**6.939.063.376.000**	**6.939.063.376.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02	**KEUANGAN**	**78.751.028.000**	**78.751.028.000**	**78.751.028.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**78.751.028.000**	**78.751.028.000**	**78.751.028.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**685.000.000**	**685.000.000**	**685.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.000.000	305.000.000	305.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.000.000	240.000.000	240.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.829.727.000**	**55.829.727.000**	**55.829.727.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.639.727.000	53.639.727.000	53.639.727.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000.000	240.000.000	240.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.470.500.000**	**4.470.500.000**	**4.470.500.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	505.000.000	505.000.000	505.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000.000	850.000.000	850.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000	750.000.000	750.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	450.000.000	450.000.000	450.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	440.000.000	440.000.000	440.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	405.500.000	405.500.000	405.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.144.810.000**	**1.144.810.000**	**1.144.810.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	190.000.000	190.000.000	190.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	954.810.000	954.810.000	954.810.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.402.155.000**	**8.402.155.000**	**8.402.155.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.760.000	11.760.000	11.760.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.210.395.000	6.210.395.000	6.210.395.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.668.836.000**	**7.668.836.000**	**7.668.836.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	73.500.000	73.500.000	73.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.793.940.000	1.793.940.000	1.793.940.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.777.596.000	2.777.596.000	2.777.596.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.783.800.000	1.783.800.000	1.783.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02	**KEUANGAN**	**6.860.312.348.000**	**6.860.312.348.000**	**6.860.312.348.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**6.857.812.348.000**	**6.857.812.348.000**	**6.857.812.348.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**6.518.200.000**	**6.518.200.000**	**6.518.200.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.000.000	58.000.000	58.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.000.000	58.000.000	58.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.731.200.000	2.731.200.000	2.731.200.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.029.000.000	2.029.000.000	2.029.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.642.000.000	1.642.000.000	1.642.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**607.520.000**	**607.520.000**	**607.520.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	168.600.000	168.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	168.600.000	168.600.000	168.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	125.720.000	125.720.000	125.720.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	144.600.000	144.600.000	144.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**900.000.000**	**900.000.000**	**900.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**3.374.280.000**	**3.374.280.000**	**3.374.280.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	273.286.000	273.286.000	273.286.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.830.000	59.830.000	59.830.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.624.625.000	1.624.625.000	1.624.625.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	682.149.000	682.149.000	682.149.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	292.165.000	292.165.000	292.165.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	442.225.000	442.225.000	442.225.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**6.846.312.348.000**	**6.846.312.348.000**	**6.846.312.348.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000	2.425.944.120.000	2.425.944.120.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4.400.368.228.000	4.400.368.228.000	4.400.368.228.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	74.880.000	74.880.000	74.880.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	330.000.000	330.000.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	223.875.000	223.875.000	223.875.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	584.864.000	584.864.000	584.864.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	518.381.000	518.381.000	518.381.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	318.000.000	318.000.000	318.000.000
5.03.0.00.0.00.01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**36.244.682.000**	**36.244.682.000**	**36.244.682.000**
5.03.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**36.244.682.000**	**36.244.682.000**	**36.244.682.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03	**KEPEGAWAIAN**	**30.372.842.000**	**30.372.842.000**	**30.372.842.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.372.842.000**	**30.372.842.000**	**30.372.842.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**306.000.000**	**306.000.000**	**306.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000	136.000.000	136.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.226.255.000**	**26.226.255.000**	**26.226.255.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.317.611.000	25.317.611.000	25.317.611.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	858.644.000	858.644.000	858.644.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**110.000.000**	**110.000.000**	**110.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.087.000**	**99.087.000**	**99.087.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.087.000	74.087.000	74.087.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**737.500.000**	**737.500.000**	**737.500.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	42.000.000	42.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	140.500.000	140.500.000	140.500.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	340.000.000	340.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**375.000.000**	**375.000.000**	**375.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.992.000.000**	**1.992.000.000**	**1.992.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	710.000.000	710.000.000	710.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.248.000.000	1.248.000.000	1.248.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.000.000**	**517.000.000**	**517.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	140.000.000	140.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.000.000	242.000.000	242.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.871.840.000**	**5.871.840.000**	**5.871.840.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**5.871.840.000**	**5.871.840.000**	**5.871.840.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.000.000	180.000.000	180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	155.000.000	155.000.000	155.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**675.000.000**	**675.000.000**	**675.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	130.000.000	130.000.000	130.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	145.000.000	145.000.000	145.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**3.315.000.000**	**3.315.000.000**	**3.315.000.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	620.000.000	620.000.000	620.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.490.000.000	2.490.000.000	2.490.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	160.000.000	160.000.000	160.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**681.840.000**	**681.840.000**	**681.840.000**
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	170.000.000	170.000.000	170.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	41.840.000	41.840.000	41.840.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	180.000.000	180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.04.0.00.0.00.01	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**72.408.777.000**	**72.408.777.000**	**72.408.777.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.04.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**72.408.777.000**	**72.408.777.000**	**72.408.777.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**45.516.428.000**	**45.516.428.000**	**45.516.428.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**45.516.428.000**	**45.516.428.000**	**45.516.428.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**380.500.000**	**380.500.000**	**380.500.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.000.000	84.000.000	84.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.500.000	261.500.000	261.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.975.423.000**	**26.975.423.000**	**26.975.423.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.578.023.000	23.578.023.000	23.578.023.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.200.000	77.200.000	77.200.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.500.000	65.500.000	65.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.700.000	54.700.000	54.700.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**255.000.000**	**255.000.000**	**255.000.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	255.000.000	255.000.000	255.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**77.600.000**	**77.600.000**	**77.600.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	77.600.000	77.600.000	77.600.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**257.970.000**	**257.970.000**	**257.970.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.200.000	24.200.000	24.200.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.770.000	233.770.000	233.770.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.253.243.000**	**2.253.243.000**	**2.253.243.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	400.000.000	400.000.000	400.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.560.000	303.560.000	303.560.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.987.000	73.987.000	73.987.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	18.000.000	18.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.750.000	96.750.000	96.750.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.846.000	364.846.000	364.846.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.150.000	31.150.000	31.150.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	514.950.000	514.950.000	514.950.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.421.500.000**	**2.421.500.000**	**2.421.500.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	993.000.000	993.000.000	993.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.393.500.000	1.393.500.000	1.393.500.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.949.942.000**	**9.949.942.000**	**9.949.942.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.975.000.000	2.975.000.000	2.975.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.964.942.000	6.964.942.000	6.964.942.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.945.250.000**	**2.945.250.000**	**2.945.250.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.000.000	171.000.000	171.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.250.000	20.250.000	20.250.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.673.000.000	1.673.000.000	1.673.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.000.000	1.081.000.000	1.081.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**26.892.349.000**	**26.892.349.000**	**26.892.349.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**26.892.349.000**	**26.892.349.000**	**26.892.349.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.307.244.000**	**2.307.244.000**	**2.307.244.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	87.551.000	87.551.000	87.551.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	97.440.000	97.440.000	97.440.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.253.000	22.253.000	22.253.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**4.262.061.000**	**4.262.061.000**	**4.262.061.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	125.290.000	125.290.000	125.290.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	110.922.000	110.922.000	110.922.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	318.383.000	318.383.000	318.383.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	123.334.000	123.334.000	123.334.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	384.132.000	384.132.000	384.132.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri**	**20.323.044.000**	**20.323.044.000**	**20.323.044.000**
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	323.044.000	323.044.000	323.044.000
5.05.0.00.0.00.01	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**17.173.842.000**	**17.173.842.000**	**17.173.842.000**
5.05.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**17.173.842.000**	**17.173.842.000**	**17.173.842.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**13.794.842.000**	**13.794.842.000**	**13.794.842.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.794.842.000**	**13.794.842.000**	**13.794.842.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.300.499.000**	**9.300.499.000**	**9.300.499.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.955.499.000	8.955.499.000	8.955.499.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	225.000.000	225.000.000	225.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.500.000**	**114.500.000**	**114.500.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	110.000.000	110.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**157.508.000**	**157.508.000**	**157.508.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.508.000	12.508.000	12.508.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**487.000.000**	**487.000.000**	**487.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	70.000.000	70.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**205.000.000**	**205.000.000**	**205.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	175.000.000	175.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.599.080.000**	**2.599.080.000**	**2.599.080.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	473.580.000	473.580.000	473.580.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.000.000	166.000.000	166.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.956.500.000	1.956.500.000	1.956.500.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**711.255.000**	**711.255.000**	**711.255.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.255.000	137.255.000	137.255.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.000.000	104.000.000	104.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**3.379.000.000**	**3.379.000.000**	**3.379.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**3.379.000.000**	**3.379.000.000**	**3.379.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**1.263.000.000**	**1.263.000.000**	**1.263.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	450.000.000	450.000.000	450.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01.0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	380.000.000	380.000.000	380.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.01.0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	233.000.000	233.000.000	233.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02	**Invensi dan Inovasi**	**2.116.000.000**	**2.116.000.000**	**2.116.000.000**
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	223.000.000	223.000.000	223.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	450.000.000	450.000.000	450.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	396.000.000	396.000.000	396.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	650.000.000	650.000.000	650.000.000
5.05.0.00.0.00.01.5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	97.000.000	97.000.000	97.000.000
5.07.0.00.0.00.01	**Badan Penghubung**	**26.244.475.000**	**26.244.475.000**	**26.244.475.000**
5.07.0.00.0.00.01.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**26.244.475.000**	**26.244.475.000**	**26.244.475.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**21.512.206.000**	**21.512.206.000**	**21.512.206.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.512.206.000**	**21.512.206.000**	**21.512.206.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.735.000**	**54.735.000**	**54.735.000**

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.535.000	30.535.000	30.535.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.648.000	16.648.000	16.648.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	3.776.000	3.776.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.776.000	3.776.000	3.776.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.506.572.000**	**9.506.572.000**	**9.506.572.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.433.572.000	9.433.572.000	9.433.572.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**307.787.000**	**307.787.000**	**307.787.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	307.787.000	307.787.000	307.787.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**130.487.000**	**130.487.000**	**130.487.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.271.000	34.271.000	34.271.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.216.000	96.216.000	96.216.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.788.997.000**	**1.788.997.000**	**1.788.997.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.035.000	56.035.000	56.035.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.556.000	158.556.000	158.556.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	436.859.000	436.859.000	436.859.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.967.000	74.967.000	74.967.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	630.000.000	630.000.000	630.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.580.000	397.580.000	397.580.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.127.220.000**	**1.127.220.000**	**1.127.220.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	362.000.000	362.000.000	362.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	765.220.000	765.220.000	765.220.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.547.088.000**	**5.547.088.000**	**5.547.088.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	35.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.036.000	87.036.000	87.036.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.325.052.000	4.325.052.000	4.325.052.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.049.320.000**	**3.049.320.000**	**3.049.320.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.319.720.000	1.319.720.000	1.319.720.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	27.500.000	27.500.000	27.500.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	350.000.000	350.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	47.100.000	47.100.000	47.100.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.305.000.000	1.305.000.000	1.305.000.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**	**4.732.269.000**
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.681.080.000	3.681.080.000	3.681.080.000
5.07.0.00.0.00.01.5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.051.189.000	1.051.189.000	1.051.189.000
6.01.0.00.0.00.01	**INSPEKTORAT**	**36.109.160.000**	**36.109.160.000**	**36.109.160.000**
6.01.0.00.0.00.01.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**36.109.160.000**	**36.109.160.000**	**36.109.160.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**29.616.394.000**	**29.616.394.000**	**29.616.394.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.616.394.000**	**29.616.394.000**	**29.616.394.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**189.983.000**	**189.983.000**	**189.983.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.765.000	144.765.000	144.765.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.218.000	35.218.000	35.218.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.388.628.000**	**24.388.628.000**	**24.388.628.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.378.628.000	24.378.628.000	24.378.628.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**208.006.000**	**208.006.000**	**208.006.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	208.006.000	208.006.000	208.006.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**365.819.000**	**365.819.000**	**365.819.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	40.000.000	40.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.819.000	325.819.000	325.819.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**883.944.000**	**883.944.000**	**883.944.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.820.000	13.820.000	13.820.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.602.000	34.602.000	34.602.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.350.000	169.350.000	169.350.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	251.000.000	251.000.000	251.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.172.000	240.172.000	240.172.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.500.000**	**34.500.000**	**34.500.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	34.500.000	34.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.779.168.000**	**2.779.168.000**	**2.779.168.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	14.000.000	14.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	500.000.000	500.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	14.400.000	14.400.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.768.000	2.250.768.000	2.250.768.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**766.346.000**	**766.346.000**	**766.346.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.025.000	380.025.000	380.025.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.010.000	11.010.000	11.010.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.511.000	181.511.000	181.511.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.300.000	161.300.000	161.300.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	26.500.000	26.500.000	26.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**6.492.766.000**	**6.492.766.000**	**6.492.766.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.568.089.000**	**4.568.089.000**	**4.568.089.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**3.703.249.000**	**3.703.249.000**	**3.703.249.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.246.920.000	1.246.920.000	1.246.920.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	982.440.000	982.440.000	982.440.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.278.120.000	1.278.120.000	1.278.120.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	195.769.000	195.769.000	195.769.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**864.840.000**	**864.840.000**	**864.840.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	864.840.000	864.840.000	864.840.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.924.677.000**	**1.924.677.000**	**1.924.677.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**127.180.000**	**127.180.000**	**127.180.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	127.180.000	127.180.000	127.180.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.797.497.000**	**1.797.497.000**	**1.797.497.000**
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114.520.000	114.520.000	114.520.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.572.219.000	1.572.219.000	1.572.219.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.758.000	110.758.000	110.758.000
8.01.0.00.0.00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**326.696.548.000**	**326.696.548.000**	**326.696.548.000**
8.01.0.00.0.00.01.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**326.696.548.000**	**326.696.548.000**	**326.696.548.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**16.545.275.000**	**16.545.275.000**	**16.545.275.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.545.275.000**	**16.545.275.000**	**16.545.275.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.372.000.000**	**2.372.000.000**	**2.372.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.266.033.000	1.266.033.000	1.266.033.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.055.967.000	1.055.967.000	1.055.967.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.867.419.000**	**8.867.419.000**	**8.867.419.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.496.019.000	8.496.019.000	8.496.019.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	350.000.000	350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700.000	700.000	700.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	700.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**203.500.000**	**203.500.000**	**203.500.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000	33.000.000	33.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.500.000	150.500.000	150.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.218.135.000**	**1.218.135.000**	**1.218.135.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000	115.000.000	115.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	150.000.000	150.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	90.000.000	90.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.135.000	656.135.000	656.135.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.000.000	45.000.000	45.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**246.031.000**	**246.031.000**	**246.031.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.031.000	196.031.000	196.031.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.848.131.000**	**2.848.131.000**	**2.848.131.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.941.000	587.941.000	587.941.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.259.190.000	2.259.190.000	2.259.190.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**710.059.000**	**710.059.000**	**710.059.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	280.000.000	280.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.000.000	271.000.000	271.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.059.000	76.059.000	76.059.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**310.151.273.000**	**310.151.273.000**	**310.151.273.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.608.336.000**	**2.608.336.000**	**2.608.336.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.608.336.000**	**2.608.336.000**	**2.608.336.000**

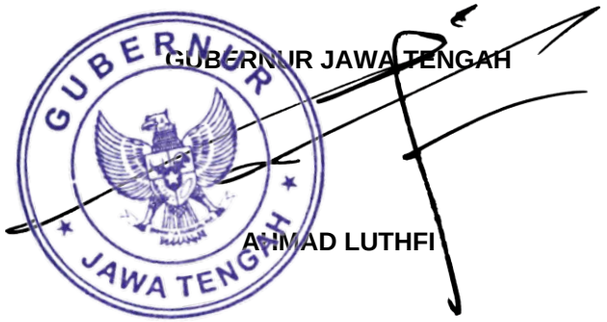
Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	710.000.000	710.000.000	710.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.103.336.000	1.103.336.000	1.103.336.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98.000.000	98.000.000	98.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	15.890.000	15.890.000	15.890.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	15.110.000	15.110.000	15.110.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	56.000.000	56.000.000	56.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	610.000.000	610.000.000	610.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**61.299.273.000**	**61.299.273.000**	**61.299.273.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**61.299.273.000**	**61.299.273.000**	**61.299.273.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95.890.000	95.890.000	95.890.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.133.065.000	3.133.065.000	3.133.065.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	645.000.000	645.000.000	645.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57.425.318.000	57.425.318.000	57.425.318.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**36.626.664.000**	**36.626.664.000**	**36.626.664.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**36.626.664.000**	**36.626.664.000**	**36.626.664.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.211.664.000	1.211.664.000	1.211.664.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.350.000.000	34.350.000.000	34.350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.373.400.000**	**2.373.400.000**	**2.373.400.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.373.400.000**	**2.373.400.000**	**2.373.400.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.173.966.000	1.173.966.000	1.173.966.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.169.434.000	1.169.434.000	1.169.434.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**207.243.600.000**	**207.243.600.000**	**207.243.600.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**207.243.600.000**	**207.243.600.000**	**207.243.600.000**
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	73.661.000	73.661.000	73.661.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	819.379.000	819.379.000	819.379.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	636.490.000	636.490.000	636.490.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.714.070.000	204.714.070.000	204.714.070.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	KUA PPAS (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Total Anggaran	**24.156.414.261.000**	**24.156.414.261.000**	**24.156.414.261.000**



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN IX : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**			**313.683.429.000**	**-**	**-**	**-**	**313.683.429.000**	**0.22**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.432.690.000	-	-	-	4.432.690.000	1.41
			Satuan Polisi Pamong Praja	4.432.690.000	-	-	-	4.432.690.000	100
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		1.472.866.000	-	-	-	1.472.866.000	0.47
			BIRO HUKUM	1.472.866.000	-	-	-	1.472.866.000	100
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.608.336.000	-	-	-	2.608.336.000	0.83
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.608.336.000	-	-	-	2.608.336.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		61.299.273.000	-	-	-	61.299.273.000	19.54
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.299.273.000	-	-	-	61.299.273.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		36.626.664.000	-	-	-	36.626.664.000	11.68
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.626.664.000	-	-	-	36.626.664.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		207.243.600.000	-	-	-	207.243.600.000	66.07
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	207.243.600.000	-	-	-	207.243.600.000	100
2	**PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**			**512.035.554.000**	**36.772.069.000**	**-**	**-**	**548.807.623.000**	**0.07**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		38.025.318.000	10.595.984.000	-	-	48.621.302.000	8.86
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.025.318.000	10.595.984.000	-	-	48.621.302.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		9.413.637.000	13.599.672.000	-	-	23.013.309.000	4.19

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.413.637.000	13.599.672.000	-	-	23.013.309.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		11.770.900.000	-	-	-	11.770.900.000	2.14
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.770.900.000	-	-	-	11.770.900.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2.793.451.000	-	-	-	2.793.451.000	0.51
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.793.451.000	-	-	-	2.793.451.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		997.688.000	-	-	-	997.688.000	0.18
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	997.688.000	-	-	-	997.688.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		13.614.995.000	-	-	-	13.614.995.000	2.48
			Dinas Ketahanan Pangan	13.614.995.000	-	-	-	13.614.995.000	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		4.975.924.000	-	-	-	4.975.924.000	0.91
			Dinas Ketahanan Pangan	4.975.924.000	-	-	-	4.975.924.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		1.567.984.000	1.024.222.000	-	-	2.592.206.000	0.47
			Dinas Ketahanan Pangan	1.567.984.000	1.024.222.000	-	-	2.592.206.000	100
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.04
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		965.614.000	-	-	-	965.614.000	0.18
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	965.614.000	-	-	-	965.614.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		158.986.000	-	-	-	158.986.000	0.03
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	158.986.000	-	-	-	158.986.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		25.000.000	-	-	-	25.000.000	0
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.000.000	-	-	-	25.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		400.000.000	-	-	-	400.000.000	0.07
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400.000.000	-	-	-	400.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.04
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		30.000.000	-	-	-	30.000.000	0.01
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.000.000	-	-	-	30.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		245.000.000	-	-	-	245.000.000	0.04
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	245.000.000	-	-	-	245.000.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		1.592.960.000	190.840.000	-	-	1.783.800.000	0.33
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	1.592.960.000	190.840.000	-	-	1.783.800.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		1.380.311.000	1.600.000	-	-	1.381.911.000	0.25
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.380.311.000	1.600.000	-	-	1.381.911.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		4.799.578.000	4.448.998.000	-	-	9.248.576.000	1.69
			Dinas Kelautan dan Perikanan	4.799.578.000	4.448.998.000	-	-	9.248.576.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		6.294.407.000	6.317.643.000	-	-	12.612.050.000	2.3
			Dinas Kelautan dan Perikanan	6.294.407.000	6.317.643.000	-	-	12.612.050.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.663.227.000	-	-	-	1.663.227.000	0.3
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.663.227.000	-	-	-	1.663.227.000	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.000.072.000	-	-	-	1.000.072.000	0.18
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.000.072.000	-	-	-	1.000.072.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		158.688.418.000	593.110.000	-	-	159.281.528.000	29.02
			Dinas Pertanian dan Peternakan	158.688.418.000	593.110.000	-	-	159.281.528.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		178.234.000.000	-	-	-	178.234.000.000	32.48
			Dinas Pertanian dan Peternakan	178.234.000.000	-	-	-	178.234.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		4.637.563.000	-	-	-	4.637.563.000	0.85
			Dinas Pertanian dan Peternakan	4.637.563.000	-	-	-	4.637.563.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		5.850.000.000	-	-	-	5.850.000.000	1.07
			Dinas Pertanian dan Peternakan	5.850.000.000	-	-	-	5.850.000.000	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		52.959.252.000	-	-	-	52.959.252.000	9.65
			Dinas Pertanian dan Peternakan	52.959.252.000	-	-	-	52.959.252.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		2.676.375.000	-	-	-	2.676.375.000	0.49
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.676.375.000	-	-	-	2.676.375.000	100
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		191.362.000	-	-	-	191.362.000	0.03
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	191.362.000	-	-	-	191.362.000	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		300.000.000	-	-	-	300.000.000	0.05
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000	-	-	-	300.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		115.000.000	-	-	-	115.000.000	0.02
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	115.000.000	-	-	-	115.000.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		923.631.000	-	-	-	923.631.000	0.17
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	923.631.000	-	-	-	923.631.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		1.077.356.000	-	-	-	1.077.356.000	0.2
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.077.356.000	-	-	-	1.077.356.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		2.135.551.000	-	-	-	2.135.551.000	0.39
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.135.551.000	-	-	-	2.135.551.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		2.131.994.000	-	-	-	2.131.994.000	0.39
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.131.994.000	-	-	-	2.131.994.000	100
3	**PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**			**335.256.206.500**	**193.027.034.500**	**-**	**-**	**528.283.241.000**	**0.12**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		1.961.642.000	11.508.474.000	-	-	13.470.116.000	2.55
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.961.642.000	11.508.474.000	-	-	13.470.116.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		181.365.278.500	168.424.198.500	-	-	349.789.477.000	66.21
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.365.278.500	168.424.198.500	-	-	349.789.477.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		2.140.224.000	6.000.000	-	-	2.146.224.000	0.41
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.140.224.000	6.000.000	-	-	2.146.224.000	100
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		270.000.000	-	-	-	270.000.000	0.05
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	270.000.000	-	-	-	270.000.000	100
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		500.000.000	-	-	-	500.000.000	0.09
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.000.000	-	-	-	500.000.000	100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		430.000.000	-	-	-	430.000.000	0.08
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	430.000.000	-	-	-	430.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		124.221.660.000	12.217.036.000	-	-	136.438.696.000	25.83
			Dinas Perhubungan	124.221.660.000	12.217.036.000	-	-	136.438.696.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		137.223.000	579.760.000	-	-	716.983.000	0.14
			Dinas Perhubungan	137.223.000	579.760.000	-	-	716.983.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		1.308.434.000	291.566.000	-	-	1.600.000.000	0.3
			Dinas Perhubungan	1.308.434.000	291.566.000	-	-	1.600.000.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		938.680.000	-	-	-	938.680.000	0.18
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	938.680.000	-	-	-	938.680.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		195.000.000	-	-	-	195.000.000	0.04
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	195.000.000	-	-	-	195.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		577.000.000	-	-	-	577.000.000	0.11
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	577.000.000	-	-	-	577.000.000	100
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		855.000.000	-	-	-	855.000.000	0.16
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	855.000.000	-	-	-	855.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		3.278.390.000	-	-	-	3.278.390.000	0.62
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.278.390.000	-	-	-	3.278.390.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		6.525.625.000	-	-	-	6.525.625.000	1.24
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.525.625.000	-	-	-	6.525.625.000	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		8.652.050.000	-	-	-	8.652.050.000	1.64
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.652.050.000	-	-	-	8.652.050.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		850.000.000	-	-	-	850.000.000	0.16
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	850.000.000	-	-	-	850.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000	0.2
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000	100
4	**PN 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**			**5.070.699.604.000**	**1.332.539.880.000**	**-**	**-**	**6.403.239.484.000**	**0.92**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.885.710.797.000	803.233.199.000	-	-	2.688.943.996.000	41.99
			Dinas Kesehatan	1.885.710.797.000	803.233.199.000	-	-	2.688.943.996.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		2.593.801.913.000	434.487.889.000	-	-	3.028.289.802.000	47.29
			Dinas Pendidikan	2.593.801.913.000	434.487.889.000	-	-	3.028.289.802.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		330.000.000	-	-	-	330.000.000	0.01
			Dinas Pendidikan	330.000.000	-	-	-	330.000.000	100
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		400.000.000	-	-	-	400.000.000	0.01
			Dinas Pendidikan	400.000.000	-	-	-	400.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		300.000.000	-	-	-	300.000.000	0
			Dinas Pendidikan	300.000.000	-	-	-	300.000.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		452.878.465.000	94.373.112.000	-	-	547.251.577.000	8.55

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Kesehatan	452.878.465.000	94.373.112.000	-	-	547.251.577.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.928.215.000	-	-	-	1.928.215.000	0.03
			Dinas Kesehatan	1.928.215.000	-	-	-	1.928.215.000	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		75.000.000	-	-	-	75.000.000	0
			Dinas Kesehatan	75.000.000	-	-	-	75.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1.160.222.000	-	-	-	1.160.222.000	0.02
			Dinas Kesehatan	1.160.222.000	-	-	-	1.160.222.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		121.635.000	-	-	-	121.635.000	0
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	121.635.000	-	-	-	121.635.000	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		7.564.217.000	8.000.000	-	-	7.572.217.000	0.12
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.564.217.000	8.000.000	-	-	7.572.217.000	100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1.510.000.000	-	-	-	1.510.000.000	0.02
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.510.000.000	-	-	-	1.510.000.000	100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		950.000.000	-	-	-	950.000.000	0.01
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	950.000.000	-	-	-	950.000.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		1.748.312.000	-	-	-	1.748.312.000	0.03
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.748.312.000	-	-	-	1.748.312.000	100
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.698.800.000	-	-	-	2.698.800.000	0.04
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.698.800.000	-	-	-	2.698.800.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		770.432.000	-	-	-	770.432.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	770.432.000	-	-	-	770.432.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		328.408.000	-	-	-	328.408.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	328.408.000	-	-	-	328.408.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		373.720.000	-	-	-	373.720.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	373.720.000	-	-	-	373.720.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		296.720.000	-	-	-	296.720.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	296.720.000	-	-	-	296.720.000	100
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		70.000.000	-	-	-	70.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000	-	-	-	70.000.000	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		60.000.000	-	-	-	60.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000	-	-	-	60.000.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		75.000.000	-	-	-	75.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000	-	-	-	75.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		160.000.000	-	-	-	160.000.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	160.000.000	-	-	-	160.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		389.667.000	-	-	-	389.667.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	389.667.000	-	-	-	389.667.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		177.353.000	-	-	-	177.353.000	0
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	177.353.000	-	-	-	177.353.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		11.965.000.000	-	-	-	11.965.000.000	0.19
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.965.000.000	-	-	-	11.965.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		100.444.700.000	-	-	-	100.444.700.000	1.57
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.444.700.000	-	-	-	100.444.700.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1.032.028.000	437.680.000	-	-	1.469.708.000	0.02
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.444.700.000	-	-	-	100.444.700.000	100
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		3.379.000.000	-	-	-	3.379.000.000	0.05
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.032.028.000	437.680.000	-	-	1.469.708.000	100
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.379.000.000	-	-	-	3.379.000.000	100
5	**PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**			**58.465.900.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**58.615.900.000**	**0.02**
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		667.200.000	-	-	-	667.200.000	1.14
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	667.200.000	-	-	-	667.200.000	100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1.514.954.000	-	-	-	1.514.954.000	2.58
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.514.954.000	-	-	-	1.514.954.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		790.000.000	-	-	-	790.000.000	1.35
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	790.000.000	-	-	-	790.000.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		350.000.000	-	-	-	350.000.000	0.6
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000.000	-	-	-	350.000.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		210.000.000	-	-	-	210.000.000	0.36
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.000.000	-	-	-	210.000.000	100
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		70.000.000	-	-	-	70.000.000	0.12
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.000.000	-	-	-	70.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.34
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		33.550.000.000	-	-	-	33.550.000.000	57.24
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.550.000.000	-	-	-	33.550.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		2.150.000.000	-	-	-	2.150.000.000	3.67
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.150.000.000	-	-	-	2.150.000.000	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		999.054.000	-	-	-	999.054.000	1.7
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	999.054.000	-	-	-	999.054.000	100
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		6.791.546.000	-	-	-	6.791.546.000	11.59
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.791.546.000	-	-	-	6.791.546.000	100
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		10.611.146.000	150.000.000	-	-	10.761.146.000	18.36
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.611.146.000	150.000.000	-	-	10.761.146.000	100
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		502.000.000	-	-	-	502.000.000	0.86
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	502.000.000	-	-	-	502.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		60.000.000	-	-	-	60.000.000	0.1
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000	-	-	-	60.000.000	100
6	**PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**			**221.184.043.000**	**2.937.095.000**	**-**	**2.425.944.120.000**	**2.650.065.258.000**	**0.74**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		12.755.000.000	90.000.000	-	-	12.845.000.000	0.48
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.755.000.000	90.000.000	-	-	12.845.000.000	100
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		3.106.323.000	160.000.000	-	-	3.266.323.000	0.12
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.106.323.000	160.000.000	-	-	3.266.323.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		2.663.000.000	-	-	-	2.663.000.000	0.1
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.663.000.000	-	-	-	2.663.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		370.000.000	-	-	-	370.000.000	0.01

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	370.000.000	-	-	-	370.000.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		10.286.000.000	-	-	-	10.286.000.000	0.39
			Dinas Sosial	10.286.000.000	-	-	-	10.286.000.000	100
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.01
			Dinas Sosial	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		71.403.028.000	2.687.095.000	-	-	74.090.123.000	2.8
			Dinas Sosial	71.403.028.000	2.687.095.000	-	-	74.090.123.000	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		110.594.572.000	-	-	-	110.594.572.000	4.17
			Dinas Sosial	110.594.572.000	-	-	-	110.594.572.000	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		4.397.580.000	-	-	-	4.397.580.000	0.17
			Dinas Sosial	4.397.580.000	-	-	-	4.397.580.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		200.000.000	-	-	-	200.000.000	0.01
			Dinas Sosial	200.000.000	-	-	-	200.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		155.000.000	-	-	-	155.000.000	0.01
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	155.000.000	-	-	-	155.000.000	100
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.033.540.000	-	-	-	1.033.540.000	0.04
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.033.540.000	-	-	-	1.033.540.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		3.870.000.000	-	-	-	3.870.000.000	0.15
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.870.000.000	-	-	-	3.870.000.000	100
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		150.000.000	-	-	-	150.000.000	0.01
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000	-	-	-	150.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-	-	-	2.425.944.120.000	2.425.944.120.000	91.54
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	2.425.944.120.000	2.425.944.120.000	100
7	**PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan**			**8.539.220.568.000**	**112.506.311.000**	**20.000.000.000**	**4.400.368.228.000**	**13.072.095.107.000**	**0.85**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.059.325.498.000	82.518.811.000	-	-	8.141.844.309.000	1.52
			Dinas Pendidikan	5.389.909.931.000	6.308.312.000	-	-	5.396.218.243.000	66.28
			Dinas Kesehatan	629.311.270.000	740.000.000	-	-	630.051.270.000	7.74
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.240.821.000	2.490.609.000	-	-	186.731.430.000	2.29
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.466.548.000	-	-	-	19.466.548.000	0.24
			Satuan Polisi Pamong Praja	17.394.411.000	348.457.000	-	-	17.742.868.000	0.22

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.321.444.000	100.000.000	-	-	14.421.444.000	0.18
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.419.394.000	196.378.000	-	-	77.615.772.000	0.95
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.266.862.000	74.962.000	-	-	16.341.824.000	0.2
			Dinas Ketahanan Pangan	20.995.803.000	2.990.367.000	-	-	23.986.170.000	0.29
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135.118.313.000	40.500.000	-	-	135.158.813.000	1.66
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.571.651.000	74.250.000	-	-	18.645.901.000	0.23
			Dinas Perhubungan	66.907.811.000	1.885.000.000	-	-	68.792.811.000	0.84
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	36.762.703.000	-	-	-	36.762.703.000	0.45
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.089.628.000	-	-	-	28.089.628.000	0.35
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.303.177.000	218.000.000	-	-	19.521.177.000	0.24
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.132.745.000	110.000.000	-	-	39.242.745.000	0.48
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.515.166.000	794.819.000	-	-	30.309.985.000	0.37
			Dinas Kelautan dan Perikanan	63.355.006.000	502.756.000	-	-	63.857.762.000	0.78
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	42.023.062.000	1.239.415.000	-	-	43.262.477.000	0.53
			Dinas Pertanian dan Peternakan	149.547.367.000	19.011.230.000	-	-	168.558.597.000	2.07
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	48.579.175.000	74.420.000	-	-	48.653.595.000	0.6
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.089.345.000	698.000.000	-	-	53.787.345.000	0.66
			BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	421.074.000	-	-	-	421.074.000	0.01
			BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	511.956.000	-	-	-	511.956.000	0.01
			BIRO PEREKONOMIAN	217.884.000	-	-	-	217.884.000	0
			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	204.272.000	-	-	-	204.272.000	0
			BIRO HUKUM	631.018.000	-	-	-	631.018.000	0.01
			BIRO UMUM	242.988.743.000	28.004.338.000	-	-	270.993.081.000	3.33
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.630.155.000	-	-	-	1.630.155.000	0.02
			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	516.500.000	-	-	-	516.500.000	0.01
			BIRO ORGANISASI	590.064.000	-	-	-	590.064.000	0.01
			Sekretariat DPRD	226.128.600.000	4.935.954.000	-	-	231.064.554.000	2.84
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.257.576.000	732.000.000	-	-	30.989.576.000	0.38
			Badan Pengelola Pendapatan Daerah	227.139.665.000	3.606.387.000	-	-	230.746.052.000	2.83
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	75.817.622.000	2.933.406.000	-	-	78.751.028.000	0.97
			Badan Kepegawaian Daerah	29.997.842.000	375.000.000	-	-	30.372.842.000	0.37
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	43.094.928.000	2.421.500.000	-	-	45.516.428.000	0.56
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.589.842.000	205.000.000	-	-	13.794.842.000	0.17
			Badan Penghubung	20.384.986.000	1.127.220.000	-	-	21.512.206.000	0.26
			INSPEKTORAT	29.581.894.000	34.500.000	-	-	29.616.394.000	0.36
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.299.244.000	246.031.000	-	-	16.545.275.000	0.2
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		15.337.500.000	7.500.000	-	-	15.345.000.000	0.12

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	15.337.500.000	7.500.000	-	-	15.345.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		12.761.829.000	29.980.000.000	-	-	42.741.829.000	0.33
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	12.761.829.000	29.980.000.000	-	-	42.741.829.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		740.000.000	-	-	-	740.000.000	0.01
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	740.000.000	-	-	-	740.000.000	100
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		1.410.458.000	-	-	-	1.410.458.000	0.01
			BIRO ORGANISASI	1.410.458.000	-	-	-	1.410.458.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		2.919.557.000	-	-	-	2.919.557.000	0.02
			BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	2.919.557.000	-	-	-	2.919.557.000	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000	0.01
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.250.000.000	-	-	-	1.250.000.000	100
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		1.383.134.000	-	-	-	1.383.134.000	0.01
			BIRO HUKUM	1.383.134.000	-	-	-	1.383.134.000	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4.640.000.000	-	-	-	4.640.000.000	0.02
			BIRO PEREKONOMIAN	2.660.000.000	-	-	-	2.660.000.000	57.33
			BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	1.980.000.000	-	-	-	1.980.000.000	42.67
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1.781.081.000	-	-	-	1.781.081.000	0.01
			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000	-	-	-	1.781.081.000	100
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.755.000.000	-	-	-	1.755.000.000	0.01
			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000	-	-	-	1.755.000.000	100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		336.517.695.000	-	-	-	336.517.695.000	2.57
			Sekretariat DPRD	336.517.695.000	-	-	-	336.517.695.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		4.850.000.000	-	-	-	4.850.000.000	0.04
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.850.000.000	-	-	-	4.850.000.000	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		5.235.000.000	-	-	-	5.235.000.000	0.04
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.235.000.000	-	-	-	5.235.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		11.500.000.000	-	20.000.000.000	4.400.368.228.000	4.431.868.228.000	33.9
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.500.000.000	-	20.000.000.000	4.400.368.228.000	4.431.868.228.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		2.815.905.000	-	-	-	2.815.905.000	0.01
			Badan Pengelola Pendapatan Daerah	315.905.000	-	-	-	315.905.000	11.22
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	88.78

PRINTED BY GRMS JATENG

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		31.008.687.000	-	-	-	31.008.687.000	0.24
			Badan Pengelola Pendapatan Daerah	31.008.687.000	-	-	-	31.008.687.000	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		5.871.840.000	-	-	-	5.871.840.000	0.04
			Badan Kepegawaian Daerah	5.871.840.000	-	-	-	5.871.840.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		26.892.349.000	-	-	-	26.892.349.000	0.21
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.892.349.000	-	-	-	26.892.349.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		4.732.269.000	-	-	-	4.732.269.000	0.04
			Badan Penghubung	4.732.269.000	-	-	-	4.732.269.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		4.568.089.000	-	-	-	4.568.089.000	0.03
			INSPEKTORAT	4.568.089.000	-	-	-	4.568.089.000	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.924.677.000	-	-	-	1.924.677.000	0.01
			INSPEKTORAT	1.924.677.000	-	-	-	1.924.677.000	100
8	**PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**			**447.491.210.000**	**6.420.000**	**-**	**-**	**447.497.630.000**	**0.16**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5.975.000.000	-	-	-	5.975.000.000	1.34
			Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.975.000.000	-	-	-	5.975.000.000	100
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		360.000.000	-	-	-	360.000.000	0.08
			Satuan Polisi Pamong Praja	360.000.000	-	-	-	360.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		22.675.000.000	-	-	-	22.675.000.000	5.07
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.675.000.000	-	-	-	22.675.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000	0.39
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.750.000.000	-	-	-	1.750.000.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		150.000.000	-	-	-	150.000.000	0.03
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	-	-	150.000.000	100
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.205.000.000	-	-	-	1.205.000.000	0.27
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.205.000.000	-	-	-	1.205.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		1.900.000.000	-	-	-	1.900.000.000	0.42
			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.900.000.000	-	-	-	1.900.000.000	100
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100.061.000	2.520.000	-	-	102.581.000	0.02
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.061.000	2.520.000	-	-	102.581.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		595.627.000	2.200.000	-	-	597.827.000	0.13
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	595.627.000	2.200.000	-	-	597.827.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		18.365.000	1.700.000	-	-	20.065.000	0
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.365.000	1.700.000	-	-	20.065.000	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		410.388.757.000	-	-	-	410.388.757.000	91.71
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	410.388.757.000	-	-	-	410.388.757.000	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		2.373.400.000	-	-	-	2.373.400.000	0.53
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.373.400.000	-	-	-	2.373.400.000	100
TOTAL ANGGARAN				**15.498.036.514.500**	**1.677.938.809.500**	**20.000.000.000**	**6.826.312.348.000**	**24.022.287.672.000**	

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN X : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON				TOTAL
	I	II	III	IV	V	FUNGSIONAL			PELAKSANA	
						PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	20	6	-	26
Golongan IV/d	1	18	-	-	-	4	20	6	-	49
Golongan IV/c	-	25	1	-	-	892	204	67	1	1.190
Golongan IV/b	-	4	141	2	-	3.681	350	156	10	4.344
Golongan IV/a	-	-	143	222	-	971	314	262	216	2.128
Jumlah Golongan IV	1	47	285	224	-	5.548	908	497	227	7.737
Golongan III/d	-	-	6	310	-	8.123	1.008	639	880	10.966
Golongan III/c	-	-	-	23	-	867	454	160	647	2.151
Golongan III/b	-	-	-	1	-	2.608	746	317	1.148	4.820
Golongan III/a	-	-	-	-	-	15.288	156	675	4.543	20.662
Jumlah Golongan III	-	-	6	334	-	26.886	2.364	1.791	7.218	38.599
Golongan II/d	-	-	-	-	-	3	544	75	874	1.496
Golongan II/c	-	-	-	-	-	2	427	162	853	1.444
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	1	110	111
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	1	2	647	650
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	5	972	240	2.484	3.701

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON				TOTAL
	I	II	III	IV	V	FUNGSIONAL			PELAKSANA	
						PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71
TOTAL	1	47	291	558	-	32.439	4.244	2.528	10.000	50.108

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2024	Perkiraan Penambahan Tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	**Piutang Pajak Daerah**					
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2020 s/d 2024	2.897.325.081.950,00	488.758.671.000,00	919.491.613.500,00	2.466.592.139.450,00
	Piutang Pajak Air Permukaan	2024	339.099.030,00	-	339.099.030,00	-
	Jumlah Piutang Pajak Daerah		**2.897.664.180.980,00**			**2.466.592.139.450,00**
2	**Piutang Retribusi Daerah**					
	Retribusi Jasa Umum	2000 s/d 2024	111.639.377.130,73	1.490.873.227.783,73	1.472.846.803.000,29	129.665.801.914,17
	Retribusi Jasa Usaha	2014 s/d 2024	254.242.530,00	-	74.140.930,00	180.101.600,00
	Jumlah Piutang Retribusi Daerah		**111.893.619.660,73**			**129.845.903.514,17**
3	**Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**					
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2017 s/d 2024	370.051.669,00	-	-	370.051.669,00
	Piutang Pendapatan BLUD	2000 s/d 2024	1.462.676.395,88	965.708.795,00	1.635.465.265,54	792.919.925,34
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		**1.832.728.064,88**			**1.162.971.594,34**
4	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**					
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2024	53.079.604.000,00	-	53.079.604.000,00	-
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**53.079.604.000,00**			**-**
5	**Piutang Transfer Antar Daerah**					
	Piutang Bantuan Keuangan	2024	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**-**			**-**

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2024	Perkiraan Penambahan Tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
6	**Piutang Lainnya**					
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	1998 s/d 2006	10.690.193.030,00	-	304.230.313,00	10.385.962.717,00
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	2008 s/d 2012	4.466.848.174,00	-	275.000.000,00	4.191.848.174,00
	Jumlah Piutang Lainnya		**15.157.041.204,00**			**14.577.810.891,00**
	JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA		**3.079.627.173.909,61**			**2.612.178.825.449,51**

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal Yang telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
I	**INVESTASI PERMANEN**											
1	1982	PT. Jateng Agro Berdikari	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	200.000.000.000	165.309.044.135		165.309.044.135	34.690.955.865	4.167.900.000		165.309.044.135
2	1989	PT. Askrida	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	400.000.000.000	19.960.000.000		19.960.000.000	380.040.000.000	-		19.960.000.000
3	1992	PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Persoda)	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	400.000.000.000	109.197.500.000		109.197.500.000	290.802.500.000	12.706.615.000		109.197.500.000
4	1992	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma*	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	100.000.000.000	10.446.000.000		10.446.000.000	89.554.000.000	1.710.538.000		10.446.000.000
5	1993	PT. PRPP	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	200.000.000.000	64.252.200.000		64.252.200.000	135.747.800.000	-		64.252.200.000
6	1999	PT. Bank Jateng**	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	5.100.000.000.000	2.455.289.000.000		2.455.289.000.000	2.644.711.000.000	595.940.000.000		2.455.289.000.000
7	2002	PT. BPR BKK Se-Jateng**	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	1.460.640.000.000	448.870.000.000	70.000.000.000	518.870.000.000	941.770.000.000	43.300.000.000		518.870.000.000
8	2019	PT. BPR BKK JATENG	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	471.668.400.000	186.290.000.000		186.290.000.000	285.378.400.000	3.737.273.000		186.290.000.000
9	2006	PT. SPJT	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	1.500.000.000.000	375.392.000.000		375.392.000.000	1.124.608.000.000	6.097.818.000		375.392.000.000
10	2014	PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	600.000.000.000	140.000.000.000		140.000.000.000	460.000.000.000	8.729.956.000		140.000.000.000
11	2020	PT. Jateng Petro Energi (SPHC Menjadi Anak Perusahaan)	Perda Nomor 2 Tahun 2025	Recipis Saham	140.000.000.000	54.887.500.000		54.887.500.000	85.112.500.000	25.442.770.000		54.887.500.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XIII a : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Prakiraan Pengurangan tahun n-1	Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Tanah	12.332.651.846.000	13.932.478.000	1.809.300.000,00	12.344.775.024.000
2	Peralatan dan Mesin	9.528.039.167.257	760.261.702.000	49.134.537.301,00	10.239.166.331.956
3	Bangunan dan Gedung	9.849.541.705.895	298.982.094.000	6.627.495.289,00	10.141.896.304.606
4	Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	12.507.048.034.410	875.329.940.000	20.742.655.923,00	13.361.635.318.487
5	Aset Tetap Lainnya	1.056.350.270.097	127.410.903.000	1.680.121.208,00	1.182.081.051.889
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.616.819.183	-	199.525.664.691,00	88.091.154.492
		45.561.247.842.842	2.075.917.117.000	279.519.774.412	47.357.645.185.430

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XIII b : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun n - 2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Prakiraan Pengurangan tahun n-1	Prakiraan Saldo akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Kemitraan dengan Pihak Ke III	158.092.113.135	271.195.500	-	158.363.308.635
2	Aset Tak Berwujud	45.259.342.410	1.598.500.000	389.050.900	46.468.791.510
3	Aset Lain-lain	3.160.983.940.233	80.350.021.121	201.618.575.309	3.039.715.386.045
		3.364.335.395.778	82.219.716.621	202.007.626.209	3.244.547.486.190

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XIV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*Multi Years*)
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi sub Kegiatan	Jumlah Anggaran TA. 2025		Jumlah Realisasi sampai dengan November TA. 2025	Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan TA.2026		Keterangan
				APBD TA.2025	Perubahan APBD TA.2025		APBD TA.2026	Perubahan APBD TA.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Banyumas	100.000.000.000	-	23.935.588.000	156.064.412.000	-	Pembangunan gedung pelayanan 7 lantai untuk pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Transfer dari Kas daerah (Rp.)	Transfer ke Kas Daerah (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	Sisa Dana Cadangan yang Belum dicadangkan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6	9
NIHIL								

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN XVI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Sumber Pinjaman/ obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Presentase bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6	9	10	11	12
N I H I L											

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

Lampiran XVII : Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor :
Tanggal :

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Sistem Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Taun 2026;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2026 adalah sebesar

Rp12.899.838.185.000.

KEDUA : Target Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2026 adalah sebesar Rp2.405.199.623.000.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI